



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah, Kabupaten Kulon Progo memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan secara bertahap sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di Daerah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah perlu menyusun arah kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023-2026.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

(1) Sistematika RPJP Daerah terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
- e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
- f. BAB VI : Penutup;

- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Rencana Pembangunan Daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7,24/2024)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Atas dasar itu, RPJPD Kabupaten Kulon Progo disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan dan cita-cita pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo dan strategi untuk mencapainya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menentukan bahwa penetapan RPJPD dilakukan dengan Peraturan Daerah. Sebelumnya Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025. Oleh karena masa berlakunya RPJPD tersebut akan segera berakhir, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun suatu RPJPD untuk tahun 2025-2045. RPJPD ini akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD dan RKPD yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Kulon Progo sampai tahun 2045.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

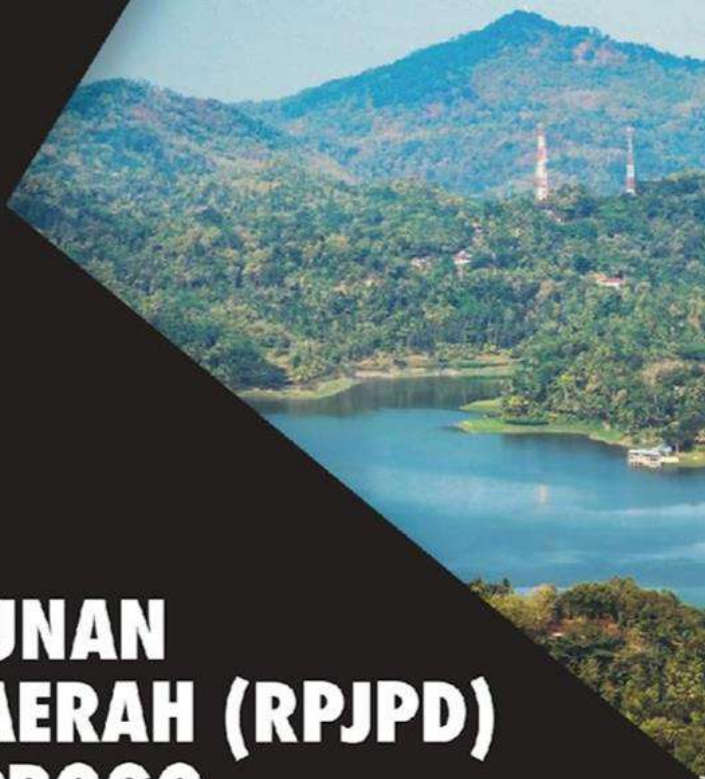
Pasal 10

Cukup jelas.

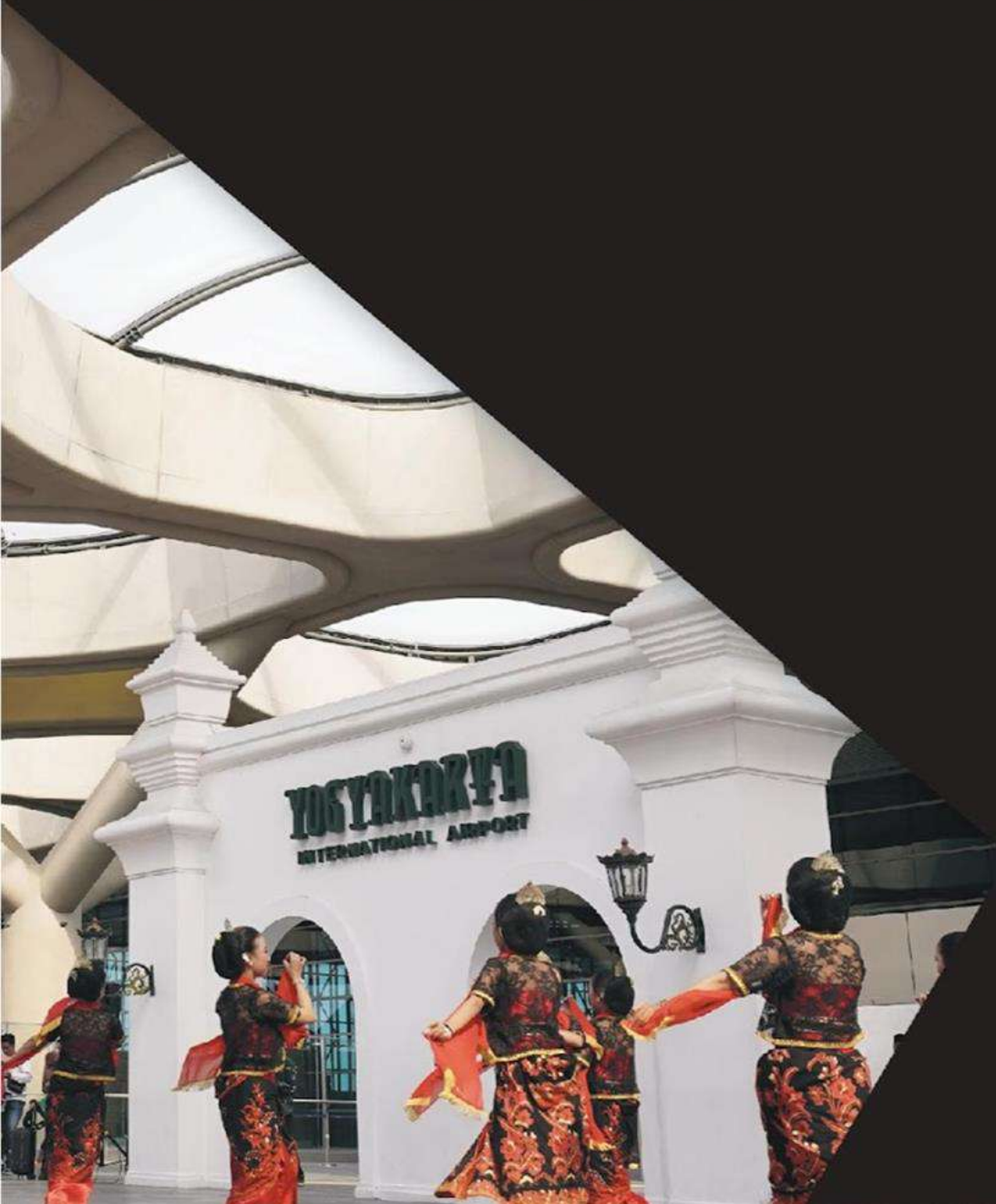
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 126

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-
2045

--	--	--



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045



**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo**

Jl. Perwakilan No.1, Terbah,
Wates, Kap. Wates, Kabupaten
Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55611

INDONESIA
E M A S

2045

Kulonprogo

the jewel of java

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, menyentuh semua lapisan masyarakat, dan dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Pada saat ini adalah masa transisi, di mana pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan jangka panjang daerah periode tersebut telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pembangunan 20 tahunan itu, Kabupaten Kulon Progo berhasil meraih predikat “BAIK”, sebagaimana telah diukur berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 600.2.1/1570/SJ tentang *Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025*. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja sektor pemerintah sampai dengan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo telah berjalan secara optimal. Namun demikian, masih terdapat hal-hal krusial yang memerlukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan, agar kualitas dan kuantitas pembangunan dapat terus ditingkatkan. Semangat inilah yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (RPJPD) periode 2025-2045.

Upaya untuk merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang ini didasari atas arah kebijakan pembangunan nasional menuju *Indonesia Emas 2045*. Dalam arah kebijakan RPJPN tahun 2025-2045 terdapat berbagai upaya transformasi yang harus dilakukan, agar cita-cita *Indonesia Emas 2045* dapat terwujud. Di samping itu, mandat lain juga tertuang dalam arah kebijakan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025-2045, yang di dalamnya menekankan aspek pemerataan pembangunan di seluruh wilayah DIY menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 ini selalu mempertimbangkan mandat pembangunan nasional maupun regional DIY.

Proses penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD*. Keselarasan arah kebijakan pembangunan, baik nasional maupun daerah, dapat diwujudkan melalui pemetaan sasaran pembangunan yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, proses penyusunan arah kebijakan dan sasaran pembangunan telah dilaksanakan pada masing-masing isu strategis.

Selanjutnya, isu-isu strategis tersebut diturunkan ke dalam indikator pembangunan di setiap sasaran strategis.

Keseluruhan arah kebijakan sampai dengan sasaran dan indikator kinerja pembangunan dapat dilihat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 ini. Dokumen ini bukan hanya dimiliki oleh kalangan internal Pemkab Kulon Progo, tetapi terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keterlibatan multipihak (masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa, LSM, dan pihak lain yang berkepentingan) sangat diperlukan. Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Kulon Progo selama 20 tahun ke depan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan antarperiode kepemimpinan. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman arah pembangunan Kabupaten Kulon Progo 20 tahun yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Wates, 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,


SRIE NURKYATSIWI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Hubungan Antardokumen.....	7
1.3.1 Keterkaitan dengan RPJPN dan RPJPD DIY 2025-2045.....	7
1.3.2 Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045	8
1.3.3 Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Kulon Progo	8
1.3.4 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya .	8
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	10
2.1.1 Geografi.....	10
2.1.2 Demografi.....	56
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	60
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	60
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	72
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	98
2.3.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	98
2.3.2 Indeks Inovasi Daerah.....	102
2.3.3 Indeks Pelayanan Publik.....	104
2.3.4 Evaluasi Kebijakan Daerah	107
2.4 Aspek Daya Saing.....	122
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	122

2.4.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia	151
2.4.3	Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah.....	165
2.4.4	Daya Saing Iklim Investasi	178
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	182
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	184
2.6.1	Tren Demografi	184
2.6.2	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar	187
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	191
2.7.1	Identifikasi dan Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah	191
2.7.2	Identifikasi dan Analisis Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana.....	195
2.7.3	Pembagian Wilayah Berdasarkan Potensi Perekonomian Wilayah	202
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		213
3.1	Permasalahan	213
3.2	Isu Strategis.....	227
3.2.1	Isu Strategis Global	227
3.2.2	Isu Strategis Nasional	230
3.2.3	Isu Strategis Daerah	234
3.3	Modal Dasar	239
3.3.1	Kependudukan.....	239
3.3.2	Ekonomi Sosial Budaya	240
3.3.3	Kekayaan Alam	242
3.3.4	Keistimewaan DIY	243
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH		247
4.1	Visi Daerah Tahun 2025-2045	247
4.2	Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045	254
4.3	Misi Daerah Tahun 2025-2045	256
4.4	Upaya Transformatif.....	267

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	275
5.1 Arah Kebijakan	275
5.2 Sasaran Pokok.....	304
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah	304
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi	309
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah.....	318
BAB VI PENUTUP.....	322
6.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	323
6.2 Kerangka Pengendalian.....	324
6.3 Sistem Insentif	325
6.4 Mekanisme Perubahan	326
6.5 Komunikasi Publik.....	326
6.6 Pembiayaan Pembangunan	327

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Persentase Luas Wilayah menurut Kapanewon	11
Tabel 2. 2	Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo	15
Tabel 2. 3	Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo	18
Tabel 2. 4	Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo	19
Tabel 2. 5	Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates	20
Tabel 2. 6	Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo	21
Tabel 2. 7	Nama DAS, Sub-DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo	22
Tabel 2. 8	Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo	24
Tabel 2. 9	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	26
Tabel 2. 10	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo, 2021-2023	28
Tabel 2. 11	Kawasan Budi daya di Kabupaten Kulon Progo	30
Tabel 2. 12	Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo	30
Tabel 2. 13	Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023	31
Tabel 2. 14	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	32
Tabel 2. 15	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Menurut Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044	33
Tabel 2. 16	Kinerja Wajib Sesuai Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2043	36
Tabel 2. 17	IKLH Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	40
Tabel 2. 18	Status Daya Dukung Permukiman di Kab. Kulon Progo, 2021 – 2041	46
Tabel 2. 19	Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Kulon Progo	48
Tabel 2. 20	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023	49
Tabel 2. 21	Capaian SPM Urusan Pangan di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	51
Tabel 2. 22	Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Kulon Progo, 2016-2023	52
Tabel 2. 23	Jumlah Kelompok Tani, Petani, dan Keanggotaan Kelompok Tani di Kabupaten Kulon Progo, 2016-2023	53
Tabel 2. 24	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo, 2017-2023	54
Tabel 2. 25	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya, 2018-2023	55
Tabel 2. 26	Komposisi Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Pertumbuhan, dan Jumlah KK, Kabupaten Kulon Progo, 2014- 2023	57
Tabel 2. 27	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	57
Tabel 2. 28	Sex Ratio di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	58
Tabel 2. 29	Kepadatan Penduduk Per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	60
Tabel 2. 30	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kulon Progo (persen), 2014-2023	62
Tabel 2. 31	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023	63
Tabel 2. 32	Rasio Gini Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023	65
Tabel 2. 33	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di DIY, 2014-2023	68
Tabel 2. 34	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DIY, 2014-2023	68
Tabel 2. 35	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023	71
Tabel 2. 36	Indikator Komponen IPM di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	72
Tabel 2. 37	Keterbandingan Komponen IPM di DIY dan Nasional, 2022-2023	73

Tabel 2. 38	Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023	74
Tabel 2. 39	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	79
Tabel 2. 40	Tahapan Desa Siaga Aktif	80
Tabel 2. 41	Tingkat Capaian Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	81
Tabel 2. 42	Data dan Jumlah Pernikahan di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023	85
Tabel 2. 43	Prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	85
Tabel 2. 44	PUS Bukan Peserta KB (unmet need) di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	86
Tabel 2. 45	Kelompok Bina Keluarga dan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	87
Tabel 2. 46	Perkembangan Jumlah Kampung KB di Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022	88
Tabel 2. 47	Jumlah Kasus Kekerasan Gender di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	92
Tabel 2. 48	Jumlah Anak dengan Disabilitas, 2023	93
Tabel 2. 49	Perkembangan Seni dan Budaya Kulon Progo, 2014-2023	94
Tabel 2. 50	Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	96
Tabel 2. 51	Jumlah Rintisan Kalurahan Budaya Kabupaten Kulon Progo, 2017-2023	96
Tabel 2. 52	Indeks SPBE DIY dan Kabupaten se-DIY, 2021-2023	100
Tabel 2. 53	Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo, 2018-2023	100
Tabel 2. 54	Hasil Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2018-2023	103
Tabel 2. 55	Perkembangan Jumlah ASN Kulon Progo, 2014-2023	106
Tabel 2. 56	Perkembangan Lembaga Keuangan dan BUMD Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	108
Tabel 2. 57	Lembaga Keuangan, Perbankan, dan Perkreditan Kabupaten Kulon Progo, 2023	110
Tabel 2. 58	Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2023	111
Tabel 2. 59	Lembaga Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023	113
Tabel 2. 60	Daftar Kerja sama Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dengan Berbagai Lembaga	118
Tabel 2. 61	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2014-2022	121
Tabel 2. 62	PDRB Kabupaten Kulon Progo (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah), 2014-2023	124
Tabel 2. 63	PDRB Kabupaten Kulon Progo (ADHK 2010) Menurut Lapangan Usaha (dalam miliar rupiah), 2014-2023	128
Tabel 2. 64	Distribusi Kontribusi per Lapangan Usaha ADHB di Kabupaten Kulon Progo (persen), 2014-2023	131
Tabel 2. 65	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	132
Tabel 2. 66	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Industri Pengolahan di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	132
Tabel 2. 67	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Penyediaan Listrik dan Gas di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	134
Tabel 2. 68	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	134
Tabel 2. 69	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	135
Tabel 2. 70	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	136

Tabel 2. 71	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	137
Tabel 2. 72	Perkembangan Volume Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	139
Tabel 2. 73	Perkembangan (USD) Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	140
Tabel 2. 74	Jenis Komoditas dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo, 2023	141
Tabel 2. 75	Jumlah Pengunjung Tempat Rekreasi di Kulon Progo, 2015-2023	142
Tabel 2. 76	Jumlah Desa Berdasarkan Status Perkembangan Wilayah Kabupaten Kulon Progo, 2019-2024	146
Tabel 2. 77	Indeks Desa Membangun per Desa di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2024	147
Tabel 2. 78	Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	152
Tabel 2. 79	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2023	156
Tabel 2. 80	Capaian Rasio Guru terhadap Murid Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	156
Tabel 2. 81	Kondisi Literasi dan Numerasi di Kabupaten Kulon Progo, 2021-2023	158
Tabel 2. 82	Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	160
Tabel 2. 83	Tingkat Minat Baca dan Pembangunan Literasi Kabupaten Kulon Progo, 2020-2023	160
Tabel 2. 84	Jumlah Buku di Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	161
Tabel 2. 85	Jumlah Perpustakaan Terstandar Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	162
Tabel 2. 86	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	162
Tabel 2. 87	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	166
Tabel 2. 88	Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	167
Tabel 2. 89	Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal di Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023	168
Tabel 2. 90	Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo, 2023	169
Tabel 2. 91	Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	174
Tabel 2. 92	Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	179
Tabel 2. 93	Skor IDSD Kabupaten Kulon Progo, 2023	180
Tabel 2. 94	Data Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	181
Tabel 2. 95	Data Jumlah Demo di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2023	182
Tabel 2. 96	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo	185
Tabel 2. 97	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kulon Progo	185
Tabel 2. 98	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kulon Progo	186
Tabel 2. 99	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Kulon Progo	188
Tabel 2. 100	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Kulon Progo	188
Tabel 2. 101	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Kulon Progo	189
Tabel 2. 102	Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Kulon Progo	189
Tabel 2. 103	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	190
Tabel 2. 104	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo	191
Tabel 2. 105	Kawasan Strategis di Kabupaten Kulon Progo	192
Tabel 2. 106	Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Kulon Progo	196
Tabel 2. 107	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022	208
Tabel 4. 1	Persandingan Visi RPJPD Kabupaten Kulon Progo, DIY,	254
Tabel 4. 2	Sasaran Visi Kabupaten Kulon Progo	256
Tabel 4. 3	Persandingan Misi RPJPD Kabupaten Kulon Progo dengan Misi RPJPN dan Misi RPJPD DIY Tahun 2025-2045	267
Tabel 4. 4	Strategi Transformatif (Game Changer)	272

Tabel 5. 1	Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo Berbudaya, Maju, Dan Sejahtera	281
Tabel 5. 2	Arah Kebijakan Misi 2: Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Ekonomi Daerah Serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	289
Tabel 5. 3	Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif Serta Masyarakat Yang Aman Dan Demokratis	295
Tabel 5. 4	Arah Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana	300
Tabel 5. 5	Arah Pembangunan Kulon Progo 2025-2045	306
Tabel 5. 6	Arah Kebijakan Transformasi Kulon Progo 2025-2045	310
Tabel 5. 7	Indikator Utama Pembangunan Daerah Kulon Progo 2025-2045	319

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Capaian Indikator TPB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019 berdasarkan Pilar	3
Gambar 1. 2	Alur hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya	7
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo	12
Gambar 2. 2	Posisi Geostrategis Kabupaten Kulon Progo	14
Gambar 2. 3	Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Kulon Progo	17
Gambar 2. 4	Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo	27
Gambar 2. 5	IKLH Kulon Progo, 2015-2023	41
Gambar 2. 6	Jasa Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo, 2021	43
Gambar 2. 7	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Kulon Progo, 2021	44
Gambar 2. 8	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Kulon Progo, 2022	45
Gambar 2. 9	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2021	47
Gambar 2. 10	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Uncerourihment) (%) Kabupaten Kulon Progo, 2017-2023	50
Gambar 2. 11	Indeks Ketahanan Pangan Kulon Progo, 2018-2023	53
Gambar 2. 12	Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo, 2023	58
Gambar 2. 13	Indeks Ketimpangan Gender di Kulon Progo, 2018-2023	59
Gambar 2. 14	Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023	63
Gambar 2. 15	Rasio Gini Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023	65
Gambar 2. 16	Angka Kemiskinan Kulon Progo, DIY, dan Nasional (%), 2014-2023	67
Gambar 2. 17	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kulon Progo (%), 2014-2023	72
Gambar 2. 18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023	73
Gambar 2. 19	Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kulon Progo, 2014-2023	76
Gambar 2. 20	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kulon Progo, 2014-2023	77
Gambar 2. 21	Gambaran Akreditasi Puskesmas di Kulon Progo, 2023	79
Gambar 2. 22	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kulon Progo, 2015-2023	82
Gambar 2. 23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kulon Progo, 2018-2023	83
Gambar 2. 24	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023	91
Gambar 2. 25	Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2022	92
Gambar 2. 26	Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023 (miliar rupiah)	97
Gambar 2. 27	Realisasi fisik dan keuangan Dana Keistimewaan DIY di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023 (%)	98
Gambar 2. 28	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo, 2018-2023	104
Gambar 2. 29	Perkembangan IKM Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022	105
Gambar 2. 30	Perkembangan Jumlah Peserta Iptek Kreanova Menoreh Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	116
Gambar 2. 31	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kulon Progo, 2015- 2023	125
Gambar 2. 32	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	126
Gambar 2. 33	Rasio Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	127
Gambar 2. 34	PDRB per Kapita ADHB Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023 (juta rupiah)	130

Gambar 2.35	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap Total PDRB di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	134
Gambar 2.36	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan Minum terhadap Total PDRB di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023	136
Gambar 2.37	Laju Inflasi DIY, 2014-2023 (persen)	138
Gambar 2.38	Realisasi Nilai Usaha Perdagangan (juta rupiah), 2017-2023	141
Gambar 2.39	Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023	144
Gambar 2.40	Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023	144
Gambar 2.41	Grafik Jumlah Akomodasi per Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023	145
Gambar 2.42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014- 2023	163
Gambar 2.43	Jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo, 2018 – 2023	164
Gambar 2.44	Angka ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo, 2014 – 2023	165
Gambar 2.45	Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu-lintas Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	170
Gambar 2.46	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Yang Aman	171
Gambar 2.47	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kulon Progo, 2014-2023	174
Gambar 2.48	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023	175
Gambar 2.49	Crime Rate Kabupaten Kulon Progo, 2014-2022	180
Gambar 2.50	Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo	187
Gambar 2.51	Kawasan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo	203
Gambar 2.52	Zona Pengembangan Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates	205
Gambar 2.53	Zona Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif	207
Gambar 2.54	Zona Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan	210
Gambar 4.1	Roadmap Implementasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045	251
Gambar 4.2	Skenario Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo (%)	270
Gambar 5.1	Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera	276
Gambar 5.2	Arah Kebijakan Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah Serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	285
Gambar 5.3	Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis	293
Gambar 5.4	Arah Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana	296

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Norma tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa dokumen pentahapan perencanaan pembangunan daerah mewajibkan adanya keseragaman dengan pentahapan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahunan.

RPJPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro, berwawasan dua puluh tahun, dan memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan bagi Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD periode lima tahunan. RPJMD tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Dokumen KUA dan PPAS akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan dan membiayai rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

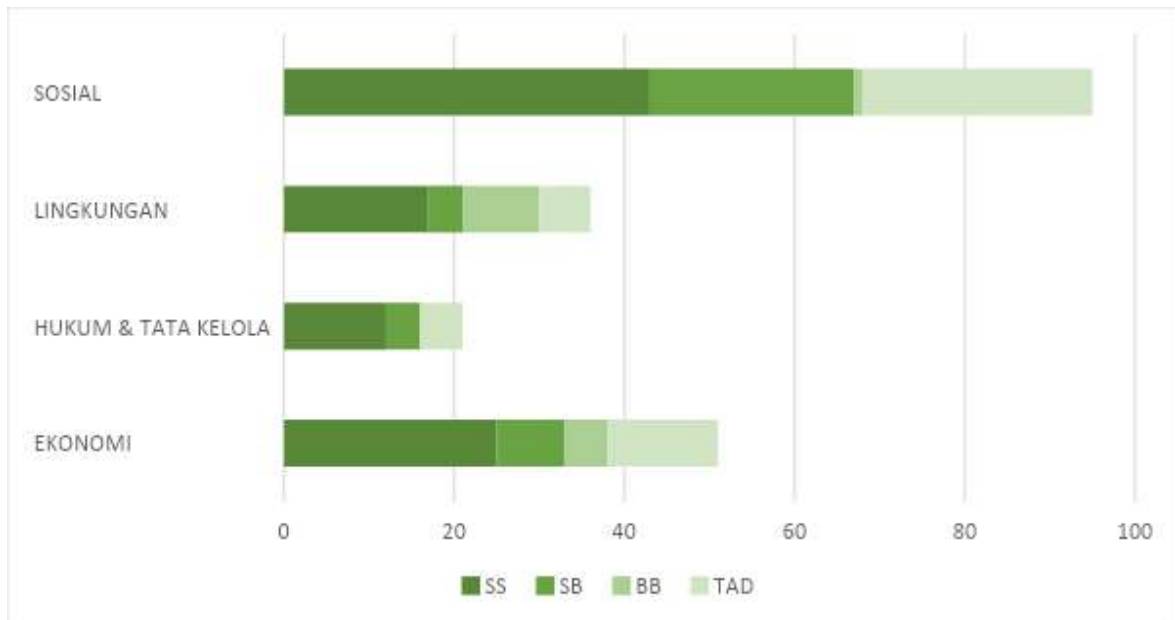
Di dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah*

Daerah disebutkan bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN serta periodisasi RPJPD 2025 akan berakhir pada tahun 2025.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) wajib memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan. Analisis kajian lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan hidup sehingga terciptanya keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Penerapan analisis pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat diterapkan pada seluruh daerah di Indonesia. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan tersebut disusun dalam sebuah laporan yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) sesuai dengan PP No. 46 tahun 2016 tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*.

Aspek dalam pembangunan berkelanjutan bukan terbatas hanya dalam aspek lingkungan hidup, namun juga dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum dan tata kelola. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's). Secara keseluruhan, Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam mencapai target TPB. Dari indikator tersebut, 97 indikator (47,78 persen) telah berhasil mencapai target nasional (SS), sedangkan 40 indikator (19,70 persen) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB). Selain itu, terdapat 15 indikator (7,39 persen) yang belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB), serta 40 indikator (25,12 persen) yang belum memiliki data (TAD). Namun, tantangan yang dihadapi ke depan adalah mencapai target nasional untuk indikator yang belum terpenuhi, dengan harapan bahwa dalam lima tahun mendatang, sebagian besar indikator tersebut dapat mencapai target nasional.

Jika ditinjau dari perspektif pilar pembangunan, pilar hukum dan tata kelola menonjol sebagai pilar dengan capaian TPB tertinggi, mencapai 57 indikator yang sudah memenuhi target nasional RPJMN 2019. Sementara itu, pilar lingkungan dan ekonomi menjadi pilar dengan capaian TPB terendah, hanya mencapai 47 persen. Rincian lengkap mengenai capaian indikator TPB berdasarkan pilar pembangunan dapat ditemukan dalam grafik yang disajikan.



Gambar 1. 1 Capaian indikator TPB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019 berdasarkan Pilar

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan isu-isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat tujuh permasalahan utama yang mempengaruhi pencapaian TPB yang menjadi perhatian perhatian, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk ditangani dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yaitu sebagai berikut.

- 1) Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
- 2) Alih Fungsi Lahan
- 3) Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
- 4) Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan
- 5) Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Belum Optimal
- 6) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal
- 7) Ancaman Bencana Hidrogeometeorologi dan Perubahan Iklim

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 telah mendekati akhir periode. Permendagri No. 86 tahun 2017 mengamanatkan kepada Bappeda Kabupaten/Kota untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal tersebut dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023 tentang *Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025*. Bappeda Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti surat edaran Mendagri tersebut dengan menyusun dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025. Kesimpulan umum dari evaluasi tersebut adalah bahwa RPJPD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 telah dilaksanakan dengan baik, yang ditandai dengan rata-rata capaian kinerja RPJMD pada empat tahap pelaksanaan mendapatkan predikat kinerja yang “Tinggi”.

Langkah berikutnya adalah merumuskan visi misi, menurunkan visi dan misi ke dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 tahun 2017, bahwa penyusunan dokumen RPJPD yang dimulai dengan tahap penyusunan rancangan awal dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang No. 15 tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1951 tentang *Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo*. (Lembaran Negara 1950 Nomor 44) dan (Lembaran Negara 1951 Nomor 101);
- b. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*;
- c. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) dan (Lembaran Negara 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- d. Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- e. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

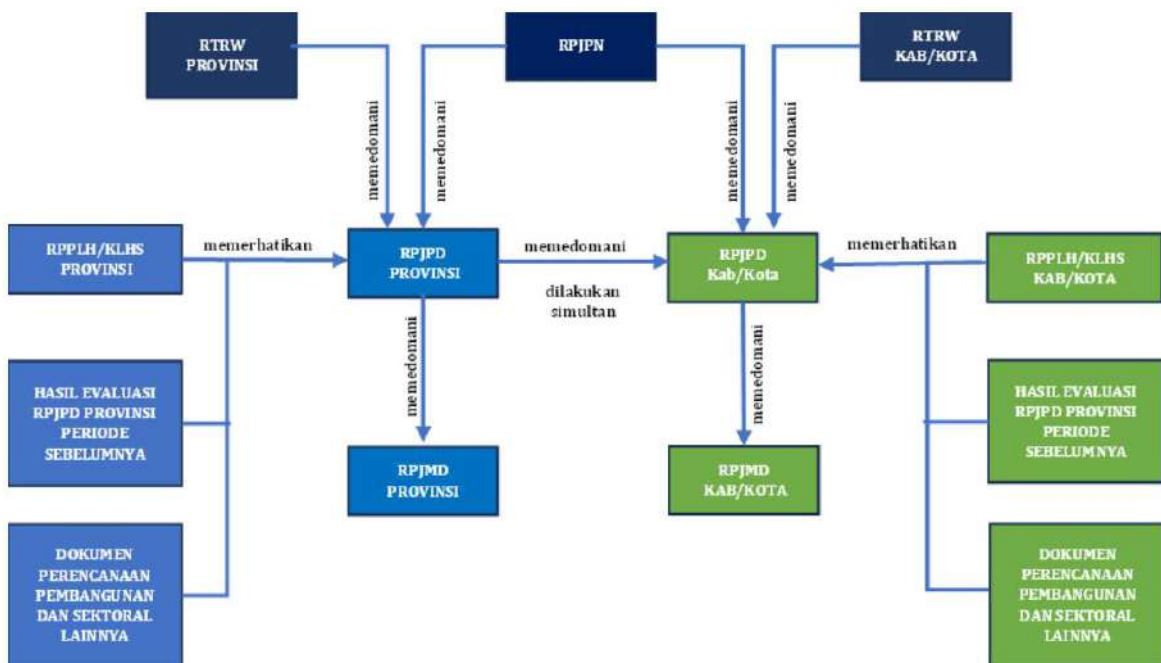
- f. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- h. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang *Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- i. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang* (Lembaran Negara 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- j. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- k. Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
- l. Peraturan Presiden No. 111 tahun 2022 tentang *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- m. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang *Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan*;
- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (Berita Negara 2017 Nomor 69);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah* (Berita Negara 2017 Nomor 1312);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 tahun 2018 tentang *Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (Berita Negara 2018 Nomor 459);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Berita Negara 2020 Nomor 288);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 tahun 2021 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal* (Berita Negara 2021 Nomor 1419);
- s. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.8/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang *Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2020*;
- t. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang *Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion, skala 1:250.000*;
- u. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.146/2023 tentang *Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000*;
- v. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 1 tahun 2024 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045*;
- w. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.54/Menlhk/PKTL/Pla.1.1/B/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang *Percepatan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*;
- x. Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 660/5112/Bangda/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang *Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD*;
- y. Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 660.11.2/8754/Bangda tentang *Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke Dalam Dokumen RPJPD/RPJMD*;
- z. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 tahun 2009 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025* (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- aa. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2015 tentang *Pelestarian Habitat Alami* (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 6);
- bb. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 tahun 2017 tentang *Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten*;

- cc. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 tahun 2023 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043* (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
- dd. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 tahun 2022 tentang *Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 tahun 2012 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032* (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antardokumen

Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terlihat dalam alur sebagai berikut.



Gambar 1. 2 Alur hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.3.1 Keterkaitan dengan RPJPN dan RPJPD DIY 2025-2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo mengikuti panduan visi, misi, tujuan, target, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJP Nasional dan RPJPD DIY, termasuk juga dalam penentuan periode waktu dan langkah-langkah pembangunan dalam interval lima tahun.

1.3.2 Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045

RPJPD Kabupaten Kulon Progo berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan visi, misi, dan program bagi calon Kepala Daerah. Selain itu, dokumen ini juga menjadi panduan bagi Kepala Daerah terpilih dalam merancang strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam RPJMD. RPJPD Kabupaten Kulon Progo juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan seluruh warga masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang konkret, dinamis, sejalan, dan bertanggung jawab.

1.3.3 Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Kulon Progo

RPJPD Kabupaten Kulon Progo berisi panduan mengenai arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan di wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo, dengan memperhitungkan pemanfaatan seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara. Di sisi lain, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo mencakup perencanaan tentang tata letak, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Kulon Progo dan RTRW Kabupaten Kulon Progo tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait.

1.3.4 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo juga terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045 dan Masterplan Smart City Tahun 2018 – 2028.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 ini adalah untuk memberikan penjabaran tentang visi, misi, serta arah pembangunan Kabupaten Kulon Progo selama 20 tahun, dari tahun 2025 sampai dengan 2045.

RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 bertujuan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo selama empat periode.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pada Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045 yang terdiri dari enam bab utama sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD, termasuk latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi eksisting pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan beberapa aspek sesuai dengan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai bahan acuan perencanaan. Bab ini juga merinci proyeksi dinamika demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan terkait pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan masalah dan isu strategis di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil analisis data, analisis permasalahan, dan identifikasi isu-isu strategis. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang relevan dan efektif, sesuai dengan konteks daerahnya.

BAB IV VISI & MISI DAERAH

Menjelaskan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo selama 20 tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2045.

BAB VI PENUTUP

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek-Aspek Kondisi Daerah

Aspek Geografi & Demografi



Kulon Progo terdiri atas 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 Pedukuhan, 1.825 RW, 4.469 RT. Jumlah Penduduk **446.192 jiwa** (156.775 KK) dengan rincian 221.249 laki-laki dan 224.943 perempuan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat



Pada tahun 2023, Kulon Progo memiliki laju pertumbuhan ekonomi pada **5,65%**, PRDB Per Kapita ADHB **35,77 juta rupiah**, rasio gini **0,402**, tingkat kemiskinan **15,64%**, tingkat pengangguran terbuka **2,4%**, Indeks Pembangunan Manusia **75,82**, Indeks Ketimpangan Gender **0,129**.

Aspek Pelayanan Umum



Indeks SPBE tahun 2023 pada **4,08** dengan predikat sangat baik, peringkat indeks inovasi daerah pada peringkat **46**, indeks pelayanan publik **4,26**, Indeks Kapasitas Fiskal daerah **1,174**.

Aspek Daya Saing



Berdasarkan data 2023, PDRB ADHB **15,8 triliun rupiah**, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB **2,11%**, pembentukan modal tetap bruto **41,01**, rasio pajak daerah **0,61**, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB **9,95%**, kontribusi penyediaan akomodasi makan minum **3,77%**.

Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

No.	Tahapan RPJPD	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	RPJMD Tahun 2006–2011	82,44	Tinggi
2	RPJMD Tahun 2011–2016	83,49	Tinggi
3	RPJMD Tahun 2017–2022	81,54	Tinggi
4	RPD Tahun 2023–2026	97,15	Sangat Tinggi
	Rata-rata	86,16	Tinggi

Kesimpulan dan rekomendasi arah kebijakan dalam RPJPD periode berikutnya:

- Memperkuat upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan
- Perlu pengoptimalan pencapaian IPM serta penurunan kemiskinan
- Kolaborasi lintas sektor serta pendanaan kolaboratif perlu diinisiasi
- Memastikan stabilitas dan keamanan Kabupaten Kulon Progo
- Perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan
- Dibutuhkan pertanian presisi

Tren Demografi & Kebutuhan Sarpras Pelayanan Publik

Tren Demografi

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk 2025 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk 2045 (ribu jiwa)
0 – 14 tahun	87,60	84,30
15 – 64 tahun	298,68	299,70
65+ tahun	61,18	91,08
Total penduduk	447,46	475,08
Angka ketergantungan	49,81	58,52



Kebutuhan Sarana & Prasarana

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kulon Progo 443.591 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk di 2045 adalah **475.081 jiwa**, sehingga proyeksi kebutuhan sarpras tahun 2045 adalah:

- Kebutuhan fasilitas pendidikan TK **380 unit**, SD/ MI **368 unit**, SMP/ MTs **99 unit**, SMA/ MA/ SMK **99 unit**
- Kekurangan kebutuhan rumah **65.643 unit**
- Kekurangan sambungan air **33.265 SR**
- Kekurangan kebutuhan listrik **163,4 MW**
- Timbulan sampah **950.162 liter/hari**



Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah



Strategi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan potensi kondisi perekonomian wilayah, Kabupaten Kulon Progo membagi wilayahnya menjadi:

- Kawasan Pariwisata Berkelanjutan
- Kawasan Peruntukan Industri & Ekonomi Kreatif
- Kawasan Aerotropolis & Perkotaan Wates

Proyek Strategis Daerah

Terdapat 10 proyek strategis di Kulon Progo:

- Bedah Menoreh (trase Temon-Borobudur)
- Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo
- Kawasan Peruntukan Industri Sento
- Pelabuhan Tanjung Adikarto
- Pertambangan Berkelanjutan pasir Besi
- Kawasan Perkotaan Wates
- Kawasan Pantai Selatan
- SPAM Kamijoro
- Asrama Haji
- Aerotropolis



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Kabupaten ini tidak berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, berjarak kurang lebih 25 kilometer dari pusat kota Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kapanewon, di mana setiap kapanewon memiliki karakteristik fisik maupun nonfisik yang berbeda-beda.

Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga zona: wilayah utara, tengah, dan selatan. Dengan kualifikasi topografi tersebut menyebabkan perbedaan karakter kegiatan ekonomi yang bervariasi di setiap zona. Uraian tentang kondisi umum daerah ini akan dijelaskan lebih rinci dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis geografi dan demografi memberikan gambaran dan evaluasi tentang kondisi suatu daerah antara lain mengenai: karakteristik fisik, potensi perkembangan wilayah, tingkat kerentanan terhadap bencana, dan luas wilayah serta batas administrasi pemerintahan. Kedua aspek tersebut menyajikan informasi dasar yang esensial untuk mengenali potensi sumber daya alam dan SDM, guna merencanakan pengembangan wilayah yang mendukung kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang *Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan* luas keseluruhan wilayah Kulon Progo adalah 577,22 kilometer persegi. Jumlah luasan berdasarkan kepmendagri tersebut belum dirinci untuk setiap kecamatan. Menurut data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 576,88 km². Perbedaan luasan ini kemudian akan menjadi bahan yang akan disinkronkan dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo yang masih berproses. Secara rinci nama Kapanewon dan prosentase luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Persentase Luas Wilayah menurut Kapanewon

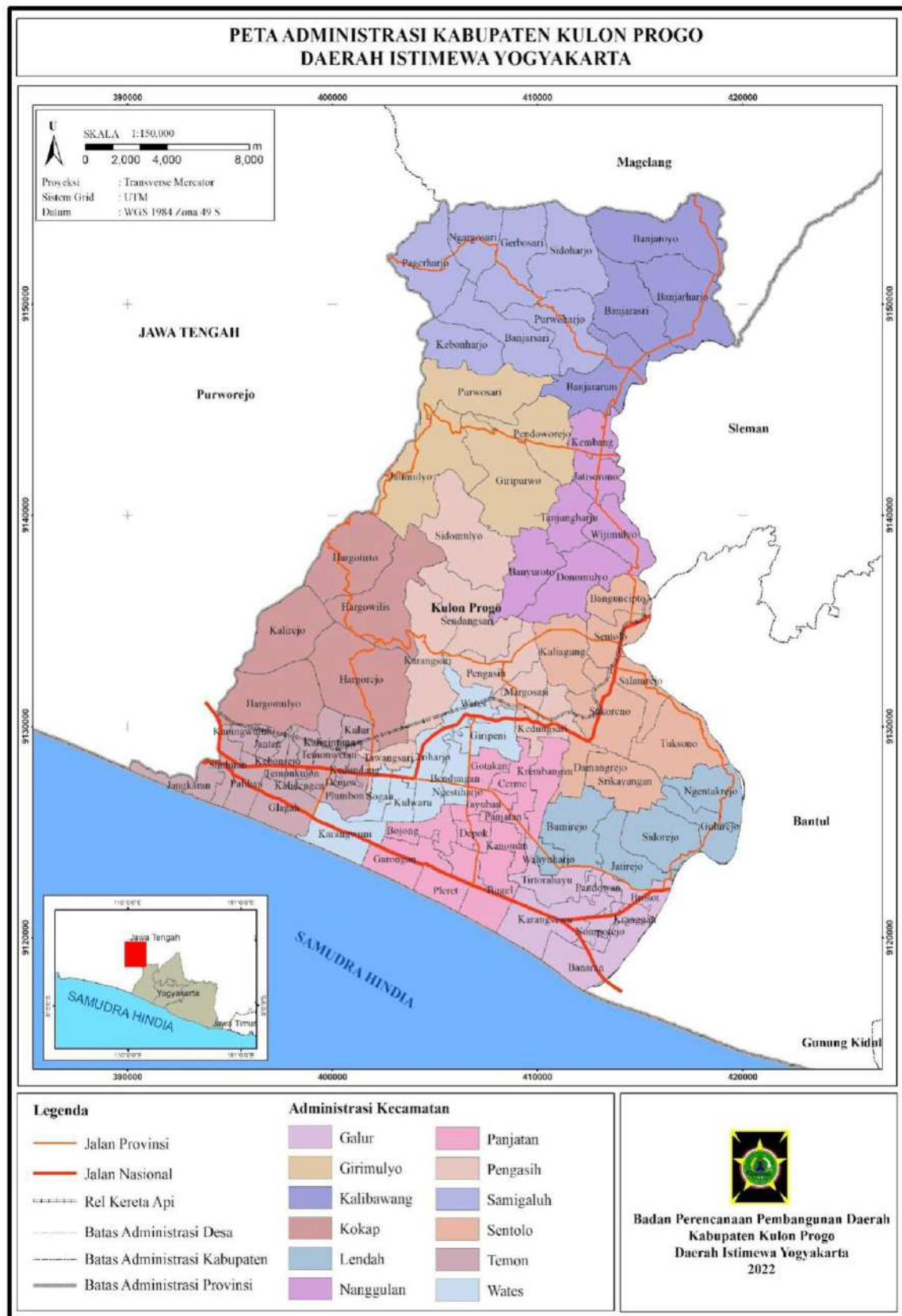
No	Kapanewon	Persentase (%)
1.	Temon	6,32
2.	Wates	5,66
3.	Panjatan	7,65
4.	Galur	5,61
5.	Lendah	6,51
6.	Sentolo	9,33
7.	Pengasih	10,04
8.	Kokap	12,16
9.	Girimulyo	9,58
10.	Nanggulan	6,78
11.	Kalibawang	8,88
12.	Samigaluh	11,49
Kabupaten Kulon Progo		100,00

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2024

Batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.
- Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran lebih jelas mengenai batas administrasi wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7°38'30" — 7°58'3" lintang selatan dan 110°1'37" — 110°16'26" bujur timur. Letak geografis Kabupaten Kulon Progo menjadi strategis dan menguntungkan.

Terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, menjadikan Kulon Progo sebagai gerbang yang menghubungkan DIY dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan. Misalnya di bagian barat dengan Kabupaten Purworejo dan di bagian utara dengan KSPN Borobudur di Kabupaten Magelang.

Selain itu, letak Kulon Progo juga menghadap langsung ke Samudera Hindia, memberikan potensi untuk menjadi pintu gerbang yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan negara tetangga seperti Australia. Posisi geostrategis Kabupaten Kulon Progo telah memangkas jarak dan memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik dalam perdagangan dan hubungan antarwilayah.

Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkan sebagai KSPN Borobudur, tentu akan mendatangkan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara tersebut. Jalur wisata dari bandara menuju Borobudur akan menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan YIA dapat memberikan nilai tambah *global value chain* bagi Kulon Progo dalam hal penyediaan transportasi dan akomodasi.

Gambaran mengenai posisi geostrategis Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Posisi Geostrategis Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Dibangunnya jalan raya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menyusur sepanjang pantai di Kabupaten Kulon Progo telah membuka jalur baru distribusi barang dan jasa. Terutama untuk wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Infrastruktur ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik dan mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo serta DIY secara keseluruhan.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu:

a. Kawasan Pesisir

Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0—100 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini mencakup kapanewon: Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, sebagian Sentolo, dan sebagian Pengasih. Kawasan ini memiliki kemiringan lahan yang relatif rendah, antara 0—2 persen, terdiri dari wilayah pantai dengan panjang garis pantai 24,8 kilometer.

b. Kawasan Dataran

Wilayah ini terdiri dari perbukitan dengan ketinggian antara 100—500 meter di atas permukaan air laut. Meliputi beberapa kapanewon: Nanggulan, sebagian Sentolo, Pengasih, dan sebagian Kalibawang. Wilayah ini memiliki kemiringan lahan antara 2—15 persen dan

termasuk dalam jenis wilayah peralihan dataran rendah dan perbukitan berombak dan bergelombang.

c. Kawasan Pegunungan

Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 500—1000 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini mencakup kapanewon: Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang. Wilayah ini merupakan kawasan tertinggi dan termasuk dalam zona dataran tinggi perbukitan Menoreh.

Pembagian kawasan berdasarkan karakteristik fisik wilayah memungkinkan pengembangan berbagai potensi dan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis setiap kawasan di Kabupaten Kulon Progo.

2.1.1.3 Topografi Wilayah

a. Kemiringan Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam wilayah dengan kemiringan lereng <20 (40,11 persen) dan 18,73 persen wilayah dengan kemiringan >40 persen. Data wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut tingkat kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo

No	Kemiringan Lereng	Persentase (%)
1	< 2°	40,11
2	3°-15°	18,70
3	16°-40°	22,46
4	>40°	18,73
Kabupaten Kulon Progo		100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020 (diolah)

Dalam skala kapanewon, wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 derajat terletak di bagian barat Kabupaten Kulon Progo. Wilayah ini meliputi Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, dan sebagian Nanggulan. Di sisi lain, kapanewon yang tidak memiliki wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 derajat adalah Kapanewon Wates, Panjatan, Galur, Lendah, dan Sentolo. Kelima kapanewon tersebut terletak di daerah dataran rendah dan tidak berkarakteristik topografi pegunungan.

Kapanewon terluas yang memiliki wilayah dengan kemiringan lereng kurang dari 20 derajat adalah Panjatan Sedangkan kapanewon yang hampir tidak memiliki wilayah dengan karakteristik dataran rendah adalah Samigaluh. Kondisi topografi seperti ini berdampak signifikan terhadap perkembangan wilayah, aktivitas ekonomi, dan konektivitas antardaerah.

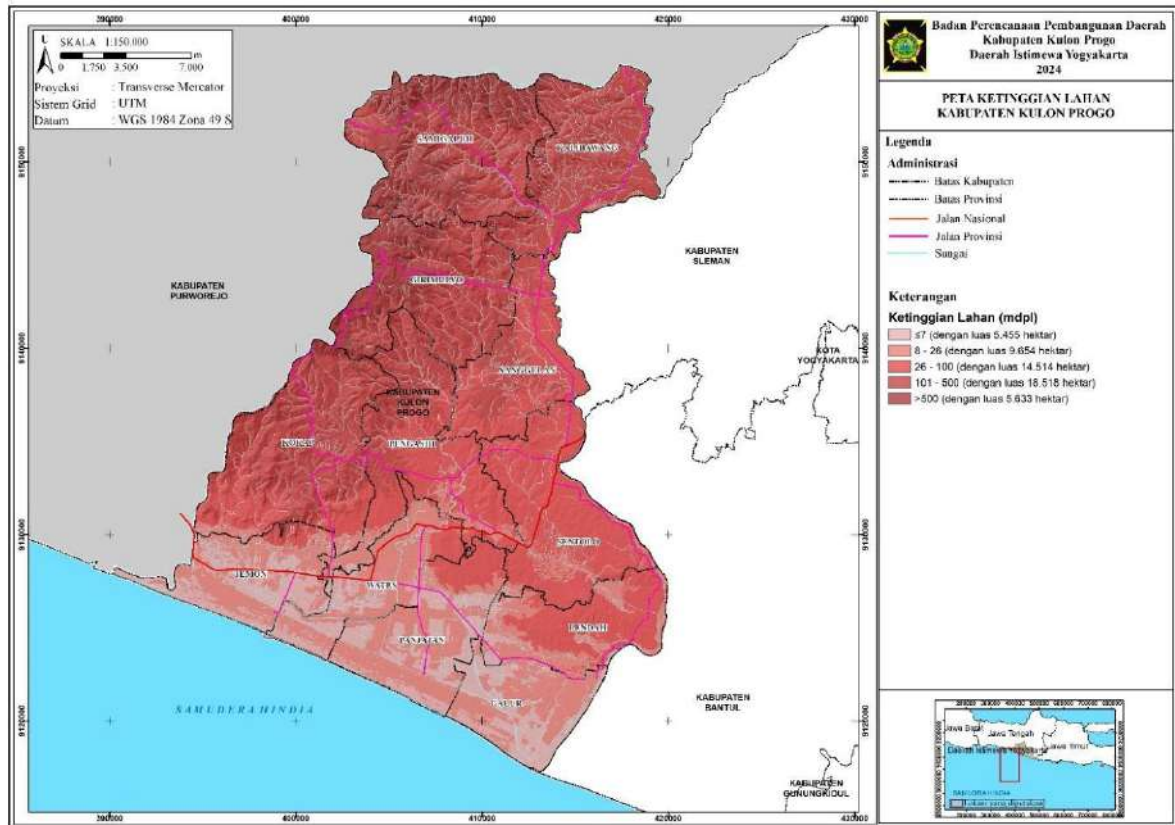
Adalah penting untuk memahami perbedaan karakteristik topografi di berbagai kapanewon di Kulon Progo, karena faktor ini akan memengaruhi berbagai aspek pembangunan, seperti potensi pertanian, pariwisata, infrastruktur, serta adaptasi terhadap risiko bencana. Dengan memahami karakteristik topografi tersebut, maka pemerintah dan masyarakat dapat merencanakan pengembangan wilayah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Ketinggian Lahan

Berdasarkan perbandingan data ketinggian lahan terhadap permukaan air laut, Kabupaten Kulon Progo dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Wilayah Rendah (<7 meter di atas permukaan laut)
 - a. Luas tanah: 10,14 persen dari wilayah total Kabupaten Kulon Progo.
 - b. Wilayah ini terletak pada ketinggian kurang dari 7 meter di atas permukaan laut.
 - c. Karakteristik topografi, umumnya terdapat di sepanjang garis pantai dan berpotensi untuk pertanian pesisir dan pariwisata.
- 2) Wilayah Menengah (8-25 meter di atas permukaan laut)
 - a. Luas tanah: 17,95 persen dari wilayah total.
 - b. Wilayah ini memiliki ketinggian antara 8-25 meter di atas permukaan laut.
 - c. Berpotensi untuk pertanian dan pengembangan permukiman.
- 3) Wilayah Perbukitan (26-100 meter di atas permukaan laut)
 - a. Luas tanah: 26,99 persen dari wilayah total.
 - b. Wilayah ini memiliki ketinggian antara 26-100 meter di atas permukaan laut.
 - c. Berpotensi untuk pertanian dan kegiatan pariwisata/hutan.
- 4) Wilayah Perbukitan Tinggi (101-500 meter di atas permukaan laut)
 - a. Luas tanah: 34,43 persen dari wilayah total.
 - b. Wilayah ini mencakup ketinggian antara 101-500 meter di atas permukaan laut.
 - c. Kondisi perbukitan ini berpotensi untuk hutan dan sumber daya alam lainnya.
- 5) Wilayah Pegunungan (>500 meter di atas permukaan laut)
 - a. Luas tanah: 10,48 persen dari wilayah total.
 - b. Memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.
 - c. Merupakan wilayah pegunungan yang umumnya memiliki sumber daya alam yang beragam dan potensi konservasi.

Pemahaman tentang perbedaan ketinggian wilayah ini penting bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan. Termasuk di antaranya pertanian, pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi risiko bencana alam.



Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.1.4 Geologi

A. Karakteristik dan Struktur

Karakteristik geologi Kabupaten Kulon Progo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Struktur Geologi Perlipatan Batuan (Fold)*. Ini adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat gaya tegasan, mengakibatkan batuan bergerak dari posisi semula dan membentuk lengkungan. Perlipatan ini dapat ditemukan di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah Pengasih, Sentolo, Panjatan, Lendah, dan Galur.
- b. *Struktur Geologi Patahan/Sesar (Fault)*. Struktur ini terjadi ketika bagian-bagian batuan saling bergerak di sepanjang zona patahan. Di wilayah Kulon Progo, ada dua jenis patahan sebagai berikut.
 - 1) *Patahan Regional*. Merupakan bagian dari patahan Yogyakarta, yang dikenal sebagai Patahan Graben Yogyakarta. Patahan ini termasuk Patahan Opak dan Patahan Progo. Patahan Opak bergerak barat daya—timur laut, sementara patahan Progo bergerak utara—selatan. Patahan ini mempengaruhi wilayah Kalibawang, Nanggulan, Sentolo, Panjatan, Galur, dan Lendah.

- 2) *Patahan Lokal*. Ini terjadi di Kulon Progo saja. Patahan ini cenderung mengikuti pola radial dan terdapat di wilayah pegunungan atau kubah di bagian barat laut Kulon Progo, termasuk wilayah Kapanewon Kokap, Temon bagian utara, Pengasih, dan Nanggulan bagian barat.
- 3) *Struktur Kekar (Joint)*. Struktur ini adalah pecahan batuan yang tidak melibatkan pergerakan. Struktur kekar ini banyak terjadi di formasi batuan andesit dan formasi andesit tua.

Pemahaman tentang struktur geologi ini penting dalam pengelolaan sumber daya alam, penentuan lokasi pembangunan, serta pemahaman tentang potensi risiko geologi seperti gempa bumi dan bencana lainnya dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.

B. Formasi Batuan

Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api (40,37 persen), batuan sedimen (47,81 persen), batuan gunung api (7,48 persen) dan batuan terobosan (4,43 persen). Lebih detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo

Kapanewon	Luas Satuan Batuan (hektare)				Jumlah
	Endapan Gunung Api	Batuan Sedimen	Batuan Gunung Api	Batuan Intrusi	
Temon	3.688				3.688
Wates	3.063	138			3.197
Panjatan	3.872	588			4.454
Galur	2.229		1.063		3.288
Lendah	2.009	1.075	475		3.555
Sentolo	3.165	1.175	925		5.259
Pengasih	4.342	1.825			6.161
Kokap	550	4.23		2.6	7.372
Girimulyo	125	5.366			5.485
Nanggulan	250	2.736	975		3.957
Kalibawang	375	3.971	950		5.296
Samigaluh		6.929			6.922
TOTAL	23.667	28.032	4.388	2.6	58.628
Persentase	40,37%	47,81%	7,48%	4,43%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007

Kabupaten Kulon Progo memiliki stratigrafi yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Formasi Nanggulan, adalah formasi tertua di daerah Pegunungan Kulon Progo. Batuan dari Formasi Nanggulan terdiri dari batupasir dengan lignit, napal pasiran, batulempung dengan konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, batupasir dan tuff yang kaya akan fosil foraminifera dan moluska. Diperkirakan tebal formasi ini sekitar 300 meter.

- b. Formasi Andesit Tua, terdiri dari breksi andesit, tuff, tuff lapilli, aglomerat, dan aliran lava andesit. Formasi ini membentuk gunung api tua di daerah ini, seperti Gunung Gajah, Gunung Ijo, dan Gunung Menoreh. Umur formasi ini diperkirakan Oligosen Atas sampai Miosen Bawah.
- c. Formasi Kaligesing, terdiri dari breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batu pasir tufaan. Berumur Oligosen, formasi ini menumpang di atas Formasi Nanggulan.
- d. Formasi Dukuh, terdiri dari breksi, batupasir kerikil, batu gamping, dan batu lempung. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan terdapat di daerah Dukuh Kapanewon Samigaluh.
- e. Formasi Jonggrangan, terdiri dari konglomerat, napal tufan, batu pasir gampingan dengan sisipan lignit. Berumur Miosen Tengah, formasi ini terletak di atas Formasi Andesit Tua.
- f. Formasi Sentolo, terdiri dari aglomerat, napal, dan batu gamping berlapis. Umur formasi ini sekitar Miosen Tengah. Formasi Sentolo memiliki ketebalan sekitar 950 meter.
- g. Endapan Vulkanik Kuartar, merupakan endapan Gunung Merapi, terdiri dari breksi sisipan lava dan endapan lahar. Berumur Pliosen-Pleistosen.
- h. Endapan Aluvial, merupakan endapan kerikil, pasir, lanau, lempung, dan bongkah sepanjang sungai dan dataran pantai.

Pemahaman mengenai stratigrafi ini penting untuk penelitian geologi, pemahaman mengenai sejarah pembentukan daerah, serta potensi sumber daya alam yang dapat ditemukan di setiap formasi batuan.

Tabel 2. 4 Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo

Umur	Formasi	Deskripsi Litologi	Ketebalan (m)
Kuartar	Aluvium	Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai dan dataran pantai.	100
Pliosen-Pleistosen	Endapan Vulkanik Kuartar	breksi sisipan lava dan endapan lahar	20
Miosen Bawah	Sentolo	Bagian atas batu gamping berlapis baik kaya foraminifera Bagian bawah konglomerat alas di atasnya napal tufaan bersilangan dengan vitrik tuff	950
Miosen Bawah	Jonggrangan	Bagian atas batu gamping berlapis ke arah atas menjadi batu gamping koral Bagian bawah konglomerat di atasnya napal tufaan dan batupasir gampingan berselang-seling dengan lignit	250
Oligo—Miosen	Dukuh	Perselangselingan antara breksi, batupasir kerikil, batugamping dan batulempung	660
Oligosen	Kaligesing	breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan	600
Oligo-Miosen	Andesit Tua	Breksi andesit, tuf, lapilli tuff,	660

Umur	Formasi	Deskripsi Litologi	Ketebalan (m)
		aglomerat dan berselingan dengan lava andesit Terdapat fragmen batuan lebih tua.	
Eosen Atas Oligosen	Nanggulan	Batu pasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, batu lempung gampingan struktur konkresi, selang-seling napal dan batu gamping, batu pasir dan tuf, kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan moluska	300

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012

C. Potensi

a. Potensi Air Tanah

- Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi air tanah dalam bentuk Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdiri dari CAT Wates dan yang sedang dalam tahap pengkajian adalah CAT Menoreh. Pemanfaatan air tanah dari CAT tersebut meliputi berbagai kebutuhan: domestik, pertanian, industri, dan layanan nonindustri (pendidikan, kesehatan, dan perkantoran).
- CAT Wates: Telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2 tahun 2017. Dalam penelitian oleh Hendrayana (2020), potensi air tanah bebas di CAT Wates diperkirakan sekitar 34.650.385 meter kubik per tahun. Pemanfaatan air tanah dari CAT Wates pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai 7.721.376 meter kubik per tahun.
- CAT Menoreh: Sedang dalam tahap pengkajian. Potensi air tanah bebas di CAT Menoreh diperkirakan sekitar 56.889.340 meter kubik per tahun.

Selain CAT, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki sumber mata air lainnya yang digunakan untuk berbagai keperluan. Pemanfaatan sumber-sumber mata air ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air bagi berbagai sektor di Kabupaten Kulon Progo. Informasi mengenai sumber mata air dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates

No	Sumber	Lokasi (Kapanewon)	Debit (Liter/Detik)	Pemanfaatan
1	Mata air Clereng	Pengasih	125	Sudah/PDAM
2	Tuk Mudal	Girimulyo	5-15	Sudah
3	Tuk Gua Kiskendo	Girimulyo	24 - 60	Sudah
4	Tuk Grembul	Kalibawang	5-10	Sudah/PDAM
5	Tuk Gua Upas	Samigaluh	1,5 - 3 5	Sudah/PDAM
6	Mata air Sekepyar dan	Samigaluh	-	Belum

No	Sumber	Lokasi (Kapanewon)	Debit (Liter/Detik)	Pemanfaatan
	Kayangan			
7	Tuk Mudal Anjir	pengasih	3— 11	MCK
8	Cekungan Air Tanah Wates	Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan	34,6 juta m ³ /th	Sudah

Sumber:

(1). Bappeda, DPU, Disperindag ESDM, PDAM Kab. Kulon Progo, 2018.

(2). Hendrayana, Heru.dkk. 2020. Neraca Air Tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Menoreh dan Wates Kabupaten Kulon Progo. Geomedia Vol.18 No.2 tahun 2020.Hal 10-29.

b. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Selain potensi geologi serta potensi air tanah, Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai potensi Energi Baru dan Terbarukan yang tersebar di beberapa kapanewon. Secara lengkap, sebaran potensi energi alternatif di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo

No	Kluster	Bahan	Lokasi	Pemanfaatan
1	Biofuel, Biokerosene, Bioethanol	Ketela rambat, jarak pagar, nyamplung	Seluruh Kapanewon	n/a
2	Biogas	Limbah tahu, limbah temak	122 unit usaha tahu (tersebar di Kap. Sentolo), 51405 populasi ternak (seluruh Kapanewon) bisa dikembangkan biogas 15 ribu	Memenuhi kebutuhan rumah tangga
3	Briket	Limbah kayu	Seluruh Kapanewon	n/a
4	Energi Tenaga Surya	Sinar matahari	Seluruh Kapanewon	n/a
5	Mikrohidro	Air	Semawung, Kedungrong, Kalisangga, Sermo	Semawung (kapasitas 600 kWh) dikelola oleh PT. Energy Puntama
6	Energi Tenaga Angin	Angin	Sepanjang pantai dan pegunungan	n/a
7	Energi Limbah Sampah	Limbah sampah	TPA Sampah Banyuroto 70-75 m	n/a

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2022 (diolah)

2.1.1.5 Hidrologi

A. Daerah Aliran Sungai

Menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk ke dalam DAS Progo, DAS Serang, dan

sebagian kecil yang masuk ke dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut Direktorat Bina Penatagunaan Sumber daya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk ke dalam Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. Nama DAS dan sub DAS beserta luasannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Nama DAS, Sub-DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo

No.	DAS	Luas DAS (ha)	Sub DAS
1	Bogowonto	2.509,931	Dekso
			Gesing
			Keduren
			Kodil
			Ngasinan
			Plamping
			Semanggung
2	Serang	23.532,85	Nagung
			Ngrancah
			Serang Hilir
			Serang Sekiyep
			Sidatan
			Sumitro
3	Progo	30.141,92	Batang
			Bedog
			Blongkeng
			Diro
			Gandri
			Jenes
			Kedung-Gong
			Konteng
			Krasak
			Krawang
			Mlinting Putih
			Penter
			Progo Hilir
			Sileng
			Sindon Salak
			Sudu
			Tangsi
			Tinalah

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 2017

Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah pengaliran seluas 8.894 hektare, dengan debit maksimum 381,90 meter kubik per detik dan debit minimum 13,00 meter kubik per detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama

Kali Serang dengan anak-anak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 hektare, dengan debit maksimum 153,6 meter kubik per detik dan debit minimum 0,03 meter kubik per detik.

Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk irigasi persawahan seluas 9.351 hektare. Selain itu Daerah Aliran Sungai Progo juga dimanfaatkan untuk penambangan mineral logam dan batuan yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kabupaten Kulon Progo memiliki danau buatan yaitu Waduk Sermo yang terletak di Kapanewon Kokap dengan luas genangan waduk sebesar 157 hektare. Waduk ini dibuat dengan membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi sebagai suplesi irigasi sawah yang berada di Kapanewon Temon, Wates dan Pengasih dan sebagian suplesi kebutuhan air minum.

B. Sungai

Sungai-sungai yang melewati wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Hal ini karena sungai-sungai tersebut memiliki potensi besar dalam menyediakan air untuk berbagai keperluan, seperti domestik, perkotaan, industri, dan irigasi pertanian. Dua sungai utama yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah Sungai Progo dan Sungai Serang.

Sungai Progo memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Sungai ini menjadi sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM Kulon Progo untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan industri, terutama di kawasan perkotaan. Selain itu, sungai ini juga menjadi sumber air irigasi untuk lahan pertanian di Daerah Irigasi Kalibawang dan Daerah Irigasi Sapon. Debit maksimum dan minimum Sungai Progo tercatat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Progo Opak Serang 2015-2035.

Sungai Serang mencakup daerah tangkapan air seluas 280 kilometer persegi. Sungai ini memiliki debit rata-rata bulanan yang bervariasi. Sungai ini memiliki anak sungai bernama Sungai Ngrancah, yang dibendung untuk mengoperasikan Waduk Sermo. Waduk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan mendukung irigasi di Daerah Irigasi Kalibawang.

Kondisi morfologi sungai di Kabupaten Kulon Progo juga mencerminkan variasi, dan informasi lebih lanjut mengenai inventarisasi sungai-sungai di wilayah ini dapat ditemukan dalam tabel yang disajikan dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, sungai-sungai ini memiliki peran yang krusial dalam penyediaan air untuk berbagai kebutuhan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2. 8 Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Kedalaman (m)
1	Progo	56,70	650	6
2	Serang	23,16	60	8
3	Ngrancah	9,12	50	10
4	Gede	11,17	50	10
5	Nagung	10,97	20	8
6	Seling	7,75	15	4
7	Pening	7,63	15	6
8	Sidatan	3,86	8	2
9	Sari	3,31	6	3
10	Bogem	2,60	6	3
11	Kopat	1,69	8	3
12	Papah	21,94	30	5
13	Tinalah	6,70	50	15
14	Kamal/Sudu	11,60	20	12
15	Salak	5,64	10	6
16	Dunggong	5,45	10	7
17	Klegung	6,48	15	6
18	Rowo Jembangan	8,30	12	3
19	Banyu Meneng	5,03	8	5

Sumber: Neraca Sumber Daya Alam Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2018

2.1.1.6 Klimatologi

• Iklim

Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo terletak pada satu wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim utama: iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim muson sangat tergantung pada perubahan angin musiman yang berlangsung dalam periode tertentu. Biasanya, setiap periode perubahan angin berlangsung selama enam bulan. Iklim muson terdiri dari dua jenis: angin musim barat daya (*muson barat*) dan angin musim timur laut (*muson timur*).

Angin musim barat daya berembus sekitar Oktober hingga April, membawa hujan yang menyebabkan musim penghujan. Sebaliknya, angin musim timur laut berembus sekitar April hingga Oktober, cenderung kering dan mengakibatkan musim kemarau.

Karena berada di wilayah tropis, Kabupaten Kulon Progo mengalami iklim panas dan curah hujan yang tinggi. Faktor lain yang memengaruhi kondisi iklim adalah kedekatan dengan Samudera Indonesia, yang mengakibatkan penguapan air laut dan udara lembab, sehingga curah hujan pun juga tinggi.

Klasifikasi iklim dalam konteks ini menggunakan deskripsi tipe iklim yang dikembangkan oleh F.H. Schmidt dan J.H.A. Ferguson. Klasifikasi ini berdasarkan nisbah antara jumlah bulan kering dan basah dalam setahun. Terdapat delapan kelompok iklim dalam klasifikasi ini, dari sangat basah hingga sangat kering.

Berdasarkan data curah hujan yang tercatat selama lima tahun (2015-2019), Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata bulan kering sebanyak 3,83 bulan dan rata-rata bulan basah sebanyak 7,17 bulan. Hal ini menghasilkan nilai nisbah Q sebesar 53,49 persen. Dengan demikian, menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C, yang merupakan kategori daerah agak basah.

- **Curah Hujan**

Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam sub-DAS Progo Hilir dan memiliki tipe iklim Am (*muson tropis*) dan Aw (*muson tropis kering*) berdasarkan klasifikasi iklim Köppen. Curah hujan dan hari hujan diukur melalui lima stasiun hujan yaitu Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, dan Brosot. Curah hujan rata-rata per tahun selama periode 2013-2018 berkisar antara 153 milimeter per hari hingga 271 milimeter per tahun, dan rata-rata hari hujan per bulan berkisar antara 8 hingga 14 hari.

Secara umum, curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan pola naik turun yang dapat diamati setiap tahun. Curah hujan dan jumlah hari hujan yang lebih tinggi biasanya terjadi pada bulan-bulan Januari hingga April dan November hingga Desember, yang merupakan periode musim penghujan. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik daerah yang memiliki muson tropis.

Rincian lebih lanjut mengenai curah hujan dan jumlah hari hujan pada tiap bulan, serta rata-rata curah hujan dan hari hujan selama tahun 2014-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

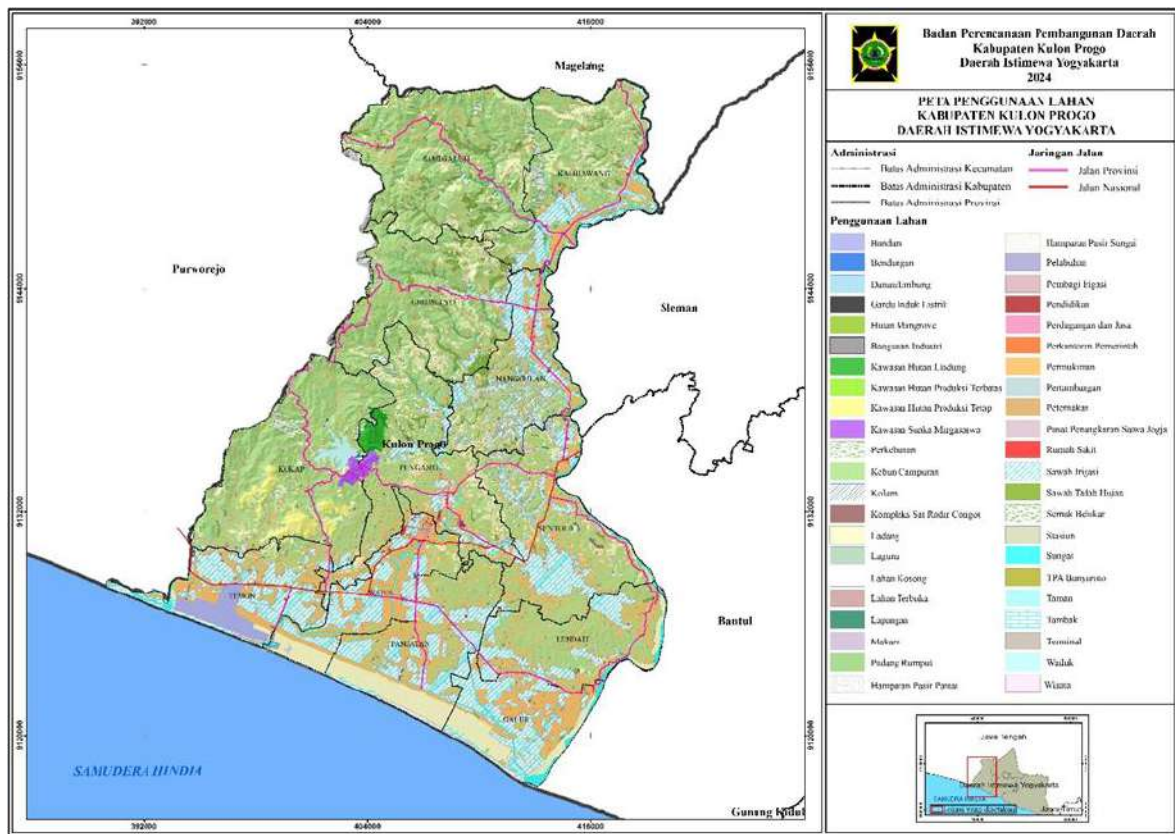
Tabel 2. 9 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Bulan	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Januari	301	19	372	18	199	12	492	24	310	21	392,67	22,92	349,25	18,75	487	21	397	20	243	14
2	Februari	251	16	178	15	408	16	352	19	381	21	28417	16,58	354,56	17,75	454	14	251	11	222	17
3	Maret	174	10	345	17	292	17	289	16	329	18	532,58	20,58	500,19	19,50	188	13	289	18	126	12
4	April	195	13	362	16	180	12	82	9	344	19	75,92	6,5	177,31	10,31	60	8	176	8	37	7
5	Mei	55	7	47	4	129	11	9	2	95	18	17,17	1,75	147,50	11,94	0	0	178	13	69	4
6	Juni	57	5	2	1	318	9	2	1	25	3	1,33	0,67	28,81	3,94	254	7	191	10	44	3
7	Juli	93	7	0	0	114	9	0	0	17	4	0,08	0,67	2,69	0,88	0	0	32	3	33	5
8	Agustus	5	0,5	0	0	37	6	3	2	3	2	0,58	0,58	1 1,75	2,56	38	6	76	7	4	1
9	September	0	0	0	0	301	14	12	2	86	6	-	-	44,63	6,75	109	3	41	6	0	0
10	Oktober	11	2	0	0	357	16	2	2	239	14	-	-	176,38	14,06	159	14	700	22	0	0
11	November	290	16	134	7	552	20	305	17	716	11	54	7	278,88	16,44	374	20	803	21	35	5
12	Desember	438	20	394	17	270	12	290	19	171	11	246,42	18,17	477,69	20,94	290	19	438	16	28	3
Rata-rata		155	9	152	8	263	13	153	9	226	12	134	8	212	12	201	10	297	13	70	6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat dikategorikan menggunakan pendekatan klasifikasi penutup lahan sesuai dengan SNI 7654:2010 terdiri atas daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi terdiri atas lahan pertanian dan lahan non pertanian. Sedangkan daerah tak bervegetasi terdiri dari lahan terbuka, permukiman serta perairan. Mendasar pada hal tersebut, penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo pada 2023 terdiri atas daerah bervegetasi sebesar 77 persen dan daerah tak bervegetasi sebesar 23 persen. Adapun pada daerah bervegetasi terdiri dari 73,5 persen lahan pertanian dan 3,1 persen lahan nonpertanian. Sedangkan pada daerah tak bervegetasi terdiri dari 20,5 persen permukiman, 2,5 persen perairan dan 0,4 persen lahan terbuka. Penggunaan lahan yang masih didominasi oleh lahan pertanian menunjukkan karakteristik masyarakat Kulon Progo yang agraris. Sebaran penggunaan lahan diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 4 Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nlti Mandhala lan Niti Sasana) Kab.Kulon Progo, 2024 (diolah)

Adapun rincian penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kelas penggunaan lahan dari tahun 2021 – 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo, 2021-2023

No	Penggunaan Lahan	2021	2022	2023
		(%)	(%)	(%)
1	Bandara	0,91	1,01	1,02
2	Bangunan Industri	0,06	0,07	0,07
3	Bendungan	0,01	0,01	0,01
4	Danau/Embung	0,01	0,01	0,01
5	Gardu Induk Listrik	0,00	0,00	0,00
6	Gedung	0,01	0,01	-
7	Hamparan Pasir Pantai	0,34	0,46	0,36
8	Hamparan Pasir Sungai	0,01	0,01	0,01
9	Hutan Lahan Kering Primer	1,82	1,82	-
10	Hutan Mangrove	0,00	0,00	0,01
11	Kebun campuran	42,95	43,58	43,56
12	Kompleks Sat Radar Congot	0,00	0,01	0,01
13	Ladang	9,08	9,09	9,89
14	Laguna	0,03	0,03	0,03
15	Lahan Terbuka	0,43	0,41	0,00
16	Lahan Terbuka Hijau	0,01	0,01	-
17	Padang Rumput	0,86	0,87	0,01
18	Pasar	0,03	0,03	-
19	Pelabuhan Laut	0,02	0,02	0,02
20	Pembagi Irigasi	0,01	0,01	0,01
21	Pendidikan	0,26	0,27	0,28
22	Perdagangan dan Jasa	0,17	0,19	0,23
23	Perkantoran Pemerintah	0,17	0,18	0,18
24	Perkebunan	0,59	0,63	0,59
25	Permukiman	17,81	18,05	18,10
26	Pertambangan	0,09	0,09	0,10
27	Rumah Sakit	0,02	0,02	0,02
28	Sawah Irigasi	16,82	17,12	17,09
29	Sawah Tadah Hujan	2,25	2,29	2,35
30	Semak	0,01	0,11	-
31	Semak Belukar	1,24	1,28	1,26
32	Stasiun Kereta Api	0,01	0,01	0,01
33	Sungai	1,61	1,63	1,71
34	Tambak Ikan	0,01	0,01	-
35	Tambak Udang	0,47	0,35	-
36	Tanaman Campuran	0,01	0,01	-
37	Tempat Penimbunan Sampah/Deposit	0,00	0,00	-
38	Terminal Bus	0,00	0,00	0,00
39	Waduk	0,27	0,27	0,27
40	Kesehatan	0,018	0,02	-
41	Wisata	-	0,01	0,01
42	Kawasan Hutan Lindung	-	-	0,44
43	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	-	-	0,03
44	Kawasan Hutan Produksi Tetap	-	-	1,05
45	Kawasan Suaka Margasatwa	-	-	0,32
46	Kolam	-	-	0,01

No	Penggunaan Lahan	2021	2022	2023
		(%)	(%)	(%)
47	Lahan kosong	-	-	0.02
48	Lapangan	-	-	0.13
49	Makam	-	-	0.27
50	Pusat Penangkaran Satwa Jogja	-	-	0.01
51	Tambak	-	-	0.47
52	TPA Banyuroto	-	-	0.00
53	Peternakan	-	-	0.00
54	Taman	-	-	0.01
	Total Luas	100,00	100,00	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala lan Niti Sasana) Kabupaten Kulon Progo, 2024

Penggunaan lahan pada tahun 2021–2023 sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, masih didominasi oleh lahan kebun campuran, disusul oleh permukiman dan sawah irigasi. Lahan kebun campuran secara perlahan mengalami penurunan, begitu pula dengan lahan sawah irigasi. Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya persentase lahan permukiman. Selain itu, luas penggunaan lahan tambak udang menurun pada 2022. Hal ini karena telah dilakukan penertiban terhadap aktivitas tambak udang di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo, keberadaan tambak udang tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo.

Beberapa kelas penggunaan lahan baru muncul pada 2023, yang semula 42 kelas (2021-2022) menjadi 54 kelas penggunaan lahan. Hal tersebut karena pendetailan kelas penggunaan lahan berdasarkan hasil survei lapangan dan pengamatan berbasis citra satelit mendasar pada pemutakhiran peta dasar dan peta tematik pada reviu RTRW tahun 2023.

Meskipun terdapat penambahan kelas penggunaan lahan, hasil pembaruan pemetaan kelas penggunaan lahan direpresentasikan dalam 44 jenis kelas penggunaan lahan, dengan peleburan pemetaan kelas penggunaan lahan jenis gedung, hutan lahan kering primer, lahan terbuka hijau, pasar, semak, tambak ikan, tambak udang, tanaman campuran, dan tempat penimbunan sampah/deposit.

2.1.1.8 Penataan Ruang

Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2012 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo*, rencana pola tata ruang dibagi menjadi dua kawasan utama, yakni kawasan budi daya dan kawasan lindung. Mayoritas kawasan lindung terletak di Pegunungan Menoreh, sementara beberapa lainnya terletak di sepanjang sungai dan pantai.

Kawasan budi daya mencakup wilayah dataran dan pesisir. Berdasarkan analisis terhadap peta eksisting kawasan budi daya dari RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar

jenis penggunaan lahan di kawasan budi daya adalah pertanian lahan kering, yang mencakup luas area 12.542,38 hektare (33,28 persen).

Apabila dibandingkan dengan peta rencana potensi pengembangan wilayah untuk kawasan pertanian lahan kering yang mencapai luas 29.328 hektare, maka arah pembangunan kawasan pertanian telah sesuai dengan rencana, tetapi implementasinya masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Hal ini mencerminkan gambaran awal dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo sebagai basis utama untuk komoditas pertanian. Informasi lebih detail mengenai jenis penggunaan lahan dalam kawasan budi daya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 11 Kawasan Budi daya di Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Peruntukan	Luas (ha)	%
1	Hutan Produksi	683,62	1,81
2	Hutan Rakyat	1.882,97	5,00
3	Industri	3.565,81	9,46
4	Perdagangan	346,13	0,92
5	Perikanan Darat	831,27	2,21
6	Permukiman Perdesaan	7.560,92	20,06
7	Permukiman Perkotaan	1.778,96	4,72
8	Pertanian Lahan Basah	8.493,17	22,54
9	Pertanian Lahan Kering	12.542,38	33,28
	Total	37.685,23	100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2012

Ditinjau dari jenis peruntukannya, kondisi kawasan lindung terlihat bahwa mayoritas luas di dalam kawasan lindung adalah peruntukan bagi resapan air, yang mencakup area seluas 16.770,32 hektar (79,35 persen) dari luas total wilayah Kawasan Lindung.

Sementara itu, peruntukan paling terkecil di dalam kawasan lindung adalah suaka alam, yang hanya memiliki luas 109,13 hektar (0,52 persen). Informasi lebih rinci mengenai luas tiap jenis penggunaan lahan dalam kawasan lindung, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 12 Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	278,58	1,32
2	Kawasan Sempadan Waduk	341,84	1,62
3	Pelestarian Alam	919,42	4,35
4	Resapan Air	16.770,32	79,35
5	Sempadan Pantai	579,54	2,74
6	Sempadan Sungai	2.136,51	10,11
7	Suaka Alam	109,13	0,52
	Total	21.135,34	100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2012

Audit tata ruang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi realisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik dalam hal pola maupun struktur ruang. Pelaksanaan program-program sektoral oleh Pemerintah Daerah akan dianalisis secara bersamaan dengan rencana pola dan struktur ruang untuk menentukan tingkat kesesuaian antara keduanya.

Kesesuaian pemanfaatan ruang diukur dalam bentuk persentase, di mana dalam hal ini, kesesuaian tata ruang di Kabupaten Kulon Progo dinilai dengan membandingkan jenis pemanfaatan ruang yang tercantum di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo terhadap jenis pemanfaatan ruang eksisting. Jenis rencana tata ruang yang dimaksud meliputi rencana tata ruang berupa struktur dan pola ruang. Tabel berikut memberikan informasi mengenai pencapaian tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dari 2015 hingga 2023.

Tabel 2. 13 Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Struktur ruang	68,73	68,73	75,00	86,3	87,50	86,38	87,00	87,22	87,33
2	Pola ruang	82,35	82,56	99,50	88,8	89,83	89,67	89,58	89,88	89,78
3	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	75,54	75,65	87,25	87,55	88,67	88,03	88,29	88,55	88,56

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan data di atas, implementasi struktur ruang dan pola ruang mengalami peningkatan. Salah satu kontribusi utama dalam implementasi struktur ruang adalah penerapan rencana pusat pelayanan kegiatan. Mayoritas pusat kegiatan telah berhasil mencapai peran dan fungsi sesuai dengan panduan rencana tata ruang. Di sisi lain, pelaksanaan rencana sarana prasarana seperti jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan infrastruktur lainnya masih berada pada tingkat moderat.

Dalam hal implementasi pola ruang, kontribusi paling signifikan terlihat pada penerapan rencana peruntukan kawasan lindung. Sebaliknya, untuk kawasan budi daya, beberapa peruntukan masih menghadapi tantangan dalam mencapai penerapan yang optimal. Misalnya, kawasan peruntukan industri, hingga saat ini masih mengalami tingkat perwujudan yang rendah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*, ruang terbuka hijau adalah area yang membentang atau berkelompok dan cenderung memiliki karakter terbuka, di mana tempat ini digunakan untuk pertumbuhan tanaman, baik

secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Ruang terbuka hijau terdiri dari dua jenis, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Ruang terbuka hijau publik adalah area terbuka yang dimiliki serta diurus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, koridor hijau di sepanjang jalan, serta area sungai dan pantai. Di sisi lain, ruang terbuka hijau privat mencakup area seperti kebun atau halaman yang dimiliki oleh masyarakat atau sektor swasta, dan di dalamnya terdapat tanaman yang ditanam.

Dalam wilayah perkotaan, persentase ruang terbuka hijau diatur dengan ketentuan minimal 30 persen dari luas total wilayah perkotaan. Dari angka tersebut, setidaknya 20 persen di antaranya harus diwujudkan sebagai ruang terbuka hijau publik, sementara sisanya (10 persen) dapat menjadi proporsi ruang terbuka hijau privat.

Pada 2023, persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) publik yang telah terwujud adalah sebesar 9,612 persen. Hal ini terinci dalam komponen luas RTH publik yang telah tersedia, mencapai 247,81 hektare, serta luas RTH publik yang seharusnya ada dalam wilayah perkotaan, yakni 2.578,20 hektare.

Pada 2019, dimulai kegiatan pengadaan tanah tahap pertama untuk RTH dengan lokasi perencanaan di Teteg Kulon, Kelurahan Wates. Pengadaan tanah tahap kedua terjadi pada 2020. Meskipun rencananya pada tahun tersebut terdapat rencana pembangunan fisik RTH, namun (*di-refocus*) akibat dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu alokasi anggaran. Hasilnya, pencapaian luas RTH publik dari 2018 hingga 2023 tetap dalam kondisi yang sama.

Rincian luas RTH publik di kawasan perkotaan tercantum dalam tabel di bawah ini. Dengan capaian tersebut, pemerintah kabupaten masih terus berkomitmen untuk mewujudkan penyediaan RTH publik melalui upaya penataan bangunan dan lingkungan di wilayah perkotaan.

Tabel 2. 14 Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan RTH publik yang tersedia					247,81	247,81	247,81	247,81	247,81	247,81
2	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	2.578,2	2.578,2	2.578,2	2.578,2	2.578,2	2.578,2	2.578,2	2.578,2	2.578,2	2.578,2
3	Luasan RTH publik (%)					9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pemanfaatan ruang untuk pembangunan gedung harus mematuhi kriteria administratif dan teknis yang cocok dengan tujuan dan jenis gedung, serta peruntukan lahan yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Sinergi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi (penyelarasan) antara RTRW dengan RPJPD harus dilakukan. Dengan demikian penting untuk menelaah dokumen RTRW yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD.

Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2024–2044. Raperda RTRW Kabupaten Kulon Progo 2024-2044 bertujuan untuk penataan ruang wilayah guna mewujudkan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan jasa, dan industri secara terpadu dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Dalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo tersebut tertulis kebijakan dan strategi penataan ruang seperti yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Menurut Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Penyediaan aksesibilitas dan jaringan infrastruktur transportasi yang memadai;	mengembangkan jaringan jalan dan transportasi perdesaan untuk aksesibilitas perdesaan; mengembangkan kawasan strategis bandar udara internasional sebagai simpul Antar-Moda terpadu; mengintegrasikan berbagai moda transportasi; mengembangkan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) pada simpul angkutan umum massal; mengembangkan fasilitas parkir; membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi; mengembangkan jaringan jalan dan transportasi yang menghubungkan PSN Bandar Udara Internasional dengan KSPN Borobudur dan kawasan lainnya; dan mengintegrasikan jaringan rel kereta api dengan jaringan jalan dan udara, baik dalam hal perangkutan orang maupun barang
Penguatan dan penyiapan sumber daya manusia;	menyediakan ruang untuk pembangunan perguruan tinggi dan fasilitas pendidikan; menyediakan ruang publik untuk warga berkumpul dan berkelompok dalam pemberdayaan; menyediakan ruang untuk pengembangan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan; dan menyediakan ruang untuk pengembangan sarana prasarana yang mendukung penyehatan masyarakat.
Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata	menyusun dan mengimplementasikan sistem agropolitan dan minapolitan dalam konteks hulu hingga hilir; mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
sebagai prioritas;	menyediakan ruang/kawasan untuk sentra komoditas pertanian berdasarkan indikasi geografis; menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat; pengembangan pariwisata alam, buatan, dan budaya; menyediakan ruang untuk penelitian sektor pertanian dan pariwisata; mengembangkan aksesibilitas kawasan wisata; mengembangkan promosi dan informasi wisata; dan menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata.
Pengembangan sektor bahari melalui penguatan kelembagaan, dan peningkatan sarana prasarana;	penyediaan ruang untuk pengembangan kawasan industri perikanan; pemantapan kelompok nelayan melalui kewirausahaan di bidang pengolahan hasil perikanan; pengembangan tempat pelelangan ikan sebagai pendukung pariwisata; dan pengembangan wisata bahari.
Penyediaan akses dan infrastruktur serta prasarana pada wilayah-wilayah kurang terjangkau;	membuka konektivitas terhadap permukiman di Perbukitan Menoreh dengan tetap mengendalikan pertumbuhan permukiman; mengembangkan transportasi umum untuk menghubungkan pusat-pusat perekonomian dengan kawasan-kawasan kurang terjangkau yang memiliki potensi pengembangan; dan melakukan penataan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan perdesaan.
Pengembangan pertambangan yang berkelanjutan;	menyediakan ruang untuk pertambangan dengan konsep pertambangan berkelanjutan (<i>sustainability mining</i>); mengendalikan proses pertambangan; dan mengembangkan prasarana dan sarana pendukung aktivitas pertambangan Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi Melakukan penetapan zona-zona tertentu yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan Mengatur jarak aman antara area pertambangan dengan permukiman dan kawasan lindung Melakukan reklamasi lahan tambang untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.
Pengembangan industri berbahan baku setempat;	menyediakan ruang untuk kegiatan industri berbahan baku lokal; mengelompokkan industri sejenis pada sebuah kawasan melalui sentra-sentra industri; mengembangkan konteks hulu dan hilir industri; menyediakan ruang untuk pengembangan industri-industri kecil; dan menyediakan ruang sebagai etalase industri berbahan baku lokal untuk menarik investasi.
Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang menyinergikan kawasan perkotaan dan perdesaan;	mengembangkan fungsi kota tani utama dalam konstelasi agropolitan; mengembangkan fungsi kota mina utama dalam konstelasi minapolitan; mengembangkan perdagangan komoditas perdesaan; dan mengembangkan pusat-pusat perdagangan dan promosi produk dan industri unggulan setempat di simpul-simpul pergerakan regional.
Perlindungan dan pelestarian alam;	menetapkan kawasan lindung; mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung; melindungi habitat-habitat flora dan fauna endemik Kulon Progo;

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
	menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan pemenuhan luas minimal ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
Perlindungan dan pelestarian budaya;	menetapkan kawasan cagar budaya; mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya; mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan strategis budaya; mendorong penggunaan langgam arsitektur warisan budaya jawa sebagai ciri khas bangunan daerah; dan menyediakan ruang untuk pelestarian seni dan budaya sebagai nilai-nilai luhur warisan budaya.
Peningkatan upaya mitigasi bencana secara terpadu dan berkelanjutan;	identifikasi kawasan rawan bencana; pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; mengembangkan jalur evakuasi bencana; penyediaan ruang untuk evakuasi bencana; dan pemanfaatan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan
Pemantapan kawasan pendukung Program Strategis Nasional (PSN) Bandar Udara Internasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur;	penyediaan ruang untuk pembangunan infrastruktur meliputi: aksesibilitas transportasi penghubung PSN Bandar Udara Internasional dengan KSPN Borobudur, pelayanan kebandarudaraan, dan fasilitas lain; penyediaan ruang untuk pengembangan aksesibilitas menuju kawasan strategis PSN Bandar Udara Internasional dan KSPN Borobudur; penyediaan ruang untuk kegiatan pengembangan perekonomian lokal, nasional dan internasional kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan penyediaan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa
Pemantapan kawasan pendukung pertahanan dan keamanan;	mengendalikan pembangunan di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan; menyediakan jalur-jalur khusus untuk kegiatan pertahanan dan keamanan; dan mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
Pemantapan pelayanan infrastruktur dan jaringan prasarana wilayah; dan	memantapkan infrastruktur energi dan penyediaan energi alternatif; memantapkan infrastruktur telematika dalam mendukung perwujudan kota cerdas (<i>smart city</i>); memantapkan jaringan pergerakan dan perangkutan perdesaan, perkotaan dan regional; memantapkan dan melestarikan jaringan sumber daya air; dan memantapkan jaringan prasarana lainnya
Perwujudan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang praktis dan sinergis.	menyusun rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya; mengembangkan sistem dan prosedur perizinan; dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sumber: Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044

Dalam menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa kinerja wajib utama yang tertuang dalam dokumen Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044 beserta waktu pelaksanaannya sebagai berikut.

Tabel 2. 16 Kinerja Wajib Sesuai Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2043

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Target	Lokasi	Tahapan				Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional							
A. Terwujudnya Struktur Ruang									
Terwujudnya Sistem Pusat Permukiman	Terwujudnya Pusat Kegiatan Lokal	Berkembangnya PKL menjadi PKW	v	Perkotaan Wates, Perkotaan Temon	v	v	v	v	
		Penataan bangunan dan lingkungan	v	Perkotaan Wates, Perkotaan Temon	v	v	v	v	
		Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas perkotaan	v	Perkotaan Wates, Perkotaan Galur, Perkotaan Sentolo, Perkotaan Nanggulan, Perkotaan Dekso, dan Perkotaan Temon	v	v	v	v	
		Pengembangan transportasi bersinergi melalui simpul-simpul kegiatan berbasis <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	v	Perkotaan Wates	v	v	v	v	
		Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial	v	Perkotaan Wates, Perkotaan Galur, Perkotaan Sentolo, Perkotaan Nanggulan, Perkotaan Dekso, dan Perkotaan Temon	v	v	v	v	
		Pengembangan kawasan campuran	v	Perkotaan Temon	v	v	v	v	
		Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kegiatan agropolitan	v	Perkotaan Dekso	v	v	v	v	
		Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung pariwisata Borobudur	v	Perkotaan Dekso	v	v	v	v	
		Pengembangan dan pengaturan fasilitas pariwisata berbasis pertanian	v	Perkotaan Nanggulan	v	v	v	v	
		Pengembangan dan pengaturan fasilitas pariwisata bahari	v	Perkotaan Galur, Perkotaan Wates, Perkotaan Temon	v	v	v	v	
		Pengembangan utilitas pendukung kegiatan industri	v	Perkotaan Sentolo	v	v	v	v	
		Pengembangan kapasitas pelayanan air minum	v	Perkotaan Galur, Perkotaan Nanggulan	v	v	v	v	
		Penataan dan pengembangan kawasan pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi	v	Perkotaan Wates	v	v	v	v	
		Pengembangan sarana, prasarana, dan fasilitas olahraga	v	Perkotaan Wates	v	v	v	v	
	Terwujudnya Pusat Pelayanan Kawasan	Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial	v	Perkotaan Panjatan, Perkotaan Lendah, Perkotaan Kokap, Perkotaan Girimulyo, Perkotaan Kalibawang, dan Perkotaan Samigaluh	v	v	v	v	
		Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas perkotaan	v	Perkotaan Panjatan, Perkotaan Lendah, Perkotaan Kokap, Perkotaan Girimulyo, Perkotaan Kalibawang, dan Perkotaan Samigaluh	v	v	v	v	
		Pengembangan dan pengaturan fasilitas pariwisata	v	Perkotaan Girimulyo, Perkotaan Samigaluh	v	v	v	v	
		Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas sentra industri batik	v	Perkotaan Lendah	v	v	v	v	
		Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung eduwisata	v	Perkotaan Kokap	v	v	v	v	
		Pengembangan sarana, prasarana, dan fasilitas olahraga	v	Perkotaan Panjatan	v	v	v	v	

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Target	Lokasi	Tahapan				Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional							
		Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kegiatan agropolitan	v	Perkotaan Kalibawang	v	v	v	v	
	Terwujudnya Pusat Pelayanan Lingkungan	Perbaikan dan pengembangan aksesibilitas wilayah	v	Kalurahan Pandowan, Kalurahan Hargorejo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Ngentakrejo, Kalurahan Demangrejo, Kalurahan Bojong, Kalurahan Tanjungharjo, Kalurahan Banjarasri	v	v	v	v	
		Penataan bangunan dan lingkungan kawasan geoheritage Mangaan-Kliripan	v	Kelurahan Hargorejo	v	v	v	v	
		Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung eduwisata	v	Kelurahan Hargorejo	v	v	v	v	
Terwujudnya Sistem Jaringan Prasarana	Terwujudnya Sistem Jaringan Transportasi	Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan	v	Perkotaan Wates, Seluruh Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Sistem Jaringan Perkeretaapian	v	Kapanewon Temon, Wates, Sentolo	v	v	v	v	
		Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Sistem Jaringan Transportasi Laut	v	Tanjung Adikarto	v	v	v	v	
		Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	v	Bandar Udara Kulon Progo (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)	v	v	v	v	
	Terwujudnya Sistem Jaringan Energi	Terwujudnya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	v	Kapanewon Temon, Wates, Pengasih, Sentolo, dan Seluruh Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	v	12 Kapanewon belum terjangkau, Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Sentolo, Temon, Wates, Waduk Sermo	v	v	v	v	
	Terwujudnya Sistem Jaringan Telekomunikasi	Terwujudnya Jaringan Tetap	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Jaringan Bergerak	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
	Terwujudnya Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	v	Seluruh wilayah Kab. Kulon Progo	v	v	v	v	
		Terwujudnya Sistem Pengendali Banjir	v	Kapanewon Temon dan semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Bangunan Sumber Daya Air	v	Waduk Sermo, Bendung Bantar, Bendung Kamijoro, Bendung Sapon, Embung Blubuk, Embung Kalibuko, Embung Plampang, Embung Samigaluh, Bendung Karangtalun dan semua Kapanewon	v	v	v	v	
	Terwujudnya Sistem Prasarana Lainnya	Terwujudnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	v	KPI Sentolo	v	v	v	v	
		Terwujudnya Sistem jaringan Persampahan	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Sistem Drainase	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
B. Terwujudnya Pola Ruang									

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Target	Lokasi	Tahapan				Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional							
Terwujudnya Kawasan Lindung	Terwujudnya Kawasan Lindung Kabupaten	Terwujudnya Badan Air	v	Waduk Sermo, Sungai Progo, Sungai Serang, Sungai Bogowonto	v	v	v	v	
		Terwujudnya kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahannya	v	Kapanewon Kokap dan Pengasih	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Perlindungan Setempat	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Konservasi	v	Suaka Margasatwa Sermo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Temon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Lindung Geologi	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Cagar Budaya	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Mangrove	v	Kapanewon Temon	v	v	v	v	
	Terwujudnya Kawasan Budi daya Kabupaten	Terwujudnya Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	v	Kapanewon Kokap, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Gimiluyo	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Perkebunan Rakyat	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Peruntukan Pertanian	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Peruntukan Perikanan	v	Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Galur, Nanggulan	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi	v	Kapanewon Wates	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Peruntukan Industri	v	Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Temon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Peruntukan Pariwisata	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Permukiman	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
		Terwujudnya kawasan Transportasi	v	Kapanewon Temon	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan Pertahanan dan Keamanan	v	Semua Kapanewon	v	v	v	v	
C. Terwujudnya Kawasan Strategis									
Terwujudnya Kawasan Strategis	Terwujudnya Kawasan Strategis Kabupaten	Terwujudnya Kawasan Strategis Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	v	Kapanewon Wates, Lendah, Sentolo, Temon, Nanggulan	v	v	v	v	
		Terwujudnya Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya	v	Kapanewon Temon, Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, dan Kapanewon Samigaluh	v	v	v	v	

Sumber: Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044

2.1.1.9 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu entitas spasial yang mencakup segala komponen, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakan mereka, yang saling memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sejalan dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis di Kabupaten Kulon Progo, di mana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan pemanfaatan sumber daya alam, juga terdapat potensi terjadinya dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Situasi ini bisa mengancam daya dukung, kapasitas tahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya berpotensi menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik demi keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah, digunakan analisis daya dukung dan daya tampung untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan akan air, pangan, permukiman, dan jasa lingkungan, serta analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencakup penilaian terhadap kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air-IKA), kondisi kualitas udara (Indeks Kualitas Udara-IKU), serta kondisi tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan).

IKLH berfungsi sebagai ukuran kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menggambarkan secara substansial status atau kualitas lingkungan hidup suatu daerah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021 tentang *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*, komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari tiga indikator utama: indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Indikator kualitas air (IKA) dihitung berdasarkan berbagai parameter, termasuk derajat keasaman (pH), kadar oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), total padatan tersuspensi (TSS), kadar nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-Phosphat), dan kandungan *fecal coliform* (Fecal Coli). Sampel untuk mengukur kualitas air diambil dari sembilan titik sungai, yang meliputi Sungai Serang, Papah, Papak, Sudu, Nagung, Tedunan/Gede, Tinalah, Ngrancah, dan Pening.

Indikator kualitas udara (IKU) dihitung berdasarkan parameter sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂), yang diambil dari berbagai lokasi seperti area perkantoran, industri, permukiman, dan transportasi. Sementara itu, indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan perhitungan luas tutupan lahan dalam wilayah yang diamati.

Seiring berjalannya waktu, perhitungan IKLH terus mengalami penyempurnaan. Pada periode 2009-2011, penyempurnaan dilakukan dengan mengubah titik acuan dan perhitungan. Setiap indikator dalam IKLH dibandingkan dengan standar atau ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan pemerintah, seperti baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Kemudian, pada 2012-2014, metodologi ditingkatkan dengan menerapkan pembobotan, agar tercipta keseimbangan dinamis antara isu hijau (aktivitas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan) dan isu coklat (aktivitas pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan). Kemudian, pada 2016-2017, dilakukan penyempurnaan lagi dengan mengembangkan metode perhitungan IKA. Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) juga disempurnakan dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan rehabilitasi yang berhubungan dengan perubahan tutupan lahan atau hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial.

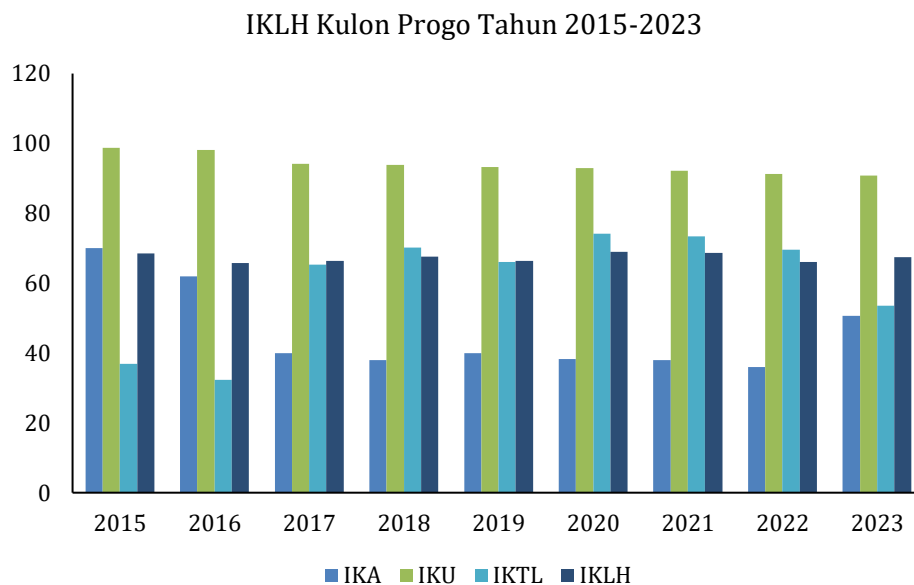
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021 tentang *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*, terjadi perubahan pada parameter pengukuran dan kategori indeks sesuai dengan peringkat nilai. Dalam peraturan ini, terdapat kebijakan baru yang menyebabkan jumlah parameter penilaian pada 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 17 IKLH Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
1	2014	0,94*)	98,74	n/a	n/a
2	2015	70	98,76	36,93	68,56
3	2016	62	98,07	37,27	65,75
4	2017	40	94,22	65,28	66,38
5	2018	38	93,86	70,13	67,61
6	2019	40	93,17	66,11	66,4
7	2020	38,33	92,91	74,1	69,01
8	2021	38	92,15	73,32	68,69
9	2022	36	91,3	69,55	66,01
10	2023	50,61	90,74	53,51	67,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2023

*) cara penghitungan berbeda



Gambar 2. 5 IKLH Kulon Progo, 2015-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa besaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kulon Progo dalam kurun waktu 8 tahun bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui panjang grafik kolom yang menunjukkan nilai setiap indeks per tahunnya. Artinya, rincian nilai IKA, IKU, dan IKTL setiap tahunnya senantiasa terus mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan indikator pengukuran yang semakin kompleks setiap tahunnya. Aspek pertama yang dapat dilihat tingkat fluktuasinya adalah besaran IKA yang menghasilkan skor “cukup baik” pada tahun 2015-2016 dan mengalami penurunan dengan kisaran yang stagnan antara 36-40 (buruk) pada tahun 2017-2022. Kemudian, angka tersebut mulai meningkat pada tahun 2023, yakni mencapai 50,61 sehingga kategori kualitas air Kulon Progo saat ini terklasifikasi sebagai tingkat “sedang”. Peningkatan nilai IKA pada tahun 2023 karena pada pengambilan sampel air sungai periode 1 dan 2 di tahun 2023 dilakukan pada musim kemarau. Musim kemarau membuat air sungai tidak bercampur sedimentasi, sehingga kualitas air lebih jernih.

Debit air yang menurun pada musim kemarau membuat arus sungai menjadi lebih pelan dan mencegah pencampuran antara air dan sedimentasi, pada saat musim hujan arus sungai menjadi lebih cepat atau terjadinya turbulensi, sehingga dapat mengangkat sedimentasi dan bercampur dengan air. Air sungai terlihat lebih keruh di musim hujan dibandingkan musim kemarau. Indeks Kualitas Air Kabupaten Kulon Progo dengan kenaikan angka tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan laju kenaikannya agar nilai IKA dapat selalu memenuhi target yang ditentukan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab perubahan kualitas air, salah satunya adalah adanya kecenderungan peningkatan beban pencemaran di sungai dari tahun ke tahun, sementara kemampuan daya tampung dan dukung lingkungan terbatas. Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai, tampak bahwa parameter pencemar yang paling dominan dan melebihi batas mutu air sungai adalah Fecal Coli. Pencemaran ini berasal dari limbah domestik dan mungkin terkait dengan infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar yang seharusnya.

Aspek kedua yang memengaruhi nilai akhir IKLH adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Berdasarkan hasil perhitungan data berkala, diketahui bahwa nilai IKU Kabupaten Kulon Progo berada pada kisaran 90,74 – 98,76. Meskipun rentang tersebut diklasifikasikan pada tingkat “sangat baik”, penurunan yang konstan dari tahun ke tahun juga perlu menjadi perhatian. Terlebih lagi, skor terendah yang dicapai merupakan data terbaru pada tahun 2023. Metodologi perhitungan IKU rata-rata selalu dilakukan dengan cara yang sama setiap tahunnya, hanya saja beberapa kali terjadi perbedaan bobot, misalnya persentase hitungan IKU pada tahun 2021 mencapai 42,8 persen, sedangkan tahun sebelumnya besaran IKU dalam IKLH hanya sebesar 30 persen.

Dengan demikian, penurunan yang terjadi meskipun pembobotan lebih besar menjadikan upaya mengontrol jumlah emisi NO_2 dan SO_2 perlu dilakukan. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan di empat lokasi yang mewakili berbagai area, yakni transportasi, industri, perkantoran, dan permukiman, dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Capaian IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan satu sama lain, seperti lalu lintas, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan-bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya menjaga kualitas udara yang baik.

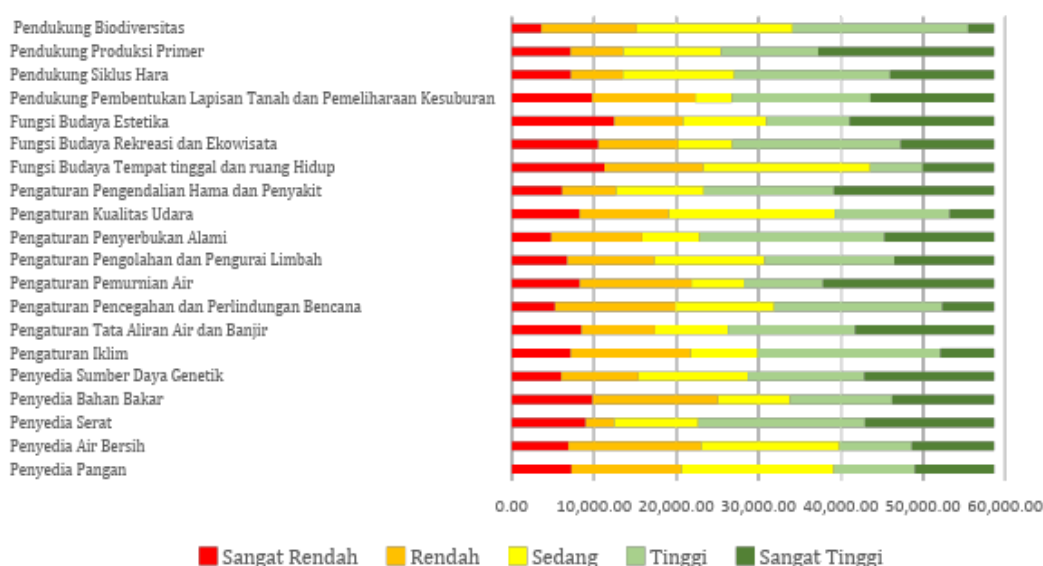
Aspek terakhir yang memengaruhi skor IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berdasarkan perhitungan IKTL yang dilakukan, diketahui bahwa tahun 2015-2018 nilai yang dicapai selalu mengalami kenaikan. Penurunan sedikit terjadi pada 2019 dan mengalami puncak tertingginya pada 2020 dengan skor 74,1. Nilai tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya indikator luasan tutupan lahan yang dihitung, yakni penambahan aspek rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya di area penggunaan lain.

Kemudian nilai tersebut mengalami penurunan terus-menerus sejak tahun 2021 hingga di titik terendah pada tahun 2023 dengan skor 53,51. Penurunan tersebut tentu disebabkan oleh proses pembukaan lahan untuk pembangunan Banda Internasional Yogyakarta (BIA). Upaya penanganan yang telah dilakukan untuk menambah tutupan lahan

adalah dengan melakukan penanaman pohon di sekitar mata air, di sempadan pantai dan pembangunan RTH.

2.1.1.10 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup terdiri atas dua puluh jenis jasa lingkungan yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu jasa lingkungan hidup fungsi penyedia, pengaturan, budaya, maupun jasa pendukung. Adapun perhitungan daya dukung dan daya tampung berbasis jasa lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo dihitung berdasarkan data 2021. Distribusi luasan masing-masing jasa lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam grafik berikut.

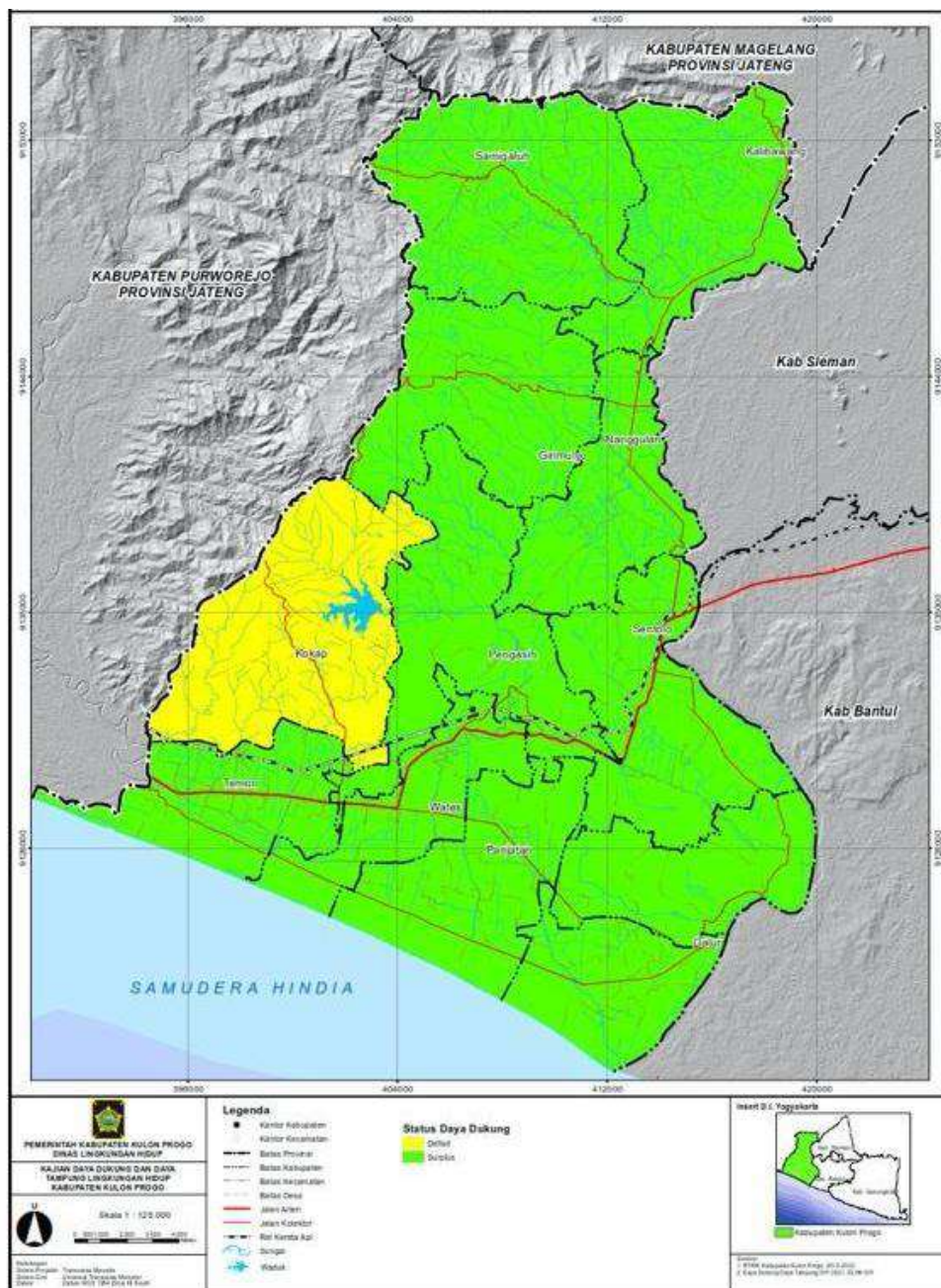


Gambar 2. 6 Jasa Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo, 2021

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dari grafik di atas dapat diketahui terdapat kondisi jasa lingkungan yang memiliki kriteria tinggi dan sangat tinggi yang rendah yaitu Jasa Lingkungan Fungsi Penyedia Air Bersih, Fungsi Penyedia Pangan, Fungsi Pengaturan Kualitas Udara, Fungsi Pendukung Biodiversitas, dan Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup. Perlu ada upaya untuk menjaga jasa lingkungan tersebut agar tidak mengalami penurunan kualitas dan mengurangi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan.

Status daya dukung dan daya tampung pangan merupakan penilaian untuk mengetahui ketersediaan pangan yang disandingkan dengan kebutuhan pangan oleh masyarakat. Berdasarkan analisis, hanya Kapanewon Kokap yang memiliki kesediaan lahan tanaman pangan defisit serta memiliki luasan lahan pertanian tanaman pangan terkecil. Berikut adalah sebaran status daya dukung dan daya tampung pangan di Kulon Progo pada 2021.

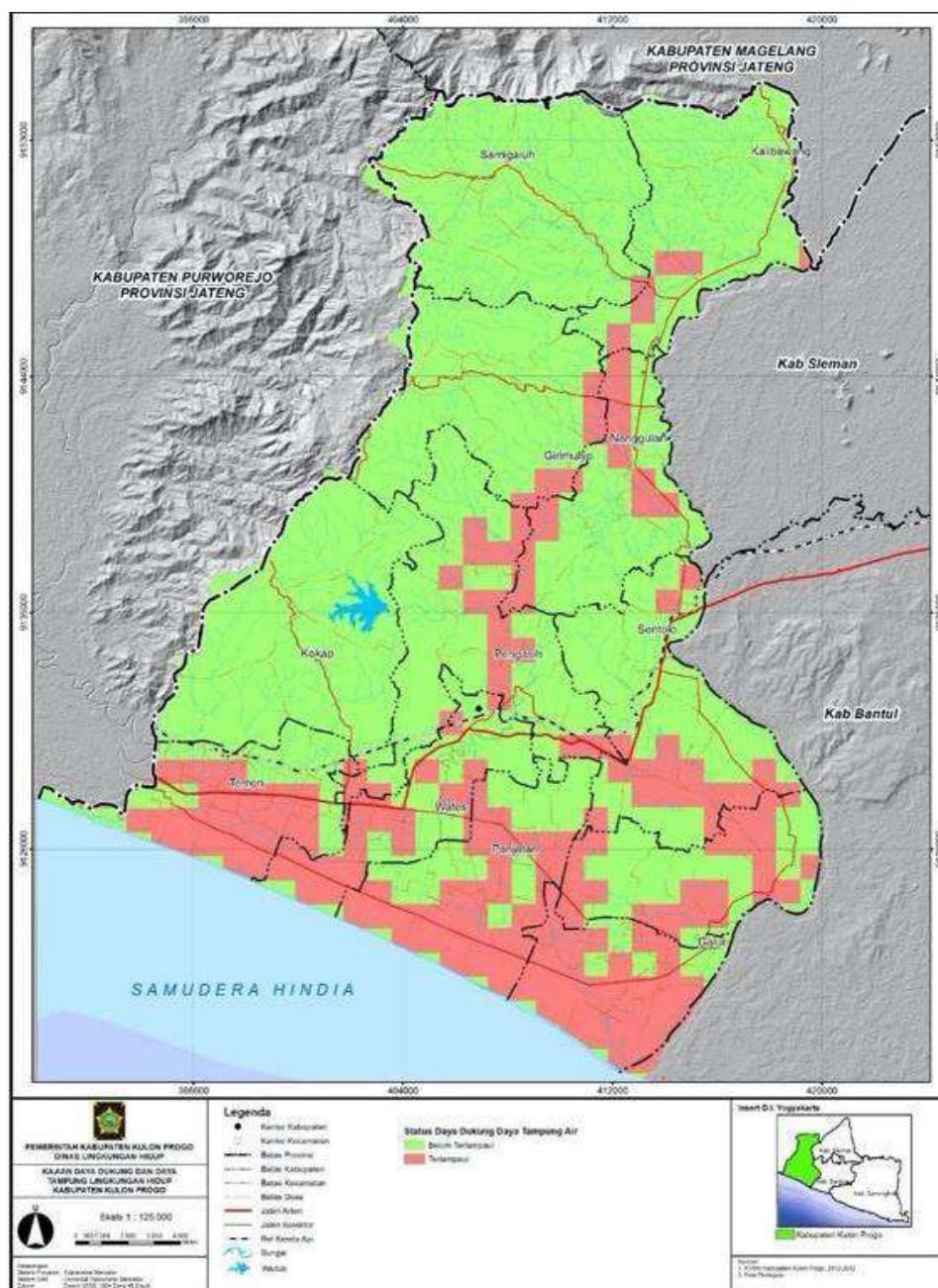


Gambar 2. 7 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Kulon Progo, 2021

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Kulon Progo, 2023

Secara umum, Kabupaten Kulon Progo memiliki daya dukung air yang baik. Kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo pada 2021 adalah sebesar 712.468.800,01 meter kubik, sedangkan ketersediaan air di wilayah ini adalah sebesar 772.640.481,65 meter kubik. Artinya, secara umum, status daya dukung air di Kabupaten Kulon Progo masih dikategorikan “surplus” atau sumber daya air yang dapat memenuhi kebutuhan suatu wilayah (kebutuhan penduduk). Meskipun demikian, di beberapa lokasi masih ditemui status daya dukung air “defisit”, yaitu sumber daya air yang tidak dapat memenuhi kebutuhan suatu wilayah. Dari 12 kapanewon di

Kabupaten Kulon Progo, terdapat tujuh kapanewon: Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Pengasih, Samigaluh, Sentolo dan Temon yang berstatus “surplus”. Artinya, daya dukung air di kapanewon tersebut belum terlampaui. Sedangkan empat kapanewon: Kapanewon Galur, Lendah, Wates dan Panjatan memiliki daya dukung air yang “defisit”, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan konservasi pada area ini. Berikut adalah sebaran status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Kulon Progo pada 2021.



Gambar 2. 8 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Kulon Progo, 2022

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Kulon Progo, 2023

Ditinjau dari daya dukung dan daya tampung permukiman, hanya Kapanewon Lendah yang berada pada kriteria “optimum”, bahwa pemenuhan kebutuhan permukiman dan jumlah penduduk masih cukup seimbang. Berikut adalah rincian dari daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2. 18 Status Daya Dukung Permukiman di Kab. Kulon Progo, 2021 - 2041

Kapanewon	Pola Ruang Permukiman	Jumlah Penduduk		Luas Pola Ruang Permukiman	DD Permukiman		Status DD Permukiman	
		2021	2041		2021	2041	2021	2041
Galur	Permukiman Perdesaan	32.930	36.882	3.129.803,97	3,66	3,22	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Girimulyo	Permukiman Perdesaan	25.216	25.720	4.961.680,01	7,57	7,44	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Kalibawang	Permukiman Perdesaan	31.077	31.699	4.718.283,3	5,84	5,71	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Kokap	Permukiman Perdesaan	35.876	35.948	11.300.637,94	12,12	12,09	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
	Permukiman Perkotaan	663	664	292.363,16	16,96	16,93	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Lendah	Permukiman Perdesaan	41.180	47.769	1.809.214,19	1,69	1,42	Optimum	Optimum
Nanggulan	Permukiman Perdesaan	30.706	35.619	3.191.729,46	4	3,35	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Panjatan	Permukiman Perdesaan	39.003	45.634	4.660.341,62	4,6	3,83	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Pengasih	Permukiman Perdesaan	49.860	59.832	8.138.151,13	6,28	5,05	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
	Permukiman Perkotaan	1.600	1.920	365.593,82	8,79	7,06	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Samigaluh	Permukiman Perdesaan	28.741	31.328	3.896.012,78	5,21	4,72	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Sentolo	Permukiman Perdesaan	50.224	59.767	3.378.743,23	2,59	2,11	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Temon	Permukiman Perdesaan	28.302	33.962	3.731.638,88	5,07	4,07	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
	Permukiman Perkotaan	731	877	135.020,35	7,1	5,7	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Wates	Permukiman Perdesaan	41.866	50.239	3.327.891,4	3,06	2,46	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
	Permukiman Perkotaan	7.318	8.782	814.321,91	4,28	3,44	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Kulon Progo

Berikut sebaran status daya dukung permukiman di Kabupaten Kulon Progo.

Kawasan Pegunungan Menoreh yang terdiri dari kapanewon: Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, dan sebagian Pengasih dengan topografi berlereng dan berbukit berakibat munculnya ancaman tanah longsor dan banjir bandang di musim penghujan, kekeringan di musim kemarau, di musim pancaroba sering terjadi bencana cuaca ekstrem.

Topografi dataran rendah dengan ketinggian antara 100–500 meter dari permukaan air laut yang meliputi kapanewon: Nanggulan, Sentolo, sebagian Pengasih, Lendah, sebagian besar Wates dengan ketinggian 2–15 persen, yang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan memiliki ancaman bencana yang relatif kecil. Ancaman bencana adalah kebakaran permukiman, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, gempa bumi dengan ancaman yang kecil.

Wilayah Pesisir garis pantai Samudera Hindia merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2 persen, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang 24,8 kilometer, kawasan ini terancam bencana banjir, tsunami, dan cuaca ekstrem.

Selain ancaman bencana kawasan, terdapat ancaman bencana yang bisa terjadi tanpa mengenal kawasan. Misalnya kebakaran permukiman, hutan dan lahan, gempa bumi, wabah penyakit, cuaca ekstrem dan perubahan iklim, serta letusan gunung berapi. Walaupun Kabupaten Kulon Progo tidak terdapat gunung berapi, tetapi apabila Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Sleman meletus, dapat menyebabkan gangguan penghidupan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Dampak ekstrem dari perubahan iklim adalah terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim. Tingkat kerentanan perubahan iklim terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu agak rentan, cukup, sangat rentan, dan tidak rentan. Kabupaten Kulon Progo memiliki kerentanan perubahan iklim kategori cukup rentan yang mencapai 95 persen dari luas wilayah keseluruhan. Secara detail, luas tingkat kerentanan perubahan iklim Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Kulon Progo

Tingkat Kerentanan	Luas (ha)	Persentase (%)
Tidak Rentan	470,76	0,82
Agak Rentan	2.398,76	4,18
Cukup Rentan	54.466,33	95
Total	57.335,85	100

Sumber: Sistem Inventarisasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dalam mengukur dan mengelola risiko bencana, Kabupaten Kulon Progo menggunakan indeks risiko bencana. Indeks risiko bencana mencakup penilaian terhadap potensi bencana, kerentanan masyarakat, dan kapasitas untuk mengatasi bencana. Dengan memahami indikator-indikator ini, pemerintah dan pihak terkait dapat mengembangkan strategi mitigasi dan respons bencana yang lebih efektif. Pada 2023, total skor indeks risiko bencana di Kabupaten Kulon Progo sebesar 140,98 yang termasuk ke dalam kelas “risiko tinggi”. Skor tersebut terus mengalami penurunan sejak 2015. Skor total indeks risiko bencana Kabupaten Kulon Progo secara lebih detail disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 20 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023

Tahun	Skor	Kelas Risiko
2015	203,20	Tinggi
2016	203,20	Tinggi
2017	203,20	Tinggi
2018	203,20	Tinggi
2019	203,20	Tinggi
2020	203,20	Tinggi
2021	180,80	Tinggi
2022	157,94	Tinggi
2023	140,98	Tinggi

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam rangka upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah administrasi, pemerintah menyusun indeks ketahanan daerah yang diukur setiap tahun. Pada 2022, indeks ketahanan daerah Kulon Progo mencapai 0,63 dengan kategori “sedang”, kemudian pada 2023 naik menjadi 0,65 atau masih masuk dalam kategori “sedang”.

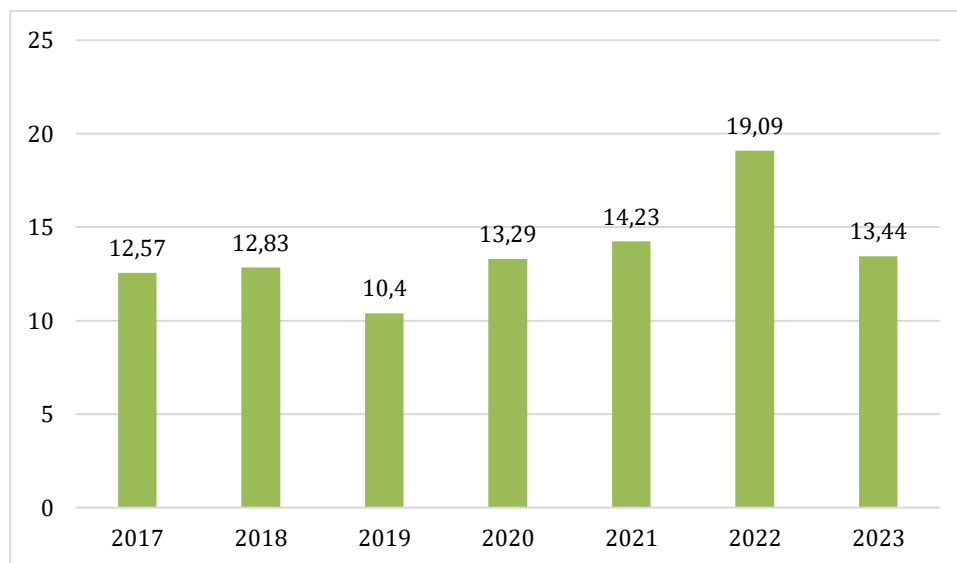
Karena Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih rendah dalam penanganan mitigasi bencana. Kesadaran masyarakat terhadap IKD juga rendah dalam hal penanganan masalah bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

2.1.1.12 Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu

konsumsi pangan. Dalam hal ini penting untuk mengetahui prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*pravelence of undernourishment*).

Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak populasi suatu wilayah yang belum bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. Indikator ini juga membantu dalam memantau kesejahteraan masyarakat dan menilai program yang sudah dilakukan dalam hal gizi dan keamanan pangan. Berdasarkan data di bawah ini, ada peningkatan pada 2019 hingga 2022, sehingga dalam hal ini perlu adanya langkah-langkah yang digunakan untuk meningkatkan produksi pangan, penguatan infrastruktur, dan pendekatan lainnya yang dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dengan pihak lainnya. Pada 2023, kondisi ketercukupan pangan di Kulon Progo beranjak membaik. Hal ini dapat dilihat pada angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang semakin kecil (13,44).



Gambar 2. 10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Uncerourihment) (%) Kabupaten Kulon Progo, 2017-2023

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kinerja urusan pangan diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota*, dengan capaian pada 2014-2023 terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 21 Capaian SPM Urusan Pangan di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan dan cadangan pangan	Ketersediaan Energi Per kapita (kkal/kap/hr)	3.215	3.306	3.494	3.230	3.264	3.479	3.407	3,42	3.461	3.361
		Ketersediaan Protein Per Kapita (gr/kap/hr)	85,38	120,98	120,26	132,65	83,94	102,27	100,80	161,09	102,65	78
		Cadangan pangan pemerintah (ton)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,55	4,55	14,55	24,22
		Penguatan Cadangan Pangan masyarakat (ton)	1.068	1.390	1.719,5	1.496	1.561	1.631,5	1,78	2.537,50	2.602	2.650
2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	91,45	91,45	91,45	91,45	91,52	91,52	91,52	91,45	91.52	91,55
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	98,23	98,55	98,55	176,26	98,60	100,59	100,66	99,38	99.43	99,44
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,9	93,1	93	92	92,30	92,60	92,60	92,82	92,10	92,53
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	95,83	95,92	96,23	93,10	95,06	70,59	100	98	98	98
4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Kalurahan)	14	29	32	36	36	36	36	0	0	0

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat satu variabel yang belum terpenuhi, yakni jumlah persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah. Persediaan pangan yang dianggap optimal di Kabupaten Kulon Progo adalah 120 ton (berdasarkan ketentuan Perda DIY No. 4 tahun 2018 tentang *Pengelolaan Persediaan Pangan*, dan Instruksi Gubernur No. 2 tahun 2018 tentang *Besaran Persediaan Pangan yang Harus Dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota*).

Saat ini (2023), stok persediaan pangan pemerintah daerah baru mencapai 14,55 ton beras. Persediaan pangan pada 2021 sebanyak 4,55 ton, kemudian pada 2022 dan 2023 ditambahkan masing-masing 10 ton, sehingga jumlah persediaan pangan hingga akhir tahun 2023 meningkat menjadi 24,22 ton.

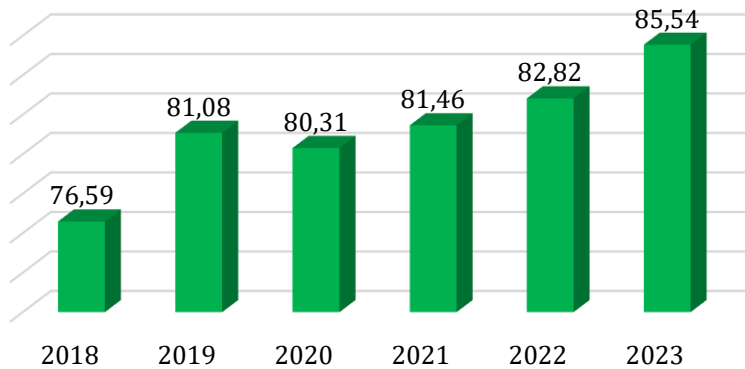
Pencapaian ketersediaan energi telah mencapai 3.461 kilokalori per kapita per hari, melebihi dengan signifikan batas standar yang ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Selain itu, pencapaian ketersediaan protein juga mengalami peningkatan, pada 2022 mencapai 102,65 gram per kapita per hari. Angka ini jauh di atas nilai minimal ketersediaan protein yang ditetapkan sebesar 56 gram per kapita per hari. Berdasarkan perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2022, nilainya mencapai 92,10. Angka ini melebihi standar nasional yang ditetapkan sebesar 90. Untuk indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada 2022, mencapai skor 98. Dalam 100 sampel produk sayuran dan pangan segar yang diperiksa, terdapat dua sampel yang mengandung residu pestisida dan zat kimia.

Tabel 2. 22 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Kulon Progo, 2016-2023

No.	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1	Temon	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wates	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	Panjatan	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Galur	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Lendah	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Sentolo	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	Pengasih	0	1	0	0	0	0	0	0	
8	Kokap	1	1	1	1	1	0	0	0	2020: Kalirejo
9	Girimulyo	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	Nanggulan	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kalibawang	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Samigaluh	2	2	2	2	2	0	0	0	2020: Banjarsari, Kebonharjo
	Jumlah	6	4	3	3	3	0	0	0	

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Untuk melihat tingkat ketahanan wilayah dengan faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan sistem penilaian yang disebut dengan Indeks Ketahanan Pangan. Indeks tersebut merupakan turunan dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Berikut Indeks Ketahanan Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun:



Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Pangan Kulon Progo, 2018-2023

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa sejak 2018 sampai dengan 2023 nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo telah melebihi 75,68, di mana dalam skala kerentanan masuk dalam kategori “sangat tahan” atau memiliki ketahanan pangan paling baik.

Pemerintah telah melakukan intervensi melalui tindakan pemberdayaan masyarakat yang rentan pangan, melalui inisiatif yang dikenal sebagai Program Desa Mandiri Pangan. Langkah ini diambil sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan, dengan menggunakan secara efektif sumber daya yang tersedia atau di bawah kendalinya, untuk mencapai kemandirian pasokan pangan bagi rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan akhir untuk mencapai ketahanan pangan.

Intervensi ini difokuskan ke sepuluh desa yang menjadi lokasi proyek percontohan untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo. Kalurahan-kalurahan ini mencakup Sendangsari dan Sidomulyo (Pengasih), Demangrejo dan Kaliagung (Sentolo), Kebonharjo, Purwoharjo, dan Banjarsari (Samigaluh), dan Kalirejo, Hargotirto, serta Hargowilis (Kokap).

Tabel 2. 23 Jumlah Kelompok Tani, Petani, dan Keanggotaan Kelompok Tani di Kabupaten Kulon Progo, 2016-2023

No.	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kelompok tani	1.968	1.410	1.469	1.506	1.542	1.584	1.610	1.616
a.	Kelas Pemula	533	171	179	192	189	177	159	148
b.	Kelas Lanjut	502	483	482	480	490	528	534	493
c.	Kelas Madya	811	654	684	715	735	743	773	820

No.	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
d.	Kelas Utama	121	102	124	119	128	136	144	155
2.a.	Jumlah petani/buruh tani	139.149	139.228	139.785	138.922	139.710	139.710	141.919	142.619
b.	Jumlah keanggotaan dlm kelompok tani	88.041	72.800	73.183	74.189	76.516	76.560	78.725	79.425
c.	Rasio jumlah anggota kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani (%)	63,27	5,29	52,29	52,26	53,4	54,79	55,47	55,69

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi variasi jumlah kelompok tani pada masing-masing kategori. Selama periode dari 2016 hingga 2023, jumlah kelompok tani mengalami fluktuasi yang disebabkan adanya pendirian kelompok baru serta kenaikan kategori kelompok. Dalam perkembangannya, terjadi pertumbuhan signifikan dalam pembentukan kelompok tani baru, terutama kelompok wanita tani (KWT).

Kualitas konsumsi pangan tercermin melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang dipengaruhi oleh variasi dan keseimbangan dalam konsumsi berbagai jenis makanan oleh kelompok masyarakat. PPH merupakan rangkaian komposisi beragam jenis pangan yang didesain berdasarkan proporsi yang seimbang dari setiap kelompok pangan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, aspek ekonomi, budaya, serta agama.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) umumnya digunakan untuk mengarahkan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan makanan yang optimal di suatu daerah. Selain itu, pangan juga merupakan elemen utama dalam konteks Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yang berbasis pada layanan ekosistem. Pentingnya mencapai skor PPH ini ditegaskan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang *Pangan* serta Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang *Ketahanan Pangan dan Gizi*. Tabel di bawah ini menunjukkan rangkaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo dari 2017 hingga 2023.

Tabel 2. 24 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo, 2017-2023

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Padi-padian	22,2	21,5	21,5	21,5	21,6	20,3	21,3
2.	Umbi-umbian	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2,5	1,9
3.	Pangan Hewani	24	24	24	24	24	24	24
4.	Minyak dan Lemak	2,9	2,9	3	3	3	3	3,9
5.	Buah/Biji Berminyak	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.	Kacang-kacangan	10	10	10	10	10	10	10
7.	Gula	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
8.	Sayur dan Buah	30	30	30	30	30	30	30
9.	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0
	Total	93	92,3	92,6	92,6	92,82	92,1	93,5

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Skor pangan harapan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan capaian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, meskipun belum mencapai angka standar 100. Pada 2023, skor PPH mencapai 93,5. Faktor pendorong tercapainya PPH antara lain kegiatan sosialisasi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) di setiap pertemuan kelompok wanita tani, dengan harapan anggota KWT (ibu-ibu) bisa mengimplementasikan menu-menu B2SA di keluarga mereka. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anak-anak dan remaja kurang menyukai menu-menu sesuai Isi Piringku (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman-B2SA) dan lebih banyak yang menyukai menu siap saji dengan nutrisi kurang seimbang.

2.1.1.13 Pertanian

Komoditas unggulan pangan di Kulon Progo berupa padi, jagung, kedelai, dan umbi kayu, dan kacang tanah. Sepanjang 2018-2023 produktivitas pangan mengalami kenaikan yang disebabkan intensifikasi pada pertanaman dan fasilitasi sarana produksi berupa pupuk dan benih. Selain itu dilakukan kegiatan perawatan tanaman *on farm* intensif dan dengan pemupukan seimbang serta pengendalian hama penyakit tanaman.

Untuk meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya, Pemerintah Daerah memberikan dukungan/fasilitasi sarana produksi berupa bibit dan pupuk, serta penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Sarana prasarana pertanian berupa rehabilitasi jaringan irigasi untuk komoditas tanaman pangan, alat dan mesin budi daya tanaman pangan.

Tabel 2. 25 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya, 2018-2023

No.	Keterangan	Capaian (ku/ha)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produktivitas Padi	66,80	65,15	66,21	66,26	67,15	69,22
2	Produktivitas Jagung	62,72	59,28	62,85	64,36	66,83	67,86
3	Produktivitas Kedelai	14,07	14,37	14,40	15,75	10,85	16,35
4	Produktivitas Ubi Kayu	219,1	219,1	254,18	256,59	257,21	211,74
5	Produktivitas Kacang Tanah	13,64	14,48	14,52	14,78	14,88	15,23

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa secara umum produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di Kabupaten Kulon Progo mengalami tren fluktuatif. Hal tersebut tercermin dari besaran capaian produktivitas yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Namun, pada tahun tertentu mengalami penurunan yang ditemukan dalam periode jangka waktu 2018-2023. Sebagai contoh, produktivitas padi pada 2018 sebesar 66,80 kuintal per hektare, kemudian mengalami penurunan hingga 65.15 kuintal per hektare (2019), namun kembali mengalami peningkatan mulai 2020 sampai 2023.

Hal yang sama terjadi pada komoditas kedelai. Pada 2018 mencapai 14,07 kuintal per hektare, yang meningkat drastis hingga 2021 mencapai 15,75 kuintal per hektare, kemudian kembali turun dengan signifikan menjadi 10,85 kuintal per hektare (2022), namun kembali naik pada 2023 menjadi 16,35 kuintal per hektare.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten, khususnya bagi dinas yang bergerak di bidang agraria untuk dapat meningkatkan kestabilan produktivitas pertanian di Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo mestinya dapat terus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan dapat dioptimalkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, demi menjaga kualitas dan kondisi ekologi.

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo mencapai 446.192 jiwa, terdiri atas 221.249 laki-laki dan 224.943 perempuan, dengan jumlah total keluarga sebanyak 156.775 KK. Selama kurun sembilan tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi.

Penurunan populasi yang paling signifikan terjadi pada 2020, yaitu sebesar minus 0,95 persen dibandingkan 2019. Demikian pula, jumlah keluarga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada beberapa tahun dan penurunan pada tahun lainnya. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.

Selain itu, berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*, penyajian data kependudukan tingkat kabupaten/kota berasal dari data yang telah dikonsolidasikan dan disaring oleh kementerian yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Hal ini berpotensi munculnya data ganda. Kematian yang belum dilaporkan dan anomali lainnya dapat berkontribusi terhadap perluasan data. Oleh karena itu, dilakukan pembersihan data di tingkat nasional yang mengakibatkan penurunan

angka populasi dari tahun ke tahun. Secara rinci, gambaran mengenai data demografi di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 26 Komposisi Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Pertumbuhan, dan Jumlah KK, Kabupaten Kulon Progo, 2014- 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Pertumbuhan	Jumlah Kepala Keluarga
2014	417.473	210.979	206.494	3,54	138.984
2015	436.123	216.651	219.472	4,67	145.152
2016	445.293	221.220	224.073	2,10	148.879
2017	446.028	221.380	224.648	0,17	149.265
2018	448.114	222.014	226.100	0,47	150.954
2019	447.246	221.299	225.947	-0,19	151.911
2020	443.003	219.505	223.498	-0,95	152.251
2021	442.874	219.347	223.527	-0,03	152.251
2022	443.591	219.776	223.815	0,16	155.219
2023	446.192	221.249	224.943	0,59	156.775

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2023

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

Kondisi penduduk menurut umur pada 2023 diketahui bahwa jumlah penduduk secara umum mengalami kenaikan, namun untuk kelompok umur 25-29 tahun serta kelompok umur 55-75+ mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	27.039	28.073	27.980	27.003	27.247	26.941	26.372	25.506	19.970	24.546
5-9	29.480	32.165	31.885	32.075	31.473	30.770	30.322	29.933	29.111	29.217
10-14	29.481	31.048	30.558	31.350	31.978	31.783	32.377	32.561	31.616	31.861
15-19	28.952	32.468	32.339	32.266	32.343	31.931	31.299	31.065	31.574	31.819
20-24	29.097	30.263	31.887	32.129	32.007	32.179	32.480	32.196	31.822	31.321
25-29	26.659	27.282	27.890	28.525	29.447	29.946	30.860	31.666	31.574	31.482
30-34	30.069	31.465	31.129	29.741	28.653	27.870	27.403	27.656	29.312	29.365
35-39	30.203	31.354	32.368	32.666	32.250	31.790	31.787	30.829	28.578	28.782
40-44	29.018	30.573	31.429	30.894	31.051	31.593	31.412	31.665	32.065	32.366
45-49	32.024	32.182	32.440	32.123	31.234	29.961	30.280	30.589	30.703	30.861
50-54	28.424	29.164	30.270	30.934	31.703	32.365	31.457	31.153	30.533	30.626
55-59	24.967	26.389	27.230	27.789	28.403	27.975	28.167	28.725	30.553	30.490
60-64	19.430	20.212	21.461	21.945	23.109	24.008	24.949	25.199	26.919	26.734
65-69	15.555	15.501	16.299	16.948	17.265	18.094	18.366	19.049	21.088	20.765
70-74	14.645	13.953	14.314	13.387	13.568	13.561	12.984	13.261	14.780	14.312
75+	22.430	24.031	25.814	26.253	26.383	26.479	22.488	21.821	23.516	21.645
Total	417.473	436.123	445.293	446.028	448.114	447.246	443.003	442.874	443.591	446.192

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan komposisi jenis kelamin, di Kabupaten Kulon Progo pada 2023 terdapat lebih banyak penduduk perempuan (50,41 persen) daripada laki-laki (49,59 persen). Proporsi ini sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan 2022.

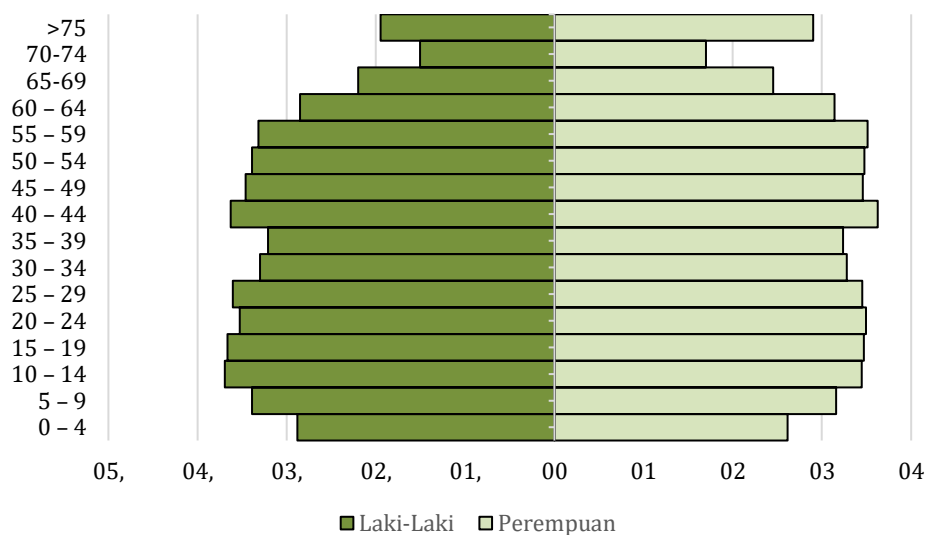
Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) mencapai 98,36, artinya terdapat 98 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Rincian jumlah penduduk berdasarkan sex ratio dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 28 Sex Ratio di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
2014	206.494	210.979	97,87
2015	216.651	219.472	98,71
2016	221.220	224.073	98,73
2017	221.380	224.648	98,55
2018	222.014	226.100	98,19
2019	221.299	225.947	97,94
2020	219.505	223.498	98,21
2021	219.347	223.527	98,13
2022	219.776	223.815	98,19
2023	221.249	224.943	98,36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2023

Penggambaran komposisi penduduk secara efektif dapat direpresentasikan melalui piramida penduduk. Bagan tersebut berguna untuk mengamati proporsi penduduk dari jenis kelamin per kelompok umur. Lebih lanjut, piramida penduduk Kulon Progo pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

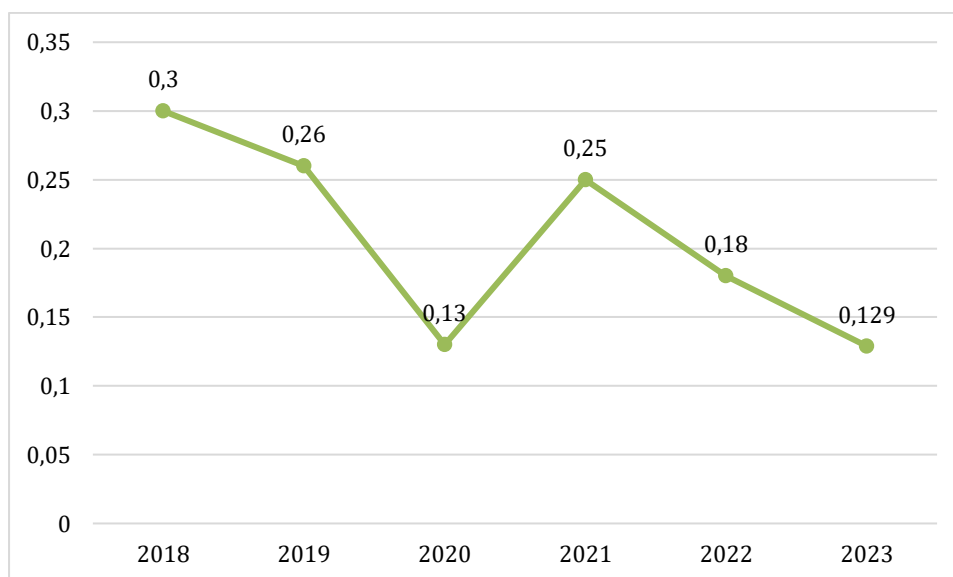


Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo, 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2023

Aspek *gender* merupakan salah satu komponen penting yang berkaitan dengan demografi dan komposisi penduduk. Dalam hal ini, *gender* merupakan sifat serta perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan, yang dibentuk secara sosial maupun budaya. *Gender* berlaku secara temporer bergantung pada tempat dan waktunya. Salah satu komponen *gender* yang tercakup dalam aspek demografi dan komposisi penduduk merupakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks ini merupakan indikator yang ditunjukkan untuk melihat kesenjangan *gender* dengan merujuk pada metodologi oleh UNDP. Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan potensi capaian pembangunan manusia yang terhambat atau hilang akibat adanya kesenjangan gender. IKG berfokus pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai IKG, maka akan semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan.



Gambar 2. 13 Indeks Ketimpangan Gender di Kulon Progo, 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan grafik tersebut, maka dapat diketahui nilai indeks ketimpangan *gender* secara umum di Kabupaten Kulon Progo mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Pada 2018, IKG berada pada angka 0,3 kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,129 (2023). Capaian tersebut merupakan capaian terendah selama periode 2018-2023. IKG mengalami kenaikan pada 2021 menjadi 0,25, dan kembali mengalami penurunan pada 2022.

2.1.2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk di Kabupaten Kulon Progo digambarkan sebagai berikut: wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi terletak di Kapanewon Pengasih, Sentolo, dan

Wates. Pada 2023, kepadatan penduduk kabupaten ini mencapai 773 jiwa per kilometer persegi. Khusus di Kapanewon Wates, kepadatan penduduknya menduduki peringkat tertinggi, dengan angka 1.426,16 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan itu berarti 3,55 kali padat dibandingkan dengan Kapanewon Samigaluh yang merupakan kapanewon dengan kepadatan terendah (401,89 jiwa per kilometer persegi).

Data tersebut dapat menjelaskan bahwa Kapanewon Wates telah berperan sebagai pusat aktivitas dan pelayanan, meskipun wilayahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain se-Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Lendah dan Galur, meskipun jumlah penduduknya tidak sebanyak Sentolo dan Pengasih, ternyata memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Data tentang kepadatan penduduk itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 29 Kepadatan Penduduk Per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Kapanewon	Luas Wilayah (km ²)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Temon	36,3	726,12	785,43	799,81	801,68	809,97	811,21	802,09	802,34	802,98	811,07
Wates	32	1426,16	1488,13	1537,00	1.537,94	1.541,43	1.539,85	1.529,66	1.529,63	1.534	1426,16
Panjatan	44,59	806,97	854,68	874,70	873,96	879,59	876,79	868,92	869,79	873,27	879,19
Galur	32,91	958,16	986,24	1000,61	1.001,85	1.009,05	1.004,88	994,9	995,11	995,17	998,75
Lendah	35,59	1104,94	1136,86	1157,07	1.160,58	1.167,79	1.166,89	1.154,34	1.155,04	1.158,78	1162,83
Sentolo	52,65	892,33	927,94	953,92	953,79	960,2	959,03	948,89	950,47	952,52	956,24
Pengasih	61,66	782,14	814,99	834,58	835,16	845,81	849,81	850,75	851,91	856,05	863,40
Kokap	73,8	463,77	486,67	495,11	495,68	497,47	497,16	490,7	489,36	488,02	489,08
Girimulyo	54,9	434,15	450,38	459,31	459,13	459,71	457,31	449,71	448,47	448,94	450,13
Nanggulan	39,61	740,52	762,18	775,21	776,04	782,1	782,44	779,45	779,68	783,74	789,85
Samigaluh	69,29	391,50	419,58	414,79	415,85	415,61	410,99	406,16	405,44	403,51	401,91
Kalibawang	52,96	545,88	577,32	586,80	586,12	584,57	578,74	567,07	564,14	563,14	561,35
Jumlah	586,26	712,07	743,91	759,55	760,17	764,36	762,85	755,64	755,42	756,65	761,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (diolah), 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses jangka panjang, yang mengembangkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi dan menyediakan barang dan jasa kepada warganya. Secara umum, perkembangan ekonomi dapat diukur melalui laju pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan. Artinya, suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDRB-nya melebihi angka pada tahun sebelumnya.

Pada 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo meningkat, dari 10,83 persen menjadi 13,49 persen. Kenaikan tersebut tergolong “sangat tinggi”, jika ditinjau dengan standar angka pertumbuhan nasional. Sumbangan terbesar pada tahun tersebut diberikan oleh sektor konstruksi (68,64 persen). Kondisi ini dipengaruhi oleh proses penyelesaian pembangunan bandara YIA dan *underpass* JJLS. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak dapat dipertahankan karena pandemi Covid-19. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo saat itu bergerak tajam hingga menyentuh angka minus 3,45 persen. Hampir seluruh sektor mengalami penurunan (negatif), juga untuk sektor konstruksi yang selama ini berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kondisi tersebut, hanya dua sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan/kegiatan sosial. Kedua sektor tersebut ditengarai sebagai sektor yang paling dibutuhkan dan justru berkembang selama masa pandemi. Sektor informasi dan komunikasi meningkat tajam karena adanya anjuran *work from home* dan pembatasan-pembatasan kegiatan yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial berperan penting sebagai akibat dari kebutuhan penduduk terhadap pelayanan penyembuhan serta penularan Covid-19.

Meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan, pada 2021 Kabupaten Kulon Progo memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Hal ini ditandai dengan kembalinya sektor-sektor yang tumbuh positif. Di lain pihak, sektor pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial belum kembali pulih. Sektor-sektor lain yang semula jatuh ke titik nadir, secara perlahan kini sudah mulai tumbuh.

Pertumbuhan pesat dapat dilihat dari sektor konstruksi, yang bergerak dari angka minus 18,44 persen menjadi positif 4,03 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bergerak dari minus 5,13 persen menjadi positif 10,46 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kegiatan finalisasi pembangunan bandara dan pembangunan *underpass* JJLS yang dilanjutkan dengan mulainya kegiatan operasional.

Operasional hasil sektor konstruksi tersebut dilanjutkan dengan meningkatnya sektor transportasi dan pergudangan menjadi 31,76 persen (2022). Kondisi tersebut mengindikasikan akan adanya stabilitas pengadaan prasarana hingga tahap operasional secara komersial. Secara umum pada 2022, angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo sudah kembali pulih, yang ditandai dengan keseragaman pertumbuhan positif di seluruh sektor lapangan usaha.

Tabel 2. 30 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kulon Progo (persen), 2014-2023

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,99	1,67	1,49	1,94	1,56	1,73	0,62	1,61	1,86	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	1,49	0,55	1,46	13,83	26,64	3,26	-8,56	-2,29	1,33	6,55
C	Industri Pengolahan	8,55	3,52	5,98	7,68	7,90	5,26	-3,49	0,95	2,13	4,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	2,96	14,89	3,73	3,90	8,06	-1,27	2,46	6,61	7,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,21	2,18	2,28	4,65	5,84	8,88	2,07	6,23	4,32	3,23
F	Konstruksi	5,17	4,30	6,21	12,25	59,73	68,64	-18,44	4,03	3,13	4,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	6,52	6,59	8,06	6,92	5,19	-1,59	1,54	6,45	3,93
H	Transportasi dan Pergudangan	2,05	3,61	2,57	3,60	6,97	10,61	5,51	9,65	31,76	18,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,78	5,37	5,57	5,17	6,87	8,22	-5,13	10,46	12,73	7,47
J	Informasi dan Komunikasi	7,37	5,44	8,07	5,86	7,33	5,56	17,17	17,4	5,11	4,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,24	8,09	4,22	1,08	6,44	8,02	-4,88	1,38	5,43	10,24
L	Real Estate	5,27	6,25	5,26	6,38	5,51	6	4,65	0,53	2,93	3,08
M, N	Jasa Perusahaan	6,72	6,79	3,20	5,21	5,87	7,75	2,58	7,9	6,97	7,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,02	5,02	6,21	4,79	4,35	3,42	-3,26	-1,96	2,89	2,02
P	Jasa Pendidikan	7,08	7,24	3,38	7,16	5,49	4,56	1,24	4,36	1,18	3,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,08	7,14	5,39	6,68	5,67	5,61	18,27	4,22	4,56	5,28
R, S, T, U	Jasa Lainnya	5,89	8,02	5,21	4,41	5,98	6,56	-16,28	16,45	13,94	5,43
PDRB ADHK		4,57	4,62	4,76	5,97	10,83	13,49	-3,45	4,37	6,57	5,65

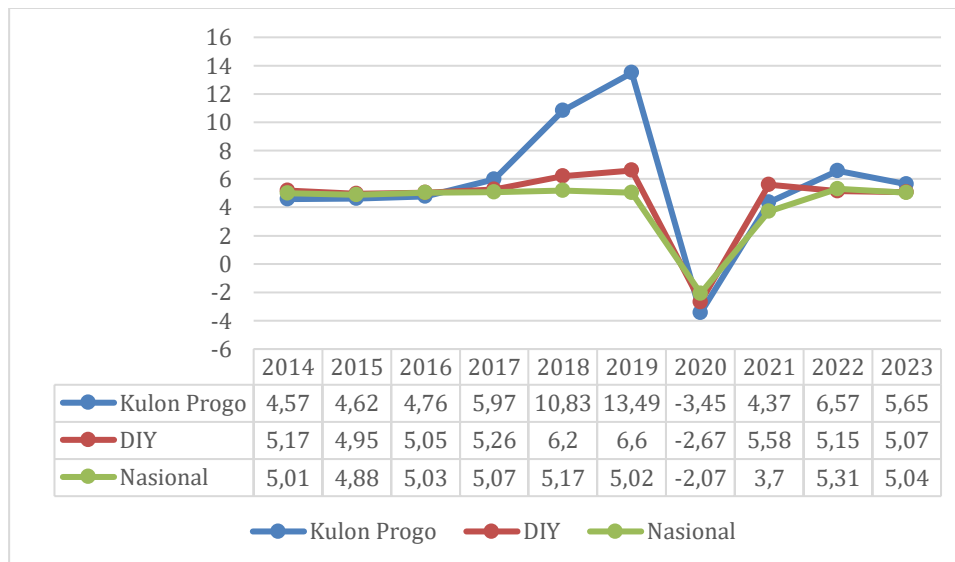
Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Keterangan: *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi seluruh daerah di Indonesia mengalami kontraksi. Tak terkecuali di Kabupaten Kulon Progo yang mengalami kontraksi sebesar 3,45 persen. Hal tersebut disebabkan karena pandemi Covid-19 yang berdampak negatif pada perekonomian daerah. Pada 2022, ekonomi di Kulon Progo tumbuh sebesar 6,57 persen. Hal ini didasarkan pada proses perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi, secara nasional dilakukan kebijakan pelonggaran mobilitas.

Pada 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,92 poin menjadi 5,65. Dibandingkan dengan D.I. Yogyakarta dan nasional, pertumbuhan ekonomi di Kulon

Progo masih lebih tinggi. Berikut perbandingan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dengan nasional, DIY, serta kabupaten/kota di DIY.



Gambar 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, Prov. DIY, Nasional, 2024

Selaras dengan grafik di atas, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY, Kulon Progo juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 31 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023

No.	Kab/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kulon Progo	4,57	4,62	4,76	5,97	10,83	13,49	-3,45	4,37	6,57	5,65
2	Kab. Bantul	5,04	4,97	5,05	5,10	5,47	5,53	-1,65	4,99	5,20	5,06
3	Kab. Gunungkidul	4,54	4,82	4,88	5,01	5,16	5,34	-0,68	5,29	5,37	5,04
4	Kab. Sleman	5,30	5,18	5,25	5,35	6,42	6,48	-4,05	5,61	5,15	5,09
5	Kota Yogyakarta	5,28	5,09	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42	5,16	5,12	5,08

Sumber: BPS DIY, 2023

2.2.1.2 Rasio Gini

Pertumbuhan merupakan prasyarat penting untuk mempercepat kemajuan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Inti dari keberhasilan pembangunan terletak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan stabilitas sosial yang dinamis. Hal ini memerlukan dukungan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua aspek ini akan berdampak pada skala makro dalam ekonomi.

Investasi adalah salah satu elemen yang berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga peningkatan investasi akan mengangkat nilai PDRB. Investasi juga berkorelasi positif dengan kemampuan konsumen untuk berbelanja. Dengan tumbuhnya investasi, akumulasi produksi juga akan meningkat. Upaya meningkatkan produksi membutuhkan tambahan tenaga kerja, yang berpotensi mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

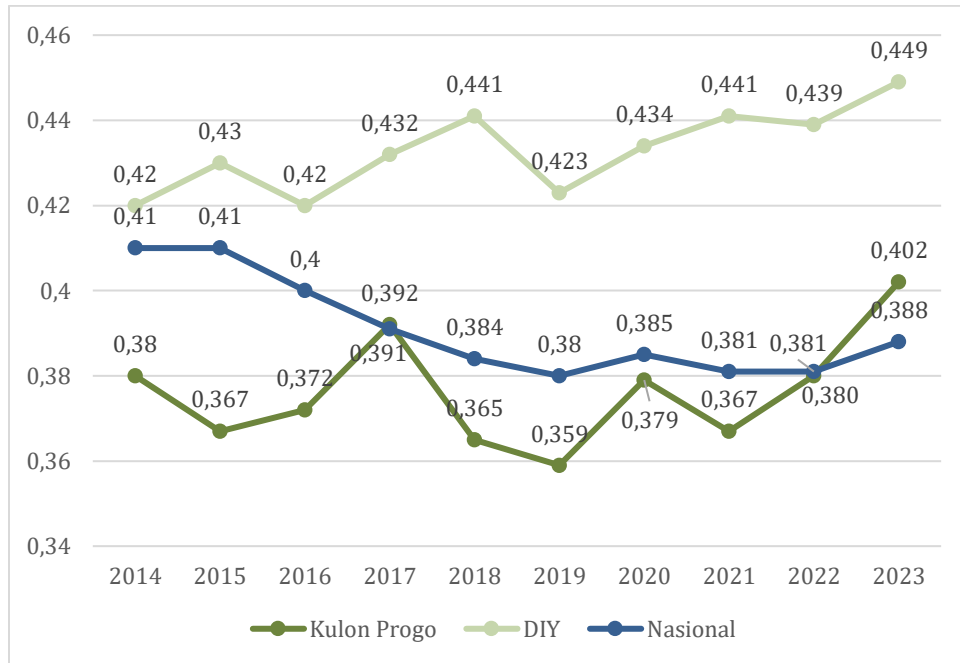
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Jika hanya fokus pada pertumbuhan, dapat memicu munculnya dua masalah krusial: ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan. Ketidaksetaraan ekonomi merujuk pada disparitas dalam distribusi pendapatan. Ketidaksetaraan ini bermula dari ketidakmerataan distribusi pendapatan yang mengakibatkan adanya disparitas pendapatan akibat perbedaan tingkat kesejahteraan di antara kelompok masyarakat.

Ketidaksetaraan ekonomi dapat semakin memburuk apabila kelompok masyarakat berpendapatan rendah terus mengalami pertumbuhan yang lambat atau bahkan menurun, sementara kelompok berpendapatan tinggi mengalami pertumbuhan yang cepat. Jika masalah ini dibiarkan tanpa tindakan, dampaknya berujung pada ketidakpuasan sosial dan politik yang berpotensi merugikan.

Sebagai inti dari semuanya, kesenjangan ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, serta tingkat kemiskinan, menjadi dua masalah yang signifikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun isu pemerataan akan selalu hadir dalam tahap awal pembangunan, tetapi penting untuk terus mengendalikan agar dampaknya tidak meluas.

Ketimpangan yang semakin besar bisa menghasilkan ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menciptakan keresahan dan akhirnya berpotensi memicu berbagai konflik. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini.

Indeks Gini di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2014-2022 menunjukkan variasi nilai yang fluktuatif, yakni menurun pada 2015, 2018, 2019, dan 2021. Kemudian, terdapat peningkatan nilai rasio mulai 2017, 2020, 2022 dan 2023. Secara umum, pada periode 10 tahun terakhir, Kabupaten Kulon Progo memiliki ketimpangan yang rendah dibandingkan DIY dan nasional. Namun, pada tahun 2023, ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo semakin melebar yang ditunjukkan dengan nilai Rasio Gini yang meningkat melebihi nilai nasional. Meskipun demikian, besaran Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo masih berada di bawah nilai Rasio Gini DIY.



Gambar 2. 15 Rasio Gini Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, Prov. DIY, Nasional, 2023

Keterangan : *) Angka sementara

**) angka sangat sementara

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-DIY, pada periode 2014 hingga 2015 Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai Rasio Gini terendah dan menempati peringkat kedua terendah setelah Gunungkidul sejak 2016 hingga 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Rasio Gini Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023

No.	Kab/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kulon Progo	0,382	0,367	0,372	0,392	0,365	0,359	0,379	0,367	0,380	0,402
2	Kab. Bantul	0,320	0,376	0,397	0,413	0,448	0,422	0,418	0,441	0,410	0,454
3	Kab. Gunungkidul	0,296	0,319	0,334	0,340	0,337	0,325	0,352	0,323	0,316	0,343
4	Kab. Sleman	0,412	0,446	0,394	0,406	0,425	0,417	0,42	0,425	0,418	0,433
5	Kota Yogyakarta	0,396	0,446	0,429	0,446	0,420	0,371	0,421	0,464	0,519	0,454

Sumber: BPS DIY, 2023

2.2.1.3 Kemiskinan

Penduduk dikategorikan “miskin” jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha

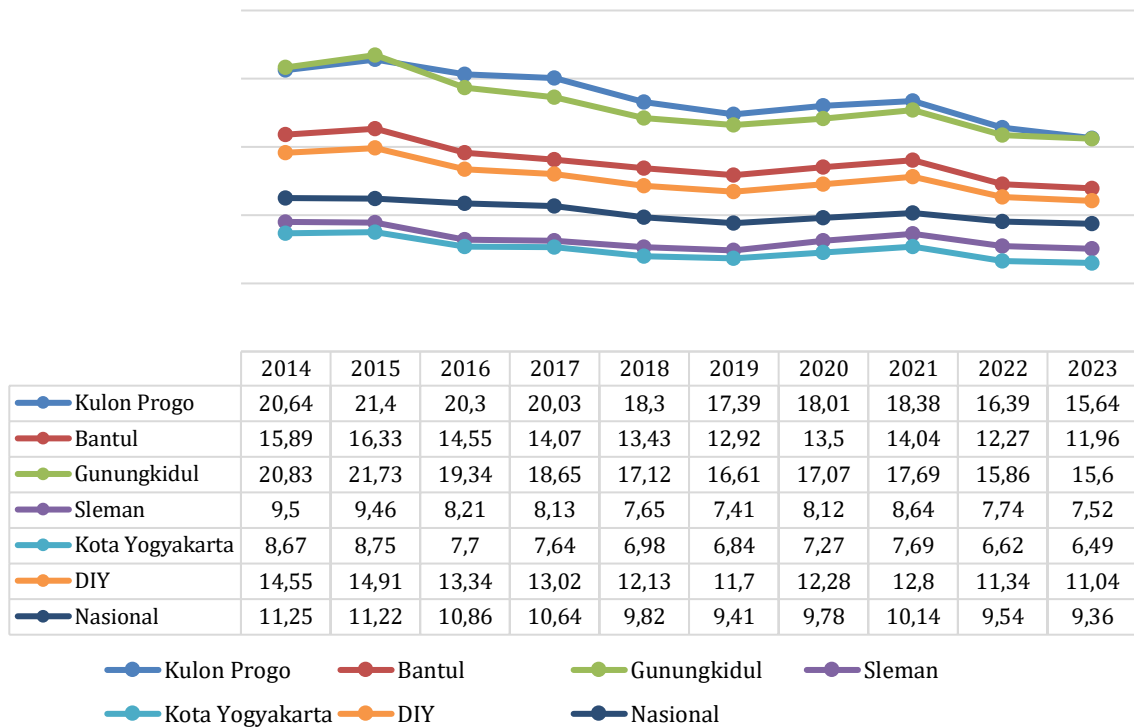
untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan nonmakanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan (dari sisi ekonomi) untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. BPS menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan nonmakanan. Pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp416.870,00 (2023), di mana angka ini naik dari Rp381.666,00 (2022). Garis kemiskinan sebesar Rp416.870,00 berarti bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp416.870,00 dalam sebulan, termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2014-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, garis kemiskinan tersebut selalu di bawah standar DIY dan nasional. Jika dibandingkan dengan 2022, dengan garis kemiskinan sebesar Rp416.870,00 per kapita per bulan, maka telah terjadi kenaikan sebesar 9,22 persen. Pada saat yang sama, kenaikan ini lebih rendah jika dibandingkan kenaikan di DIY yang mencapai 9,84 persen namun lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 8,90 persen.

Pada 2014-2019 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo. Namun, pada tahun 2020-2021 jumlah penduduk miskin kembali mengalami kenaikan karena adanya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tidak bertahan lama karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo kembali turun pada tahun berikutnya. Secara persentase, penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY. Data kemiskinan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Gambar 2. 16 Angka Kemiskinan Kulon Progo, DIY, dan Nasional (%), 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, Prov. DIY, Nasional, 2023

Tabel 2. 33 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di DIY, 2014-2023

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)										Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	65.575	273.436	297.353	312.403	323.105	333.781	353.807	360.202	381.666	416.870	85,00	85,00	84,34	84,17	77,72	74,62	78,06	81,14	73,21	70,74
Bantul	301.986	301.986	332.057	347.476	369.480	381.538	405.613	418.265	445.511	488.340	153,00	153,00	142,76	139,67	134,84	131,15	138,66	146,98	130,13	128,51
Gunungkidul	243.847	243.847	264.637	277.261	288.748	301.125	319.851	325.907	350.739	382.249	148,00	148,00	139,15	135,74	125,76	123,08	127,61	135,33	122,82	122,24
Sleman	306.961	306.961	334.406	351.331	370.127	382.868	411.610	422.933	450.876	491.652	110,00	110,00	96,63	96,75	92,04	90,17	99,78	108,93	98,92	97,50
Kota Yogyakarta	366.520	366.520	401.193	423.815	467061	495.562	533.423	556.674	601.905	662.267	37,00	37,00	32,06	32,20	29,74	29,45	31,62	34,07	29,68	29,48
D.I.Yogyakarta	321.056	347.721	354.084	374.009	409.744	432.026	404.861	482.855	521.673	573.022	533,00	486,00	494,94	488,53	460,10	448,47	475,73	506,45	454,76	448,47
Nasional	302.735	330.776	354.386	374.478	401.220	425.250	454.652	472.525	505.469	550.458	27.730	28.510	28.010	27.770	25.950	25.140	26.420	27.540	26.160	25.900

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023

Tabel 2. 34 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DIY, 2014-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)										Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	3,22	4,16	3,55	2,79	2,47	2,72	3,32	3,01	2,32	2,54	0,69	1,24	1,00	0,64	0,56	0,61	0,86	0,75	0,56	0,61
Bantul	2,44	3,16	2,02	2,21	2,17	1,87	1,85	2,24	2,11	1,79	0,59	0,89	0,41	0,56	0,46	0,43	0,43	0,54	0,50	0,44
Gunungkidul	3,74	4,55	4,16	3,36	3,84	2,58	2,68	2,98	2,63	2,71	1,03	1,33	1,30	0,79	1,16	0,53	0,63	0,76	0,67	0,60

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)										Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sleman	1,15	1,46	1,36	1,23	0,98	1,13	1,37	1,26	0,80	0,86	0,22	0,37	0,34	0,28	0,20	0,23	0,33	0,32	0,27	0,32
Kota Yogyakarta	1,14	1,06	1,05	1,58	0,98	0,85	1,19	1,07	1,18	1,34	0,26	0,23	0,19	0,48	0,34	0,20	0,20	0,21	0,13	0,18
D.I.Yogyakarta	2,35	2,93	2,30	2,19	2,09	1,74	1,94	2,42	2,01	1,72	0,61	0,83	0,59	0,55	0,50	0,38	0,46	0,65	0,50	0,38
Nasional	1,75	1,84	1,94	1,83	1,71	1,55	1,61	1,71	1,59	1,53	0,44	0,51	0,52	0,48	0,44	0,37	0,38	0,42	0,39	0,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo (2014- 2019) secara umum terus menurun, tetapi angkanya kembali mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 18,01 persen, dan kembali meningkat menjadi 18,38 persen (2021). Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2023 selalu berada di atas rata-rata DIY. Oleh karena itu, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi kantong kemiskinan di DIY. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo cukup bervariasi. Salah satu penyebabnya adalah pendapatan yang rendah akibat keterbatasan keterampilan atau jenjang pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten di Kulon Progo selama tahun 2014-2023 cenderung fluktuatif. Kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2023 dimana sebelumnya konsisten turun dalam periode 2020-2022. Artinya dalam periode 2022-2023 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin Kulon Progo semakin jauh dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2014-2023 cenderung fluktuatif. Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin mengalami peningkatan pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan variasi pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin atau semakin jauh antara penduduk miskin tertinggi dan penduduk miskin terendah.

Penanggulangan kemiskinan masih terus menjadi isu penting di Kabupaten Kulon Progo. Sejak 2007, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, cita-cita penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan yang merata dan berkeadilan sudah menjadi tujuan strategis Kabupaten Kulon Progo.

Rencana jangka panjang tersebut juga selalu dijabarkan ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari sisi target, penurunan angka kemiskinan yang diinginkan pemerintah Kabupaten Kulon Progo hingga 2025, sebagaimana tercantum dalam RPJPD, cukup besar, yaitu tidak lebih dari lima persen penduduk di Kulon Progo.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dilakukan untuk menjadi panduan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun program, anggaran, hingga strategi penanggulangan kemiskinan. Lebih jauh, dokumen RPKD merupakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang *Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota*.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencerminkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja. Dalam rentang waktu 2014-2023, TPT di Kabupaten Kulon Progo selalu berada di bawah nilai rata-rata TPT DIY dan nasional. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa TPT Kulon Progo jauh lebih rendah daripada angka TPT nasional, bahkan nyaris setengahnya.

Namun demikian, pada 2020 terjadi kenaikan yang signifikan atas nilai TPT Kulon Progo, yaitu naik dari 1,80 persen dari tahun sebelumnya menjadi 3,71 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada tingkat DIY dan nasional, akibat dari Covid-19. Pada 2023, TPT Kulon Progo kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu menurun sebesar 0,40 persen menjadi 2,40 persen.

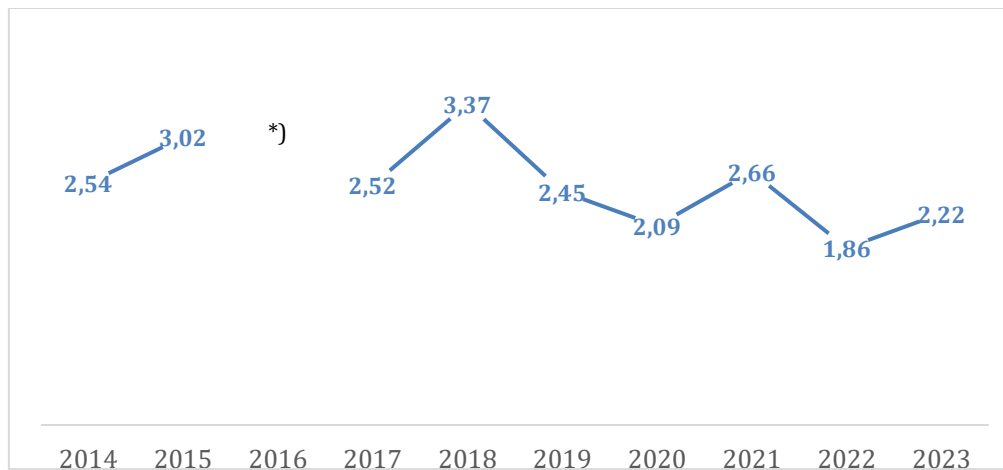
Tabel 2. 35 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023

No.	Kab/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kulon Progo	2,88	3,72	2,37	1,99	1,51	1,80	3,71	3,69	2,80	2,40
2	Kab. Bantul	2,57	3,00	1,95	3,12	2,76	3,07	4,06	4,04	3,97	3,78
3	Kab. Gunungkidul	1,61	2,90	1,95	1,65	2,11	1,96	2,16	2,20	2,08	2,09
4	Kab. Sleman	4,21	5,37	3,64	3,51	4,41	3,98	5,09	5,17	4,78	4,47
5	Kota Yogyakarta	6,35	5,52	3,66	5,08	6,24	4,95	9,16	9,13	7,18	6,07
	DIY	3,33	4,07	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69
	Indonesia	5,94	6,18	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS DIY, 2023

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di suatu daerah, rasio kewirausahaan dapat menjadi indikator yang mewakili. Rasio kewirausahaan membandingkan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Semakin tinggi rasio kewirausahaan daerah, maka semakin tinggi pula daya saing ekonomi lokal yang akan memberikan dampak ganda bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan kesempatan kerja, dan kenaikan jumlah produksi barang/jasa.

Rasio kewirausahaan Kulon Progo selama 10 tahun ini berada di kisaran dua persen. Pada 2023 rasio kewirausahaan mencapai 2,22 persen.



Gambar 2. 17 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kulon Progo (%), 2014-2023

Sumber: BPS, 2023

*) Tidak ada data

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2020-2023 angka IPM Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren meningkat. Tabel berikut ini perkembangan indikator komponen IPM di Kabupaten Kulon Progo pada rentang 2020-2023, di mana sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sejak 2014 sampai 2023 seluruh komponen IPM mengalami kenaikan.

Tabel 2. 36 Indikator Komponen IPM di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.90	75.00	75.03	75.06	75.12	75.20	75.29	75.32	75.33	75.35
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.27	13.55	13.97	14.23	14.24	14.25	14.26	14.27	14.38	14.48
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.20	8.40	8.50	8.64	8.65	8.66	8.86	9.02	9.17	9.18
4	Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)	8.480	8.688	8.938	9.277	9.698	10.275	10.041	10.069	10.511	10.723
5	IPM	70,68	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44	74,48	74,73	75,48	75,82

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pencapaian IPM berdasarkan kapanewon di Kulon Progo menunjukkan variasi nilai yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di setiap wilayah. Dalam hal ini, Kapanewon Wates memiliki IPM tertinggi pada 2013 dan 2018, dengan nilai 72,79 dan 77,89. Sementara itu, Kapanewon Kokap memiliki IPM terendah dengan nilai 67,03 pada 2013 dan 69,18 pada 2018.

Angka Harapan Hidup dan pengeluaran per kapita di Kapanewon Kokap pada 2018 juga yang terendah di Kabupaten Kulon Progo. Angka Harapan Hidup mencapai 72,03 tahun, dan pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp8,6 juta. Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas hidup dan daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

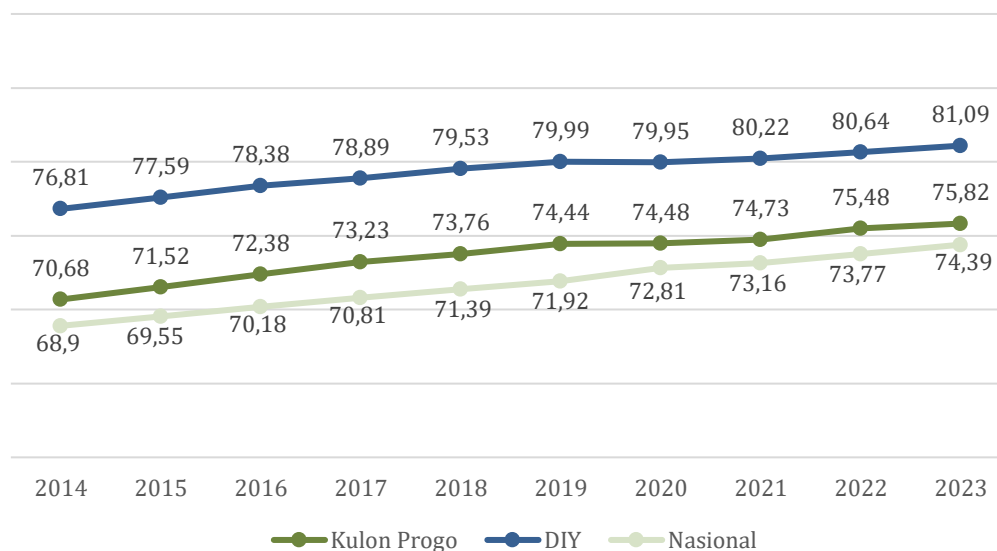
Untuk indikator pendidikan, Kapanewon Pengasih dan Panjatan menduduki peringkat tertinggi dalam hal pencapaian angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan Kapanewon Samigaluh dan Girimulyo menduduki peringkat terendah. Data ini menunjukkan kondisi tingkat pendidikan dan akses pendidikan di berbagai wilayah.

Tabel 2. 37 Keterbandingan Komponen IPM di DIY dan Nasional, 2022-2023

Kab/Kota	Usia Harapan Hidup (tahun) *)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Pengeluaran riil per kapita		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kulon Progo	75,33	75,35	14,38	14,48	9,17	9,18	10.511	10.723	75,46	75,82
Bantul	74,61	74,64	15,48	15,61	9,59	9,79	16,002	16.524	80,69	81,74
Gunungkidul	74,75	74,76	13,33	13,39	7,31	7,32	9.874	10.065	70,96	71,46
Sleman	75,17	75,26	16,76	16,77	10,94	11,01	16.638	16.976	84,31	84,86
Yogyakarta	75,43	75,52	17,61	17,62	11,89	12,11	19.319	19.920	87,69	88,61
DIY	75,11	75,18	15,65	17,62	9,75	9,83	14.482	14.924	80,64	81,09
Nasional	73,70	73,93	13,10	13,15	8,69	8,77	11.479	11.899	73,77	74,39

*) SP2020

Sumber: BPS Kulon Progo, 2023



Gambar 2. 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, 2023

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, DIY, dan Nasional dalam kurun waktu 2017-2023. Pada grafik tersebut terlihat bahwa IPM Kulon Progo memiliki pola (*pattern*) yang searah dengan IPM DIY maupun Nasional. Secara umum, perkembangan IPM Kulon Progo dari 2017 sampai dengan 2023 selalu mengalami pola yang semakin meningkat, dengan nilai kategori tinggi (75,82) pada 2023, dibandingkan dengan angka IPM pada 2017 yang hanya sebesar 73,23. Posisi IPM Kulon Progo berada di antara nasional dan DIY yang berarti lebih tinggi daripada nasional, namun masih di bawah DIY.

2.2.2.2. Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kondisi kesehatan yang baik menjadi dasar untuk menjalani kehidupan yang layak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan setiap warga negara. Meskipun pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan tanggung jawab individu, karakteristik kesehatan yang kompleks mengharuskan peran pemerintah dalam menjamin: 1) ketersediaan layanan kesehatan sesuai kebutuhan, dan 2) pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu. Karena pentingnya kesehatan dan kompleksitas layanan kesehatan, pemerintah harus memiliki peran yang terstandarisasi dalam memastikan pemenuhan kebutuhan kesehatan warga negara.

Pengukuran derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan menggunakan indeks keluarga sehat (IKS). Pada tahun 2023, penilaian indeks keluarga sehat di Kabupaten Kulon Progo cukup baik dengan capaian melebihi target. Dari target 0,29, realisasi tercapai 0,31.

Pemerintah telah mengatur pengadaan layanan kesehatan oleh Pemda melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang *Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan* yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.

Melalui, Keputusan Bupati Kulon Progo No. 30/A/2020 tentang *Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Kabupaten Kulon Progo telah memulai komitmennya untuk memenuhi standar layanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2. 38 Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023

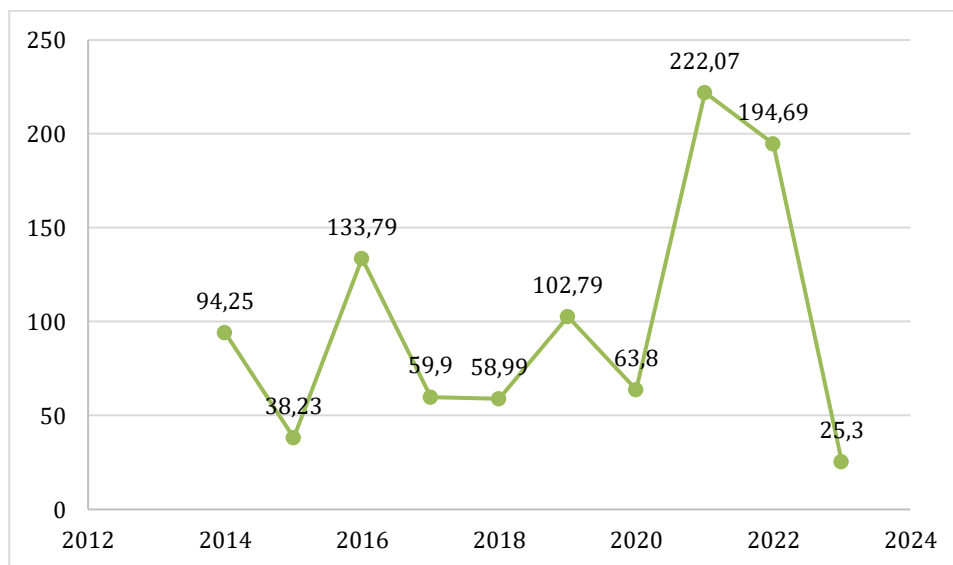
No.	Aspek	Uraian	Satuan	Capaian (Jumlah)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Orang	4713	4713	4400	3.707	3.881

No.	Aspek	Uraian	Satuan	Capaian (Jumlah)				
				2019	2020	2021	2022	2023
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	4853	4734	4475	3.802	3.937
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi	4492	4021	3875	3.819	3.891
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	23.800	13.963	18.369	15.240	19.194
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	12.659	31.227	27.517	30.630	47.643
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	35.525	34.227	31.885	49.407	64.342
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	24.820	21.262	36.682	38.070	46.794
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2.327	2.977	4.771	4.469	10.683
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1.334	1.796	2.489	2.415	4.030
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	592	1.315	1.207	1.272	1.419
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar,	Orang	3.826	2.803	3.251	3.177	3.910
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (LP) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Orang	5.088	3.008	3.620	4.010	4.590

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi 2018-2021

Cakupan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas merupakan satu di antara pilar penting dalam konteks pembangunan manusia. Hal tersebut menjadi *urgent* karena cakupan pelayanan kesehatan dapat menjadi indikator untuk mengetahui taraf kualitas hidup, tingkat kesetaraan sosial, dan ketahanan masyarakat. Berdasarkan 12 aspek pelayanan

kesehatan di atas, terdapat persoalan yang dapat disoroti. Satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan mental, terutama bagi orang dengan gangguan jiwa berat. Sejak 2019, diketahui bahwa cakupan pelayanan bersifat fluktuatif. Selain dipengaruhi oleh jumlah sasaran, jangkauan pelayanan terhadap penderita, juga disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakmampuan dalam melakukan pengobatan secara teratur. Kondisi ini dapat terjadi karena pendamping yang tidak dapat meluangkan waktu untuk mengantar penderita berobat secara rutin. Dengan demikian, keterlibatan pendamping dalam mengontrol ketertiban pengobatan juga perlu diperhatikan. Misalnya, dengan mengoptimalkan pemakaian kartu pemantauan minum obat bagi ODGJ, melakukan PHN, serta melakukan pendampingan penderita dan keluarga oleh kader kesehatan jiwa.



Gambar 2. 19 Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kulon Progo, 2014-2023

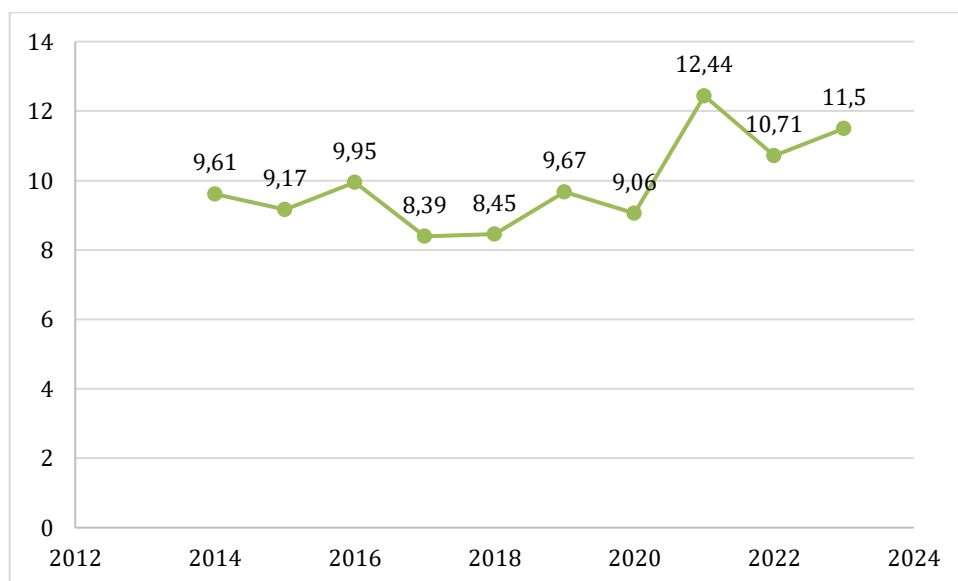
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan hingga pasca persalinan. AKI adalah ukuran jumlah kematian wanita yang terjadi selama kehamilan, saat melahirkan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan, yang disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan kehamilan atau diperburuk oleh proses kehamilan tersebut atau penanganannya.

AKI bukan termasuk kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. AKI juga merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tiga, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dengan tujuan mengurangi angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030, sebagaimana yang diusung oleh Program Indonesia Sehat.

AKI dapat dipengaruhi oleh status gizi, situasi sosial ekonomi, kesehatan sebelum kehamilan, komplikasi kehamilan, dan layanan kesehatan. Tinggi atau rendahnya AKI dapat mengindikasikan kondisi sosial ekonomi dan pelayanan kesehatan; juga mencerminkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Upaya mengurangi AKI melibatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas, perawatan kehamilan, persalinan oleh tenaga terlatih, perawatan pasca persalinan, penanganan komplikasi, dan layanan keluarga berencana pasca persalinan. AKI dihitung dengan cara menghitung jumlah kasus kematian ibu yang terjadi setiap 100.000 kelahiran hidup.

AKI di Kabupaten Kulon Progo bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada 2022 jika dibandingkan dengan 2015, namun pada 2023 angka kematian ibu menurun dengan jumlah satu kasus kematian ibu.



Gambar 2. 20 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kulon Progo, 2014-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Salah satu tanda kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah melalui indikator Angka Kematian Bayi (AKB). AKB mengukur jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. AKB mencerminkan isu-isu kesehatan masyarakat terkait penyebab kematian bayi, kualitas pelayanan prenatal, gizi ibu hamil, efektivitas program KIA dan KB, serta lingkungan dan ekonomi sosial. Jika AKB tinggi di suatu wilayah, itu menandakan tingkat kesehatan yang rendah di wilayah tersebut. Kasus kematian bayi sering kali disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan kongenital, atau kesulitan bernafas.

Dalam rangka menghadapi tantangan terkait kematian ibu dan bayi, Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (Rindu KIA) telah terbentuk sejak 2017. Rindu KIA merupakan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak yang efektif melalui komunikasi dan penyampaian

informasi yang cepat. Keberhasilannya tercermin dalam penghargaan yang diraih, serta peningkatan pada aplikasi *Bumilku* yang turut berkontribusi dalam peningkatan pelayanan bagi ibu hamil. Upaya peningkatan kualitas layanan tidak berhenti di situ, dengan berbagai inovasi lain seperti pemanfaatan teknologi SMS Gateway, deteksi dini penyakit malaria, dan pemantauan ibu hamil berisiko tinggi, yang terus dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Namun, angka kematian ibu tetap menjadi parameter yang sulit dicapai. Usaha untuk mereduksi angka ini melibatkan peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan dasar, peningkatan kesadaran ibu hamil, serta peningkatan kualitas Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM).

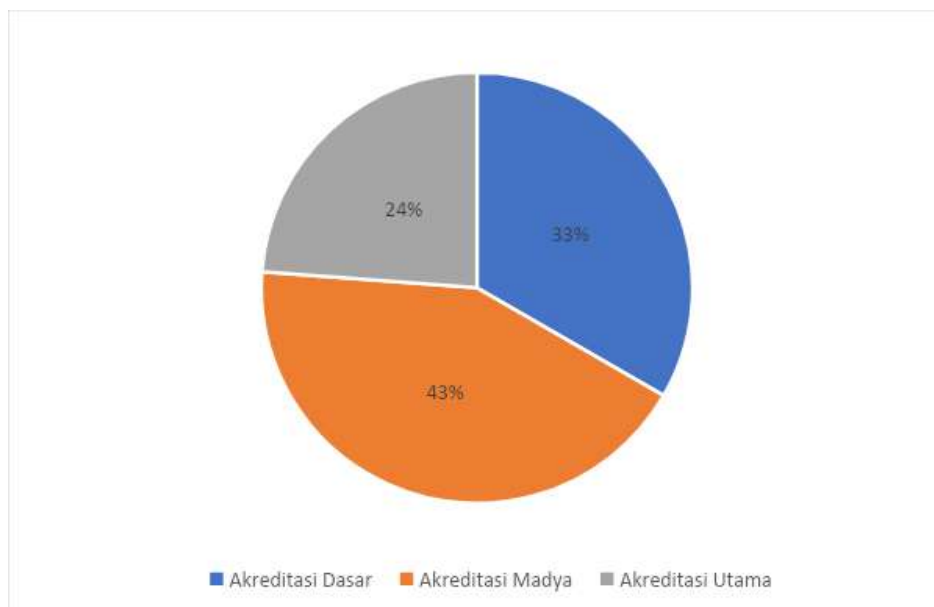
Pentingnya diseminasi informasi tentang kesehatan kehamilan sebagai bagian dari strategi ini bertujuan agar ibu hamil dapat dengan efektif memantau kesehatan diri dan kesehatan janin yang dikandung. Pada 2019, aplikasi *Bumilku* telah diperbarui dengan memungkinkan penyediaan informasi kesehatan ibu hamil dan lokasinya kepada pihak kesehatan dan pejabat yang berwenang. Keberhasilan konsep ini diakui dengan pemberian penghargaan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) atas pemanfaatan teknologi GPS dalam mendukung layanan ibu hamil. Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan dan peningkatan kesadaran ibu hamil tentang kesehatan pribadi dan janin menjadi faktor penting dalam upaya ini.

Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan peningkatan penyakit tidak menular, termasuk kanker, hipertensi, diabetes, dan stroke di DIY dan Kulon Progo dengan tingkat diabetes dan kanker lebih tinggi dari rata-rata nasional. Meskipun Yogyakarta memiliki AKI dan AKB rendah, populasi lansia menjadi fokus kesehatan. Namun, persepsi sakit berbeda antara pihak kesehatan dan masyarakat. Masyarakat menganggap "sakit" saat aktivitas terganggu dan butuh pelayanan kesehatan, sehingga waktu penanganan menjadi tertunda.

Keterlambatan dalam penanganan penyakit tidak menular dapat terjadi karena penyakit ini bersifat kronis dan gejalanya muncul setelah waktu yang lama. Diagnosis dan pengobatan memerlukan peralatan medis canggih serta waktu yang lama, sehingga seringkali dianggap "mahal". Walaupun perubahan perilaku dan gaya hidup dapat mencegah penyakit ini, sulit diterapkan oleh masyarakat modern saat ini. Diperlukan usaha keras dari *stakeholder* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong deteksi dini melalui inovasi yang diterima oleh masyarakat. Strategi efektif dan kebijakan yang tepat juga perlu disusun untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Di Kabupaten Kulon Progo, desa-desa yang sebelumnya terkena malaria telah berhasil dieliminasi. Indikator eliminasi daerah adalah ketika tidak ada desa dengan kasus malaria lebih

dari satu permil penduduk dan tidak ada penularan setempat (*indigenous*) selama tiga tahun berturut-turut, serta dilengkapi dengan pengawasan yang baik.



Gambar 2. 21 Gambaran Akreditasi Puskesmas di Kulon Progo, 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Perlu ada perbaikan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Kulon Progo. Dari 21 Puskesmas yang telah disurvei untuk akreditasi, Puskesmas yang sudah mendapatkan akreditasi dengan status “dasar” sebanyak tujuh Puskesmas, status “madya” sebanyak sembilan Puskesmas, dan status “utama” sebanyak lima Puskesmas. Namun, belum ada puskesmas yang mendapatkan akreditasi “paripurna”.

Tabel 2. 39 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita Bawah garis merah	Balita	196	205	199	192	173	222	2.238
	Jumlah balita Bawah garis merah yang ditangani	Balita	196	205	199	192	173	222	2.238
	Persentase balita bawah garis merah yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah balita yang ditimbang	Balita	21.915	21.641	21.936	19.263	19.366	20.242	19.178
3	Jumlah balita stunting	Balita	3.564	3.138	2.921	2.535	2.119	2.057	1.828
4	Jumlah ibu hamil dengan anemia	Orang	695	819	614	718	846	635	535
5	Jumlah ibu hamil	orang	6.018	6.014	4.811	4.529	4.400	3.707	3.984
6	Jumlah bayi dengan BBLR	Bayi	342	360	316	313	327	270	308
7	Jumlah bayi	Bayi	5.052	5.086	4.129	4.716	3.875	3.819	3.844
8	Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif	Bayi	2.897	3.464	2.956	4.445	3.855	3.655	3.320

No.	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Jumlah balita kurus	Balita	963	1.126	1.039	1.209	1.019	1.105	1.545
10	Jumlah desa siaga yang sudah aktif (mandiri)	Desa	21	18	38	34	38	85	66
11	Jumlah desa	Desa	88	88	88	88	88	88	88
12	Jumlah kapanewon sehat	Kap.	12	12	12	12	12	12	12
13	Jumlah desa STBM semua pilar	desa	-	21	20	20	25	51	64

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Terjadi peningkatan status gizi masyarakat, ditunjukkan oleh penurunan jumlah balita *stunting* dan balita di bawah garis merah, serta peningkatan bayi yang menerima ASI eksklusif. Terjadi peningkatan jumlah balita kurus dan ibu hamil dengan anemia. Upaya mengurangi angka *stunting* meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Intervensi gizi langsung pada balita *stunting*
- Optimalisasi Posyandu dan PAUD
- Peningkatan cakupan air bersih
- Penyediaan sanitasi yang memadai,
- dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Langkah untuk mengurangi anemia pada ibu hamil dan meningkatkan ASI eksklusif perlu pemantauan minum tablet Fe (zat besi) oleh ibu hamil, serta inovasi untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi.

Desa siaga adalah konsep yang mengindikasikan bahwa warga di suatu daerah memiliki kesiapan dalam hal sumber daya, kemampuan, dan niat untuk secara mandiri mencegah serta mengatasi isu-isu kesehatan, bencana, dan keadaan darurat kesehatan. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 564/MENKES/SK/VIII/2006. Syarat-syarat menjadi desa siaga termasuk adanya satu bidan tetap di desa, setidaknya dua kader desa, dan setidaknya satu pos kesehatan desa (Poskesdes) dengan perlengkapan yang memadai.

Desa siaga aktif memiliki empat tahapan (strata), yaitu pratama, madya, paripurna, serta mandiri. Klasifikasi tahapan tersebut berdasarkan pada indikator desa/kalurahan siaga aktif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 40 Tahapan Desa Siaga Aktif

Indikator	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
Forum desa/kalurahan	Ada, tetapi belum berjalan	Berjalan, tetapi belum rutin setiap triwulan	Berjalan setiap triwulan	Berjalan setiap bulan
KPM/Kader Kesehatan	Sudah ada minimal 2 orang	sudah ada 3-5 orang	Sudah ada 6-8 orang	Sudah ada 9 orang atau lebih

Indikator	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
Kemudahan akses pelayanan kesehatan	Ya	Ya	Ya	Ya
Posyandu dan UKBM lainnya aktif	Posyandu dan UKBM lainnya tidak aktif	Posyandu dan 2 UKBM lainnya aktif	Posyandu dan 3 UKBM lainnya aktif	Posyandu dan 4 UKBM lainnya aktif
Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa/kalurahan	Sudah ada dana dari pemerintah desa/kalurahan serta belum ada sumber dana lainnya	Sudah ada dana dari pemerintah desa/kalurahan serta 1 sumber dana lainnya	Sudah ada dana dari pemerintah desa/kalurahan serta 2 sumber dana lainnya	Sudah ada dana dari pemerintah desa/kalurahan 2 sumber dana lainnya
Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas	Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif 1 ormas	Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif 2 ormas	Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari 2 ormas
Peraturan kepala desa atau peraturan bupati/walikota	Belum ada	Ada, belum direalisasikan	Ada, sudah direalisasikan	Ada, sudah direalisasikan
Pembinaan PHBS di rumah tangga	Pembinaan PHBS kurang dari 20% rumah tangga yang ada	Pembinaan PHBS minimal 20% rumah tangga yang ada	Pembinaan PHBS minimal 40% rumah tangga yang ada	Pembinaan PHBS minimal 70% rumah tangga yang ada

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010

Kabupaten Kulon Progo memiliki 38 kalurahan siaga aktif mandiri namun beberapa desa belum memenuhi kriteria desa siaga aktif karena kurangnya aktivitas forum desa siaga dan dokumentasi data yang baik, sehingga pemantauan dan evaluasi perlu ditingkatkan. Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo sudah termasuk dalam kategori Kapanewon Sehat. Terdapat 25 kalurahan yang memenuhi kriteria Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tingkat capaian kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 41 Tingkat Capaian Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

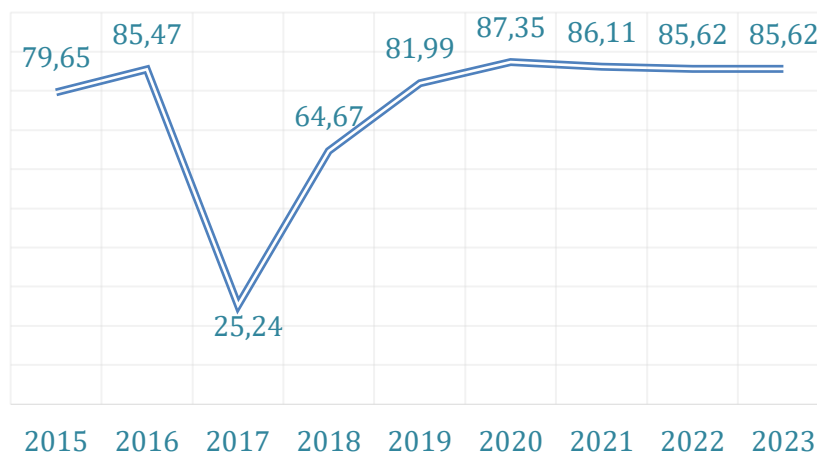
No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kejadian malaria	Per 100.000 penduduk	21,486	28,977	21,489	18,833	6,248	2,907	1,117	3,613	12,606	2,241
2	Angka kasus malaria	Kasus	88	121	94	84	28	13	5	16	59	10
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	409.568	417.570	437.441	446.028	448.114	447.246	447.506	442.838	428.816	446.192
4	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,0056	0,0057	0,0055	0,00673	0,0118	0,0065	0,0058	0,00248	0,0065	0,0053
5	Jumlah pasien HIV/AIDS	Kasus	23	24	24	30	53	29	26	11	28	54
6	Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue	Kasus	128	122	381	79	86	194	316	213	231	76
7	Jumlah Penderita Diare	Kasus	25.491	8.233	9.840	9.101	7.203	7.914	4.768	2.028	3.618	4.851
8	Jumlah Penderita TB	Kasus	134	223	207	148	254	311	247	205	270	282
9	Jumlah Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut	Kasus	20.419	14.319	31.863	1.310	1.708	858	22.351	12.354	1.190	26.308

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya pengentasan penyakit merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat suatu wilayah khususnya pada bidang kesehatan. Menindaklanjuti hal tersebut, salah satu penyakit yang menjadi perhatian bagi khalayak umum adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang terjadi oleh sebab infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Umumnya, penyakit ini menyerang organ otak, kelenjar getah bening, jantung dan tulang belakang, sistem saraf pusat, dan paling kerap menyerang organ paru-paru. Tuberculosis (TBC) menjadi penyakit menular mematikan nomor dunia di dunia dan kasusnya banyak terjadi di Indonesia mencapai 305 ribu jiwa sehingga menjadikannya sebagai lima besar negara pengidap TB paling banyak di Asia Tenggara.

Menindaklanjuti urgensi tersebut, cakupan penemuan serta pengobatan kasus tuberkulosis dipergunakan sebagai salah satu indikator. Indikator ini didapatkan melalui perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang dilaporkan dan diobati pada tahun tertentu dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis pada tahun yang sama. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa capaian persentase cakupan penemuan serta pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Kulon Progo selama jangka waktu periode 2015-2023 telah mencapai angka sempurna (100 persen) secara konsisten.

Hal tersebut mengindikasikan seluruh kasus tuberkulosis Kabupaten Kulon Progo telah berhasil ditemukan (*coverage*) serta telah diupayakan pengobatan bagi pengidap tuberkulosis. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat baik dan perlu untuk terus dipertahankan capaiannya supaya keterjaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi pengidap TBC dan khalayak umum sekitarnya dapat tetap terwujud.



Gambar 2. 22 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kulon Progo, 2015-2023

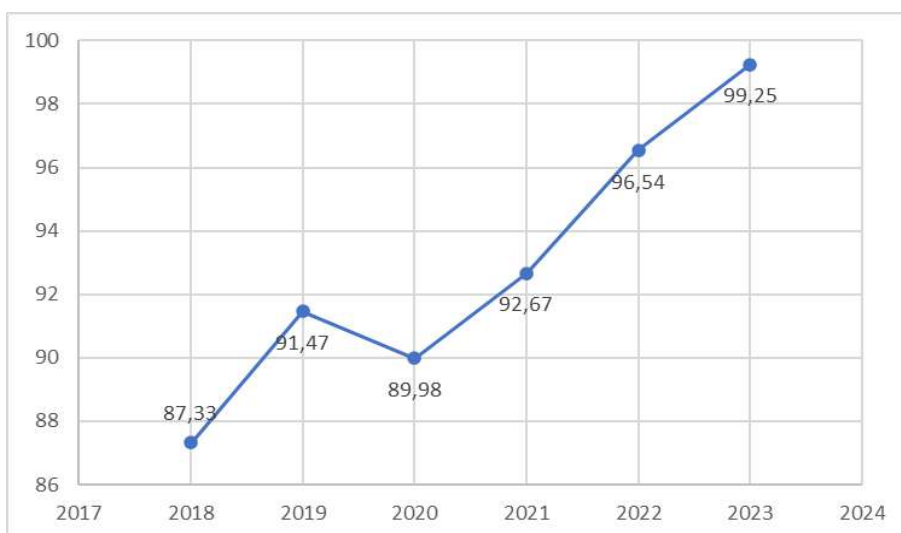
Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Angka keberhasilan pengobatan atau *success rate* merupakan salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengevaluasi pengobatan penyakit tuberkulosis (TBC). Indikator ini

didapatkan melalui perbandingan angka jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang dinyatakan berhasil sembuh dan pengobatan lengkap dengan seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan, dilaporkan, dan diobati. Semakin besar, angka keberhasilan pengobatan atau *success rate* maka akan semakin baik indikasi upaya pengobatan yang dilakukan. Menindaklanjuti hal tersebut, didasarkan pada grafik tersebut maka dapat diketahui bahwa angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Kulon Progo memiliki tren yang fluktuatif.

Baseline pada 2015 berada pada angka 79,65 persen. Capaian tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 85,47 persen. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis pada 2017 hingga mencapai angka 25,24 persen. Persentase ini dinilai sangat kecil karena hanya berhasil menyembuhkan satu perempuan pengidap dari seluruh kasus tuberkulosis yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Angka persentase keberhasilan pengobatan tuberkulosis kemudian berhasil meningkat pada 2018 hingga mencapai angka 64,67 persen.

Peningkatan ini dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya cukup baik karena telah mencakup lebih dari 50 persen. Pasca tahun tersebut, capaian keberhasilan pengobatan TB mengalami perbaikan dan peningkatan hingga berada pada angka 87,35 persen di tahun 2020. Angka tersebut merupakan capaian persentase tertinggi dalam jangka waktu 8 tahun terakhir. Capaian keberhasilan pengobatan kembali mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2023 hingga mencapai angka 85,62 persen.



Gambar 2. 23 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kulon Progo, 2018-2023

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dalam rangka upaya perwujudan keterjaminan aspek kesehatan bagi masyarakat, pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial dengan sifat wajib dengan mengacu pada UU No. 40 tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

Program tersebut ditujukan untuk dapat memberikan kepastian jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi tiap rakyat Indonesia supaya dapat hidup sehat, sejahtera, dan produktif. Program ini diselenggarakan dengan menggunakan prinsip asuransi sosial dan ekuitas dengan mengutamakan kesamaan hak dalam perolehan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Program ini memberikan kebermanfaatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan *managed care*.

Berkaitan dengan kepesertaan, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan orang yang telah membayar iuran ataupun dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dengan sifat kepesertaan yang berkesinambungan sesuai dengan prinsip portabilitas dengan menyelenggarakan program di seluruh wilayah Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mengindikasikan kepesertaan JKN di suatu wilayah salah satunya di Kulon Progo. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum tren cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mengalami peningkatan.

Pada 2018, capaian persentase kepesertaan JKN di Kulon Progo berada pada angka 87,33 persen dan mengalami peningkatan menjadi 91,47 persen pada 2019. Persentase ini mengalami penurunan pada 2020 menjadi 89,98 persen. Setelahnya, capaian kepesertaan mencapai peningkatan sampai 99,25 persen pada 2023.

2.2.2.3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada awal 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melakukan *rebranding* nama program, dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang dikenal sebagai *Bangga Kencana*.

Bangga Kencana adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, tenteram, mandiri, dan bahagia melalui berbagai upaya, seperti Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan Pengelolaan Kependudukan.

Namun, upaya sosialisasi mengenai Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengatasi kasus pernikahan dini yang masih cukup tinggi terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Data dari 2019 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi dalam jumlah

kasus pernikahan dini. Pada 2019, terdapat 1.812 kasus pernikahan dini, dengan jumlah pernikahan sebanyak 5.898 (30,72 persen).

Pada 2020, angka tersebut turun signifikan menjadi 1.178 kasus pernikahan dini, dengan jumlah pernikahan sebanyak 5.554 (21,20 persen). Pada 2021, jumlah kasus pernikahan dini kembali menurun menjadi 917, dengan jumlah pernikahan sebanyak 5.264 (17,42 persen). Namun, pada 2022, angka kasus pernikahan dini mengalami peningkatan menjadi 996, dengan jumlah pernikahan sebanyak 5.436 (18,32 persen). Informasi mengenai angka pernikahan usia dini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 42 Data dan Jumlah Pernikahan di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Persentase Pernikahan Dini
2019	1.812	5.898	30,72%
2020	1.178	5.554	21,20%
2021	917	5.264	17,42%
2022	996	5.436	18,32%
2023	85	2.816	3,01%

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya dalam mengatur kelahiran melalui program KB di Kabupaten Kulon Progo terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, dengan memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa bentuk kemudahan yang diberikan antara lain layanan jemput antar bagi calon akseptor KB, perluasan cakupan pelayanan KB melalui kolaborasi dengan mitra kerja melalui kegiatan bakti sosial dalam program "Bakso Mentor KB-Ku", serta memastikan ketersediaan alat dan obat di fasilitas kesehatan terdekat.

Partisipasi aktif dalam program KB tercermin dari tingkat prevalensi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2020. Namun, pada 2022, terjadi penurunan prevalensi. Pada 2022, terdapat 38.068 Peserta Usia Subur (PUS) yang aktif dalam program KB dari total 61.576 PUS (61,82 persen). Persentase ini mengalami kenaikan menjadi 69,26 persen pada 2023. Perkembangan ini terlihat dengan jelas dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2. 43 Prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PUS peserta KB Aktif (PA)	54.934	53.559	53.820	45.116	43.032	44.451	44.944	45.329	38.068	43.687
2	Pasangan usia subur (PUS)	68.374	67.741	67.849	64.281	60.359	60.601	59.893	60.840	61.576	63.079
Prevalensi (%)		80,34	79,06	79,32	70,18	71,29	73,35	75,04	74,51	61,82	69,26

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tercatat bahwa pada 2022, capaian Peserta KB Aktif (PA) mengalami penurunan signifikan menjadi 61,82 persen. Dalam capaian ini, sebagian besar peserta masih didominasi oleh wanita. Dari gambaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa minat dan kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB masih belum memadai, meskipun telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak 2020 berdampak pada menurunnya peserta KB Pria menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Hal ini disebabkan beberapa fasilitas kesehatan tidak melayani KB MKJP dan mengalihkan ke metode lain seperti pil, suntik, dan kondom.

Selama masa pandemi, upaya advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dari rumah ke rumah menjadi strategi utama yang dilakukan oleh para kader untuk merekrut peserta KB baru. Walaupun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memberikan *reward* bagi peserta KB pria menggunakan metode MOP, namun capaian target masih belum optimal. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan upaya KIE berbasis kelompok/komunitas bagi calon peserta KB Pria.

Penduduk Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB, atau yang termasuk dalam kategori *unmet need*, memiliki potensi yang dapat dijadikan calon peserta KB. Pada 2022, di Kabupaten Kulon Progo tercatat angka *unmet need* mencapai 21,19 persen. Meskipun angka ini telah menunjukkan peningkatan, namun masih belum memenuhi target nasional sebesar sembilan persen.

Penyebab dari capaian ini ada beberapa faktor, salah satunya adalah PUS yang bukan peserta KB (*unmet need*) yang berusia 45 tahun ke atas. Kelompok ini cenderung sulit untuk diajak mengikuti program KB karena mereka merasa sudah tidak berperan aktif dalam hal reproduksi, meskipun masih memiliki kemungkinan untuk mengalami kehamilan.

Sementara itu, penurunan jumlah peserta KB Aktif juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Salah satunya adalah penurunan jumlah pasangan usia subur, yang dapat berdampak pada penurunan angka peserta KB. Di sisi lain, terjadi peningkatan jumlah individu yang termasuk dalam kategori bukan peserta KB (*unmet need*), yang juga ikut memengaruhi penurunan capaian peserta KB Aktif. Detail perbandingan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2. 44 PUS Bukan Peserta KB (*unmet need*) di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pasangan usia subur (PUS)	Pasangan	68.374	67.741	67.849	64.281	60.359	60.601	59.895	60.840	61.576	63.079
2. PUS bukan peserta KB (Unmet Need)	Orang	4.412	4.853	4.642	8.564	6.189	5.709	4.929	5.409	13.050	7.239

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Ingin anak tunda (IAT)	Orang	2.276	2.202	2.374	3.581	2.804	2.601	2.289	2.406	8.934	1.809
- Tidak ingin anak lagi (TIAL)	Orang	2.136	2.651	2.268	4.983	3.385	3.108	2.64	3.003	4.575	5.430
3. Persentase	Persen	6,45	7,16	6,84	13,32	10,25	9,42	8,23	8,89	21,19	11,48

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) serta Klinik Ketahanan Keluarga. Pembinaan kelompok bina keluarga dan ketahanan keluarga disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 45 Kelompok Bina Keluarga dan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelompok UPPKS	Kelompok	946	946	936	936	785	601	449	450	360	330
2	Jumlah Anggota UPPKS	Orang	17.246	16.549	16.667	14.145	13.622	12.807	9.395	8.989	3.324	5.129
3	Kelompok BKB	Kelompok	403	403	407	407	387	324	291	291	290	290
4	Kelompok BKR	Kelompok	128	128	130	130	130	122	135	135	139	142
5	Kelompok BKL	Kelompok	101	102	105	105	115	122	137	137	149	155
6	PIK KRR	Kelompok	50	55	55	57	51	36	62	63	63	64

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Perkembangan cakupan kepesertaan keluarga dalam kegiatan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL) menunjukkan dinamika yang signifikan setiap tahun, menunjukkan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan tersebut juga bersifat dinamis. Selama masa pandemi Covid-19, kegiatan di kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS mengalami beberapa kali penghentian sesuai dengan kondisi saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan dapat kembali berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan serta melibatkan kelompok yang lebih kecil dalam waktu yang singkat.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah anggota dalam kelompok UPPKS. Penurunan ini terjadi karena perhitungan yang berbeda, mengeluarkan anggota yang sudah lanjut usia dan tidak aktif dalam kegiatan dari kelompok.

Sama halnya dengan data kelompok BKB, BKR, dan BKL. Melalui kegiatan PIK Remaja, tercapai generasi remaja *GenRe* (Generasi Berencana) yang memiliki pola hidup sehat, menunda usia perkawinan, bercita-cita menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, serta memiliki keterampilan hidup. Remaja *GenRe* juga diharapkan dapat menjadi *role model*, idola, dan sumber informasi bagi teman sebaya.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan melalui pembinaan kelompok UPPKS. Tujuan pembentukan kelompok UPPKS adalah meningkatkan pendapatan keluarga menuju sejahtera. Pembinaan meliputi pelatihan keterampilan, manajemen pengelolaan kelompok, kemudahan akses kredit dari berbagai lembaga, serta partisipasi dalam pameran. Meskipun jumlah anggota kelompok UPPKS mengalami penurunan, anggota yang aktif di dalamnya memiliki kualitas yang lebih baik karena anggota yang tidak aktif dikeluarkan.

Sejak 2017, Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan program Kampung KB dalam upaya penguatan program *Bangga Kencana*. Program ini meliputi berbagai kegiatan seperti PIK Remaja, BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan pembangunan di tingkat kampung. Hingga 2018, sudah terbentuk 23 Kampung KB di Kulon Progo, dan pada 2019, ada penambahan tiga lokasi. Namun, periode 2020-2022 belum ada penambahan kampung KB karena pandemi.

Tabel 2. 46 Perkembangan Jumlah Kampung KB di Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022

No.	Kapanewon	Jumlah	Nama Kalurahan	Tahun Dibentuk	Keterangan
1	Temon	1	Kulur	2017	
2	Wates	1	Triharjo	2017	
3	Panjatan	1	Bugel	2017	
4	Galur	2	Kranggan	2017	
			Nomporejo	2018	Lokus Stunting
5	Lendah	2	Jatirejo	2017	
			Gulurejo	2019	
6	Sentolo	3	Kaliagung	2017	
			Sukoreno	2019	
			Tuksono	2018	Lokus Stunting
7	Pengasih	3	Kedungsari	2017	
			Karangsari	2018	Lokus Stunting
			Sendangsari	2018	Lokus Stunting
8	Kokap	2	Hargowilis	2016	
			Hargorejo	2018	
9	Girimulyo	2	Purwosari	2017	
			Giripurwo	2018	
10	Nanggulan	2	Kemabang	2017	
			Donomulyo	2018	Lokus Stunting
11	Samigaluh	5	Gerbosari	2017	Lokus Stunting
			Kebonharjo	2018	Lokus Stunting

No.	Kapanewon	Jumlah	Nama Kalurahan	Tahun Dibentuk	Keterangan
			Sidoharjo	2018	Lokus Stunting
			Ngargosari	2018	Lokus Stunting
			Pagerharjo	2018	Lokus Stunting
12	Kalibawang	2	Banjaroya	2017	
			Banjararum	2019	
	Jumlah	26			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2023

Untuk memastikan kelancaran program dan kegiatan Kampung KB, setiap kampung telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung KB, yang disahkan oleh Keputusan Bupati. Contohnya, Kampung KB pertama, yaitu Kampung KB Tegiri 2 di Desa Hargowilis, disahkan oleh Keputusan Bupati Kulon Progo No. 102/A/2016. Pada 2017, Pokja Kampung KB diperkuat melalui Keputusan Bupati 355/A/2017. Pada 2018, Kampung KB yang berfokus pada Desa Stunting diperkuat oleh Keputusan Bupati No. 358/A/2018. Bupati Kulon Progo juga menerbitkan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2018 tentang *Penanganan Stunting di Daerah* pada tanggal 24 Mei 2018.

Pada 2020, diterbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 362/A/2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri No. 843.4/2879/SJ tahun 2020 tentang *Intensifikasi Kampung Keluarga berkualitas*. Istilah "Kampung Keluarga Berencana" diganti menjadi "Kampung Berkualitas." Tujuannya adalah mengatasi *stunting*, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka *unmet need*, meningkatkan partisipasi keluarga berencana, dan mengurangi angka kemiskinan melalui program *Bangga Kencana* melalui kampung berkualitas.

Di Kampung KB, selain program *Bangga Kencana*, juga ada Rumah Data Kependudukan yang menjadi pusat data, informasi, dan intervensi pembangunan di tingkat mikro. Rumah Data Kependudukan, atau "Rumah Data-Ku," berfungsi mengelola dan memanfaatkan data kependudukan untuk intervensi pembangunan di Kampung KB guna meningkatkan kesejahteraan.

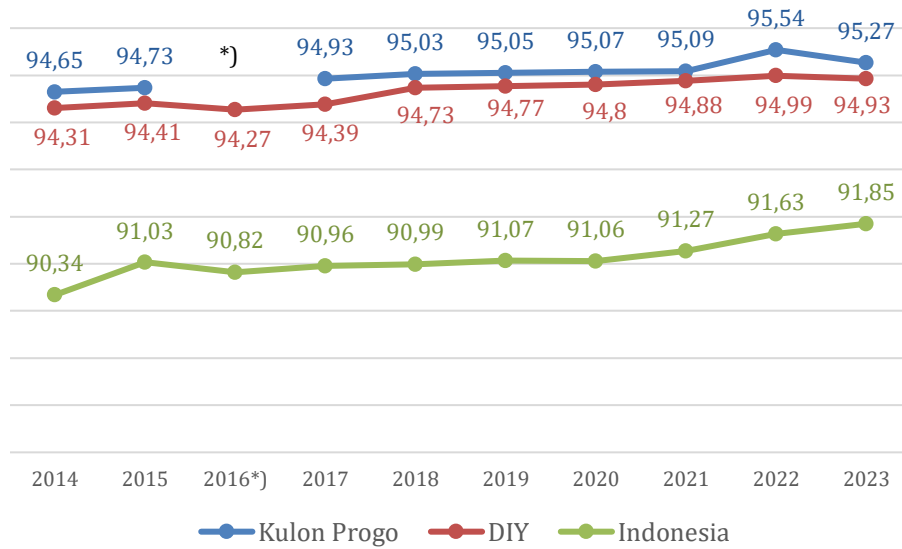
Rumah Data Kependudukan berperan sebagai pusat data dan intervensi kependudukan di tingkat mikro, termasuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar intervensi pembangunan di Kampung KB. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga diatur oleh Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga* Pasal 58.

Kini, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 10 Rumah Data Kependudukan di berbagai Kampung KB, seperti Hargowilis, Kalirejo, Triharjo, Kedungsari, Sendangsari, Gerbosari, Kaliagung, Donomulyo, Giripurwo, dan Bugel. Untuk menyosialisasikan program *Bangga Kencana*, termasuk kepada siswa sekolah, dibentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pojok Kependudukan di SMP dan SMA. Selain mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan, SSK juga membentuk pojok kependudukan di sekolah.

Dalam rangka mengukur kualitas keluarga pada surat wilayah telah ditetapkan sebuah indeks yang dinamakan Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*). Kualitas keluarga ditunjukkan melalui variabel ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dengan 11 indikator dan 17 variabel. Yang dimaksud dengan dimensi “ketenteraman” adalah kondisi keluarga yang di dalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. “Kemandirian” adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Sedangkan “kebahagiaan” adalah kondisi keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014, seligmen :2002, chaplin :2008). Pada 2020, *iBangga* Kabupaten Kulon Progo mencapai 61,43, kemudian turun pada 2021 menjadi 57,59 dan kembali naik pada 2022 menjadi 57,82.

2.2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur: umur panjang dan hidup sehat yang dilihat dari umur harapan hidup, pengetahuan yang dilihat dari rata – rata lama sekolah, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki.



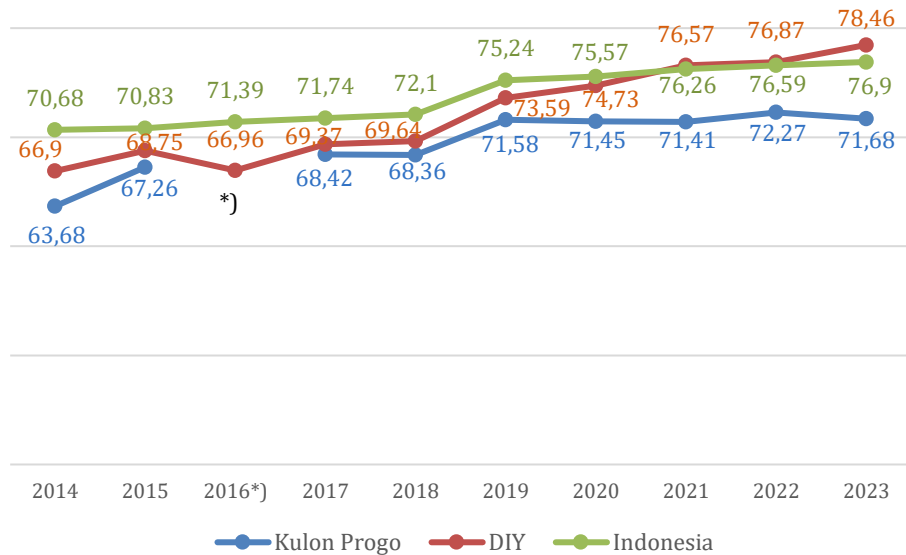
Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

*) data kabupaten/kota tidak tersedia

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kulon Progo mengalami tren peningkatan pada 2017 hingga mencapai angka 95,27 pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut, kapabilitas perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup telah meningkat sejalan dengan implementasi program-program pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah suatu alat ukur yang mencerminkan sejauh mana perempuan terlibat aktif dalam bidang ekonomi dan politik. IDG berfokus pada tingkat keterlibatan dengan cara menilai kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, serta peran dalam proses pengambilan keputusan. IDG mencakup berbagai dimensi, seperti representasi dalam lembaga legislatif, peran dalam pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.



Gambar 2. 25 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2022

Sumber: BPS DIY, 2023

*) data kabupaten/kota tidak tersedia

Tabel 2. 47 Jumlah Kasus Kekerasan Gender di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Korban Kekerasan terhadap Perempuan	54	49	64	43	71	54	54	32	27	42
2	Korban Kekerasan terhadap Anak	38	59	65	66	62	77	98	81	62	43
3	Jumlah Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	92	108	129	109	133	131	152	113	89	85
4	Jumlah Kasus KDRT	46	47	47	46	44	51	26	23	27	33
	Jumlah Keluarga	138.984	145.152	148.879	149.839	149.265	149.976	154.796	152.833	154.674	156.775
	Persentase kasus KDRT (%)	0,033	0,032	0,032	0,030	0,029	0,034	0,017	0,015	0,017	0,021

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada 2020, kasus KDRT mencapai 42 kasus, dengan kekerasan KDRT terhadap anak sebanyak 16 kasus dan terhadap perempuan sebanyak 26 kasus. Meskipun jumlah korban yang melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun, catatan tersebut masih belum mencakup keseluruhan korban karena banyak yang tidak melapor, baik karena malu ataupun kurangnya pengetahuan mengenai proses pelaporan. Menurut laporan dari P2TP2A dan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPPK), beberapa penyebab kekerasan terhadap anak antara lain pengaruh teknologi yang berkembang pesat, perundungan atau *bullying*, pergaulan bebas, dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pola asuh yang tepat. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang

semakin menurun serta kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan pembentukan FPKK hingga tingkat desa. Upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi dan penyuluhan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara penyandang disabilitas semestinya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Dalam rangka melindungi keberadaan dan martabat serta menjaga kesamaan hak dan kewajiban penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan Perda No. 3 tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas* serta aturan turunannya, yaitu Peraturan Bupati No. 35 tahun 2017 tentang *Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas*.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY untuk membantu pengecekan kesehatan kaum disabilitas, pengecekan alat bantu, serta penggantian terhadap kerusakan alat bantu. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak disabilitas yang mengalami kekerasan.

Data menunjukkan bahwa terdapat 341 anak dengan kedisabilitasan yang tersebar di seluruh kapanewon di Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 48 Jumlah Anak dengan Disabilitas, 2023

No.	Kapanewon	Laki-laki	Perempuan
1	Temon	6	7
2	Wates	24	16
3	Panjatan	18	14
4	Galur	22	13
5	Lendah	15	21
6	Sentolo	22	15
7	Pengasih	16	19
8	Kokap	11	7
9	Girimulyo	17	14
10	Nanggulan	10	16
11	Samigaluh	10	7
12	Kalibawang	8	13
	Total	179	162

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2024

Diharapkan penanganan dan pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo semakin baik dan berkualitas. Di samping itu, proses pembangunan

dan pemerintahan di Kulon Progo juga diharapkan bersifat inklusif bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

2.2.2.5. Seni dan Budaya

Pembangunan seni budaya sangat erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Pembangunan kebudayaan secara nasional diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan. Dalam Permendikbud Ristek No. 55 tahun 2022 tentang *Indeks Pembangunan Kebudayaan*, komponen penyusun IPK berupa dimensi yang terdiri dari berbagai indikator, meliputi dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi gender.

Pembangunan bidang seni budaya melingkupi semua jenis seni budaya di Kabupaten Kulon Progo yang cukup beragam: kelompok seni tari, musik, kriya, rupa, Majelis Luhur Kebudayaan (MLK), upacara adat, desa budaya, penyelenggaraan lomba budaya dan juga sarana prasarana seni budaya. Perkembangan seni budaya di Kabupaten Kulon Progo disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 49 Perkembangan Seni dan Budaya Kulon Progo, 2014-2023

No	Kondisi Perkembangan Kebudayaan	Tahun										Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jenis Seni											
	1. Seni Tari											
	a. Tradisional	102	102	201	352	352	357	366	366	366	352	Buah
	b. Kreasi baru	26	26	26	30	30	30	31	31	31	30	Buah
	2. Seni Musik											
	a. Diatonis	94	94	101	101	101	101	104	104	104	61	Buah
	b. Pentatonis	125	125	144	144	144	145	171	171	171	171	Buah
	3. Seni Rupa											
	a. Lukis	-	-	-	-	-	8	9	9	9	6	Buah
	b. Pahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah
	4. Seni Theater											
	a. Tradisional	127	127	155	152	152	153	153	153	153	153	Buah
	b. Modern	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	Buah

No	Kondisi Perkembangan Kebudayaan	Tahun										Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Jumlah	480	480	633	631	631	801	841	841	841	779	Buah
2	Jumlah Grup Kesenian	1.130	1211	1269	1269	1269	1305	1279	1320	1365	1.454	Grup
3	Penyelenggaraan Lomba Unit											
	a. Banyaknya Lomba/Festival	10	10	6	7	12	12	19	24	16	13	Kali
	b. Jenis Lomba Festival	4	4	3	2	2	10	13	5	5	5	Jenis
4	Upacara Adat	35	35	35	35	40	85	93	75	80	15	Kel
5	Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	15	17	18	18	18	18	18	18	20	20	Kel
6	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	Unit
7	Kesenian khas Kab. Kulon Progo	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Buah
8	Desa Budaya	10	10	15	15	15	15	15	16	16	21	Kalurahan

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kelompok/grup kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat memiliki peran penting dalam mewadahi pelaku-pelaku seni untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya agar tetap terpelihara, sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya serta mendukung perkembangan desa budaya. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki grup kesenian dalam jumlah yang cukup banyak.

Pada 2015 sebanyak 1.211 group, 2016, 2017, dan 2018 sebanyak 1.269 group, 2019 sebanyak 1305 group, dan pada 2020 jumlah grup kesenian menurun menjadi 1.279 grup. Setelah menurun akibat pandemi, pada 2021 jumlah grup kesenian bertambah lagi menjadi 1.320 grup dan meningkat lagi menjadi 1.365 pada 2022. Namun demikian, jika dibandingkan antara jumlah group yang aktif dengan jumlah group eksisting, jumlahnya masih relatif sedikit.

Di Kabupaten Kulon Progo, ada 13 ragam seni yang telah dikembangkan dan menjadi seni unggulan seperti Angguk Putri. Seni unggulan lain meliputi Ketoprak, Jathilan, Inkling, Keroncong, Reog, Oglek, Hadrah/Sholawatan, Lengger Tapan, Wayang Topeng, Panjidor, Krumpyung, dan Zabur. Selain itu, budaya tradisi berupa upacara adat juga sudah dikemas dengan cukup baik, sehingga menjadi daya tarik wisata daerah.

Pemerintah daerah terus meningkatkan pengembangan seni lainnya seperti sendratari, dengan mengangkat tema lokal dan seni musik krumpyung. Perkembangan kegiatan seni dan budaya di kabupaten ini semakin meningkat dengan dukungan Dana Keistimewaan DIY. Semakin banyak kegiatan atau festival seni budaya yang diselenggarakan pemerintah, maka akan mendukung peningkatan pelestarian nilai budaya. Kabupaten Kulon

Progo memiliki potensi warisan budaya fisik dan nilai budaya dari masa lalu berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga, baik kondisi maupun keamanannya.

Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari atas: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan. Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film.

Tabel 2. 50 Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	202	202	304	304	345	373	345	364	316	371
	a. Masa Prasejarah	2	2	4	4	4	17	11	11	4	3
	b. Masa Hindu-Budha	154	154	119	119	119	122	159	166	119	128
	c. Masa Islam	23	23	50	50	50	85	81	83	51	82
	d. Masa Kolonial/Perjuangan	18	18	18	121	121	123	77	86	127	139
	e. Tradisional	5	5	10	10	10	26	16	18	15	19
2	Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Rintisan Kalurahan Budaya adalah kalurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat. Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Kalurahan Budaya harus melestarikan, memberdayakan, mengaktualisasikan, mengembangkan, dan menggali potensi kekayaan budaya yang dimiliki. Pada 2022, di Kabupaten Kulon Progo diketahui terdapat tujuh kalurahan mandiri budaya, sembilan kalurahan budaya, 35 kalurahan berkembang, dan 37 kalurahan budaya kategori tumbuh.

Tabel 2. 51 Jumlah Rintisan Kalurahan Budaya Kabupaten Kulon Progo, 2017-2023

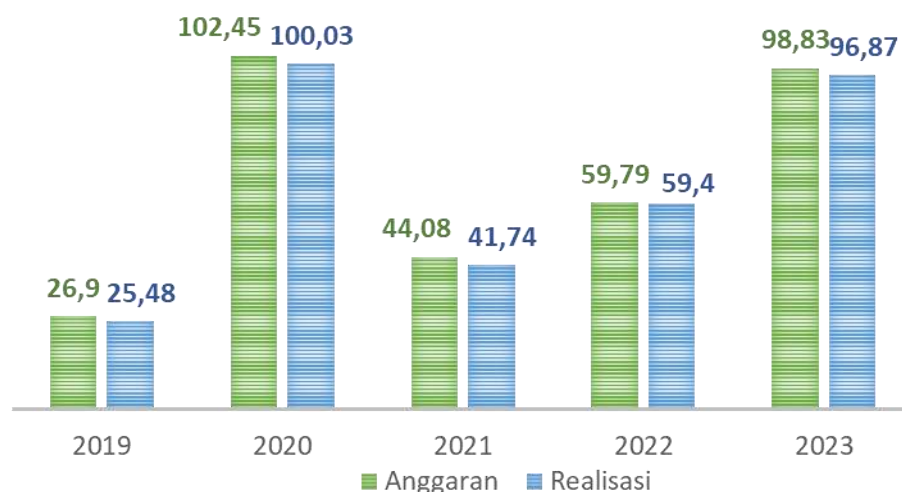
Jumlah rintisan kalurahan budaya	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Desa/kalurahan mandiri budaya	0	0	0	2	7	7	7
Desa/kalurahan budaya	15	15	15	13	9	9	14
Rintisan desa/kalurahan budaya kategori berkembang	11	16	21	26	30	35	31
Rintisan desa/kalurahan budaya kategori tumbuh	62	57	52	47	42	37	36

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu dari unsur dari keistimewaan DIY. Satu di antara kewenangan keistimewaan yang dimiliki DIY adalah memberikan sejumlah alokasi dana setiap tahun yang disebut dana keistimewaan kepada kabupaten di bawahnya, termasuk Kabupaten Kulon Progo. Dana ini disalurkan dengan prinsip keseimbangan pembangunan antara DIY dan kabupaten-kabupaten yang dinaunginya. Dengan demikian, dana keistimewaan merupakan sumber kekuatan Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan pembangunan pada bidang kelembagaan, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan.

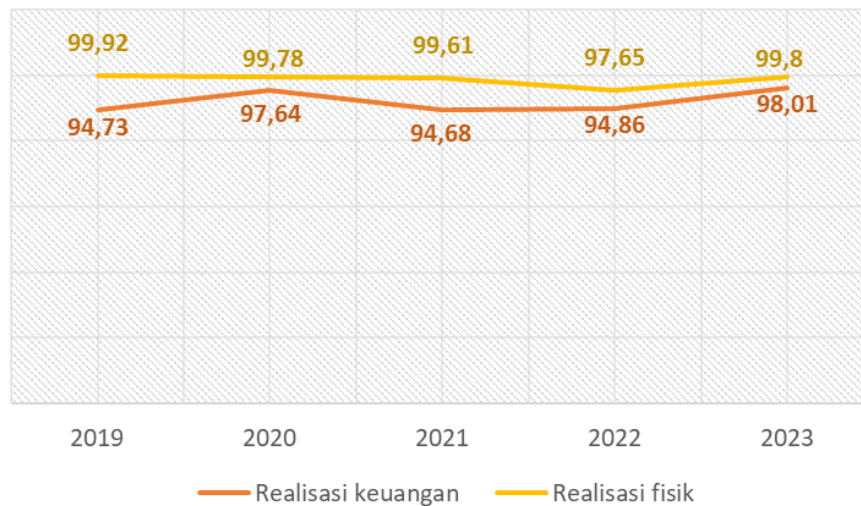
Berdasarkan Laporan Pengendalian dan Evaluasi BKK Dana Keistimewaan DIY, penerimaan dana keistimewaan DIY selama lima tahun terakhir di Kabupaten Kulon Progo untuk empat urusan keistimewaan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 26 Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023 (miliar rupiah)

Sumber: Bappeda Kulon Progo

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi lonjakan anggaran Dana Keistimewaan yang cukup besar pada 2020. Hal tersebut disebabkan adanya pembebasan lahan sebagai lahan pengganti Taman Budaya dengan luas 91.321 meter persegi sebesar Rp73.700.400.000. Secara keseluruhan, apabila dilihat dari realisasi keuangan dan fisiknya, terlihat bahwa capaian fisik dan keuangan di Kabupaten Kulon Progo tergolong “sangat tinggi” dengan kisaran di atas 90 persen, baik untuk realisasi fisik maupun keuangannya.



Gambar 2. 27 Realisasi fisik dan keuangan Dana Keistimewaan DIY di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023 (%)

Sumber: Bappeda Kulon Progo

Berdasarkan Dana Keistimewaan yang dialokasikan ke Kabupaten Kulon Progo, anggaran terbesar pada 2023 direncanakan untuk urusan kebudayaan (79 persen). Sebagai penerima alokasi terbesar, Kulon Progo dapat memanfaatkan Dana Keistimewaan secara khusus untuk menonjolkan atraksi daerah yang dimiliki, utamanya dari sisi pemeliharaan budaya dan tradisi. Beberapa perwujudan pemeliharaan budaya dan tradisi, antara lain lawatan sejarah, peringatan hari besar sejarah, kegiatan apresiasi sastra, pemeliharaan cagar budaya, pengelolaan taman budaya, dan pengadaan pentas seni.

Setelah urusan kebudayaan, pembangunan pada bidang tata ruang merupakan alokasi anggaran tertinggi kedua dalam penggunaan Dana Keistimewaan. Pada 2023, pembangunan di bidang ini dialokasikan sebesar Rp15.206.257.238 (15,38 persen). Hal ini turut menjadi satu di antara bentuk penguatan fondasi penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang memanfaatkan sumber daya lahan.

Bidang tersebut dapat dioptimalkan agar terbuka ruang-ruang strategis yang mampu membawa Kulon Progo ke arah percepatan dan ekspansi pembangunan daerah. Selain urusan tata ruang dan kebudayaan, urusan kelembagaan serta pertanahan perlu dipertahankan realisasinya agar terwujud pembangunan yang tepat sasaran dan adaptif terhadap tantangan di masa depan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya permintaan terhadap mutu layanan publik dan informasi yang cepat, akurat, dan terpadu,

diperlukan kerangka acuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-Government) sebagai langkah menuju implementasi konsep *smart city* di Kabupaten Kulon Progo. Tahapan pengembangan komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menuju *smart city* dilaksanakan secara bersamaan dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal daerah.

Hal tersebut melibatkan peningkatan sumber daya manusia, pengorganisasian, serta penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang sesuai. Pengimplementasian konsep *smart city* di Kabupaten Kulon Progo perlu memperhatikan karakteristik potensi lokal dalam pengembangan wilayah yang cerdas. Proses implementasinya dilakukan secara bertahap, sejalan, dan fleksibel, disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan setiap daerah. Ini mencakup seluruh urusan pemerintahan, termasuk urusan pemerintahan yang wajib untuk pelayanan dasar serta nonpelayanan dasar, dan juga urusan pemerintahan pilihan. Setiap urusan pemerintahan tersebut akan didukung oleh elemen pendukung yang sesuai.

Dalam rencana induk (*masterplan*) *smart city* Tahun 2018-2028, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terkait pembangunan dan pengembangan *smart city* harus sejalan dengan rencana pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara umum. Implementasi *smart city* terdiri dari enam komponen yaitu: tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Berbagai aspek yang diatur dalam peraturan tersebut diharapkan bisa diterapkan secara efektif dan efisien, dengan tujuan mencapai visi SPBE yang mengemukakan "Pencapaian sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh guna mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Penerapan SPBE di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari hasil evaluasi mandiri. Tingkat kematangan SPBE pada 2023 sebesar 4,08, namun demikian jika dibandingkan dengan lima kabupaten/kota ditambah DIY sendiri, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi ke tiga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 52 Indeks SPBE DIY dan Kabupaten se-DIY, 2021-2023

No	Nama Instansi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Indeks SPBE	Predikat	Indeks SPBE	Predikat	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kabupaten Bantul	3,62	Sangat Baik	3,84	Sangat Baik	3,72	Sangat Baik
2	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	3,49	Baik	3,02	Baik	4,22	Memuaskan
3	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	3,22	Baik	3,45	Baik	4,08	Sangat Baik
4	Pemerintah Kota Yogyakarta	2,98	Baik	3,36	Sangat Baik	3,41	Baik
5	Pemerintah Kabupaten Sleman	2,49	Cukup	3,19	Baik	4,29	Memuaskan
6	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	2,55	Cukup	2,62	Baik	2,84	Baik

Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, 2024

Tabel 2. 53 Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo, 2018-2023

Nama Indeks	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SPBE	2,69	2,91	3,36	3,22	3,45	4,08
Domain Kebijakan SPBE	2,47	2,00	3,30	3,5	3,6	4,20
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,14	1,86	3,30	3,5	3,6	4,20
Domain Tata Kelola SPBE	2,14	2,57	3,50	3,7	3,9	4,30
Perencanaan Strategis SPBE	2,00	3,00	3,00	2,75	3,25	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	3,00	3,50	4,5	4,5	5,00
Penyelenggara SPBE	n/a	n/a	4,50	4	4	5,00
Domain Manajemen SPBE	n/a	n/a	2,91	1	1,45	3,55
Penerapan Manajemen SPBE	n/a	n/a	3,13	1	1,13	3,75
Audit TIK	n/a	n/a	2,33	1	2,33	3,00
Domain Layanan SPBE	3,03	3,36	3,46	3,69	3,88	4,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	3,57	3,10	3,6	3,7	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,00	4,00	3,83	4,17	4,17

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2023

Evaluasi mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo masing-masing domain sebagai berikut: Domain Kebijakan SPBE, meliputi satu aspek, yaitu kebijakan internal tata kelola dengan nilai 3,60. Domain tata kelola SPBE dengan nilai 3,90 yang terdiri dari empat aspek perencanaan strategis SPBE dengan nilai 3,25. Teknologi informasi dan komunikasi dengan nilai 4,50, penyelenggaraan dengan nilai 4,00.

Domain manajemen SPBE dengan nilai 1,45 yang terdiri dari dua aspek yaitu penerapan manajemen (nilai 1,13) dan pelaksanaan audit TIK (nilai 2,33). Domain Layanan

SPBE (nilai 3,88) terdiri dari dua aspek yaitu layanan administrasi pemerintahan (nilai 3,70), dan Layanan publik (nilai 4,17).

Dari hasil evaluasi mandiri SPBE seperti terlihat dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam domain Manajemen SPBE, nilainya masih cenderung rendah bila dibandingkan dengan domain lainnya. Domain Manajemen SPBE ini terdiri dari dua aspek penilaian, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK.

Terdapat indikator-indikator yang dinilai belum memadai dalam aspek Penerapan Manajemen SPBE, seperti perencanaan dan pengaturan yang masih terbatas dalam kebijakan internal terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Layanan SPBE, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Keamanan Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, serta Manajemen Perubahan.

Di sisi lain, dalam aspek Audit TIK, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi dengan baik, seperti kurangnya kebijakan internal yang mengatur Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memegang peran penting sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

Dalam skema itu, PPID mengemban tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan dan dokumentasi. Sejalan dengan ketentuan ini, Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 tahun 2010 juga mengatur tentang peran dan tanggung jawab PPID. Dalam praktiknya, PPID Kabupaten Kulon Progo tidak hanya memberikan layanan permohonan informasi, tetapi juga berperan dalam menangani aduan serta menerima saran, kritik, dan usulan dari masyarakat. Ini semakin memperluas peran dan fungsi PPID, dengan tujuan untuk menjadikan pelayanan informasi dan tanggapan terhadap aduan masyarakat lebih sederhana, efisien, dan terjangkau.

Selama 2021, pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Layanan PPID (dalam hal ini Dinas Kominfo) Kabupaten Kulon Progo, via telepon, *website* PPID-Ku, serta program LAPOR dan audiensi dengan Bupati Kulon Progo dalam acara Kamis Pagian Bupati Kulon Progo, langsung dilayani sesuai dengan Peraturan Bupati No. 85 tahun 2012 tentang *Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah*, serta Pedoman Standar yang telah ditetapkan melalui SOP PPID Kabupaten Kulon Progo. Acuan SOP tersebut adalah Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 tahun 2010.

Sebagai sebuah lembaga publik, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mendirikan PPID dan 42 PPID Pembantu yang berlokasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembentukan ini diatur melalui Surat Keputusan Bupati No. 243 tahun 2011, yang kemudian mengalami beberapa revisi, termasuk SK Bupati No. 215 tahun 2013, SK Bupati No. 186 tahun 2017 tentang *Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi*, SK Bupati No. 244/B/2019 tentang *Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan* pada 2019, dan SK Bupati No. 265/A/2020 tentang *Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan* pada 2020. Dalam menjalankan tugasnya, PPID bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID, yaitu Sekretaris Daerah.

Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan sebagai berikut.

1. Anugerah Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY 2021 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik menuju informatif Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.
2. Penghargaan Top Digital Award 2021 dalam Kategori Top Digital Implementation 2021 dari Majalah IT-Works Jakarta.
3. Penghargaan menuju *smart city* untuk Kategori Dimensi *Smart Governance* 2021 dari Kementerian Kominfo RI.
4. Anugerah Terbaik II Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik menuju informatif Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.

2.3.2 Indeks Inovasi Daerah

Kebijakan inovasi daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan sebuah keniscayaan terutama dalam era penerapan tata kelola baru dalam bernegara (*new public management*). Hal tersebut berkaitan erat dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat serta peran pemerintah sebagai penyedia layanan dan pengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan sehari-hari masyarakat. Untuk itu pemerintah mengatur payung hukum inovasi daerah melalui PP No. 38 tahun 2017 tentang *Inovasi Daerah*, di mana definisinya adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang juga dikuatkan oleh Peraturan Bupati Kulon Progo No. 74 tahun 2019 tentang *Inovasi Daerah*.

Implementasi kebijakan inovasi daerah di Kabupaten Kulon Progo secara kuantitatif dapat dilihat dari evaluasi yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat berupa indeks inovasi

daerah. Indeks inovasi daerah ini secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri secara periodik tahunan.

Tabel 2. 54 Hasil Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2018-2023

No.	Tahun	Hasil Evaluasi Inovasi Daerah Kulon Progo	Hasil Evaluasi Inovasi Daerah Tertinggi/Ranking 1	Keterangan
1	2018	8 satuan inovasi	341 satuan inovasi	Peringkat 1; Kabupaten Banyuwangi, Kulon Progo peringkat 5
2	2019	31 satuan inovasi	186 satuan inovasi	Peringkat 1; Kabupaten Banyuwangi, Kulon Progo peringkat 2
3	2020	4.129	11.542	Peringkat 1; Kabupaten Situbondo, Kulon Progo peringkat 25
4	2021	56,64	84,19	Peringkat 1; Kabupaten Banyuwangi, Kulon Progo peringkat 37
5	2022	55,87	96,30	Peringkat 1; Kabupaten Banyuwangi, Kulon Progo peringkat 72
6	2023	58,44	91,72	Peringkat 1; Kabupaten Wonogiri, Kulon Progo peringkat 46

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

Banyaknya berbagai inovasi dan kreasi program dan kegiatan dari pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon Progo tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dan daerah.

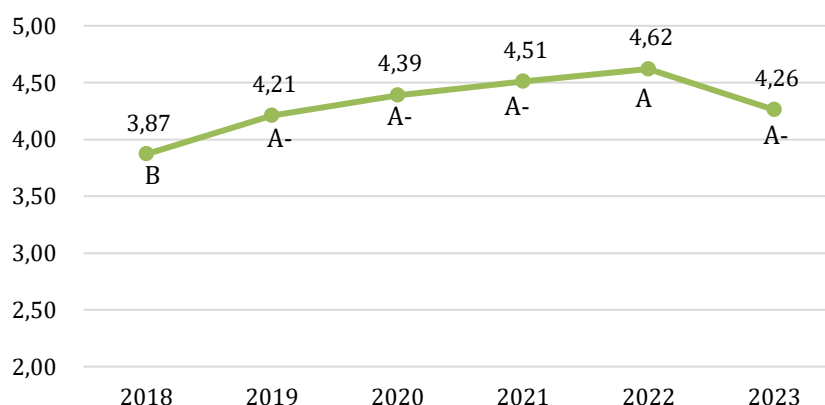
Beberapa output atau keluaran dari program inovasi daerah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.

- 1) Program tematik “Bela Beli Kulon Progo” yang sudah diadopsi menjadi salah satu kebijakan nasional dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi;
- 2) Program inovasi *PanganKu* dengan menciptakan semangat “*Yen bisa nandur ngapa kudu tuku*” yang mengunggulkan diversifikasi pangan lokal untuk mencapai ketahanan pangan masyarakat Kulon Progo;
- 3) Inovasi gerakan masyarakat “Gayeng Regeng Belanja Bareng” yakni dengan gerakan bersama untuk belanja di warung atau toko tetangga sendiri;
- 4) Program modifikasi dan replikasi BPNT (Bantuan Pangan NonTunai) sebagai program intervensi perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah dengan melibatkan penyedia logistik (Gapoktan, Pokdakan, Koperasi), perantara transaksi (Bank Daerah) dan penerima logistik (Warga Miskin) dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo sendiri.

2.3.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 17 tahun 2017 menjadi alat untuk mengevaluasi pelayanan publik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sumber daya manusia, aspek infrastruktur, dan informasi. Hal ini mencakup sisi sistem pelayanan publik, sisi saran dan pengaduan, serta sisi inovasi. Pembuatan indikator IPP didasarkan pada enam prinsip tata kelola pelayanan publik yang baik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, aksesibilitas) dan enam aspek evaluasi kinerja pelayanan publik oleh lembaga pemerintah (Kebijakan Pelayanan, Infrastruktur, Konsultasi dan Pengaduan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan).

Berikut perkembangan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo selama enam tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 2. 28 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo, 2018-2023

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

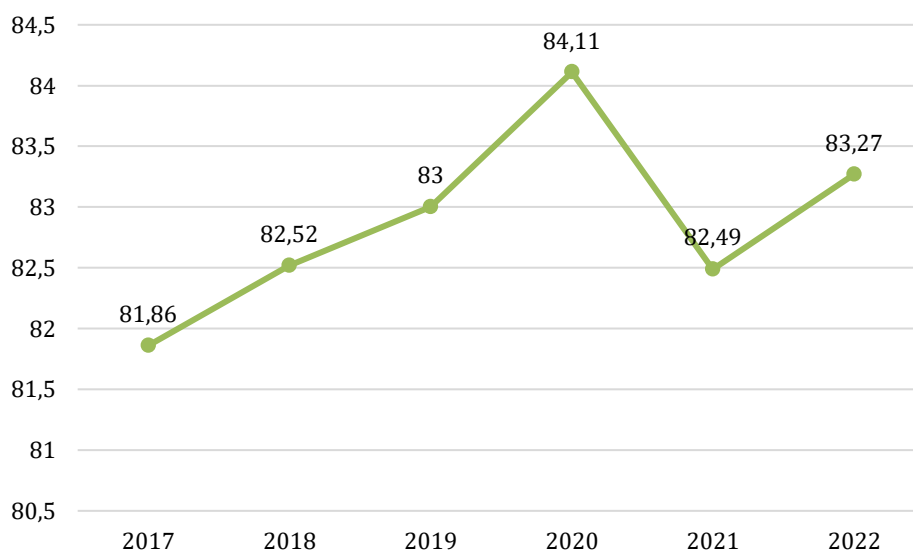
Berdasarkan pada grafik di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat di setiap tahun selama lima tahun, dimulai dari 3,81 dengan kategori B (baik) pada 2018 menjadi 4,62 dengan kategori A (pelayanan prima) pada 2022. Kategori “pelayanan prima” berarti bahwa unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terus melakukan terobosan yang menunjang pelayanan publik. Dalam hal ini Unit Pelayanan Publik yang diuji pada 2022 adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada 2023, Kulon Progo mengujikan tiga Unit Pelayanan Publik, yaitu Kapanewon Nanggulan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta RSUD Wates

di mana ketiganya mendapat kategori “A minus”, sehingga Indeks Pelayanan Publik 2023 Kabupaten Kulon Progo mendapat kategori “A minus” dengan skor 4,26.

Nilai indikator tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hasil nilai akhir saja, namun juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam peningkatan pelayanan, sehingga kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat mengidentifikasi aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih mengalami peningkatan.

Dalam hal pelayanan umum, terdapat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang digunakan untuk mengukur nilai tingkat kepuasan dan keluasan hidup masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pelayanan publik, akses terhadap fasilitas, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai IKM yang meningkat pada periode 2017 hingga 2020, lalu terjadi penurunan pada 2021 (82,49). Pada 2022, terjadi peningkatan kembali terhadap indikator kepuasan masyarakat. Penurunan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah terjadinya pandemi Covid-19.



Gambar 2. 29 Perkembangan IKM Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2023

Akuntabilitas kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik perlu diukur untuk mengetahui capaian target yang telah dipenuhi. Satu di antara cara untuk merepresentasikan akuntabilitas kinerja adalah eksistensi personel Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah personel ASN merupakan tolok ukur mendasar sebagai elemen pelaksana roda pemerintahan. Data jumlah personel ASN secara *time series* dapat menggambarkan ketercukupan kebutuhan sumber daya manusia dalam menjalankan urusan pelayanan publik.

Secara rinci, perkembangan jumlah ASN dalam kurun waktu 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 55 Perkembangan Jumlah ASN Kulon Progo, 2014-2023

No.	Tahun	Jumlah ASN	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
1	2014	8.047	9.494	-1.447	84,76%
2	2015	7.889	9.470	-1.581	83,31%
3	2016	7.624	9.438	-1.814	80,78%
4	2017	6.618	8.957	-2.339	73,89%
5	2018	6.023	8.853	-2.650	70,06%
6	2019	6.239	9.188	- 2.949	67,90%
7	2020	6.231	9.340	-3.109	66,71%
8	2021	5.870	10.149	-4.279	57,84%
9	2022	5.660	9.591	-3.931	59,01%
10	2023	6.132	9.591	-3.459	63,93%

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Secara garis besar, rasio kuantitas riil ASN terhadap kebutuhan terus menurun sejak 2014. Hal ini menandakan bahwa jumlah ASN eksisting masih di bawah angka kebutuhan setiap tahun. Apabila ketidakseimbangan jumlah riil dan kebutuhan terus terjadi, maka rata-rata beban kerja setiap personel tentu meningkat untuk menutupi kekurangan SDM secara kuantitas. Misalnya, pada 2021 rasio riil ASN hanya mencukupi 57,84 persen dari kebutuhan. Dengan demikian, satu personel harus bisa mengemban kinerja dua sampai tiga orang.

Penurunan rasio dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pengurangan pegawai yang terjadi secara kontinu dan penerimaan yang hanya diadakan selama kurun waktu terbatas. Meskipun pada 2023 nilai rasio personel riil mengalami peningkatan, upaya penyerapan pegawai sangat diperlukan untuk mengurangi beban kerja yang dapat menurunkan efektivitas kinerja terhadap pelayanan publik.

Sebagai tanggapan terhadap risiko kekurangan pegawai beberapa tahun ke belakang, pada 2018 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengadakan seleksi tenaga kontrak yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Tenaga kontrak yang direkrut sebanyak 105 personel. Sedangkan pengadaan formasi CPNS 2019, penerimaan SK Bupati sudah terlaksana pada Januari 2021, dengan jumlah CPNS 357 personel.

Meskipun ada penambahan formasi CPNS, rasio kuantitas riil ASN terhadap kebutuhan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tetap masih besar (66,90 persen) dan solusi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengikat kerja sama dengan Tenaga NonASN yang tersedia tanpa melakukan rekrutmen ulang, karena sesuai amanat PP

No. 49 tahun 2018 tentang *PPPK*, bahwa Pemda tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga nonASN selain *PPPK* yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

2.3.4 Evaluasi Kebijakan Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada 2023, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh indeks RB 83,00 (kategori A). Perolehan nilai ini merupakan penjumlahan antara nilai RB General sebesar 72,58 dengan nilai RB Tematik sebesar 10,42. Nilai 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat RB Tematik. Penghitungan nilai indeks 2023 terdiri atas 42 komponen yang terdiri dari 27 komponen RB General dan 15 RB Tematik.

Terkait dengan Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut.

1. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
2. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan;
3. Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan;
4. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
5. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi;
6. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/kegiatan;
7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi;
8. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan;

9. Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan.

Perkembangan lembaga keuangan bank dan nonbank serta BUMD di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 cenderung stabil di angka 24 unit. Sementara dari 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (47 unit), namun kembali mengalami penurunan hingga 2022 menjadi 38.

Dari jumlah lembaga, terdapat peningkatan jumlah unit bank milik daerah, di mana pada 2015 terdapat 29 unit dan terus meningkat hingga 2022 menjadi 38 unit, antara lain dengan dibukanya kantor kas dan atau kantor cabang pembantu Perumda BPR Bank Kulon Progo maupun PT Bank BPD DIY di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah BPR/BPRS juga menunjukkan peningkatan di akhir 2022.

BUMD dengan unit-unit usahanya terdiri dari Perumda BPR Bank Kulon Progo, PT Selo Adikarto, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, dan Perumda Air Minum Tirta Binangun. Sampai dengan 2022 Perumda BPR Bank Kulon Progo telah mengembangkan pelayanan keuangan melalui satu kantor pusat, 14 kantor kas dan satu *payment point* yang tersebar di 12 kapanewon.

Tabel 2. 56 Perkembangan Lembaga Keuangan dan BUMD Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Keterangan	Tahun										Satuan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Lembaga keuangan, perbankan											
a. Bank Pemerintah	-	24	24	24	24	24	47	40	38	36	PT Bank BRI : 25 unit. Bank Syariah Indonesia 1 unit, PT Bank BTN 1 unit, PT Bank Mandiri 6 unit PT Bill 46; 3 unit
b. Bank Milik Daerah	-	29	29	29	29	29	34	37	38	37	1. PT Bank BPD DIY : unit kantor cabang, 15 unit kantor cabang pembantu, 5 unit kantor fungsional; 2. Perumda BPR Bank Kulon Progo: 1 unit kantor pusat 14 unit kantor kas, 1 unit payment point

Keterangan	Tahun										Satuan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
c. Bank Swasta	-	6	6	6	6	6	6	3	4	4	unit
d. BPR/ BPRS	-	10	10	10	12	12	17	18	18	19	unit (di luar Perumda BPR Bank Kulon Progo)
e. BUKP (Badan Usaha Kredit Perdesaan)	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	unit (lokasi ada di setiap kapanewon, Kapanewon Pengasih dan Kapanewon kokap masing-masing memiliki 2 unit)
f. Pegadaian	-		5	5	5	5	6	6	6	6	unit
Jumlah Unit Usaha Daerah											
a. Jumlah BUMD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	unit (Perumda Air Minum Tirta Binangun, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo. PT Selo Adikarto, perumda BPR Bank Kulon Progo)
b. Jumlah perumda	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	unit (Bidang Usaha perdagangan, Jasa. Industri, Bidang perbankan, Unit PDAM)
c. Jumlah PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unit (Bidang Usaha Asphalt Mixing Plant)
d. Jumlah BPR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	unt
e. Jumlah PDAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	unit (terdapat 10 und pelayanan PDAM Yang berlokasi di kapanewon

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pada 2022 terdapat 491 unit lembaga keuangan, yang terdiri dari 61 Bank Umum Konvensional, dua Bank Umum Syariah, 32 Bank Perkreditan Rakyat Konvensional, dua Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta 10 Industri Keuangan Nonbank Konvensional, dan 384 unit lembaga keuangan lainnya.

Dalam analisis sebaran berdasarkan wilayah kapanewon, Wates memegang posisi teratas dengan hal jumlah lembaga keuangan (114 unit). Di sisi lain, Girimulyo dan Kalibawang memiliki jumlah lembaga keuangan paling sedikit. Kapanewon Girimulyo memiliki 17 lembaga keuangan, sementara Kalibawang memiliki 25 lembaga keuangan.

Adanya distribusi lembaga keuangan di berbagai wilayah kapanewon diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat Kulon Progo. Masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap layanan perbankan, dan tidak perlu bepergian jauh untuk mengakses layanan tersebut karena sudah tersedia di wilayah mereka masing-masing.

Dengan meningkatnya literasi perbankan di masyarakat, diharapkan kegiatan ekonomi juga akan tumbuh. Akses terhadap kredit dan transaksi keuangan akan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga mendorong perkembangan ekonomi lokal. Lembaga keuangan juga dapat memperluas pangsa pasarnya dengan membuka cabang di berbagai wilayah kapanewon. Hal ini tercermin dalam tabel yang menunjukkan besaran simpanan masyarakat dan penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 57 Lembaga Keuangan, Perbankan, dan Perkreditan Kabupaten Kulon Progo, 2023

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	3	0	3	0	2	0	27	35
2	Wates	2	0	1	0	0	0	15	18
3	Panjatan	3	0	3	0	1	0	20	27
4	Galur	3	0	1	0	0	0	34	38
5	Lendah	3	0	1	0	0	0	23	27
6	Sentolo	2	0	3	0	0	0	23	28
7	Pengasih	3	0	1	0	0	0	25	29
8	Kokap	3	0	3	1	0	0	52	59
9	Nanggulan	2	0	1	0	0	0	26	29
10	Girimulyo	9	0	2	0	1	0	32	44
11	Samigaluh	7	0	3	0	1	0	44	55
12	Kalibawang	20	1	10	2	6	0	76	115
JUMLAH		61	60	1	32	3	11	0	397

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2. 58 Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2023

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah BUMD	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah Unit Usaha	Unit	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	Penyertaan Modal (Akumulasi)	Miliar rupiah	48,56	51,18	58,23	67,23	84,56	113,68	138,75	148,15	166,70	177,58
4	Modal Sendiri	Miliar rupiah	69,52	69,87	74,99	90,64	116,79	138,64	160,50	144,54	163,59	176,35
5	Volume Usaha (Omzet)	Miliar rupiah	177,29	181,68	184,12	182,82	182,61	210,38	149,51	179,25	181,67	208,23
6	Laba Bersih Tahun Berjalan (EAT)	Miliar rupiah	10,07	9,48	10,44	9,89	9,44	9,85	1,00	6,18	6,90	9,01
7	Laba yang disetor (PAD)	Miliar rupiah	4,4	3,23	5,46	5,63	5,18	5,38	3,89	4,15	3,35	3,82
8	Aset	Miliar rupiah	378,99	393,94	456,76	460,44	487,73	593,27	643,96	660,04	714,75	743,53

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Data di atas merupakan hasil penggabungan data dari empat BUMD di Kabupaten Kulon Progo. Keempat BUMD tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perumda BPR Bank Kulon Progo, BUMD ini berfokus pada sektor jasa keuangan dan perbankan.
2. PT Selo Adikarto, BUMD ini bergerak di bidang produksi dan penjualan produk Asphalt Mixing Plant (AMP).
3. Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, BUMD ini beroperasi dalam sektor perdagangan (termasuk SPBU/BBM), industri, dan jasa perbengkelan.
4. Perumda Air Minum Tirta Binangun, BUMD ini bertanggung jawab dalam penyediaan air minum bersih.

Penggabungan data dari keempat BUMD tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang dikelola oleh BUMD di Kabupaten Kulon Progo, mencakup sektor jasa keuangan, produksi, perdagangan, industri, dan penyediaan air minum.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BUMD di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan dari peningkatan ini adalah untuk memajukan

pertumbuhan ekonomi daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dalam rangka menciptakan peluang usaha baru, lapangan kerja, dan peningkatan PAD. BUMD yang menerima penyertaan modal terbesar adalah Perumda BPR Bank Kulon Progo.

Peningkatan penyertaan modal ini tercermin dalam upaya memenuhi syarat-syarat minimum dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana Perumda BPR Bank Kulon Progo memiliki dana kelolaan yang melebihi Rp300 miliar. Oleh karena itu, BUMD ini harus memenuhi persyaratan minimal untuk Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar Rp50 miliar. Hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2016 tentang *PD BPR Bank Pasar Kulon Progo*, yang mengatur tentang Modal Dasar Pemerintah Daerah dalam PD BPR Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp50 miliar.

Pemenuhan modal dilakukan secara bertahap melalui penyertaan modal dan telah selesai pada 2020. Modal di BUMD secara umum juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan modal dari Pemda dalam bentuk uang dan aset, serta adanya perubahan dalam nilai ekuitas di masing-masing BUMD.

2020 merupakan tahun di mana terjadi penurunan omzet dan laba BUMD, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Namun, pada 2021 terjadi peningkatan omzet di beberapa BUMD. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti di PT Selo Adikarto yang belum menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laba 2019, yang dianggap sebagai utang kepada Pemerintah Kabupaten.

Keempat BUMD memiliki dinamika yang berbeda. Perumda Aneka Usaha mengalami penurunan omzet pada usaha SPBU, perbengkelan, dan perdagangan umum. Perumda Air Minum “Tirta Binangun” tidak terlalu terdampak oleh pandemi dan justru mengalami kenaikan omzet dan laba. Namun, laba Perumda Air Minum “Tirta Binangun” juga mengalami penurunan karena meningkatnya biaya penyusutan atas aset yang diserahkan sebagai tambahan penyertaan modal.

Secara keseluruhan, kinerja BUMD pada 2023 menunjukkan penurunan dalam bagian laba yang diserahkan kepada Pemda atas penyertaan modalnya di BUMD. Selengkapnya perkembangan Lembaga BUMD pada 2023 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 59 Lembaga Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023

BUMD	Unit Usaha	Penyertaan Modal (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	Omset (Rp.)	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	Laba yang disetor (Rp.)	Aset (Rp.)
Bank Kulon Progo	1	60.000.000.000	78.563.316.466	49.029.265.277	4.616.771.515	2.400.000.000	605.699.597.831
PT. Selo Adikarto	1	32.149.300.000	5.006.333.918	49.742.713.545	471.335.157	151.811.387	42.265.292.464
Perumda Air Minum Tirta Binangun	1	75.428.669.993	80.699.431.127	46.976.370.357	3.986.674.971	1.264.209.811	82.651.630.445
Perumda Aneka Usaha	4	10.000.000.000	12.084.075.157	62.480.886.715	-65.202.519	8.569.254	12.912.348.074
Jumlah	7	177.577.969.993	176.353.156.668	208.229.235.894	9.009.579.124	3.824.590.452	743.528.868.814

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023

2.3.4.1. Penelitian dan Pengembangan

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas inovasi berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi tantangan kemiskinan. Investasi dalam sistem pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berkelanjutan merupakan kunci untuk mengembangkan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan dan kesadaran lingkungan adalah hal yang krusial dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, bersih, dan kreatif, terutama bagi negara-negara berkembang.

Strategi pembangunan yang efektif perlu didasarkan pada pemanfaatan pengetahuan dan teknologi yang terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan secara lingkungan. Tidak dapat diabaikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi, yang muncul melalui proses akal, kreativitas, inovasi, dan perenungan, memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk kemajuan peradaban manusia.

Prinsip otonomi daerah memberikan peluang nyata bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan demokratis dengan kebebasan yang disertai tanggung jawab, termasuk kebebasan berpikir, berkarya, berbicara, dan berpendapat. Pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan ruang kebebasan ini secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah secara berkelanjutan.

Negara berkembang seperti Indonesia perlu mendukung pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan perlu mendorong peningkatan sumber daya manusia yang produktif.

Kulon Progo memiliki berbagai potensi strategis yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Dengan jumlah penduduk yang signifikan pada 2022, Kulon Progo memiliki modal sosial yang berpotensi mendukung ekonomi lokal dan pasar domestik bagi produk-produk lokal.

Slogan *Bela dan Beli Kulon Progo* merupakan cara yang cerdas dan berwawasan masa depan untuk memperkuat industri lokal dan pasar domestik. Seperti yang dikatakan oleh Jagdish Bhagwati, perdagangan mendorong pertumbuhan dan pertumbuhan mengurangi kemiskinan. Perdagangan masih dianggap sebagai motor penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Konsep ini menciptakan pasar yang kuat untuk produk lokal, yang juga didukung oleh karakter budaya.

Bela dan Beli Kulon Progo merupakan ajakan untuk menjadi investor dalam pengembangan pasar dan peningkatan kualitas produk lokal. Dengan membeli produk lokal, masyarakat secara konsisten dapat menjadi investor dalam pembangunan berkelanjutan,

mendukung karakteristik produk berbasis budaya, dan menciptakan pondasi yang kuat bagi pasar lokal.

Konsep *Bela dan Beli Kulon Progo* bisa menjadi dorongan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan pasar domestik, pengembangan industri lokal, dan pengurangan kemiskinan. Karakter budaya suatu masyarakat dapat membentuk karakter produk lokalnya. Keberadaan pasar yang kuat untuk produk lokal adalah langkah penting dalam melestarikan budaya melalui pembangunan ekonomi lokal.

Dalam mendukung konsep *Bela dan Beli Kulon Progo*, penting untuk meningkatkan kapasitas produksi serta variasi dan kualitas produk. Pilihan produk lokal yang bervariasi, berkualitas baik, dan memiliki harga bersaing akan membangun kesetiaan konsumen terhadap produk lokal Kulon Progo.

Bela dan Beli Kulon Progo juga bisa menjadi cara untuk menggali potensi lokal melalui pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal. Pembangunan industri lokal berbasis ekonomi kerakyatan memerlukan teknologi yang murah dan mudah diakses melalui penerapan IPTEK.

Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional, terutama terkait sektor pertanian atau agronomi. Meskipun demikian, kehidupan petani dalam kenyataannya masih kurang sejahtera. Oleh karena itu, fokus pembangunan daerah harus beralih ke pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dengan memberikan perhatian khusus pada sektor agroindustri. Misalnya, penting untuk membangun teknologi yang mendukung pengembangan industri di bidang pertanian, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian melalui peningkatan nilai tambah produk. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan kerja di Kulon Progo.

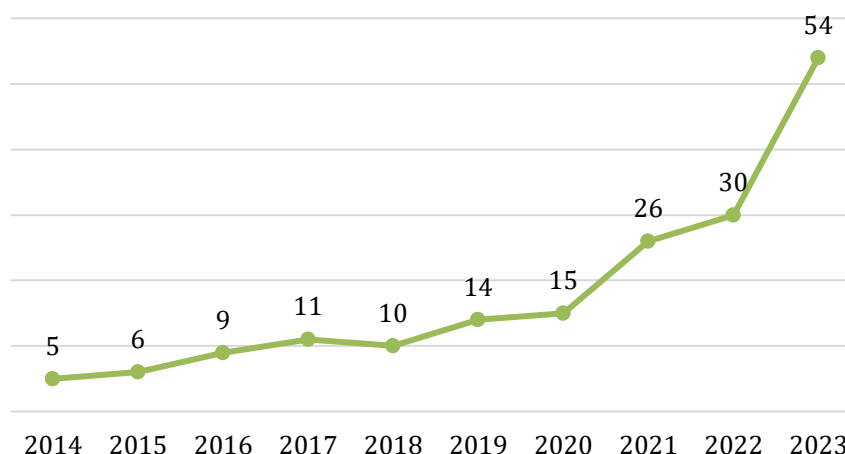
Dalam menghadapi tantangan tersebut, fokus harus diberikan pada penguatan industri dari hulu hingga hilir, yang meliputi peningkatan industri lokal untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk jadi dan konsumsi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki visi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk pertanian, dengan mengembangkan industri berbasis agronomi.

Salah satu contoh konsep ini adalah industri gula semut (*coconut sugar*). Saat ini, produksi gula semut di hulu memberikan penghidupan kepada ribuan penyadap nira kelapa yang umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo memiliki lahan yang cukup untuk membudidayakan kelapa secara ramah lingkungan. Jika produksi di hulu ditingkatkan, diperlukan industri di hilir yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi untuk konsumsi. Namun, hingga saat ini masih terbatas industri lokal yang mampu melakukan pengolahan tersebut.

Untuk mendukung konsep ini, masyarakat dapat berperan dalam penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan (IPTEK terapan) yang mendukung agroindustri di tingkat hilir serta pengembangan industri kreatif. Dengan demikian, akan tercipta nilai tambah pada produk, meningkatkan kualitas dan kapasitas produk. Pembangunan daerah yang sukses sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola potensi lokalnya. Produk-produk unggulan daerah yang didasarkan pada kreativitas, seni, dan budaya mampu menembus pasar global. Pengolahan sumber daya lokal dengan penambahan nilai (*value-added chain*) dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan.

Pemberian nilai tambah pada produk juga harus fokus pada peningkatan kualitas sehingga produk dapat diterima secara berkelanjutan dan mengikuti tren pasar. Pemerintah harus bersikap responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi.

Salah satu langkah yang diambil untuk memperkuat karakter produk lokal berbasis masyarakat adalah melalui kegiatan *Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh* yang diadakan setiap tahun. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan penerapan IPTEK dan inovasi di Kabupaten Kulon Progo, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk lokal yang berdaya saing. Animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebagai indikator keberhasilan dalam menerapkan IPTEK dan inovasi di daerah tersebut.



Gambar 2. 30 Perkembangan Jumlah Peserta Iptek Kreanova Menoreh Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Sumber data: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023

Kelembagaan Litbang di Kabupaten Kulon Progo saat ini diatur oleh Perda Kabupaten Kulon Progo No. 12 tahun 2021 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* yang menjadi dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Kulon Progo. Bappeda dipimpin kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 18 tahun 2023 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bappeda bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Mengacu pada Permendagri No. 17 tahun 2016 tentang *Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Bappeda, kegiatan kelitbangan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Daerah dengan kegiatannya yaitu sebagai berikut.

a. Kerja sama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat. Terdapat 27 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kerja sama ini dalam bentuk Penelitian serta Pemberdayaan Masyarakat melalui Penerapan Hasil Litbang dan Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), dengan hampir seluruh Universitas di DIY, dan sebagian Jawa Tengah

b. Penerapan Hasil Litbang Terpilih

Kegiatan ini merupakan fasilitasi atas hasil litbang berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dilaksanakan dari 2020 sampai dengan sekarang dengan kategori hasil litbang terpilih dari Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi. Fasilitasi Penerapan Litbang Terpilih kepada Masyarakat Kabupaten Kulon Progo berupa biaya pelatihan, peralatan, dan honor narasumber.

c. Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah

Pada 2018, Kabupaten Kulon Progo memperoleh Penghargaan “Anugerah Inovasi Indonesia” dari Kemenristekdikti (3 besar Nasional Kategori Pemerintah Daerah Inovatif).

d. Kerja sama Kelitbangan dengan Lembaga Litbang

Beberapa lembaga litbang yang telah bekerja sama antara lain sebagai berikut.

- LIPI

- Penerapan Manajemen Pakan Ternak Fermentasi untuk ruminansia di Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates.
- Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan bagi Nutrisisionis Puskesmas Kabupaten Kulon Progo.
- BPPT: Percontohan Penambangan Emas Tanpa Merkuri di Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap

- BRIN: Pemberdayaan Petani melalui Korporasi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Kulon Progo.
- Fab Lab Jogja: Penyelenggaraan Fabcamp Challenge 2023.

Dalam melaksanakan kegiatan riset dan inovasi, Bappeda Kabupaten Kulon Progo telah menjalin kerja sama riset dan inovasi dengan berbagai pihak terkait, seperti perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, instansi vertikal, serta lembaga swasta. Kerja sama dalam rangka riset dan inovasi yang pernah/sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 60 Daftar Kerja sama Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dengan Berbagai Lembaga

NO	Lembaga	RUANG LINGKUP	URUSAN YANG DIKERJASAKAN
1.	UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA (UJB)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
2.	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD) YOGYAKARTA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
3.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN YOGYAKARTA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
4.	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM YOGYAKARTA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
5	UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA (UKDW)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
6	UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA (UCY)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
7	POLTEKKES KARYA HUSADA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
8	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
9	UNIVERSITAS BSI	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
10	POLITEKNIK STATISTIK STSI	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
11	SEKOLAH TINGGI AKBIDYO	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia

NO	Lembaga	RUANG LINGKUP	URUSAN YANG DIKERJASAMAKAN
12	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
13	UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
14	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA (UNRIYO)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
15	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
16	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
17	Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTAD)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
18	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
19	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
20	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
21	UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
22	UNIVERSITAS ATMA JAYA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
23	UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA (UNISA)	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
24	SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
25	INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) YOGYAKARTA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
26	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat	Penerapan IPTEK serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sumber daya Manusia
27	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)	Pelaksanaan Tridharma PT	Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat
28	PT DELTOMED	Pengembangan Ekonomi Lokal, Kemanusiaan dan	Ekonomi Lokal, Kemanusiaan dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	Lembaga	RUANG LINGKUP	URUSAN YANG DIKERJASAMAKAN
		Pemberdayaan Masyarakat	dan bidang lainnya yang disepakati Para Pihak
29	MITRA INDO CONSULTANCY	Penelitian dan Pengembangan Solar Panel di Wilayah Kulon Progo	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kulon Progo, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kulon Progo yang terintegrasi dengan Bappeda Kabupaten Kulon Progo. BRIDA yang akan dibentuk adalah dengan mengoptimalkan Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian pada Bappeda Kulon Progo menjadi Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Adapun pedoman peraturan terkait pembentukan BRIDA antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 78 tahun 2021 tentang *Badan Riset dan Inovasi Nasional*.

Pasal-pasal yang terkait yaitu sebagai berikut.

Pasal 66 ayat (1): BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.

Pasal 66 ayat (2): Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 67: BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

2. Permendagri No. 7 tahun 2023 tentang *Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah*

Dalam peraturan ini disebutkan pada pasal 13 bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA yang dilakukan dengan cara penggabungan. Selanjutnya, fungsi BRIDA yang digabung dengan BAPPEDA diwadahi paling banyak dua kelompok JF yaitu fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, dan
- b) Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka dalam rangka pembentukan BRIDA, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berencana untuk mengintegrasikan BRIDA ke dalam Bappeda Kabupaten Kulon Progo menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo.

2.3.4.2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam upaya mendukung adanya proses perumusan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait dengan kebijakan daerah maka salah satunya dapat dilihat atau ditinjau berdasarkan aspek kapasitas fiskal daerahnya. Secara definitif, kapasitas fiskal daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan masing-masing daerah yang tercermin melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu, dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Dalam hal ini, besaran nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah memiliki lima klasifikasi Kapasitas Fiskal Daerah dengan rentang $RKFD < 1,302$ = sangat rendah hingga $2,793 < RKFD$ = sangat tinggi. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dapat diketahui melalui Peraturan Menteri Keuangan RI secara *time series* dari waktu ke waktu. Adapun, berikut merupakan kondisi dan capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah meliputi:

Tabel 2. 61 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2014-2022

Tahun	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
2014	0,09	Rendah
2015	0,21	Rendah
2016	0,73	Sedang
2017	0,762	Rendah
2018	1,003	Sedang
2019	0,730	Rendah
2020	0,913	Sedang
2021	1,492	Rendah
2022	1,174	Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo secara umum mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut tercermin melalui capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang naik dan turun seiring dengan perkembangan waktu. Pada 2014, capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dinilai berada pada angka 0,09 dengan kategori “rendah”. Pada tahun berikutnya 2018, diketahui Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah 1,003 dengan kategori “sedang”. Pada 2022, dapat diketahui bahwa capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah sebesar 1,174 dengan kategori “rendah”.

Menindaklanjuti capaian tersebut, meskipun capaian mengalami tren peningkatan, namun jika ditinjau secara kategorinya, maka sejatinya capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo masih didominasi oleh kategori “rendah” dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Kulon Progo dalam hal pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu, nilainya masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Kondisi ini merupakan salah satu evaluasi penting yang perlu untuk dibenahi bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, karena sesungguhnya kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerahnya dari tahun ke tahun masih rendah. Perlu adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan dalam sistem pemerintahan, sehingga diharapkan capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tersebut dapat menjadi jauh lebih baik di masa mendatang.

2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah total dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik dalam periode tertentu. Hasil dari aktivitas ekonomi, tanpa memperhatikan faktor produksi tersebut berasal dari penduduk setempat atau dari luar wilayah (BPS 2016). Dengan kata lain, PDRB dapat mencerminkan kapabilitas suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan jasa.

Besarnya nilai PDRB terkait erat dengan penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan semangat berwirausaha masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan kegiatan

ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tercermin dalam PDRB, baik dalam nilai konstan maupun dalam nilai aktual.

Analisis ekonomi suatu wilayah melibatkan beberapa faktor, seperti PDRB dalam nilai konstan (riil) yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB dalam nilai aktual (nominal) yang mencerminkan kemampuan ekonomi wilayah dalam menghasilkan sumber daya, distribusi PDRB yang mengindikasikan struktur perekonomian atau peran berbagai kategori ekonomi di wilayah tersebut.

Secara umum, nilai PDRB ADHB Kabupaten Kulon Progo terus mengalami kenaikan, kecuali dari 2019 hingga 2020. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda akhir Triwulan-I 2020. Meskipun demikian, penurunan dalam intensitas yang tidak begitu besar, dan berhasil meningkat kembali (*rebound*) pada 2021 sampai 2023.

Peningkatan yang terjadi dalam 3 tahun tersebut cukup tinggi, yaitu menjadi Rp15,85 triliun (2023). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adaptasi kenormalan baru yang didukung dengan kebangkitan seluruh sektor lapangan usaha pascapandemi Covid-19. Pada 2023, seluruh sektor mengalami kenaikan nilai PDRB tanpa terkecuali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor lapangan usaha di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai titik efektif dalam pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa.

Tabel 2.62 PDRB Kabupaten Kulon Progo (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah), 2014-2023

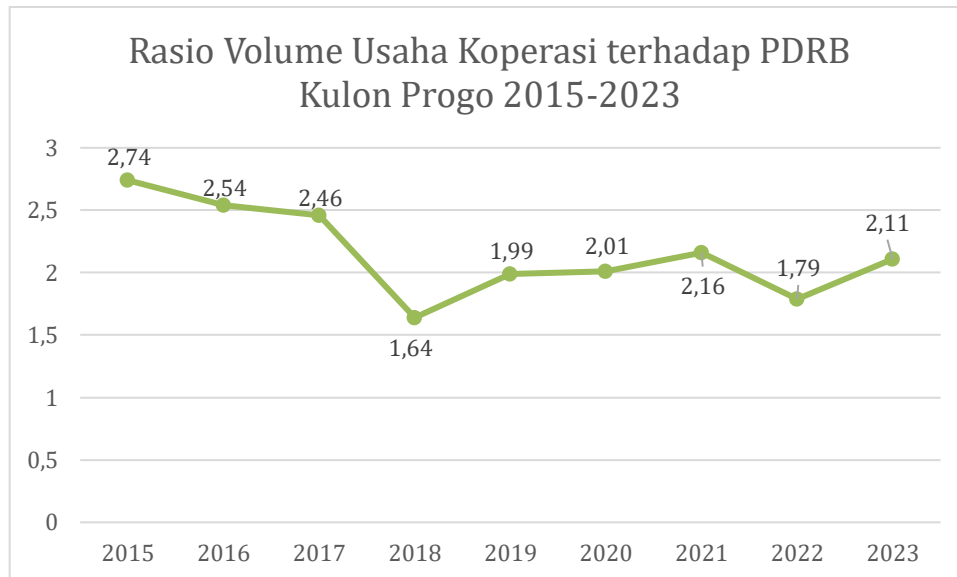
Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.442,66	1.566,77	1.656,16	1.725,34	1.817,87	1.906,26	1.959,67	2.041,72	2.227,68	2.444,81
B	Pertambangan dan Penggalian	101,82	109,89	115,21	131,69	168,49	177,13	163,61	167,39	179,37	205,75
C	Industri Pengolahan	871,87	925,81	1.023,91	1.124,65	1.240,50	1.321,33	1.299,02	1.371,30	1.478,34	1.577,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,86	5,66	6,82	8,35	9,02	10,02	9,83	10,08	11,08	12,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,01	10,52	11,01	11,96	12,74	13,92	14,31	15,46	16,56	17,41
F	Konstruksi	602,70	649,78	708,41	824,93	1.376,34	2.388,77	1.957,14	2.090,20	2.226,42	2.365,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	928,41	1.008,69	1.132,30	1.263,36	1.389,39	1.483,24	1.485,15	1.545,22	1.761,13	1.871,59
H	Transportasi dan Pergudangan	593,00	636,39	668,63	709,04	773,04	906,19	1.004,96	1.133,15	1.742,60	2.374,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,89	296,72	321,64	349,98	377,88	413,19	393,2	453,73	544,72	597,42
J	Informasi dan Komunikasi	364,48	382,52	414,31	451,34	488,91	514,09	600,12	748,34	808,11	829,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	229,41	255,82	273,52	287,56	317,06	348,7	329,36	352,05	406,47	455,93
L	Real Estate	233,58	256,04	280,55	305,76	330,86	362,48	386,42	397,32	423,06	444,05
M, N	Jasa Perusahaan	20,30	22,11	23,34	25,11	27,29	30,25	31,49	34,73	38,71	43,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615,52	684,13	758,94	844,50	907,12	959,94	949,83	964,12	1.031,93	1.071,59
P	Jasa Pendidikan	209,07	461,61	485,15	530,26	571,36	612,04	632,96	678,67	714,68	772,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,50	112,61	122,04	133,32	142,36	154,74	189,18	203,07	221,36	248,28
R, S, T, U	Jasa Lainnya	260,50	286,47	310,06	333,33	362,28	393,49	331,85	393,27	471,31	515,70
PDRB ADHB		7.056,57	7.671,55	8.312,00	9.060,47	10.312,52	11.995,77	11.738,12	12.599,82	14.303,54	15.847,21

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

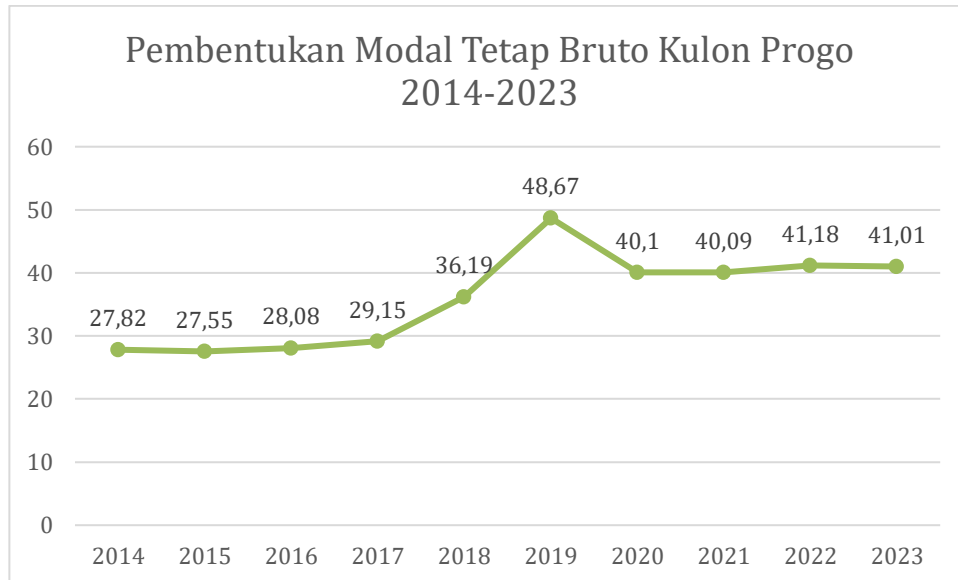
Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada nilai PDRB ADHB. Beberapa di antaranya meliputi rasio volume usaha koperasi, pembentukan modal tetap bruto, dan rasio pajak daerah terhadap PDRB. Rasio volume usaha koperasi merupakan indikator yang menunjukkan persentase nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa yang akan mendatangkan pendapatan koperasi berupa SHU terhadap PDRB. Nilai ini dapat merepresentasikan kontribusi koperasi terhadap perekonomian Kulon Progo. Rincian rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 31 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Selain rasio volume usaha koperasi, pembentukan tetap modal bruto perlu diperhatikan guna menganalisis tingkat investasi dalam ekonomi daerah. Perhitungan pembentukan tetap modal bruto biasanya mencakup investasi dari sektor swasta dan publik. Semakin tinggi Tingkat investasi, maka semakin tinggi potensi pertumbuhan ekonomi. Berikut gambaran rangkaian data pembentukan tetap modal bruto Kabupaten Kulon Progo selama periode 2014-2023.

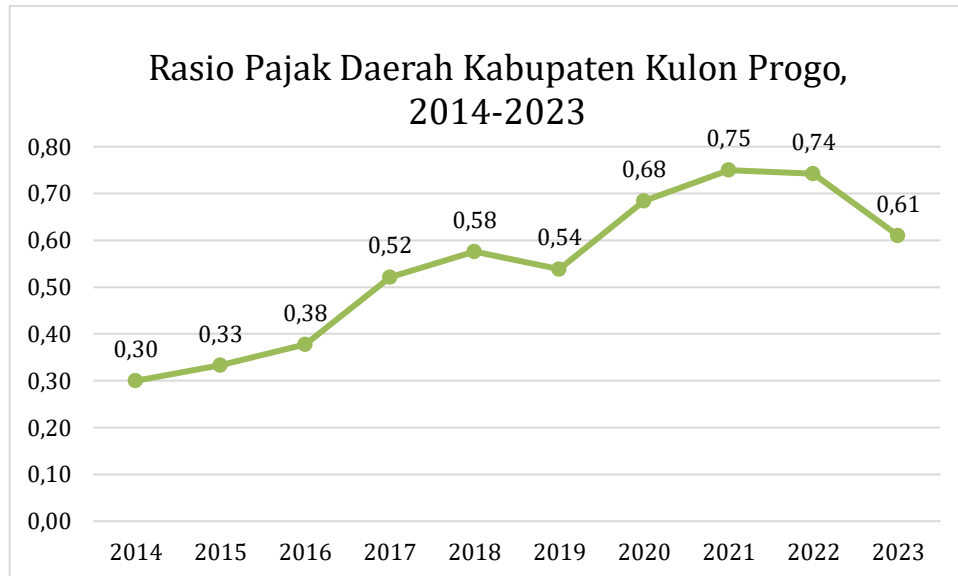


Gambar 2. 32 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Rasio pajak daerah merupakan indikator selanjutnya untuk melihat perkembangan struktur ekonomi secara prospektif. Indikator tersebut digunakan untuk memproyeksikan pembiayaan domestik guna pelaksanaan program, pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, serta pengembangan sistem perpajakan.

Semakin tinggi nilai rasio pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima daerah tersebut sehingga mempermudah alokasi pembiayaan pembangunan daerah. Tren rasio pajak daerah Kulon Progo selama periode 2014-2023 menunjukkan bahwa rasio pajak daerah Kabupaten Kulon Progo belum mampu mencapai satu persen. Hal ini cukup disayangkan, karena Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai potensi pajak daerah dari berbagai faktor, seperti dari sektor pertanian. Lebih lanjut, data rasio pajak daerah Kabupaten Kulon Progo dapat diamati melalui grafik berikut.



Gambar 2. 33 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

PDRB berdasarkan harga konstan dengan perhitungan tahun dasar 2010 menunjukkan dinamika yang sejalan dengan PDRB ADHB. Data tersebut memperlihatkan kenaikan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Nominal kenaikan terbesar diketahui terjadi dari 2018 sampai 2019 menjadi Rp8,77 triliun. Kenaikan tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh kenaikan lapangan usaha konstruksi, yang disebabkan oleh masifnya pembangunan di lokasi Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan sekitarnya.

Selanjutnya, terjadi sedikit penurunan pada 2020 dengan total Rp8,41 triliun akibat Pandemi Covid-19. Kenaikan capaian PDRB meningkat pada 2021 menjadi Rp8,83 triliun sebagai dampak implementasi era kenormalan baru. Peningkatan ideal akhirnya dapat dicapai kembali saat memasuki 2022, yakni menjadi Rp9,41 triliun.

Tabel 2. 63 PDRB Kabupaten Kulon Progo (ADHK 2010) Menurut Lapangan Usaha (dalam miliar rupiah), 2014-2023

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.120,17	1.138,92	1.155,84	1.178,30	1.196,63	1.217,36	1.224,9	1.244,66	1.267,83	1.283,51
B	Pertambangan dan Penggalian	91,49	91,99	93,34	106,25	134,56	138,95	127,05	124,14	125,78	134,03
C	Industri Pengolahan	755,84	782,47	829,27	892,97	963,53	1.014,22	978,8	988,12	1.009,2	1.051,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,03	6,21	7,13	7,39	7,68	8,3	8,2	8,4	8,95	9,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,34	8,52	8,72	9,12	9,62	10,47	10,69	11,35	11,84	12,22
F	Konstruksi	508,86	530,76	563,69	632,72	1.010,66	1.704,37	1.390,05	1.446,02	1.491,35	1.565,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	796,72	848,66	904,62	977,55	1.045,25	1.099,46	1.081,96	1.098,63	1.169,54	1.215,41
H	Transportasi dan Pergudangan	512,69	531,19	544,96	564,61	603,97	668,05	704,85	772,84	1.018,3	1.207,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219,37	231,15	244,03	256,64	274,28	296,82	281,61	311,06	350,67	378,15
J	Informasi dan Komunikasi	378,09	398,65	430,83	456,08	489,53	516,72	605,44	710,78	747,07	780,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	175,75	189,97	197,98	200,12	213	230,09	218,87	221,9	233,95	257,89
L	Real Estate	213,56	226,91	238,85	254,09	268,08	284,16	297,39	298,98	307,75	317,21
M, N	Jasa Perusahaan	19,56	20,89	21,56	22,68	24,01	25,87	26,54	28,64	30,63	33,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	488,81	513,34	545,21	571,32	596,14	616,53	596,45	584,77	601,66	613,82
P	Jasa Pendidikan	378,04	405,42	419,14	449,16	473,84	495,44	501,58	523,43	529,63	548,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91,00	97,50	102,76	109,62	115,83	122,34	144,68	150,79	157,67	165,99
R, S, T, U	Jasa Lainnya	240,00	259,24	272,74	284,76	301,79	321,59	269,25	313,53	357,25	376,63
PDRB ADHK		6.004,32	6.281,89	6.580,68	6.973,41	7.728,41	8.770,75	8.468,29	8.838,03	9.419,1	9.951,95

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

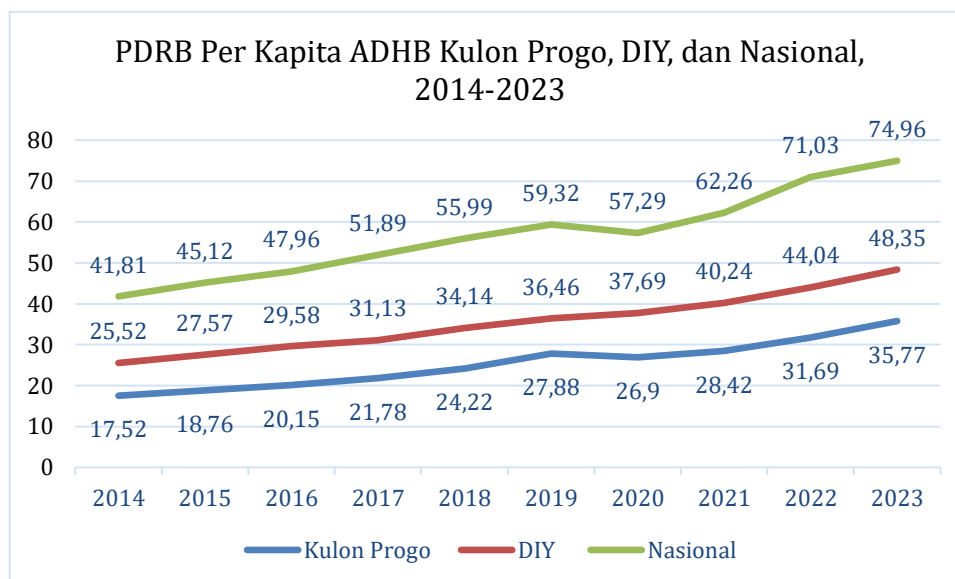
Indikator lain yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB adalah jumlah kredit/PDRB total. Jumlah kredit total terhadap PDRB digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap nilai produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Kredit dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi, antara lain investasi, ekonomi, dan produksi. Kredit total yang tinggi menunjukkan bahwa aktivitas kredit memberikan dorongan yang besar terhadap aktivitas ekonomi. Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai total kredit/PDRB pada 2022 sebesar 26,61 persen dan menurun menjadi sebesar 25,03 persen (2023).

2.4.1.2 PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita dihitung dengan cara membagi nilai PDRB (berdasarkan harga berlaku pada tahun yang sama) dengan jumlah penduduk pada periode tersebut. Pendapatan per kapita mencerminkan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima setiap penduduk di suatu wilayah.

Angka PDRB per kapita dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin meningkat pula kesejahteraan penduduknya. Guna mengukur kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kulon Progo dalam skala yang lebih luas, penyajian data PDRB per kapita dapat dilakukan bersamaan dengan perhitungan dalam skala provinsi dan nasional.

Berdasarkan perbedaan ketiga nilai PDRB per kapita yang mewakili, diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai PDRB per kapita yang cukup rendah, yakni antara Rp17,52 juta sampai Rp35,77 juta. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi sumber daya dan potensi daerah, agar setiap sektor lapangan usaha dapat meningkatkan hasil produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut secara langsung akan membantu proses eskalasi nilai PDRB per kapita daerah.



Gambar 2. 34 PDRB per Kapita ADHB Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023 (juta rupiah)

Sumber: BPS Kulon Progo, Prov. DIY, Nasional, 2023

Keterangan : *) Angka sementara

**) angka sangat sementara

2.4.1.3 Distribusi Persentase PDRB

Informasi tentang distribusi PDRB (persentase) berdasarkan lapangan usaha dapat memberikan gambaran tentang komposisi ekonomi wilayah, dengan cara menghitung proporsi masing-masing bagian terhadap PDRB total. Struktur ekonomi suatu daerah akan terus mengalami perubahan seiring berubahnya kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Analisis ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan peran sektor-sektor ekonomi melalui perhitungan persentase PDRB dari masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan PDRB ADHB, sebagian besar angka pencapaian berbagai sektor lapangan usaha mengalami fluktuasi. Hal ini dicerminkan dari pencapaian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang porsinya mengalami penurunan (2019), kemudian kembali meningkat di 2020. Selanjutnya, dalam periode 2020-2023, diketahui kontribusi sektor ini cenderung menurun.

Pergerakan persentase sektor ekonomi utama ini seringkali bersaing dengan sektor konstruksi yang juga mulai bergerak naik. Porsi sumbangan sektor tersebut juga turut bergerak fluktuatif sejak 2014, hingga sempat menyamai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai 15,57 persen di 2022. Kenaikan signifikan sektor konstruksi yang terjadi antara tahun 2018 dan 2019 dipengaruhi oleh maraknya pembangunan fisik di lokasi BIA dan sekitarnya. Penurunan konstan yang terjadi setelahnya disebabkan oleh penurunan

pembangunan fisik makro karena Bandara YIA telah beroperasi pada 2020. Tabel berikut merinci persentase PDRB ADHB yang menggambarkan rangkaian pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2. 64 Distribusi Kontribusi per Lapangan Usaha ADHB di Kabupaten Kulon Progo (persen), 2014-2023

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,44	20,42	19,92	19,04	17,62	15,89	16,69	16,13	15,53	15,43
B	Pertambangan dan Penggalian	1,44	1,43	1,39	1,45	1,63	1,48	1,39	1,32	1,25	1,30
C	Industri Pengolahan	12,36	12,07	12,23	12,41	12,02	11,01	11,07	10,81	10,23	9,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
F	Konstruksi	8,54	8,47	8,52	9,10	13,35	19,91	16,67	16,98	15,92	14,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,16	13,15	13,62	13,94	13,47	12,36	12,65	12,22	12,23	11,81
H	Transportasi dan Pergudangan	8,40	8,30	8,04	7,83	7,5	7,55	8,56	9,11	12,30	14,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,80	3,87	3,87	3,86	3,66	3,44	3,35	3,58	3,79	3,77
J	Informasi dan Komunikasi	5,17	4,99	4,98	4,98	4,74	4,29	5,11	5,71	5,46	5,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,52	3,33	3,29	3,17	3,07	2,91	2,81	2,79	2,84	2,88
L	Real Estate	3,31	3,34	3,38	3,37	3,21	3,02	3,29	3,13	2,94	2,80
M, N	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,28	0,28	0,26	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,72	8,92	9,13	9,32	8,8	8	8,09	7,62	7,20	6,76
P	Jasa Pendidikan	5,80	6,02	5,84	5,85	5,54	5,1	5,39	5,38	5,01	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,47	1,47	1,47	1,38	1,29	1,61	1,61	1,55	1,57
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,69	3,73	3,73	3,68	3,51	3,28	2,83	3,12	3,29	3,25
PDRB		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : BPS Kulon Progo, 2024

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

2.4.1.4 Kontribusi Subkategori PDRB menurut Lapangan Usaha

Informasi subkategori PDRB dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam pada suatu kategori lapangan usaha PDRB.

Tabel 2. 65 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	79,77	79,46	79,82	79,83	80,23	80,35	81,78	81,37	83,77	85,09
a.	Tanaman pangan	20,78	22,10	22,34	22,13	22,11	21,72	21,23	20,57	21,88	22,74
b.	Tanaman hortikultura	23,24	22,54	22,19	22,69	23,29	24,10	24,93	25,62	27,54	27,04
c.	Tanaman perkebunan	10,86	9,84	10,39	10,66	10,60	10,74	11,59	9,87	10,17	11,15
d.	Peternakan	23,04	23,21	23,14	22,53	22,37	21,92	22,28	23,48	22,44	22,40
e.	Jasa pertanian dan perburuan	1,85	1,77	1,81	1,84	1,86	1,86	1,74	1,83	1,74	1,77
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	14,74	14,91	14,66	14,55	14,15	14,19	12,78	12,94	10,48	9,74
3.	Perikanan	5,49	5,63	5,52	5,62	5,62	5,46	5,44	5,69	5,75	5,17
	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Kontribusi subkategori pada pertanian, kehutanan dan perikanan relatif stabil dan tidak mengalami pergeseran signifikan, terutama dalam lima tahun terakhir. Kategori ini didominasi oleh subkategori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian dengan sub subkategori yang mendominasi adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan peternakan dengan kontribusi di kisaran 20 persen.

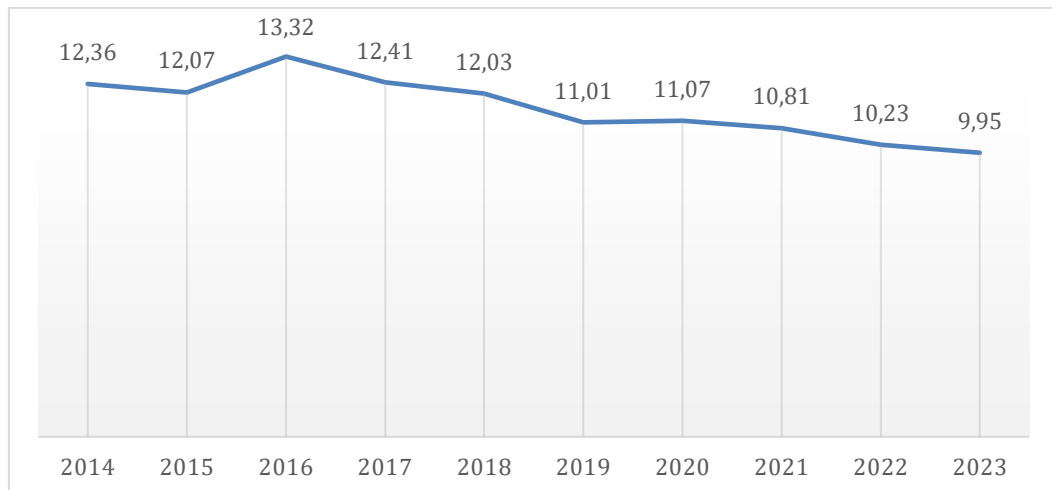
Tabel 2. 66 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Industri Pengolahan di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Industri batubara dan pengilangan migas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Industri makanan dan minuman	79,04	79,19	79,39	79,61	80,19	80,62	80,15	79,26	79,16	79,35
3.	Industri pengolahan tembakau	6,57	6,18	5,97	5,92	5,74	5,43	5,88	6,49	6,53	6,54
4.	Industri tekstil dan pakaian jadi	3,77	3,83	3,77	3,76	3,72	3,82	3,86	4,19	4,22	4,21
5.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	1,14	1,10	1,00	0,99	0,95	0,94	0,90	0,83	0,87	0,84
7.	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
8.	Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional	2,86	2,95	2,93	2,82	2,65	2,55	2,78	2,76	2,72	2,52
9.	Industri karet, barang dari karet, dan plastik	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
10.	Industri barang galian bukan logam	1,83	1,72	1,61	1,58	1,55	1,44	1,27	1,29	1,29	1,32
11.	Industri logam dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
13.	Industri mesin dan perlengkapan	0,60	0,81	1,28	1,36	1,35	1,35	1,42	1,44	1,40	1,42
14.	Industri alat angkutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Industri furnitur	0,94	0,93	0,91	0,91	0,92	0,92	0,93	0,99	0,99	0,97
16.	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan	3,01	3,07	2,92	2,84	2,71	2,74	2,62	2,57	2,62	2,64
	INDUSTRI PENGOLAHAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kulon Progo, 2023

Penyumbang nilai produksi terbesar dalam kategori industri pengolahan setiap tahun adalah subkategori industri makanan dan minuman. Pencapaian terbesar dalam subkategori ini terjadi pada 2019 dengan kontribusi sebesar Rp1,64 triliun (80,62 persen). Kenaikan tersebut mencapai puncak setelah sebelumnya terus mengalami kenaikan sejak 2014. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti meningkatnya permintaan konsumen, tersedianya bahan baku yang cukup, dan iklim persaingan industri yang stabil. Tingginya kontribusi subsektor industri makanan dan minuman ini cukup stabil selama lima tahun terakhir, meskipun sempat mengalami penurunan selama periode 2019-2021.



Gambar 2. 35 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap Total PDRB di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Ditinjau dari kontribusi terhadap PDRB total Kabupaten Kulon Progo, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, industri pengolahan masih berada pada kisaran 10-13 persen dari PDRB total. Bahkan, pada tiga tahun terakhir (2021-2023) mengalami penurunan, sampai di 9,95 persen (2023).

Tabel 2. 67 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Penyediaan Listrik dan Gas di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketenagalistrikan	99,16	99,28	99,36	99,37	99,34	99,32	99,37	99,36	99,34	99,37
2.	Pengadaan gas dan produksi es	0,85	0,73	0,64	0,64	0,66	0,68	0,63	0,64	0,66	0,63
	PENYEDIAAN LISTRIK DAN GAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Kategori pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi sebesar 0,08 persen terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo pada 2023. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya (99,37 persen) merupakan kontribusi dari subkategori ketenagalistrikan dan 0,63 persen disumbang oleh subkategori pengadaan gas dan produksi es.

Tabel 2. 68 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4,57	4,60	4,63	4,74	4,75	4,86	4,51	4,62	4,56	4,74

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	95,43	95,40	95,37	95,26	95,25	95,14	95,49	95,38	95,44	95,26
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2014-2023 subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai tambah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu di kisaran 95 persen.

Tabel 2. 69 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angkutan rel	0,59	0,66	0,69	0,71	0,73	0,72	0,42	0,37	0,64	0,90
2.	Angkutan darat	80,78	80,28	79,26	78,27	77,55	72,51	65,36	62,64	49,77	40,34
3.	Angkutan laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Angkutan udara	0	0	0	0	0	6,15	17,40	21,40	36,89	48,24
6.	Pergudangan dan jasa penunjang angkutan; pos dan kurir	18,63	19,05	20,05	21,02	21,74	20,62	16,81	15,59	12,71	10,51
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

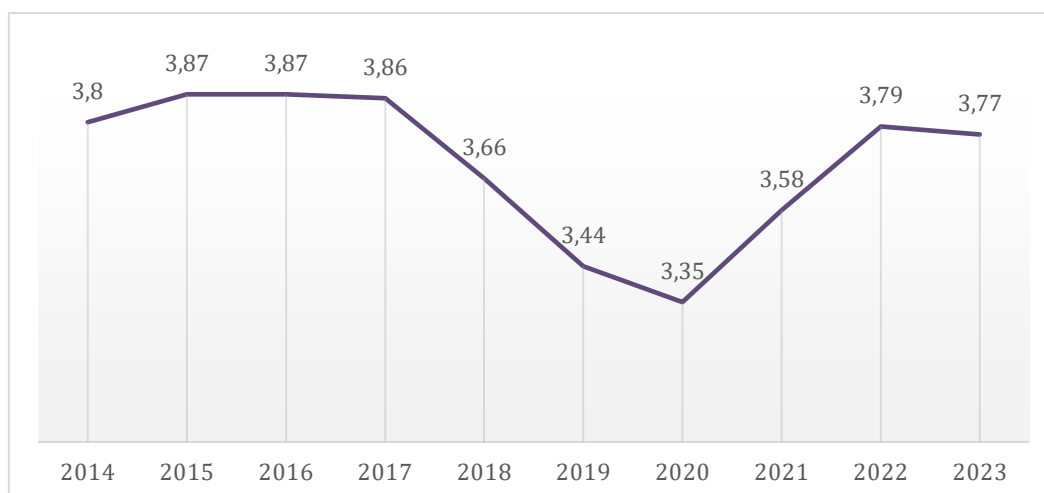
Subkategori angkutan darat mendominasi dengan angka 72-81 persen selama periode 2014-2019. Produksi dari subkategori tersebut berangsur-angsur mengalami penurunan hingga mencapai 40,34 persen (2023). Hal ini dipengaruhi oleh terbaginya pangsa pasar jasa transportasi, dari transportasi darat ke transportasi udara sejak Bandara YIA mulai beroperasi. Sejak saat itu, subkategori angkutan udara mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari nol persen (2018) menjadi 48,24 persen (2023).

Tabel 2. 70 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan akomodasi	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,12	0,32	0,93	2,19
2.	Penyediaan makan minum	99,88	99,88	99,88	99,88	99,87	99,86	99,88	99,68	99,07	97,81
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Secara umum, subkategori penyediaan akomodasi sejak 2021 mulai mengalami peningkatan kontribusi dengan nilai kontribusi 2,19 persen (2023). Hal tersebut didorong oleh hotel-hotel berbintang yang dibangun di sekitar kawasan Bandara YIA. Pada subkategori penyediaan makan minum masih menjadi penyumbang utama sektor ini, walaupun mulai mengalami penurunan menjadi 97,81 persen pada 2023.



Gambar 2. 36 Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan Minum terhadap Total PDRB di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

Sumber: BPS Kulon Progo, 2023

Ditinjau dari kontribusi terhadap PDRB total Kabupaten Kulon Progo, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kontribusi penyediaan akomodasi makan minum masih sekitar tiga persen dari PDRB total. Pada 2020, nilai kontribusi penyediaan akomodasi makan minum berada pada nilai terendah karena dampak covid-19. Mulai 2021, sektor ini kembali naik dan terakhir berada pada posisi 3,77 persen.

Tabel 2. 71 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Kulon Progo (Persen), 2014-2023

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jasa perantara keuangan	90,87	91,19	91,17	90,78	90,97	90,84	89,09	89,83	90,53	91,17
2.	Asuransi dan dana pensiun	3,02	2,90	2,91	2,86	2,85	2,80	3,20	2,90	2,57	2,32
3.	Jasa keuangan lainnya	6,03	5,84	5,89	6,19	6,10	6,26	7,62	7,20	6,85	6,45
4.	Jasa penunjang keuangan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2014-2023 subkategori jasa perantara keuangan menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai tambah jasa keuangan dan asuransi, yaitu di kisaran 90-91 persen. Di sisi lain, jasa penunjang keuangan menjadi subkategori yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tambahnya.

2.4.1.5 Laju Inflasi

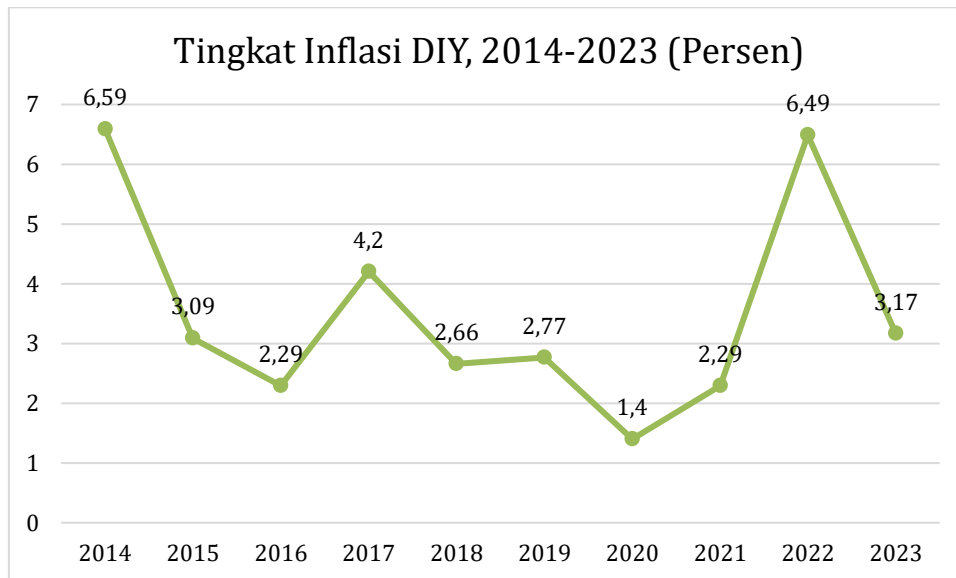
Secara sederhana, inflasi didefinisikan sebagai penurunan daya beli (*purchasing power*) mata uang secara umum dalam kaitannya dengan nilai barang dan jasa. Laju inflasi akan meningkat apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga ini akan mengakibatkan nilai mata uang menjadi lebih rendah. Inflasi memiliki hubungan yang erat dengan ketersediaan, permintaan, serta harga barang dan jasa yang diminta oleh penduduk di wilayah tertentu.

Fluktuasi harga barang dan jasa secara umum ini dikenal dengan laju inflasi. Perhitungan inflasi di Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan acuan nilai dari Kota Yogyakarta, karena BPS belum menetapkan Kota Wates sebagai salah satu lokasi dalam mengidentifikasi inflasi.

Laju inflasi *year on year* (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 6,49 persen. Nilai inflasi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara global, yang mengalami kontraksi akibat adanya pandemi. Sejak 2021, seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional, perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi mulai meningkat. Untuk mengendalikan laju inflasi agar tidak merusak perekonomian, maka dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID) yang antara lain dengan program: operasi pasar, monitoring dan evaluasi (harga pasar terutama pada momentum menjelang hari raya keagamaan, tahun baru, dan libur panjang).

Selain pembentukan TPID, Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan sistem informasi terkait harga pangan yaitu dengan Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Kabupaten Kulon Progo (*Sikepoku*) di mana harga kebutuhan pokok terus dipantau setiap hari di enam pasar utama (Wates, Bendungan, Sentolo, Temon, Galur, dan Nanggulan).



Gambar 2. 37 Laju Inflasi DIY, 2014-2023 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4.1.6 Perkembangan Ekspor Komoditas

Perkembangan ekspor merupakan salah satu indikator yang penting dalam perekonomian untuk melihat tingkat daya saing daerah dalam melakukan pengembangan produk. Perkembangan ekspor tentu akan mencerminkan dinamika dan kapabilitas ekonomi suatu daerah.

Tabel 2. 72 Perkembangan Volume Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Mata Dagangan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume
1	Arang Briket	Kg	4.838.460	5.933.440	9.795.319	7.706.532,00	7.094.869	663.050	3.737.506	152.460	2.431.916	1.488.516
2	Kerajinan serat alam	Pcs	5.025	445	85.619	67.479,00	176.699	82.375	74.858	35.250	142.466	256.756
3	Kerajinan Kayu	Pcs	30.600	22.000	290	510,00	353	638	275	285	315	330
4	Teh Mahkota Dewa	Kg	0	0	24.000	5.460,00	2.860	35.000	31.000	0	0	0
5	Gula Kristal	Ton	1.235.864	12.411.140	979.920	1.696.387,00	1.875.983	1.594.893	1.981.872	1.565.173	779.960	1.607.032,80
6	Synthetic Wigs	Pcs	829.441	1.005.390	1.176.308	1.151.820,00	955.753	1.095.859	811.457	703.368	1.567.601	798.143
7	Sabut Kelapa	Kg	107.446	66.631	67.579	40.686,00	62.306	87.489	74.309	0	0	0
8	Traktor Tangan	Unit	124	107	212	213,00	130	171	2.111	5.751	5.851	111
9	Stagen	Pcs	8.000	150.000	250	1.000,00	0	12.300	0	0	0	0
10	Sarung Tangan	Pcs	0	0	0	0,00	0	0	0	1.624.331	1.532.372	1.233.558
11	Kerajinan Bambu	Pcs	0	0	0	0,00	0	0	0	13.464	14.964	21.009

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2023

Tabel 2. 73 Perkembangan (USD) Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Mata Dagangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1	Arang Briket	3.532.192,92	5.014.656	7.394.630,94	5.527.911,43	4.988.081,97	4.869.700	2.103.142	151.918	985.845	1.064.580,20
2	Kerajinan serat alam	138.228	9.929,87	241.755,74	399.310,05	540.173,01	266.627	418.324	208.830	2.403.198	825.284,20
3	Kerajinan Kayu	21.675	15 583,32	8.607,27	11.722,00	17.576,26	19.504	11.447	11.933	13.190	13.018,90
4	Teh Mahkota Dewa	0	0	270.559,98	47.133,60	13.422,49	37.075	25.851	0	0	0
5	Gula Kristal	2.278.986,88	1.888.479,74	1.556.655,63	3.575.865,34	3.830.537,18	3.396.869	3.951.663	2.617.529	1.344.759	2.893.705,40
6	Synthetic Wigs	8.283.973,68	9.847.071,15	1.177.701.500	11.922.986	9.743.393,44	10.559.148	8.235.188	8.371.919	20.108.220	9.681.145,00
7	Sabut Kelapa	22.504,54	12.287,26	12.719,71	8.609,90	14.507,20	21.587	18.307	0	0	0
8	Traktor Tangan	248.000	213.034	425.530,77	356.845,20	224.117,27	328.850	349.842	316.444	323.537	235.480,40
9	Stagen	16.666,66	285.521,54	466,99	1.911,00	0	21.738	0	0	0	0
10	Sarung Tangan	0	0	0,00	0,00	0	0	0	620.013	651.035	633.495,70
11	Kerajinan Bambu	0	0	0,00	0,00	0	0	0	96.645	103.928	192.853,10
		15.078.454,87	17.270.980	1.187.612.427	21.852.295	19.371.808,82	19.521.098	15.113.764	12.395.231	25.933.712	15.539.562,90

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2023

Jenis komoditas dan Negara tujuan ekspor disajikan di Tabel berikut ini.

Tabel 2. 74 Jenis Komoditas dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo, 2023

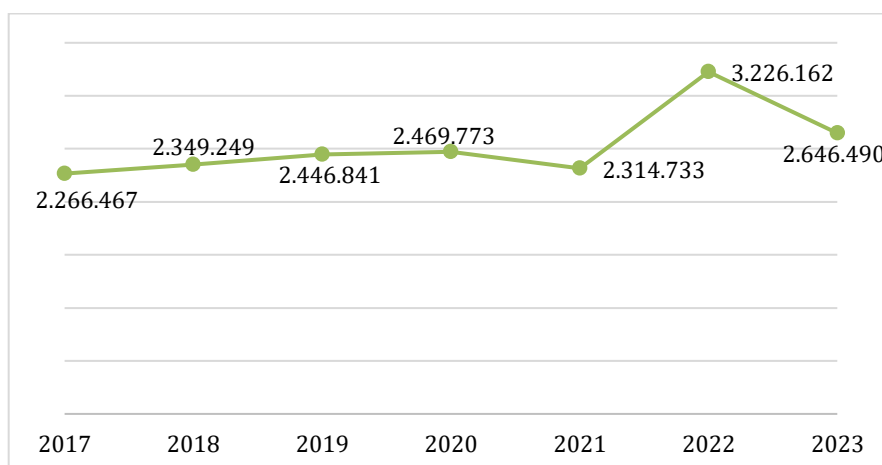
No.	Jenis Komoditas	Negara Tujuan
1.	Arang Briket	Mesir, Turki, Libanon, Uzbekistan, Iran, Amerika Serikat, Kuwait, Qatar, Jepang, UEA, Yunani
2.	Kerajinan Serat Alam	Belanda, Australia, Amerika Serikat, Perancis
3.	Synthetic Wigs	Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis
4.	Gula Kristal	Jerman, Chili, Cina, Jepang, Portugal, New Zealand, Swiss, Denmark, Australia, Amerika Serikat, Peru
5.	Kerajinan Kayu	Perancis
6.	Traktor Tangan	Brunei Darussalam, Panama, Timor Leste, Malaysia, Tanzania
7.	Sarung Tangan	Amerika Serikat, Korea Selatan
8.	Kerajinan Bambu	Australia, UEA

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada 2023 volume nilai ekspor mencapai USD15.539.563 (turun 40 persen) dibandingkan realisasi pada 2022 sebesar USD25.933.712. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya perekonomian negara tujuan ekspor produk rambut palsu (*wig*), terutama sejak Amerika Serikat mengalami resesi, sehingga berpengaruh terhadap permintaan produk. Di antara komoditas yang mengalami kenaikan ekspor cukup signifikan adalah gula kristal, karena harga bahan baku gula kristal mengalami kenaikan signifikan pada triwulan keempat.

2.4.1.7 Perdagangan

Terjadi peningkatan nilai usaha perdagangan dari tahun ke tahun, namun ada pengecualian pada 2021, di mana nilai usaha perdagangan mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Nilai usaha perdagangan mencerminkan total omzet yang dihasilkan oleh semua pelaku usaha dalam kurun waktu satu tahun.



Gambar 2. 38 Realisasi Nilai Usaha Perdagangan (juta rupiah), 2017-2023

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2023

Setelah diberlakukan PP No. 24 tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 78 tahun 2018 tentang *Pendaftaran Perusahaan* dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan*, semua izin usaha kini harus diproses melalui sistem *online single submission* (OSS). Selain itu, klasifikasi izin usaha tidak lagi berdasarkan kategori SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, melainkan didasarkan pada modal yang dimiliki oleh perusahaan. Modal di bawah Rp50 juta masuk dalam kriteria Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sedangkan di atas Rp50 juta masuk dalam kategori Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pada 2018, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mencapai 6.047 perusahaan, mengalami peningkatan 4,8 persen dibandingkan 2017 (5.768 perusahaan). Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki TDP disebabkan karena pertumbuhan jumlah PT (10,6 persen), CV (6,9 persen), perusahaan perorangan (4,5 persen), dan koperasi (2,3 persen). Sementara itu, jumlah perusahaan firma yang memiliki TDP tidak mengalami perubahan.

2.4.1.8 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan satu di antara elemen pendorong ekonomi yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tercermin dalam peningkatan secara konsisten jumlah wisatawan yang datang setiap tahun. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan pendapatan individu masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Capaian Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan sektor pariwisata dapat dinilai dari tren perkembangan kunjungan wisatawan ke beberapa destinasi sebagai berikut.

Tabel 2. 75 Jumlah Pengunjung Tempat Rekreasi di Kulon Progo, 2015-2023

No	Obek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Glagah	334.894	314.036	375.997	514.166	485.804	332.360	352.010	606.500	682.323
2	Pantai Congot	37.633	67.605	82.838	62.407	70.159	60.577	48.725	78.873	115.075
3	Pantai Trisik	13.911	11.074	13.425	34.819	31.732	8.739	6.901	12.234	23.133
4	Waduk	81.460	102.238	130.921	100.659	124.026	91.875	76.034	101.340	75.799

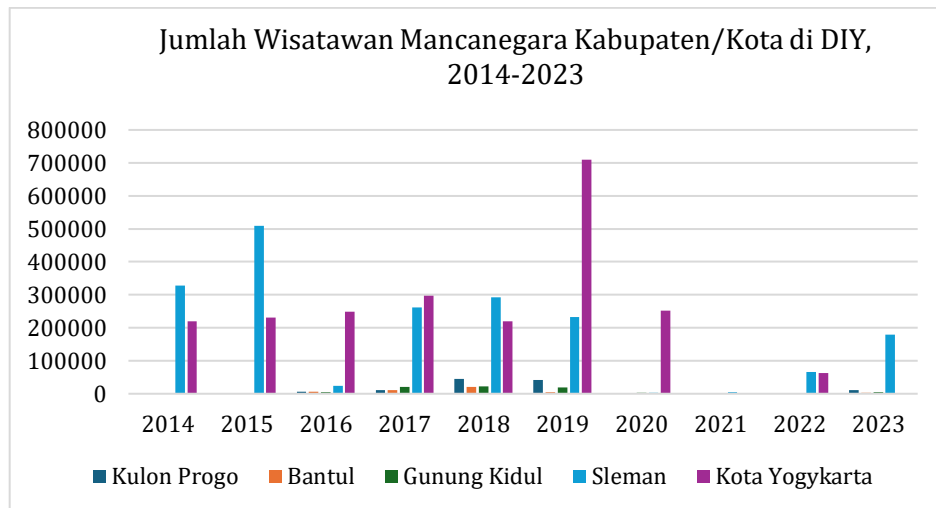
No	Obek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sermo									
5	Goa Kiskendo	15.710	14.783	11.456	12.279	14.346	4.925	4.166	7.474	6.998
6	Puncak Suroloyo	34.939	24.513	19.816	16.251	13.671	9.992	7.484	9.461	10.649
7	WA Nglinggo	n/a	n/a	59.061	47.756	62.060	30.551	44.568	25.934	200
8	WA Tritis	n/a	n/a	2.919	15.547	5.000	4.407	3.496	2.329	641
9	Kawasan Menoreh Barat	n/a	n/a	n/a	41.575	72.439	26.215	7.103	6.698	5.733
10	Kawasan Jatimulyo	n/a	n/a	n/a	n/a	7.802	21.324	28.734	41.793	22.817
	JUMLAH	518.547	534.249	696.433	845.459	887.039	590.965	579.221	892.636	943.368

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan data jumlah pengunjung ke 10 objek wisata pada 2019, jumlah wisatawan yang masuk mencapai 887.039 orang. Di sisi lain, pada 2020, jumlah kunjungan wisatawan turun menjadi 590.965 orang (turun 33,38 persen). Penurunan yang signifikan terjadi karena dampak Pandemi Covid-19, yang menyebabkan penutupan beberapa obyek wisata untuk membatasi mobilitas manusia, termasuk para wisatawan.

Meskipun demikian, pembukaan kembali obyek wisata dengan pembatasan tertentu pada 2021 memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk berlibur, tetapi jumlah kunjungan masih mengalami penurunan menjadi 579.221 orang. Data dalam tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada 2022, dengan jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 54,11 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut juga terus terjadi hingga 2023 karena keadaan operasional pariwisata telah berjalan dengan stabil.

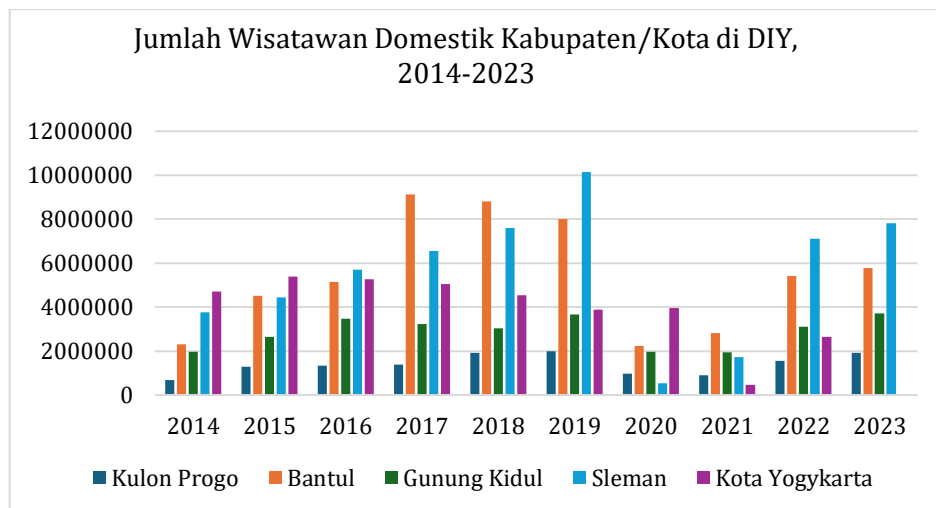
Di samping jumlah wisatawan ke destinasi lokal mulai stabil selama tiga tahun terakhir, masih terdapat kondisi yang harus diperhatikan secara makro. Kondisi tersebut merupakan persentase jumlah wisatawan ke Kulon Progo dibandingkan dalam skala provinsi. Untuk konteks ini, diketahui bahwa kunjungan wisatawan ke Kulon Progo masih sedikit jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Hal ini menjadi masalah, karena jumlah objek wisata Kulon Progo termasuk yang terbanyak. Lebih lanjut, perbandingan jumlah pengunjung objek wisata berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY dapat dicermati pada grafik sebagai berikut.



Gambar 2. 39 Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data BPS DIY, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata di Kulon Progo termasuk yang terkecil dibanding dengan empat kabupaten/kota lainnya. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada periode 2016-2019, jumlah tersebut masih jauh di bawah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang notabene memiliki objek wisata yang lebih sedikit. Di saat bersamaan, data jumlah wisatawan domestik dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



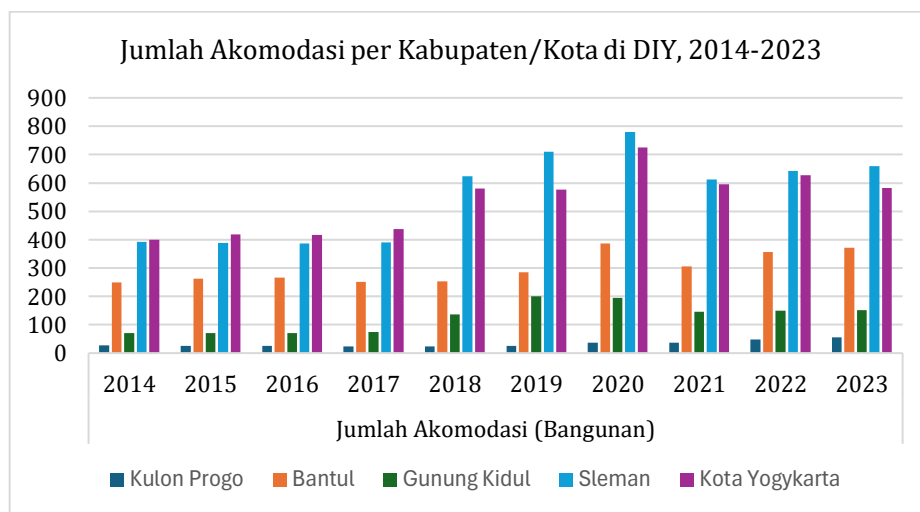
Gambar 2. 40 Grafik Jumlah Wisatawan Domestik Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sebagaimana jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi Kulon Progo pun juga lebih rendah dari pada ke kabupaten/kota lain di DIY. Meskipun beberapa kali mengalami peningkatan, jika dibandingkan di tingkat provinsi dan jumlah objek wisata yang dimiliki, kunjungan wisatawan ke Kulon Progo termasuk kecil.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya ketersediaan fasilitas, akomodasi, jangkauan aksesibilitas, serta upaya promosi dan pemasaran. Meskipun telah memiliki Bandara YIA, perluasan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas berupa jalan dan transportasi umum perlu digalakkan.

Berbagai daya tarik wisata alam, seperti Puncak Suroloyo, Kawasan Menoreh Barat, dan Desa Wisata Nglinggo merupakan objek yang sangat menarik. Setelah peningkatan aksesibilitas dilakukan, pembangunan fasilitas dan akomodasi semacam hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendukung lainnya perlu dibangun secara intensif. Guna mendukung rencana pembangunan tersebut, berikut data jumlah akomodasi per Kabupaten/Kota di DIY tahun 2014-2023.



Gambar 2. 41 Grafik Jumlah Akomodasi per Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa ketersediaan akomodasi berupa gabungan hotel berbintang dan nonberbintang di Kabupaten Kulon Progo merupakan yang paling kecil di DIY. Hal ini jelas mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kulon Progo dan mengunjungi seluruh objek wisata yang tersedia. Dengan demikian, peningkatan ketersediaan akomodasi perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Untuk mendukung rangkaian pembangunan fisik tersebut, akan lebih baik jika dilakukan peningkatan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan *branding awareness* calon pengunjung terhadap eksistensi objek wisata di Kulon Progo.

2.4.1.9 Indeks Desa Membangun

Indeks Daya Saing Daerah berkaitan dengan dinamika perkembangan yang terjadi di suatu wilayah. Hal tersebut dapat terjadi dalam skala makro di level nasional maupun skala

mikro di level desa. Dalam skala mikro, pembangunan wilayah perdesaan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, dinamika perkembangan wilayah dalam skala desa tersebut diperhitungkan melalui formulasi tertentu untuk menghasilkan indeks komposit yang didasarkan pada tiga aspek: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa yang kemudian disebut sebagai Indeks Desa Membangun (IDM).

Secara definitif, IDM merupakan indeks yang diprakarsai oleh pemerintah untuk mengukur status perkembangan wilayah perdesaan. Secara teknis, IDM memiliki lima klasifikasi pembagian status perkembangan wilayah meliputi Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri yang didasarkan pada besaran indeks komposit dari pilar IDM.

Secara umum, perkembangan status IDM di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang positif. Pada 2019, Desa Mandiri di Kabupaten Kulon Progo hanya berjumlah tiga desa, jumlah ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 72 desa (2024). Selaras dengan hal tersebut, status Desa Maju mengalami peningkatan dari 21 desa (2019) menjadi 48 desa (2021), kemudian mengalami penurunan hingga tersisa 15 desa (2024). Penurunan jumlah desa dengan status “Maju” ini tidak serta merta menunjukkan nilai yang buruk, karena penurunan jumlah desa berstatus “Maju” disebabkan oleh meningkatnya status desa tersebut menjadi Desa Mandiri.

Desa Berkembang mengalami penurunan drastis dari 63 desa (2019) menjadi nol (2023 dan 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Desa Berkembang telah mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju atau Mandiri, yang juga mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa di Kabupaten Kulon Progo. Meskipun demikian, di masa depan masih memiliki tantangan untuk menuntaskan seluruh desa agar berstatus sebagai Desa Mandiri.

Tabel 2. 76 Jumlah Desa Berdasarkan Status Perkembangan Wilayah Kabupaten Kulon Progo, 2019-2024

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MANDIRI	3	4	13	33	52	72
MAJU	21	40	48	45	35	15
BERKEMBANG	63	43	26	9	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kulon Progo, 2024

Secara rinci, Indeks Desa Membangun di 87 desa yang termasuk dalam 12 wilayah kapanewon di Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 77 Indeks Desa Membangun per Desa di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2024

No.	KAPANEWON	DESA	STATUS IDM					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	TEMON	3401012001 - Jangkaran	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
2		3401012002 - Sindutan	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
3		3401012003 - Palihan	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
4		3401012004 - Glagah	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
5		3401012005 - Kalidengen	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
6		3401012006 - Plumbon	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
7		3401012007 - Kedundang	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
8		3401012008 - Demen	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
9		3401012009 - Kulur	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
10		3401012010 - Kaligintung	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
11		3401012011 - Temon Wetan	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
12		3401012012 - Temon Kulon	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
13		3401012013 - Kebonrejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
14		3401012014 - Janten	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
15		3401012015 - Karang Wuluh	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
16	WATES	3401022001 - Karangwuni	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
17		3401022002 - Sogan	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI
18		3401022003 - Kulwaru	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
19		3401022004 - Ngestiharjo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
20		3401022005 - Bendungan	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
21		3401022006 - Triharjo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
22		3401022007 - Giripeni	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
23	PANJATAN	3401032001 - Garongan	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
24		3401032002 - Pleret	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
25		3401032003 - Bugel	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI

No.	KAPANEWON	DESA	STATUS IDM					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
26		3401032004 - Kanoman	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
27		3401032005 - Depok	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
28		3401032006 - Bojong	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI
29		3401032007 - Tayuban	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
30		3401032008 - Gotakan	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU
31		3401032009 - Panjatan	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
32		3401032010 - Cerme	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU
33		3401032011 - Krembangan	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
34	GALUR	3401042001 - Banaran	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
35		3401042002 - Kranggan	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
36		3401042003 - Nomporejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
37		3401042004 - Karangsewu	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
38		3401042005 - Tirto Rahayu	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
39		3401042006 - Pandowan	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
40		3401042007 - Brosot	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
41	LEDAH	3401052001 - Wahyu Harjo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
42		3401052002 - Bumirejo	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
43		3401052003 - Jatirejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
44		3401052004 - Sidorejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
45		3401052005 - Gulurejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
46		3401052006 - Ngentakrejo	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
47	SENTOLO	3401062001 - Demangrejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI
48		3401062002 - Srikayangan	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
49		3401062003 - Tuksono	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
50		3401062004 - Salamrejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI

No.	KAPANEWON	DESA	STATUS IDM					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
51		3401062005 - Sukoreno	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
52		3401062006 - Kaliagung	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
53		3401062007 - Sentolo	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
54		3401062008 - Banguncipto	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
55	PENGASIH	3401072001 - Tawangsari	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
56		3401072002 - Karangsari	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
57		3401072003 - Kedungsari	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
58		3401072004 - Margosari	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
59		3401072005 - Pengasih	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
60		3401072006 - Sendangsari	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
61		3401072007 - Sidomulyo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
62	KOKAP	3401082001 - Hargomulyo	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
63		3401082002 - Hargorejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
64		3401082003 - Hargowilis	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU
65		3401082004 - Kalirejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
66		3401082005 - Hargotirto	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI
67	GIRIMULYO	3401092001 - Jatimulyo	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
68		3401092002 - Giripurwo	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
69		3401092003 - Pendoworejo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
70		3401092004 - Purwosari	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
71	NANGGULAN	3401102001 - Banyuroto	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
72		3401102002 - Donomulyo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
73		3401102003 - Wiji Mulyo	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
74		3401102004 - Tanjungharjo	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
75		3401102005 - Jatisarono	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI

No.	KAPANEWON	DESA	STATUS IDM					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
76		3401102006 - Kembang	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
77	SAMIGALUH	3401112001 - Kebonharjo	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
78		3401112002 - Banjarsari	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI
79		3401112003 - Purwoharjo	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
80		3401112004 - Sidoharjo	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI
81		3401112005 - Gerbosari	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
82		3401112006 - Ngargosari	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
83		3401112007 - Pagerharjo	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
84	KALIBAWANG	3401122001 - Banjararum	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
85		3401122002 - Banjarasri	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI
86		3401122003 - Banjarharjo	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
87		3401122004 - Banjaroya	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MAJU	MANDIRI

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kulon Progo, 2024

Bedasarkan data di atas, diketahui bahwa perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019-2023 mengalami tren pertumbuhan membaik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbaikan klasifikasi Indeks Desa Membangun yang sebelumnya didominasi oleh klasifikasi Desa Berkembang (63 desa), Desa Maju (21 desa), dan Desa Mandiri (3 desa).

Capaian klasifikasi Indeks Desa Membangun kemudian meningkat menjadi 13 Desa Mandiri, 48 Desa Maju, dan 26 Desa Berkembang pada 2021. Mulai 2023 hingga 2024, capaian Indeks Desa Membangun di Kulon Progo sudah didominasi oleh klasifikasi Desa Mandiri (72 desa), Desa Maju (15 desa), dan tidak ditemukan lagi Desa Berkembang.

Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemajuan yang sangat baik dari waktu ke waktu. Kondisi ini selain disebabkan karena efektivitas pembangunan wilayah di daerah perdesaan, juga dapat terjadi karena optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah. Pemerintah, sebagai *stakeholder*, dinilai telah mampu turut serta mendukung dan mendampingi proses perkembangan wilayah perdesaan, dari semula klasifikasinya didominasi Desa Berkembang menjadi didominasi oleh Desa Mandiri.

Meskipun capaian IDM di Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan, tetapi masih perlu upaya-upaya optimalisasi agar seluruh desa/kalurahan di Kabupaten Kulon Progo masuk dalam kategori Desa Mandiri. Hingga data terakhir (2024), masih terdapat 15 desa di Kabupaten Kulon Progo yang belum masuk di dalam kategori Desa Mandiri.

Semangat meningkatkan kualitas desa secara komprehensif selaras dengan upaya pencapaian Visi-Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027 dan telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027, yaitu melalui reformasi kalurahan.

Reformasi kalurahan telah diatur di dalam Peraturan Gubernur DIY No. 40 tahun 2023 tentang *Reformasi Kalurahan* dan telah dijelaskan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan yang tidak hanya berfokus kepada perbaikan tata kelola pemerintahan tetapi juga pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Dua poin penting tersebut berpengaruh terhadap aspek-aspek di dalam IDM.

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.4.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tiang utama dalam meningkatkan mutu individu. Pengembangan ranah pendidikan harus memastikan kesetaraan dan perluasan jangkauan

pendidikan, peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing hasil pendidikan, serta penguatan manajemen, akuntabilitas, dan citra pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan dengan mengelola potensi yang dimiliki, mulai dari mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/penyetaraan, hingga manajemen pendidikan dasar dan menengah.

Data tentang pendidikan merupakan salah satu komponen yang penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2. 78 Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf	%	93,36	94,19	94,30	96,90	94,70	94,4	94,56	95,37	95,89	95,66
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,20	8,40	8,50	8,64	8,65	8,66	8,86	9,02	9,17	9,18
Angka Partisipasi Murni												
3	APM SD	%	99,75	99,76	99,44	97,45	92,77	92,79	93,76	93,73	94,33	89,09
	APM SMP	%	97,88	97,90	98,15	92,44	93,46	93,71	95,01	95,22	95,49	92,64
Angka Partisipasi Kasar												
4	APK SD	%	103,53	101,41	101,59	105,73	94,09	94,97	95,08	95,11	95,16	93,32
	APK SMP	%	101,20	97,15	98,72	94,89	95,92	98,05	98,46	98,53	98,56	109,69
Angka Partisipasi Sekolah												
5	APS SD	%	102,90	100,00	101,59	91,55	90,71	90,71	93,94	93,98	94,00	99,46
	APS SMP	%	97,00	99,04	102,86	101,07	99,68	99,68	97,02	97,04	97,1	99,13
Angka Kelulusan												
6	Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	99,98	100	100	100	100	100
	Angka kelulusan SMP	%	99,95	100	100	100	99,87	99,93	100	100	100	100
Angka melanjutkan												
7	Angka melanjutkan SD ke SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka melanjutkan SMP ke SMA	%	96,96	97,94	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka Putus Sekolah												
8	SD	Orang	31	41	6	8	6	15	10		6	6
	SMP	Orang	35	25	20	10	8	16	17	6	34	11
9	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,27	13,55	13,97	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27	14,38	14,48
Standar Kompetensi Pendidik												
10	Guru yang memenuhi Kualifikasi	%	81,27	81,27	86,29	87,82	84,52	86,98	89,40	89,45	89,61	89,8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SI/D4											
	Guru yang telah bersertifikat pendidik	%	56,91	56,91	65,20	69,59	61,4	75,85	76,71	76,73	76,81	

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023

Kemampuan membaca dan menulis merupakan dasar yang diperlukan agar dapat meraih kesejahteraan. Kemampuan ini tercermin dalam persentase melek huruf (*literacy*), yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis dalam huruf Latin atau huruf lainnya. Tingkat melek huruf umumnya mengalami peningkatan dari 93,36 persen (2014) menjadi 95,89 persen (2022). Namun, persentase ini mengalami penurunan menjadi 95,66 persen (2023).

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam pendidikan formal, dengan fokus pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 8,20 tahun (2014) dan terus mengalami peningkatan menjadi 9,18 tahun (2023), menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kenaikan ini meliputi kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak-anaknya, dukungan administratif yang lebih baik dalam pembaruan data pendidikan, serta dorongan untuk melanjutkan pendidikan seumur hidup, baik secara formal maupun nonformal.

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur persentase penduduk pada kelompok usia sekolah yang sedang menempuh pendidikan sesuai jenjang usia mereka. APM jenjang SD/MI menunjukkan tren fluktuasi, turun dari 99,75 persen (2014) menjadi 92,77 persen (2020), dan kemudian meningkat menjadi 93,73 persen (2021), menjadi 94,33 persen (2022), dan kembali menurun menjadi 89,09 persen (2023). Di sisi lain, APM jenjang SMP turut serta menunjukkan tren fluktuasi, meningkat dari 97,88 persen (2014), hingga menjadi 98,15 persen (2016), kemudian mengalami penurunan menjadi 92,44 persen (2017), kemudian mengalami tren peningkatan menjadi 95,49 persen (2022), yang kemudian kembali turun menjadi 92,64 persen (2023).

APM di bawah 100 persen menunjukkan beberapa hal, seperti kesadaran yang belum sepenuhnya terbentuk di masyarakat terkait pentingnya pendidikan pada usia tertentu, serta kecenderungan beberapa orang tua mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah di luar kabupaten karena berbagai alasan seperti pekerjaan orang tua atau pertimbangan tertentu terkait pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan jumlah penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang tertentu tanpa adanya prasyarat usia, dengan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan resmi usia sekolah pada jenjang pendidikan yang setara. APK jenjang SD mengalami tren fluktuasi, turun dari 103,53 persen (2014) menjadi 101,59 persen (2016), kemudian meningkat menjadi 105,73 persen (2017), dan kembali mengalami penurunan menjadi 94,09 persen (2018), mengalami peningkatan menjadi 95,16 persen (2021), dan mengalami penurunan kembali menjadi 93,32 persen (2023). Di sisi lain, APK jenjang SMP mengalami penurunan dari 101,20 persen (2014) menjadi 94,89 persen (2017), setelahnya mengalami tren peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun menjadi 109,69 persen (2023).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat diartikan sebagai perbandingan jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Melalui ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi nilai APS mengindikasikan semakin banyaknya usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah. APS jenjang SD secara umum mengalami penurunan persentase dari 102,90 persen (2014) menjadi 90,71 persen (2019), kembali mengalami peningkatan menjadi 99,46 persen (2023). APS jenjang SMP mengalami fluktuasi, meningkat dari 97,00 persen (2014) menjadi 102,86 persen (2016), mengalami penurunan menjadi 97,04 persen (2021), dan kembali mengalami tren peningkatan menjadi 99,13 persen (2023) meskipun persentase akhirnya bukanlah capaian tertinggi dalam 9 tahun terakhir.

Angka kelulusan cenderung stabil, fluktuasinya tidak melebihi satu persen atau berkisar antara 99-100 persen. Dari 2014 hingga 2023 terkecuali pada 2018, tingkat kelulusan di tingkat SD mencapai 100 persen sedangkan tingkat kelulusan SMP mencapai 100 persen pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2020 hingga 2023. Tingkat kelulusan ini umumnya dipengaruhi oleh perubahan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Sekarang, SD/MI menerapkan pendekatan tematik, sementara SMP/MTs menggunakan pendekatan mata pelajaran. Bobot soal ujian di tingkat daerah dan nasional juga berubah sesuai kebijakan yang berlaku, demi menyesuaikan dengan tuntutan dan karakteristik peserta didik di setiap wilayah.

Selanjutnya, data menunjukkan persentase lulusan jenjang pendidikan sebelumnya yang kemudian melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Angka melanjutkan SD ke SMP dinilai stabil karena dari 2014 hingga 2023, persentase capaian melanjutkan SD ke SMP mencapai 100 persen. Di sisi lain, angka melanjutkan SMP ke SMA juga cukup stabil dari 96,96 persen (2014) menjadi 97,94 persen (2015), dan kemudian berhasil mencapai capaian sempurna 100 persen dari 2016 hingga 2023.

Angka Putus Sekolah adalah angka yang menunjukkan tingkat putus sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Secara umum, Angka Putus Sekolah jenjang SD mengalami perbaikan yang diindikasikan melalui penurunan yang signifikan dari 31 orang (2014) menjadi 6 orang (2023), Sedangkan Angka Putus Sekolah Jenjang SMP mengalami tren fluktuasi, dari 35 orang (2014) menurun menjadi 8 orang (2018), kemudian mengalami kenaikan menjadi 17 orang (2020) dan kembali turun menjadi 6 orang (2021), Angka Putus Sekolah mengalami lonjakan menjadi 34 orang (2022), dan kembali menurun menjadi 11 orang (2023).

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) juga mengalami perbaikan, dengan peningkatan setiap tahun. Pada 2014, AHLS mencapai 13,27 dan pada 2017 naik menjadi 14,23 tahun. Kemudian, angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga 2023 menjadi 14,48 tahun. Peningkatan ini terjadi berkat dukungan dari pelbagai pihak, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun nonformal.

Dalam periode 2015-2022, pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari aspek tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi. Persentase guru yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV mencapai 81,27 persen (2014), naik menjadi 89,8 persen (2023). Sementara itu, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada 2014 berjumlah 56,91 persen, lalu naik menjadi 69,59 persen (2017). Pada 2018 sempat mengalami penurunan menjadi 61,4 persen, namun mulai rentang 2019-2022 angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 76,81 persen (2022).

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah guru PNS di setiap satuan pendidikan. Hampir setiap tahun terjadi pensiun sekitar 200-300 guru, namun tidak diimbangi dengan penambahan guru PNS baru. Upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), walaupun sebagian GTT belum memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang dibutuhkan.

Selain itu, sebagian guru PNS yang usianya di atas 50 tahun belum dapat mengikuti pendidikan lanjutan setelah ijazah terakhirnya (misalnya D-II/PGSD), karena alasan usia atau motivasi. Pada 2019, adanya rekrutmen CPNS telah menambah jumlah guru dan memberikan kenaikan dalam jumlah tenaga pendidik.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor Pendidikan Dasar mengacu pada peraturan yang ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang *Implementasi Standar Pelayanan Minimal*, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 32 tahun 2022 tentang *Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimal untuk Pendidikan*.

SPM di bidang pendidikan mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk menerima layanan dasar menurut SPM

Pendidikan, peserta didik pada pendidikan anak usia dini adalah mereka yang berusia antara lima hingga enam tahun. Penerima layanan dasar menurut SPM Pendidikan pada pendidikan dasar adalah peserta didik yang berusia antara tujuh hingga 15 tahun. Sedangkan penerima layanan dasar menurut SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang berusia antara tujuh hingga 18 tahun.

Rincian pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada 2023 dapat dilihat lebih lengkap dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 79 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	11.646	11.646	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	57.004	57.004	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	1.304	1.304	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dengan memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sektor pendidikan, semua jenis pelayanan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai optimal berkat kontribusi yang aktif dari seluruh lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, implementasi SPM Pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun di setiap satuan pendidikan, telah berjalan dengan lancar dan efektif.

Tabel 2. 80 Capaian Rasio Guru terhadap Murid Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Indikator	Capaian kinerja									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Jumlah pendidik SD/MI/ sederajat	5.115	4.749	3.518	3.518	5.171	3.482	3.365	3.740	3.384	3.618
1.2	Jumlah murid SD/MI/ sederajat	36.295	35.525	36.277	36.277	35.188	36.585	36.563	32.687	35.136	35.059
1.3	Rasio guru terhadap	10	12	10	10	10	10	9	11	10	10

No	Indikator	Capaian kinerja									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	murid SD/MI										
2.1	Jumlah pendidik SMP/MTs	1.598	1.595	1.556	1.556	1.692	1.553	1.531	1.474	1.429	1.659
2.2	Jumlah murid SMP/MTs	18.002	17.957	17.954	17.954	18.034	17.572	18.264	15.414	18.640	16.929
2.3	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	11	16	12	12	11	9	8	10	8	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2023

Rasio jumlah guru dan murid, baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, sangat dipengaruhi oleh jumlah guru yang tersedia di satuan pendidikan dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Di Kulon Progo, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan rasio tersebut, yang sebagian besar disebabkan oleh minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan di daerah tersebut.

Pada 2014, rasio guru terhadap murid mencapai 10 untuk SD/MI dan 11 untuk SMP/MTs. Rasio guru terhadap murid SD/MI mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 12, setelahnya stabil pada angka 10 dari tahun 2016 hingga 2019, rasio mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 9 yang kemudian meningkat menjadi 11 pada tahun 2021, Rasio guru terhadap murid SD/MI kembali berada pada angka yang stabil yakni 10 pada tahun 2022 dan 2023.

Sementara itu, rasio guru terhadap murid SMP/MTs sejak 2014 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan. Angka tersebut kemudian meningkat hingga mencapai angka 10 pada tahun 2023 meskipun sebelumnya sempat mengalami penurunan. Pada 2023, rasio guru terhadap murid mencapai 10 untuk SD/MI dan 10 untuk SMP/MTs. Angka ini mencerminkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, di mana setiap rombongan belajar atau kelas memiliki rata-rata 10 siswa per satu guru di tingkat SD/MI dan delapan siswa per satu guru di tingkat SMP/MTs.

Situasi ini berbeda dengan kondisi di daerah perkotaan, di mana setiap kelas memiliki jumlah peserta didik yang lebih optimal. Namun, Kabupaten Kulon Progo memiliki wilayah pegunungan dan perbukitan yang sulit dijangkau, di mana jumlah siswa masih terbatas karena pertumbuhan penduduk yang rendah. Di sisi lain, minat masyarakat untuk bersekolah cenderung tertuju ke daerah perkotaan, sehingga menyebabkan rasio guru terhadap murid relatif lebih rendah di wilayah tersebut.

2.4.2.2 Kemampuan Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kecakapan dalam membaca dan menggunakan angka/symbol yang terkait dengan matematika dasar, untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari.

Analisis kondisi literasi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut terlihat dari kemampuan literasi SD dan kompetensi literasi SMP yang semakin naik dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, kemampuan literasi SD terjadi kenaikan sebesar 8,07 poin, serta terjadi kenaikan sebesar 5,69 poin pada kompetensi literasi SMP dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut adalah tanda positif bahwa program dan upaya peningkatan literasi telah memberikan hasil yang baik. Peningkatan literasi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kualitas pengajaran, penggunaan metode pembelajaran yang lebih efektif, serta peran aktif orang tua dalam membantu anak-anak mereka membaca dan menulis.

Analisis kondisi numerasi di Kabupaten Kulon Progo pada 2021-2023 juga menunjukkan peningkatan yang positif, baik di tingkat SD maupun SMP. Pada 2021, tingkat kemampuan numerasi siswa SD adalah sebesar 37,55. Angka tersebut mencerminkan bahwa sejumlah siswa memiliki tantangan dalam memahami dan menguasai konsep-konsep matematika dasar. Terdapat peningkatan yang signifikan pada 2022 di mana tingkat kemampuan numerasi meningkat menjadi 44,22 dan menjadi 51,46 pada 2023. Sedangkan tingkat kemampuan numerasi siswa SMP mengalami peningkatan yang signifikan pada 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,84 poin menjadi 67,53.

Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini merupakan indikator positif dalam pembangunan pendidikan di Kulon Progo. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pendidikan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2. 81 Kondisi Literasi dan Numerasi di Kabupaten Kulon Progo, 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	56,67	61,06	69,13
2	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	67,69	71,64	77,33
3	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	37,55	44,24	51,46
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,2	58,69	67,53

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi, terdapat salah satu indikator yakni Literasi Membaca dan Numerasi. Secara definitif, literasi membaca merupakan

kemampuan seseorang dalam mendapatkan informasi dan mentransformasikan informasi melalui pemahaman bacaan maupun tulisan. Capaian literasi membaca diindikasikan melalui persentase dengan capaian maksimal yakni 100 persen. Di Kabupaten Kulon Progo, Literasi Membaca masyarakat berada pada angka 76,49 persen (2022). Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 80,65 persen (2023). Meskipun telah berada pada angka yang cukup baik yakni lebih dari 80 persen, namun masih terdapat 20 persen lainnya yang belum termasuk dalam Indikator Literasi Membaca. Kondisi ini merupakan kondisi yang perlu untuk terus diperbaiki di masa mendatang supaya kualitas literasi membaca masyarakat dapat menjadi jauh lebih baik lagi.

Di sisi lain, Numerasi atau Literasi Numerasi merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan berbagai angka serta simbol yang berkaitan dengan matematika dasar guna memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini berkaitan dengan analisis informasi dalam bentuk bagan, tabel, grafik, serta penggunaan interpretasi hasil analisis guna memprediksi serta dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Kebermanfaatan literasi numerasi digunakan supaya seseorang dapat menggunakan angka dan data untuk memahami dunia serta dapat melatih kemampuan berpikir rasional, sistematis, serta kritis dalam *problem solving* dan pengambilan keputusan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Kulon Progo memiliki capaian Numerasi sebesar 19,64 persen (2022). Pencapaian ini meningkat menjadi 38,6 persen (2023).

Jika dibandingkan dengan Literasi Membaca, angka Numerasi masih jauh di bawah Literasi Membaca pada jangka waktu tahun yang sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan membaca atau memahami tulisan dan bacaan masyarakat masih jauh lebih unggul dibandingkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi hitungan serta grafik dan tabel. Kondisi ini memerlukan adanya upaya lebih lanjut sehingga kemampuan literasi numerasi dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

2.4.2.3 Perpustakaan

Peran perpustakaan sangat penting dalam mengubah ilmu pengetahuan menjadi pengetahuan terapan di tengah masyarakat, mendorong kemampuan berpikir kritis dan inovatif, serta melestarikan nilai-nilai budaya. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan bertujuan untuk merangsang minat baca masyarakat, membawa ke arah budaya belajar, sehingga berkontribusi pada peningkatan kecerdasan nasional. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memiliki koleksi yang komprehensif, mudah diakses, dan terjangkau.

Peningkatan minat baca masyarakat tercermin dalam berbagai aspek, salah satunya adalah peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 82 Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Uraian	Capaian Kinerja									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan perpustakaan	82.944	101.515	113.316	114.046	169.162	176.479	93.191	102.82	299.127	180.902
2	Jumlah buku	34.640	37.640	45.825	52.555	55.762	56.184	56.499	56.649	59.322	60.344
3	Jumlah perpustakaan terstandar	14	14	14	16	28	33	38	43	78	217
4	Jumlah perpustakaan seluruhnya	663	663	663	663	621	621	621	621	616	663

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pada umumnya, jumlah kunjungan ke perpustakaan mengalami pertumbuhan setiap tahun. Peningkatan ini terjadi berkat berbagai upaya pelibatan masyarakat, intensifikasi promosi melalui bazar, serta peningkatan pengunjung melalui *platform* daring (internet). Selain itu, pertambahan kunjungan ke perpustakaan juga terhitung melalui layanan perpustakaan keliling.

Pada 2020 tercatat penurunan pengunjung perpustakaan yang signifikan karena dampak pandemi Covid-19, setelahnya pada 2022 kembali terjadi peningkatan kunjungan yang cukup signifikan. Namun, pada 2023 kembali terjadi penurunan kunjungan perpustakaan yang cukup signifikan pula.

Minat baca di Kabupaten Kulon Progo masih cukup rendah, skor masih di bawah 50 sejak 2020-2022. Namun, tingkat minat baca tersebut mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 60,71 (2023). Di sisi lain, Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM) cukup baik di angka 68,15 (2023).

Tabel 2. 83 Tingkat Minat Baca dan Pembangunan Literasi Kabupaten Kulon Progo, 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	44,47	44,51	49,71	60,71
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-	-	67,95	68,15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2024

Faktor penunjang yang berperan krusial dalam meningkatkan minat baca adalah ketersediaan buku-buku di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pembaca. Jumlah buku cenderung meningkat setiap tahun, meskipun kadang-kadang ada penambahan atau pengurangan dalam koleksi bahan pustaka karena disebabkan beberapa faktor, seperti pengadaan materi baru, buku yang rusak, dan hibah dari masyarakat. Pada 2023, terjadi penambahan 1.022 buah buku dalam koleksi perpustakaan. Tabel berikut menunjukkan rincian jumlah buku dalam perpustakaan di Kulon Progo.

Tabel 2. 84 Jumlah Buku di Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Judul/ Kelompok	Jumlah Buku									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Umum	1.245	1.572	2.781	3.495	3.501	3.672	3.756	3.759	3.695	3.831
2	Filsafat	1.566	1.652	2.404	2.716	2.734	2.85	2.865	2.868	2.882	2.903
3	Agama	3.265	3.412	5.198	6.229	6.565	6.907	6.951	6.951	6.977	6.996
4	Ilmu Sosial Politik	3.008	3.742	7.223	8.706	8.802	9.366	9.418	9.421	9.627	9.805
5	Bahasa	756	828	1.613	1.709	1.787	1.841	1.845	1.845	1.858	1.858
6	Ilmu Murni	944	1.183	3.177	3.564	3.576	3.732	3.772	3.772	3.581	3.786
7	Ilmu Terapan	5.955	6.455	9.478	10.687	10.771	10.978	10.982	10.991	10.957	11.029
8	Kesenian	1.145	1.292	2.268	2.801	2.831	3.017	3.029	3.029	2.988	3.102
9	Sastra	5.078	6.043	9.379	10.059	10.692	11.031	11.083	11.213	11.159	11.392
10.	Sejarah dan Geografi	1.324	1.451	2.284	2.589	2.625	2.79	2.798	2.8	2.915	2.937
11	Referensi lainnya (peta, globe, koleksi rumping, dan lain-lain)	10.354	10.088	10.088	9.145	1.878	2.458	2.458	2.558	2.683	2.783
JUMLAH		34.640	37.640	45.883	52.555	52.555	55.762	58.957	59.207	59.322	62.445

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2023

Kehadiran perpustakaan yang sesuai dengan standar berdampak signifikan terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Saat ini, terdapat 663 perpustakaan yang mendapat pembinaan. Namun, sebagian besar dari perpustakaan ini masih belum memenuhi standar nasional perpustakaan.

Pada 2014, hanya terdapat 14 perpustakaan yang memenuhi standar, jumlah ini meningkat menjadi 33 perpustakaan pada 2019. Pada 2020, terjadi kenaikan menjadi 38 perpustakaan yang memenuhi standar nasional. Peningkatan ini berlanjut pada 2021 dengan

jumlah 43 perpustakaan yang memenuhi standar, dan pada 2023, terjadi peningkatan secara signifikan sehingga angkanya mencapai 217 perpustakaan yang telah memenuhi standar.

Keberadaan lebih banyak perpustakaan yang memenuhi standar nasional akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan minat baca masyarakat, serta mengembangkan budaya belajar yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Tabel 2. 85 Jumlah Perpustakaan Terstandar Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perpustakaan Terstandar	14	14	14	16	28	33	38	43	78	217
Jumlah Perpustakaan Seluruhnya	663	663	663	663	621	621	621	621	616	663

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pada 2023, jumlah pustakawan yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan terdapat 12 orang, mereka bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan tenaga teknis berkurang dari tujuh orang (2014) menjadi lima orang (2023), serta penilai bersertifikat baru tersedia dua orang.

Seluruh tenaga tersebut tidak hanya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kulon Progo, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan di seluruh wilayah

Tabel 2. 86 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Indikator	Capaian Kinerja									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pustakawan	10	10	10	9	9	11	11	13	12	12
2	Jumlah tenaga teknis	7	7	7	7	7	7	6	4	5	5
3	Jumlah penilai bersertifikat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2023

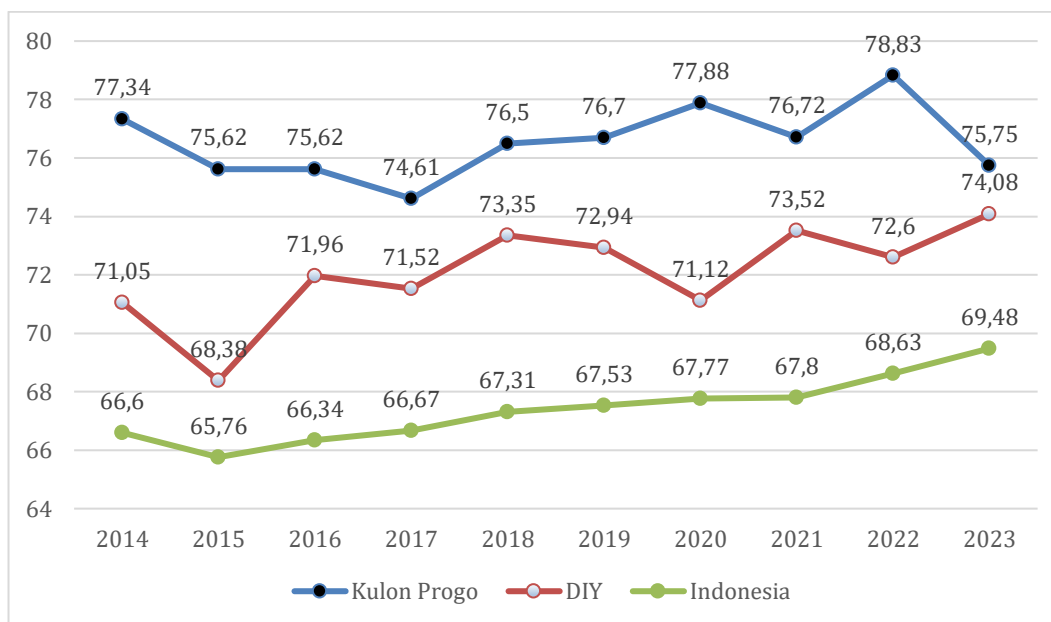
2.4.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah matriks yang mengukur proporsi populasi usia kerja yang terlibat secara aktif dalam sektor tenaga kerja, termasuk yang sedang bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

TPAK dapat dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Perhitungan TPAK dilakukan untuk mengukur proporsi penduduk yang sedang bekerja (atau sedang aktif mencari pekerjaan) dalam

kelompok usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin banyak angkatan kerja di suatu wilayah relatif dengan jumlah penduduk usia kerjanya.

Parameter ini menggambarkan ukuran relatif penawaran tenaga kerja yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK di Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Indonesia selama periode 2014–2023 disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2. 42 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

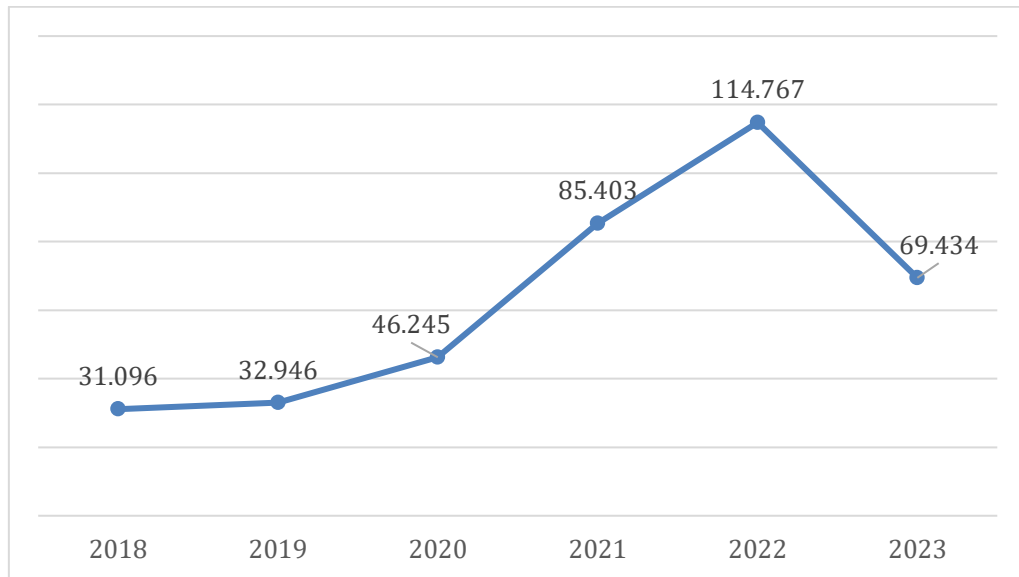
Berdasarkan informasi di atas, menurut data BPS Kabupaten Kulon Progo, pada periode 2014-2023, TPAK Kulon Progo selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK nasional dan DIY.

Salah satu faktor pendukung tingginya nilai TPAK di Kulon Progo adalah statusnya sebagai daerah agraris, sehingga banyak penduduk di wilayah ini yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa di sektor pertanian. Meskipun kabupaten ini juga merupakan kantong kemiskinan yang tinggi dengan pendapatan yang relatif rendah.

Berkaitan dengan TPAK, dalam rangka mewujudkan keterjaminan bagi pekerja, maka pemerintah menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Program ini merupakan program pemberian perlindungan yang bagi masyarakat pekerja atas bermacam risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, serta persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Di sisi lain, Jamsostek juga diupayakan dalam menjamin risiko kehilangan pekerjaan akibat PHK. Berdasarkan hal tersebut, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota di Kabupaten Kulon Progo berada pada angka 35,93 persen (2023). Angka ini mengindikasikan bahwa belum seluruh tenaga kerja tercakup dalam program Jamsostek, sehingga perlu diperhatikan ke depannya. Jamsostek diharapkan dapat menjadi program yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global serta harus dapat bersifat lebih universal dan inklusif bagi seluruh tenaga kerja.



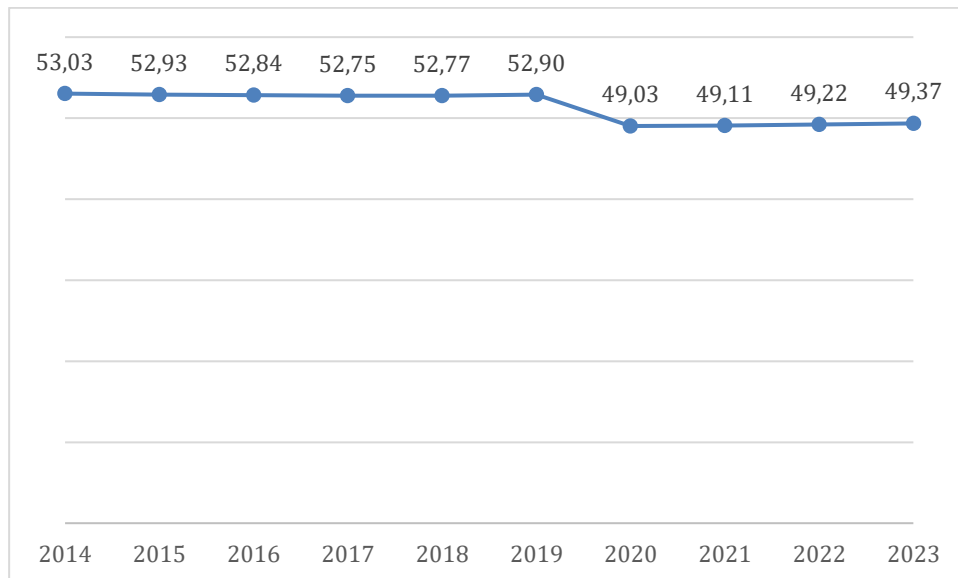
Gambar 2. 43 Jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo, 2018 – 2023

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan , 2024

2.4.2.5 Angka Ketergantungan

Besarnya angka ketergantungan akan menggambarkan besaran bonus demografi. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif dalam evolusi kependudukan yang terjadi. Kondisi ini tercapai saat angka ketergantungan sudah berada di bawah 50 persen.

Besaran Angka Ketergantungan Hidup (AKH) di Kabupaten Kulon Progo dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dari 53,03 (2014) menjadi 49,37 (2023). Hal tersebut dipengaruhi oleh tren penurunan anak usia 0-14 tahun pada periode 2014-2022. Di samping itu, juga terjadi tren kenaikan penduduk usia kerja 15-64 tahun pada periode 2014-2023. Sedangkan untuk penduduk lansia (usia 65 tahun ke atas) menunjukkan tren kenaikan pada 10 tahun terakhir.



Gambar 2. 44 Angka ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo, 2014 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Angka ketergantungan terendah terjadi pada 2020 (49,03) yang disebabkan karena jumlah penduduk usia 0-14 tahun paling kecil (88.750 jiwa) karena dampak pandemi covid-19. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa bonus demografi di Kabupaten Kulon Progo sudah mulai muncul pada 2019 dan masih terus berlangsung hingga saat ini (2023) yang ditandai dengan semakin banyaknya penduduk usia kerja (15-64 tahun).

Untuk itu perlu disiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka memfasilitasi kebutuhan hidup penduduk usia produktif yang bertambah. Juga perlu diantisipasi kebutuhan sarana prasarana hidup untuk usia lanjut.

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan 2022, tingkat kesesuaian dalam pemanfaatan ruang mencapai 88,55 persen. Angka ini menggambarkan bahwa dalam pemanfaatan ruang masih tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa pemanfaatan ruang belum melampaui kapasitas dan dukungan yang tersedia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa warga masih mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan menggambarkan efektivitas dalam pengendalian tata ruang.

Nilai kesesuaian ruang ini merupakan hasil dari kombinasi dari keterwujudan dan keselarasan dalam pemanfaatan ruang, yang pada dasarnya terdiri dari aspek struktur ruang dan pola ruang. Skor ini muncul setelah dilakukan audit periodik terhadap kesesuaian tata ruang yang dilakukan setiap tahun.

Dalam hal kesesuaian, penggunaan atau pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tercantum dalam Dokumen Audit Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2023 bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel 2. 87 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No.	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Struktur ruang	68,73	68,73	75,00	89,58	87,50	86,38	87,00	87,22	87,33
2	Pola ruang	82,35	82,56	99,50	88,29	89,83	89,67	89,58	89,88	89,78
3	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	75,54	75,65	87,25	87,55	88,67	88,03	88,29	88,55	88,56

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dengan adanya proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan bandara, kereta bandara, jalan tol, dan kawasan pariwisata nasional, ada kebutuhan yang jelas untuk menyesuaikan tata ruang di Kabupaten Kulon Progo. Proses perubahan Perda No. 1 tahun 2012 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032* telah dimulai sejak 2017 dan telah melalui proses tinjauan ulang.

Pada 2020, revisi RTRW Kulon Progo telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur DIY, untuk kemudian digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan persetujuan substansi kepada Kementerian ATR/BPN.

Revisi RTRW dan perencanaan tata ruang yang lebih spesifik menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengendalikan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, terutama dengan adanya proyek-proyek strategis yang telah menciptakan pertumbuhan yang cepat dan dinamis.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri adalah wilayah yang secara khusus didedikasikan untuk kegiatan industri, dengan harapan adanya lembaga pengelola kawasan yang memberikan dukungan dan fasilitas kepada perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Penetapan peruntukan kawasan industri biasanya dilakukan dalam perencanaan yang mencakup periode sekitar 10 tahun.

Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, beberapa langkah telah diambil seperti perbaikan akses jalan dan pengaturan regulasi yang memberikan kemudahan serta insentif untuk investasi. Meskipun beberapa proyek industri dari berbagai sektor telah berdiri, hingga saat ini belum ada entitas hukum yang menjadi pengelola resmi untuk kawasan industri ini. Berikut adalah daftar kawasan peruntukan industri.

1. Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 hektare di Kapanewon Sentolo dan Lendah.
2. Kawasan Industri Temon di Kapanewon Temon berupa industri bahari dengan luas kurang lebih 500 hektare.
3. Kawasan peruntukan industri yang berada di Kapanewon Nanggulan dengan luas 700 hektare.
4. Industri Kecil dan Mikro, tersebar di seluruh kapanewon.

3. Luas Wilayah Produktif

Pemilihan wilayah yang memiliki produktivitas dilakukan dengan fokus pada lahan pertanian yang menghasilkan secara produktif, mengingat mayoritas lahan yang digunakan di Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk pertanian. Ini berhubungan erat dengan mata pencaharian mayoritas penduduk Kulon Progo yang terkait dengan sektor pertanian.

Wilayah produktif yang dimaksud mencakup luas lahan yang digunakan untuk pertanian padi, hutan rakyat, dan budi daya perikanan. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut, persentase luas wilayah produktif pada 2018-2019 tidak dapat langsung dibandingkan dengan persentase tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan dan penggunaan data dasar mulai 2018 untuk menentukan luas kawasan sawah, hutan rakyat, dan budi daya perikanan.

Tabel 2. 88 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah produktif (Ha)	20.937,83	27.446,00	27.392,00	31.375,30	31.375,30	31.375,30	31.375,30	31.431,76	31.529,30
2	Luas Seluruh Wil. Budi daya (Ha)	37.658,69	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23
3	Rasio (1./2.)	0,556	72,83	72,69	83,26	83,26	83,26	83,26	83,47	83,72

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada 2022, sekitar 83,47 persen wilayah Kabupaten Kulon Progo digunakan sebagai wilayah produktif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tersebut dikelola secara ekonomis untuk tujuan produktif. Lahan sawah dimanfaatkan sepanjang tahun dengan ditanami padi, palawija, dan sesekali juga dengan hortikultura dan buah-buahan.

Untuk mempertahankan kawasan pertanian pangan, Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Bupati No. 118 tahun 2016 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Peraturan Bupati ini memberikan jaminan dan pemberdayaan pada petani sehingga sektor pertanian masih dapat bersaing dengan sektor lain yang memberikan *return* yang lebih besar.

Kawasan hutan rakyat dimanfaatkan oleh penduduk dengan menanam pohon kayu jati, sengon, dan akasia. Selanjutnya, kawasan perikanan budi daya digunakan untuk mengembangkan usaha perikanan seperti budi daya udang vaname, ikan lele, ikan gurami, dan ikan nila.

Komoditas utama dalam usaha perikanan budi daya adalah udang vaname, yang juga menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan dari Kulon Progo di sektor perikanan. Di sisi lain, usaha perikanan kolam masih didominasi oleh budi daya ikan lele sebagai komoditas ikan konsumsi utama.

4. Jumlah Penumpang yang Terangkut di Terminal

Jumlah kendaraan yang memasuki terminal bus AKAP dan AKDP mengalami fluktuasi yang signifikan. Demikian pula, terjadi fluktuasi pada jumlah angkutan dan penumpang AKAP dan AKDP. Pada 2020, dampak pandemi sangat terlihat dengan adanya penurunan yang drastis dalam mobilitas angkutan umum AKAP dan AKDP, serta jumlah pengguna layanan.

Penurunan ini juga sangat terkait dengan langkah-langkah pembatasan pergerakan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama saat terjadi lonjakan aktivitas mudik lebaran dan periode liburan. Rincian data mengenai jumlah angkutan dan orang yang diangkut di terminal selama periode 2015-2023 dapat ditemukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 89 Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal di Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023

TAHUN	Bus		Penumpang Bus	
	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP
2015	26.071	23.590	515.757	485.709
2016	23.061	22.850	403.926	413.569
2017	31.399	10.094	436.911	65.788
2018	45.751	16.605	612.636	100.979
2019	49.932	24.875	338.606	45.224
2020	29.620	14.883	110.506	15.966
2021	9.775	19.146	72.074	107.168
2022	31.400	10.846	287.878	12.070
2023	33.093	11.888	262.246	10.107

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

5. Kondisi Jalan

Pada tahun 2023, jaringan jalan di Kabupaten Kulon Progo memiliki kondisi yang beragam. Kondisi jalan “dalam keadaan baik” mencakup 42,58 persen dari panjang keseluruhan jaringan jalan, sementara kondisi jalan “dalam keadaan sedang” mencakup sekitar 30,82 persen. Meskipun demikian, masih ditemukan jalan dengan kondisi “rusak ringan” dan “rusak berat” sejumlah 12,68 persen serta 13,93 persen.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dan menyediakan jaringan jalan “dalam kondisi baik” sebagai bagian dari upaya percepatan pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan strategis. Langkah ini diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Detail kondisi jaringan jalan dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 90 Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo, 2023

No	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	km	%	km	%	Km	%	
1	Nasional	16,38	57,84	11,54	40,75	6,4	1,41	0	0	28,32
2	Provinsi	81,89	46,76	37,27	21,28	38,23	21,83	17,75	10,13	175,14
3	Kabupaten	557	42,58	403	30,82	166	12,68	182	13,93	1.308,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan layanan jalan dan jembatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melibatkan sejumlah langkah. Ini mencakup proyek pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

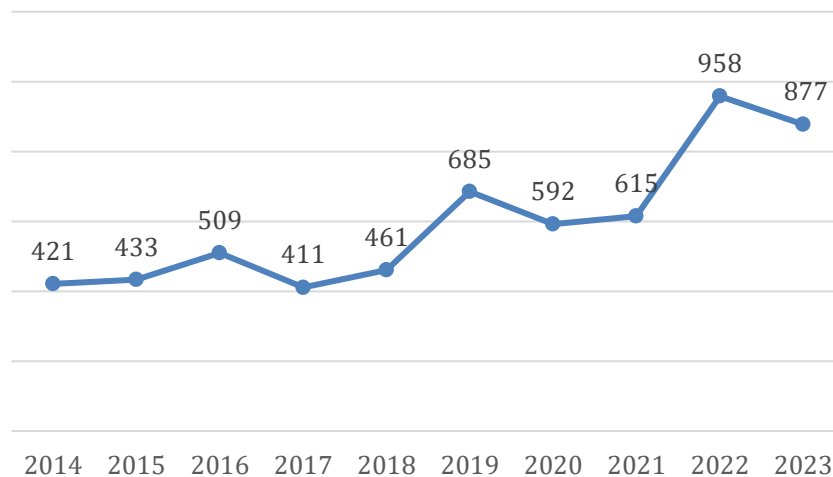
Sejalan dengan itu, untuk mendukung inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kulon Progo, seperti Bandara YIA, serta untuk memanfaatkan potensi dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan jalan yang akan menghubungkan Bandara YIA dengan KSPN Borobudur, dikenal sebagai Jalur Bedah Menoreh.

Pengembangan jalur ini juga diharapkan dapat mengurangi disparitas wilayah di Kabupaten Kulon Progo, membuka akses ke tempat-tempat wisata dan produk unggulan di wilayah tersebut. Pembangunan Jalan Bedah Menoreh diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata yang terletak di sepanjang jalur tersebut. Selain itu, dengan membuka akses di kawasan Perbukitan Menoreh, diharapkan distribusi produk-produk unggulan wilayah Kulon Progo dapat berjalan lebih lancar.

6. Kejadian Kecelakaan

Kesadaran lalu lintas bagi pengendara merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial. Hal tersebut dapat terjadi karena melaluinya maka keamanan berkendara dapat semakin terjamin. Di sisi lain, kelengkapan sarana dan prasarana perhubungan serta kondisi jalan sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga sangat berkaitan erat dengan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengendara.

Dengan sarana prasarana perhubungan yang lengkap dan kondisi jalan yang baik tentunya akan memperkecil kemungkinan terjadinya laka lantas atau kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kabupaten Kulon Progo dinilai masih belum optimal baik dari segi kesadaran lalu lintas bagi pengendara serta kelengkapan sarana prasarana perhubungan sehingga terjadi beberapa kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 2. 45 Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu-lintas Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kulon Progo

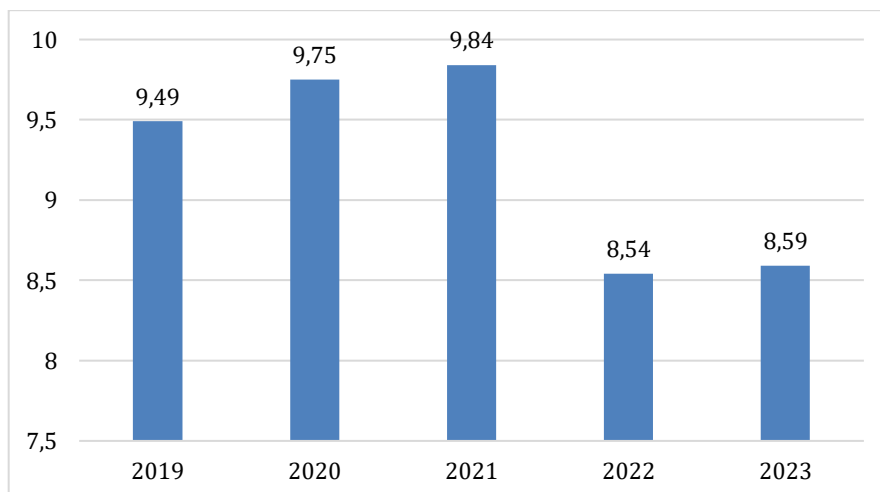
Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa kejadian kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari kejadian kecelakaan pada 2014 yang tercatat sebanyak 421 kejadian. Kemudian pada 2015 meningkat menjadi 433, juga pada 2016 meningkat menjadi 509 kasus. Pada 2017, terjadi penurunan yang signifikan (411 kasus) dan kembali meningkat hingga pada 2019 (685 kasus). Penurunan kembali terjadi pada 2020 hingga kembali meningkat pada 2022 yang menjadi kasus tertinggi (958 kasus). Kejadian kasus mengalami penurunan pada 2023 (877 kasus). Namun demikian, kejadian kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kulon Progo masih “sangat tinggi” sehingga membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah dalam hal pemenuhan sarana prasarana lalu lintas ataupun atensi masyarakat dalam hal peningkatan kesadaran berlalu lintas.

7. Kondisi Akses Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Kualitas kondisi akses sanitasi menjadi penting karena memiliki dampak langsung kepada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Dengan infrastruktur terhadap akses sanitasi yang baik, maka pembangunan yang berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.

Sanitasi yang buruk dapat mengancam kesehatan masyarakat karena melalui akses sanitasi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus dapat terjadi seperti diare. Saat ini sarana prasarana sanitasi/pengolahan air limbah di Kulon Progo meliputi, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Banyuroto dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal sejumlah 39 yang tersebar di semua Kapanewon.

IPLT Banyuroto dilengkapi dengan instalasi pengolahan lindi, serta didukung dengan tiga armada truk lumpur tinja. Untuk meningkatkan pelayanan penyedotan lumpur tinja, telah ditetapkan Perda No. 6 tahun 2023 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dalam upaya untuk melakukan layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan inisiasi dengan melakukan kebijakan yang mewajibkan setiap dinas/instansi untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala dan diikuti dengan imbauan kepada masyarakat terutama peserta program Hibah Air Limbah Setempat.



Gambar 2. 46 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Yang Aman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan grafik di atas, data rumah tangga dengan akses sanitasi yang aman di Kabupaten Kulon Progo tampak fluktuatif. Pada periode 2019-2021 mengalami peningkatan dan terjadi penurunan pada 2022. Kemudian, untuk akses sanitasi yang layak pada 2022 adalah sebesar 95 persen dan pada 2023 adalah 98 persen. Nilai tersebut mencerminkan

bahwa akses sanitasi di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup. sehingga perlu pemeliharaan fasilitas infrastruktur sanitasi dengan baik.

8. Kondisi Persampahan di Kabupaten Kulon Progo

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat kualitas infrastruktur manajemen persampahan adalah proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Di Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase sebesar 80,5 persen (2023). Nilai tersebut tentu masih perlu untuk ditingkatkan untuk mencapai manajemen persampahan yang maksimal dan optimal.

Peningkatan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah juga dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan citra wilayah. Hal ini juga membantu mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan mengelola sampah dengan lebih efektif.

Pembangunan proyek strategis di Kabupaten Kulon Progo membawa berbagai dampak ikutan, antara lain berdirinya usaha restoran, café. Yang paling besar adalah dibangunnya empat hotel berbintang lima di sekitar bandara. Pesatnya pengembangan wilayah dan munculnya berbagai aktivitas baru tersebut tentu membawa pengaruh, baik positif maupun negatif untuk pengembangan wilayah atau manusia sebagai penghuni wilayah.

Pertumbuhan ekonomi membawa dampak negatif pada lingkungan biofisik, ekonomi dan social. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, salah satunya adalah antisipasi dampak lingkungan dengan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut.

Di samping itu jumlah sampah juga berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk serta laju migrasi penduduk, khususnya adalah sampah domestik. Semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu daerah maka akan semakin tinggi produksi sampah domestik. Laju pertumbuhan penduduk dan banyaknya pendatang menjadi pemicu meningkatnya sampah domestik khususnya pada kawasan perkotaan.

Dari tahun ke tahun volume sampah selalu mengalami peningkatan, baik jumlah maupun jenisnya, di sisi lain kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya masih relatif rendah. Pada umumnya, mayoritas masyarakat dalam pengelolaan sampah belum menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan sepenuh hati.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan upaya nyata dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan, sehingga permasalahan sampah bisa diselesaikan sejak dari sumbernya.

Isu sampah semakin mencuat di Kabupaten Kulon Progo. Sampah rumah tangga hingga industri berkembang dari isu lokal ke isu global, dan pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah.

Pada saat ini, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) menjadi cepat penuh karena kesadaran dalam pengelolaan sampah masih rendah. Kondisi TPA sampah yang benar-benar dijadikan tempat pemrosesan akhir sampah belum sepenuhnya terjadi. Kebanyakan yang terjadi adalah tempat pembuangan akhir sampah. Kabupaten Kulon Progo memiliki TPA sampah Banyuroto yang terletak di Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan yang beroperasi sejak September 2009, dengan luas 4,3 hektare.

Seiring dengan bertambahnya aktivitas pembangunan dan kegiatan di Kabupaten Kulon Progo yang dipicu oleh keberadaan Bandara YIA, maka jumlah produksi sampah semakin meningkat.

Kehadiran TPA sampah Banyuroto menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya penurunan kualitas air sekitar TPA Banyuroto, polusi bau yang dampaknya semakin meluas dirasakan warga sekitar, juga keberadaan alat yang mengganggu aktivitas warga sekitar TPA.

Dengan kondisi TPA yang sudah *overload* tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu yang benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Diharapkan pengelolaan sampah akan selesai di masing-masing kalurahan di TPS3R yang dikelola oleh masing-masing KSM, ini sesuai dengan konsep 3R. Konsep 3R merupakan tiga pendekatan dasar untuk pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, yakni dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang.

Sampai saat ini jumlah KSM di kabupaten sebanyak 14 KSM yang tersebar di beberapa kalurahan, sedang bank sampah yang sudah dibentuk sejumlah 126 unit. Strategi pembinaan adalah pembinaan atau pemberdayaan lebih lanjut kepada KSM dan bank sampah yang sudah dibangun. sehingga akan berfungsi sebagaimana mestinya, juga pembentukan KSM dan bank sampah di wilayah yang potensi penghasil sampah yang besar.

Melihat isu lingkungan yang semakin banyak menjadi perhatian masyarakat/*stakeholder*, maka diperlukan upaya pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Target pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo No. 68 tahun 2018 tentang *Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* adalah untuk pengurangan sampah sebesar 30 persen dari angka timbulan sampah pada 2025 dan untuk penanganan sampah sebesar 70 persen dari

angka timbulan sampah 2025. Sampai dengan 2023, realisasi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.

Tabel 2. 91 Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

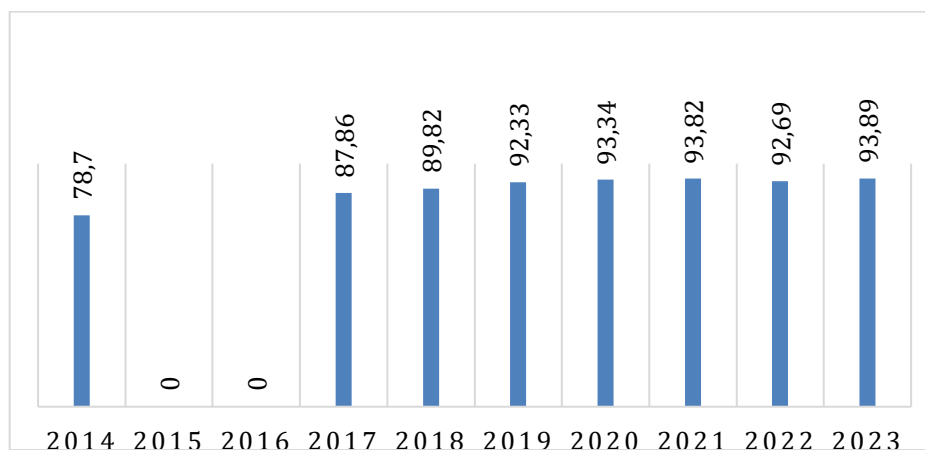
No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	61.774,21	62.257,32	62.654,35	64.730,71	80.033,09
2	Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	16.546,56	16.861,50	17.515,28	17.615,29	24.843,80
3	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	9.303,39	9.805,86	9.761,50	11.680,00	12.164,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2024

9. Kondisi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Sebagai satu di antara kebutuhan dasar, akses terhadap hunian merupakan indikator penting untuk menilai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Dengan demikian, akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan penting untuk dipastikan terus meningkat setiap tahun.

Selain menentukan aspek kesejahteraan, akses terhadap hunian turut menjadi tolok ukur untuk menilai stabilitas sosial, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, serta inklusi sosial. Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, tren kondisi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kulon Progo selama periode 2014-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 47 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kulon Progo, 2014-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024

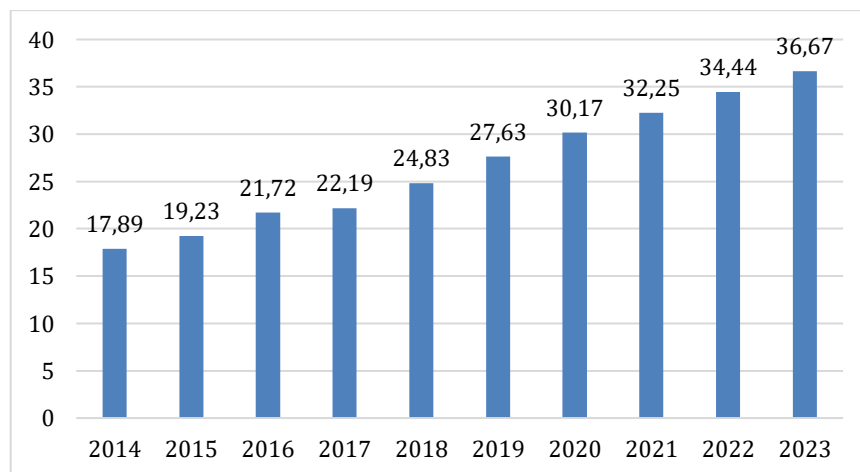
Untuk meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan penanganan atau peningkatan kualitas pada Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Jumlah RTLH pada 2023 sejumlah 6.818 unit, angka tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu pada 2017 (12.785 unit), 2018 (10.836 unit), 2019 (8.253 unit), 2020 (7.271 unit), 2021 (6.840 unit), dan 2022 (8.108 unit). Data pada 2022 terdapat peningkatan dari 2021 karena penerbitan SK Bupati yang baru mengenai RTLH.

Penanganan RTLH dilaksanakan melalui anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Selain itu juga menggunakan sumber daya di luar anggaran pemerintah, antara lain dari anggaran CSR perusahaan, Bazda, LSM. Penanganan RTLH pada 2021 adalah sejumlah 431 unit, terdiri dari 52 unit APBD Kabupaten, 67 unit dari BSPS, 120 unit APBD DIY, 150 unit dari DAK dan 42 unit dari ZIS dan CSR. Pada 2022 menangani RTLH sejumlah 992 unit, dan 2022 sejumlah 721 unit.

10. Kondisi Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan

Infrastruktur yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah adalah kualitas akses rumah tangga terhadap air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan. Penyediaan akses air bersih merupakan salah satu komponen yang penting dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit yang dapat menular melalui air, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Kulon Progo memiliki akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan yang terus meningkat pada 10 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan cerminan daerah yang baik sehingga semakin banyak rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dengan mudah. Berikut adalah data akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan secara lebih rinci.



Gambar 2. 48 Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sarana prasarana perpipaan SPAM di Kulon Progo terdiri dari SPAM PDAM dan SPAM Perdesaan. Untuk SPAM PDAM terdiri dari atas SPAM Sermo berkapasitas 60 LPS, SPAM Clereng berkapasitas 125 LPS, SPAM Salamrejo berkapasitas 20 LPS, SPAM Kalibawang berkapasitas 60,5 LPS, SPAM Sentolo berkapasitas 60 LPS, dan SPAM Lendah dengan kapasitas 80 LPS.

SPAMDes di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari SPAMDes yang dinaungi oleh Paguyuban Masyarakat Air Minum Yogyakarta (PAMASKARTA) dan SPAMDes yang mendapatkan program PAMSIMAS. Untuk SPAMDes Pamaskarta melayani pelanggan sebanyak 7.515 SR dan SPAMDes Pamsimas melayani pelanggan sebanyak 4.394 SR, dan untuk PDAM melayani 26.817 SR.

11. Prasarana Sarana Utilitas untuk Mendukung Fungsi Hunian

Untuk menunjang fungsi hunian pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan prasarana sarana utilitas antara lain: jalan lingkungan, drainase lingkungan, PJU lingkungan. Capaian Jalan Lingkungan dalam kondisi baik sampai dengan 2023 sepanjang 551 kilometer (40,31 persen) dari panjang total jalan lingkungan. Panjang drainase kondisi baik sampai dengan 2023 adalah 82,81 kilometer (40,15 persen).

12. Sarana Persampahan

Seiring dengan dibangunnya PSN YIA, meningkatnya konsumsi masyarakat menyebabkan timbulan sampah di Kulon Progo juga meningkat. Timbulan sampah total di Kulon Progo mencapai 175,74 ton per hari, sehingga diperlukan pengurangan di tingkat hulu dan juga diperlukan teknologi yang dapat memperlama umur teknis TPA Banyuroto. Pada saat ini TPA Banyuroto zona I sudah penuh dan mulai dibangun zona II pada 2023. Masih diperlukan sarana prasarana untuk penanganan sampah baik penambahan luasan TPA maupun teknologi dan peralatan.

13. Kondisi Jaringan Irigasi

Untuk mendukung produksi pangan di Kulon Progo diperlukan dukungan jaringan irigasi yang memadai. Saat ini ada tiga kewenangan jaringan irigasi, yaitu kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Kondisi saluran irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 62,5 persen dalam kondisi baik. Penurunan kondisi rusak sedang hanya terjadi pada kisaran angka 12 persen sedangkan kondisi rusak ringan relatif tetap pada angka delapan persen.

Bila dibandingkan dengan kondisi saluran irigasi di bawah kewenangan provinsi dan pusat, saluran irigasi kewenangan kabupaten masih berada di bawahnya, terutama

keberadaan saluran dengan kondisi rusak berat yang relatif banyak, saluran irigasi yang masih berupa saluran tanah, sehingga perlu ditingkatkan upaya perbaikan, peningkatan menjadi saluran permanen dan pengembangannya, mengingat pentingnya infrastruktur irigasi dalam menopang pertanian dan swasembada pangan di Kulon Progo.

Sektor pertanian yang merupakan saka guru perekonomian masyarakat secara luas harus diprioritaskan dengan membangun sinergi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan di sektor irigasi, yaitu masih minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani pemakai air tentang fisik bangunan jaringan irigasi, adanya kompetisi pemanfaatan air antarsektor, penurunan ketahanan fisik dari prasarana pengendali banjir serta penurunan keberlanjutan dari prasarana jaringan irigasi.

Dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, komisi irigasi terkait, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Adapun tugas dari Komisi Irigasi antara lain merumuskan rencana kebijakan, rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi, memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi, ikut merumuskan rencana tata tanam, merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, memberi masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi, memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.

14. Kawasan Kumuh

Dalam upaya meningkatkan lingkungan permukiman dan perekonomian wilayah, perlu dilaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan di daerah kawasan kumuh. Di Kulon Progo telah ditetapkan lokasi penanganan kawasan kumuh dengan SK terakhir yaitu Keputusan Bupati Kulon Progo No. 416/A/2020.

Lokasi penanganan kawasan kumuh tersebut meliputi kalurahan-kalurahan: Giripeni, Wates, Bangun Cipto, Sentolo, Brosot, Pengasih, Margosari, Tawangsari, Sendang Sari, dan Wiji Mulyo. Selama ini telah dilakukan intervensi untuk penanganan kawasan kumuh melalui program kegiatan antara lain pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, PJU lingkungan, peningkatan prasarana sarana persampahan, perbaikan rumah tidak layak huni, penambahan sambungan rumah untuk air minum, sanitasi, serta listrik.

Namun demikian, masih diperlukan intervensi yang lebih besar yang saat ini masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Daerah, sehingga perlu

diupayakan pembiayaan di luar APBD, seperti Dana Keistimewaan, DAK, Hibah dari Kementerian serta kontribusi dari tanggung jawab sosial perusahaan maupun LSM.

15. Infrastruktur Strategis di Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki sejumlah infrastruktur strategis yang diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap perkembangan wilayah. Salah satunya adalah Bendung Kamijoro, yang merupakan fasilitas penting untuk penyediaan pasokan air baku. Bendung ini diresmikan pada Desember 2019 dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air di Kulon Progo, khususnya untuk mendukung Bandara YIA yang juga sudah diresmikan pada Agustus 2020.

Selain itu, keberadaan Bandara itu didukung oleh peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang berstandar internasional. Untuk mendukung akses Bandara YIA yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kulon Progo, serta untuk memanfaatkan potensi dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan jalan alternatif penghubung Bandara YIA dengan KSPN Borobudur, dikenal sebagai Jalur Bedah Menoreh.

Proyek integrasi kereta bandara, dan rencana untuk mengembangkan jalan tol Yogyakarta-YIA-Cilacap juga sedang berjalan. Di sektor pariwisata, Badan Otorita Borobudur telah mengembangkan sektor pariwisata di perbatasan Kulon Progo dengan fokus pada wisata alam. Pintu masuk utama untuk wisata tersebut berada di Kulon Progo dan telah dibangun gerbang masuk di kawasan Klangon yang dikenal sebagai Samudra Raksa.

Untuk mendukung mobilitas masyarakat dari berbagai kawasan, armada angkutan Damri telah menginisiasi trayek angkutan. Rencana pengembangan selanjutnya termasuk pembangunan asrama haji dan penyelesaian jalur jalan lintas selatan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat infrastruktur wilayah tersebut.

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.4.4.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan masyarakat, karena hal ini memungkinkan mereka menjalani kehidupan dalam keadaan tenang dan damai. Lebih dari itu, ketenteraman dan ketertiban juga merupakan landasan penting untuk menjamin berjalannya pembangunan guna mewujudkan aspirasi dan impian bersama.

Usaha untuk mencapai kondisi tersebut mencakup peningkatan dalam aspek-aspek seperti keamanan, kenyamanan di lingkungan sekitar, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek nasional dan politik dalam masyarakat.

Tabel 2. 92 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelanggaran yang ditegakkan	222	220	244	350	524	558	586	695	613	370
Jumlah pelanggaran	222	220	244	450	524	558	586	695	613	370
Jumlah Anggota Satlinmas	3.326	3.220	3.326	3.326	3326	3.968	3.968	3.968	3.968	3.968
Jumlah Linmas Yang pernah dibina	2.780	3.326	3.326	3.326	3326	3.968	3.968	3.968	3.968	3.807
Jumlah Patroli	350	350	350	416	400	455	457	447	478	456

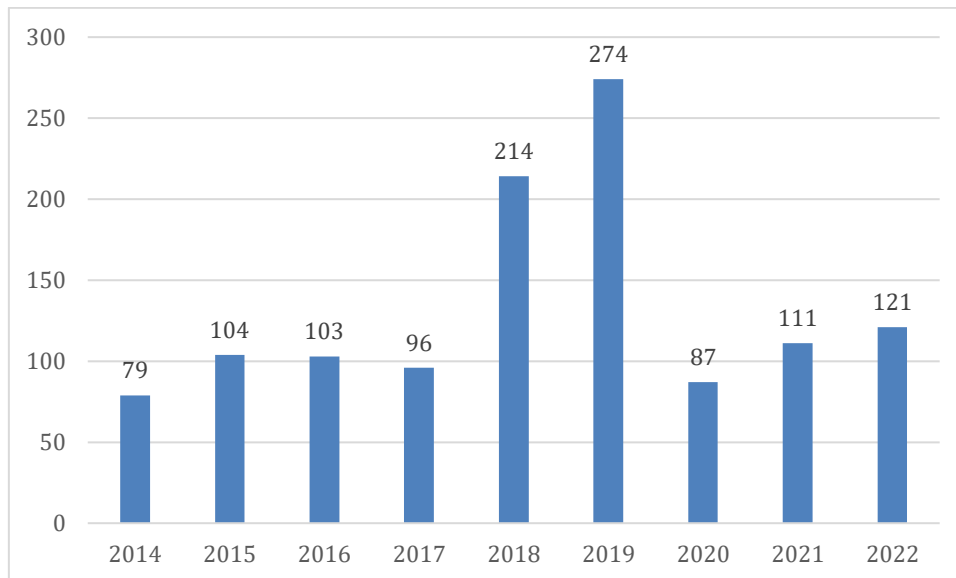
Sumber: Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo, 2024

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas yang sangat penting yaitu sebagai berikut.

1. Membantu dalam penanggulangan bencana,
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,
4. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu,
5. Membantu upaya pertahanan negara.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kementerian Dalam Negeri menentukan bahwa minimal terdapat satu orang Linmas di setiap RT. Di Kabupaten Kulon Progo, pada 2023 terdapat 3.968 orang yang menjadi linmas, sedangkan jumlah RT sebanyak 4.392, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 424 orang, artinya SPM tercapai sebesar 90,35 persen. Potensi konflik sosial yang mungkin muncul di masa depan harus dapat dipertimbangkan, terutama adanya kegiatan pemilu atau pilkada misalnya.

Dalam hal keamanan, ketertiban umum, dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo, penting juga untuk memperhatikan jumlah *crime rate* yang terjadi selama 10 tahun belakangan. *Crime rate* digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan di Kabupaten Kulon Progo dalam periode waktu tertentu. Hal tersebut mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, perampokan, kekerasan fisik, dan lainnya. Tingkat kejahatan ini diukur dalam jumlah kejahatan per seratus ribu penduduk dalam satu tahun.



Gambar 2. 49 Crime Rate Kabupaten Kulon Progo, 2014-2022

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY

Berdasarkan grafik di atas *crime rate* di Kabupaten Kulon Progo, rata-rata mengalami peningkatan. Hal tersebut tentu dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk menanggulangi berbagai faktor utama penyebab kejahatan. Penyebab kejahatan sendiri dapat karena faktor ekonomi yang rendah, keterbatasan akses pendidikan, ketidaksetaraan sosial, dan hilangnya nilai serta norma sosial.

2.4.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi tidak terlepas dari produktivitas dari daerahnya untuk bersaing. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur tingkat produktivitas daerah dengan merefleksikan daya saing. Berikut skor IDSD Kabupaten Kulon Progo pada 2023.

Tabel 2. 93 Skor IDSD Kabupaten Kulon Progo, 2023

Kategori	Pilar	Skor
Lingkungan Pendukung	Pilar 1. Institusi	4,60
	Pilar 2. Infrastruktur	2,46
	Pilar 3. Adopsi TIK	4,53
	Pilar 4. Stabilitas Ekonomi Makro	3,73
Sumber Daya Manusia	Pilar 5. Kesehatan	4,25
	Pilar 6. Ketrampilan	4,17
	Pilar 7. Pasar produk	3,88
Pasar	Pilar 8. Pasar tenaga kerja	3,03
	Pilar 9. Sistem keuangan	1,68
	Pilar 10. Ukuran pasar	4,08

Kategori	Pilar	Skor
Ekosistem Inovasi	Pilar 11. Dinamisme bisnis	3,83
	Pilar 12. Kapabilitas inovasi	1,56
IDSD		3,48

Sumber data: BRIN, 2024

Skor di atas masih berada di bawah rata-rata nasional (3,26) serta DIY (3,61). Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim yang kondusif untuk mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah aksi demonstrasi.

a. Angka Kriminalitas

Ditinjau dari kejadian kejahatan, dari 2017 hingga 2021 cenderung meningkat tiap tahun. Dengan meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan kurang tertibnya masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung.

Tantangan ke depan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal kekerasan secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2. 94 Data Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2023

No	Jenis Kriminal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pencurian biasa	9	20	7	45	58	44	58	26	41	41
2.	Jumlah pencurian hewan	1	4	0	0	4	0	1	10	7	1
3.	Jumlah pencurian dengan kekerasan	7	15	17	16	7	4	6		12	1
4.	Jumlah lainnya	321	403	917	70	388	463	468	79	389	312
Jumlah kejadian total		338	442	941	131	457	511	533	115	457	345
Jumlah kerugian		6,239	10.214,	0,262	5,76	11,68	19,26	13,38	1.815,	11.435	8.632,

No	Jenis Kriminal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(juta rupiah)		6						02	,242	794

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

b. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut, atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak, atau bisa pula dilakukan sebagai sebuah upaya menekan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah satu permasalahan di antaranya adalah berkaitan dengan pembangunan bandara di Kapanewon Temon. Demonstrasi pada 2021 terjadi pada kategori demonstrasi politik yaitu tentang penegakan HAM Kasus Munir, dan demonstrasi ekonomi yaitu terkait penambangan pasir besi. Kejadian demo di Kabupaten Kulon Progo pada 2014-2023 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 95 Data Jumlah Demo di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2023

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Demonstrasi politik	2	2	2	0	0	1	0	1	0	2
2	Demonstrasi ekonomi	11	9	8	23	7	5	1	1	1	5
3	Demonstrasi mogok kerja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Demonstrasi agama	n/a	n/a	n/a	2	0	2	0	0	0	2
JUMLAH		14	11	10	25	7	8	1	2	1	9

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan jangka panjang daerah pada periode 2005-2025 telah dilaksanakan. Menurut evaluasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo oleh Pemerintah Daerah DIY terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Capaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan berjalan baik, dengan rata-rata

kinerja RPJMD pada empat tahap pelaksanaan mencapai 86,16 persen, atau menunjukkan kinerja yang “tinggi”. Meskipun pembangunan menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih maju dan mandiri, beberapa indikator perlu untuk diperhatikan.

Terdapat catatan dan rekomendasi terkait capaian Indikator Makro Pembangunan di Kulon Progo. Upaya perlu ditingkatkan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan fokus pada faktor lokal dan strategi kolaboratif. Perlu pula identifikasi masyarakat rentan untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, dukungan pada UKM, koperasi, dan penguatan kemitraan antara perusahaan besar dan UKM lokal merupakan langkah penting. Perlindungan sosial juga menjadi hal krusial bagi pekerja rentan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi melebihi target, masih diperlukan insentif untuk menciptakan mekanisme pasar yang lebih efisien dan peningkatan daya saing melalui inovasi serta teknologi. Optimalisasi potensi daerah juga menjadi fokus, sambil memanfaatkan kehadiran Bandara YIA sebagai dorongan bagi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Kesimpulan dan rekomendasi arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

- 1) Diperlukan upaya terintegrasi dalam mewujudkan Kulon Progo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) seperti melalui memperkuat upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan.
- 2) Capaian indikator IPM secara umum mengalami peningkatan selama periode RPJPD, tetapi masih perlu dioptimalkan. Dalam urusan pendidikan, perlu peningkatan kualitas layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Terkait dengan urusan kesehatan, perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan seperti Angka Kematian Ibu, serta kebijakan-kebijakan global, nasional, dan DIY seperti SDGs, Percepatan Penurunan Stunting, Transformasi Sistem Kesehatan, dan sebagainya. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan aksesibel dilakukan dengan penyediaan SDM Kesehatan yang kompeten.
- 3) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu berupaya menciptakan iklim hukum yang aman dan mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Meskipun telah ada peraturan tentang kuota partisipasi perempuan, namun DPRD Kulon Progo masih belum memenuhinya. Strategi khusus diperlukan untuk mendukung kemunculan tokoh politik perempuan. Penting juga bagi Kabupaten Kulon Progo untuk memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait kemiskinan tinggi, IPM rendah, dan angka stunting yang masih tinggi. Kolaborasi lintas sektor serta pendanaan kolaboratif perlu diinisiasi untuk mewujudkan program SDGs tersebut karena keterbatasan dana Pemda.

- 4) Untuk memastikan stabilitas dan keamanan Kabupaten Kulon Progo, diperlukan antisipasi terhadap dinamika migrasi penduduk yang dapat timbul akibat perkembangan pusat ekonomi baru seperti Bandara YIA dan kawasan *aerotropolis*.
- 5) Kabupaten Kulon Progo telah mencatat penurunan kemiskinan, namun tingkat kemiskinan yang masih tinggi tetap jadi perhatian. Diperlukan langkah cepat sesuai target nasional dan regional. Perlu fokus pada tiap wilayah, identifikasi kelompok rentan, dan analisis mendalam penyebab kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dan akses pendidikan juga perlu diperkuat.
- 6) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan dengan fokus pada tujuan SDGs terkait air bersih, permukiman, perubahan iklim, dan ekosistem. Diperlukan mitigasi bencana, edukasi terkait kebencanaan, pengendalian ruang sesuai rencana, dan koordinasi untuk mengatasi masalah lingkungan yang berdampak pada sektor lain, seperti upaya bersama dalam pencegahan malaria.
- 7) Perlu perhatikan atas tingginya kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, terutama di wilayah selatan melalui dan evaluasi yang tepat. Kolaborasi antara berbagai pihak seperti Kampung, Kampus, Kantor, Kraton, dan Korporasi dapat mendukung program pembangunan dan terdapat pentingnya kerja sama antara lembaga untuk penanganan kemiskinan.
- 8) Perlu adanya dorongan partisipasi pemuda di wilayah perdesaan, kolaborasi Dinas Pariwisata dan Pertanian untuk ekonomi perdesaan, dan penggalakkan petani milenial dengan kelompok sadar wisata. *Jogja Agro Park* juga dapat dikembangkan untuk pertanian presisi. Selain itu, diperlukan semangat swasembada pangan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Tren Demografi

Perencanaan pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan data dan informasi terkini mengenai jumlah penduduk serta estimasinya di masa mendatang. Informasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan yang telah terjadi dan merumuskan kebijakan pembangunan di masa depan.

Selain jumlah penduduk, penting juga untuk memperhitungkan faktor-faktor demografis seperti distribusi usia penduduk, *sex ratio*, angka ketergantungan, dan kepadatan penduduk. Data-data ini sangat berperan dalam merancang perencanaan pembangunan yang presisi. Informasi semacam ini dapat diperoleh melalui perhitungan proyeksi penduduk. Untuk

keperluan proyeksi, dilakukan pergeseran penduduk dasar dari hasil Sensus Penduduk 2020 ke pertengahan 2020.

Berdasarkan proyeksi penduduk, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada akhir periode RPJPD (2045) bertambah sebanyak 32,03 ribu jiwa dari pada 2023, sehingga menjadi 475,08 ribu jiwa (2045). Meskipun jumlah penduduknya terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan penduduk ini terus melemah. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 sebesar 0,35 persen pada setiap lima tahun.

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dengan ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan semakin tingginya kepadatan penduduk di Kabupaten Kulon Progo. Di mana pada 2045 diproyeksikan kepadatan penduduk di Kabupaten Kulon Progo mencapai 810 jiwa per kilometer persegi. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo setiap lima tahun secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 96 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo

Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
443,05	447,46	456,68	464,39	470,82	475,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kulon Progo pada 2023 adalah sebanyak 219,45 ribu jiwa. Jumlah tersebut terus bertambah hingga menjadi 234,23 ribu jiwa pada 2045. Kondisi yang sama juga terjadi pada penduduk perempuan, di mana jumlahnya bertambah dari sebesar 223,60 ribu jiwa (2023) menjadi 240,82 ribu jiwa (2045).

Meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terus bertambah, tetapi nilai rasio antara keduanya mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki-laki. Pada 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kulon Progo sebesar 97,27. Artinya, terdapat 97 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin beserta rasio antara keduanya di Kabupaten Kulon Progo pada setiap lima tahun secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 97 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kulon Progo

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	219,45	221,59	225,95	229,53	232,46	234,23
Perempuan	223,60	225,87	230,73	234,86	238,35	240,82
Rasio	98,14	98,10	97,93	97,73	97,53	97,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Ditinjau dari komposisi menurut kelompok umur, proporsi penduduk usia 0-14 tahun diproyeksikan menurun dari 19,18 persen (2023), menjadi 17,74 persen (2045). Penurunan proporsi penduduk usia 0-14 tahun ini disebabkan oleh adanya tren penurunan pada nilai *Total Fertility Rate* (TFR).

Tren penurunan juga terdapat pada proporsi penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dari 66,95 persen menjadi 63,08 persen pada periode yang sama. Di sisi lain, terdapat peningkatan proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas), yang sebelumnya sebesar 13,16 persen menjadi 19,17 persen. Kenaikan proporsi penduduk usia tua ini didukung oleh adanya tren peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kulon Progo pada setiap lima tahun secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.

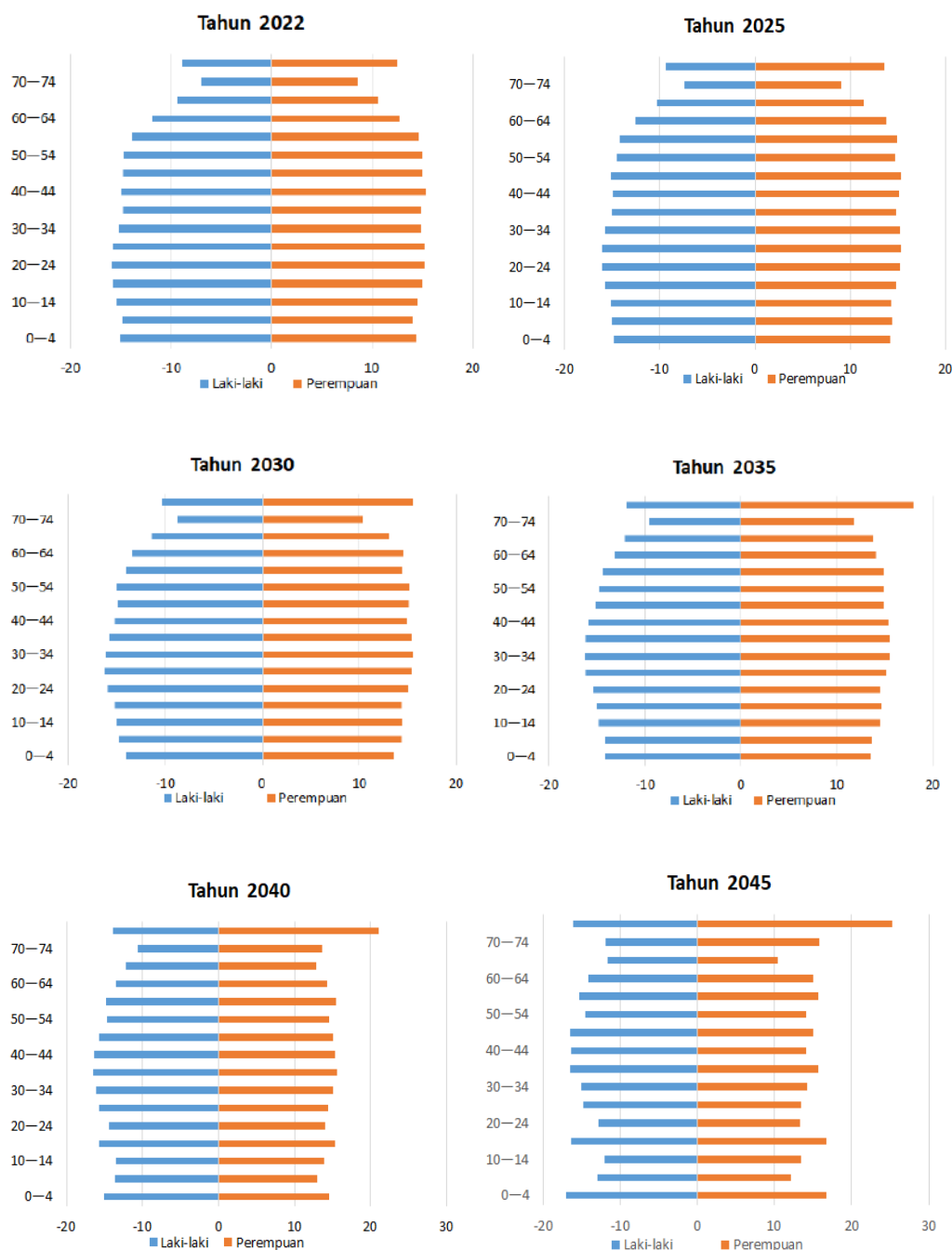
Tabel 2. 98 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kulon Progo

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	88,11	87,60	86,21	84,76	83,72	84,30
15-64 Tahun	296,61	298,68	301,28	302,38	302,61	299,70
65+ Tahun	58,33	61,18	69,18	77,25	84,49	91,08
Angka Ketergantungan	49,37	49,81	51,58	53,57	55,58	58,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Pada 2045, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan meningkat menjadi 58,52 persen, dari 49,37 persen (2023). Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 57 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan ini menunjukkan semakin tingginya beban yang harus dipikul penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Dari data tersebut juga diketahui bahwa pada periode pertama RPJMD (2025-2030), Kabupaten Kulon Progo sudah kehilangan bonus demografi (bonus demografi: proporsi penduduk usia produktif dua kali lipat dari penduduk usia nonproduktif atau nilai rasio ketergantungannya kurang dari sama dengan 50 persen).

Dalam menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat melalui piramida penduduk. Berikut piramida penduduk Kabupaten Kulon Progo pada beberapa tahun.



Gambar 2. 50 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2023

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Kebutuhan sarana dan prasarana dasar digunakan dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proyeksi sarana dan prasarana juga digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kulon Progo menjadi lebih baik. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melihat proyeksi jumlah penduduk dan kriteria cakupan pelayanan

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan tahun 2004.

Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Rumah dianggap penting karena memiliki dampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan rumah eksisting di Kabupaten Kulon Progo pada 2022 masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pada 2022 terdapat 116.077 jumlah rumah di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan jumlah KK di Kabupaten Kulon Progo adalah 155.219 sehingga terdapat defisit rumah sebanyak 40.119 rumah.

Kebutuhan terhadap rumah diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Proyeksi kebutuhan perumahan dihitung dengan memperhitungkan defisit rumah yang dimulai sejak 2022 dan akan terus bertambah dengan selisih proyeksi jumlah keluarga yang diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam melakukan proyeksi kebutuhan rumah, diasumsikan bahwa satu kepala keluarga membutuhkan satu rumah. Berikut adalah proyeksi kebutuhan rumah yang didasari dengan proyeksi jumlah keluarga yang terus meningkat.

Tabel 2. 99 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	443.591	447.460	456.680	464.390	470.819	475.081
Proyeksi Kebutuhan Rumah	40.119	42.366	47.890	53.606	59.521	65.643

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

Kebutuhan dasar air bersih dihitung menggunakan perbandingan jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan kebutuhan air bersih dalam satu hari, yaitu sebanyak 70 liter per orang per hari. Berdasarkan hasil proyeksi, laju peningkatan kebutuhan air semakin tinggi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas air sebagai salah satu sumber daya air minum.

Tabel 2. 100 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	443.591	447.460	456.680	464.390	470.819	475.081
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	31.051	31.322	31.968	32.507	32.957	33.256

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

Listrik merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketidaktersediaan listrik dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari dan bahkan dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, listrik dianggap sebagai infrastruktur kritis yang

mendukung berbagai aspek kehidupan modern. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Kulon Progo sudah mendekati 100 persen dengan persentase peningkatan setiap tahun yang cukup stabil. Pada 2020 rasio elektrifikasi sebesar 98,44 persen dan sejak 2021 hingga 2023 sudah mencapai 99,99 persen.

Dalam melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik, digunakan perhitungan kebutuhan rumah yang dikali dengan kebutuhan listrik satu rumah. Satu rumah diasumsikan membutuhkan 900 watt untuk dapat menjalankan kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2. 101 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik (Watt)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	443.591	447.460	456.680	464.390	470.819	475.081
Jumlah Rumah	116.077	158.352	163.872	169.585	175.497	181.615
Proyeksi Kebutuhan Listrik	104.469.300	142.516.388	147.484.705	152.626.224	157.946.984	163.453.232

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

Timbulan sampah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan daerah untuk mencapai lingkungan yang sehat dan nyaman. Proyeksi timbulan sampah mencakup sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Proyeksi ini dalam membantu dalam perencanaan pengelolaan sampah, mengembangkan kebijakan lingkungan, dan strategi pengurangan sampah. Perhitungan sampah berdasar hasil Kajian Timbulan Sampah Harian Permukiman Kulon Progo dilakukan dengan mengasumsikan per orang akan menghasilkan volume sampah sebesar dua liter per orang per hari.

Berikut adalah perhitungan proyeksi timbulan sampah Kabupaten Kulon Progo. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo, tentu akan mempengaruhi timbulan sampah, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyiapkan regulasi untuk penanganan sampah sehingga terolah dengan baik dan tidak memberikan dampak buruk yang besar bagi kelestarian lingkungan.

Tabel 2. 102 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbulan Sampah (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	443.591	447.460	456.680	464.390	470.819	475.081

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbulan Sampah (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Timbulan Sampah	887.182	894.920	913.360	928.780	941.637	950.162

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

Aspek kebutuhan dasar kesehatan terdapat prasarana kesehatan berupa Posyandu, balai pengobatan rumah, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan lingkungan, serta apotik/rumah obat. Jika dihitung menggunakan SNI, kebutuhan sarana fasilitas kesehatan Kabupaten Kulon Progo hingga 2045 sudah memenuhi jumlah penduduk pendukung. Namun, berdasarkan kondisi eksisting fasilitas kesehatan Kabupaten Kulon Progo lebih besar karena untuk memenuhi fasilitas kesehatan yang memiliki akses sulit untuk menuju pusat kota. Hal tersebut disebabkan karena perhitungan proyeksi yang dilakukan hanya memperhatikan jumlah penduduk saja, tanpa memperhatikan lokasi sebaran fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, di masa mendatang Kabupaten Kulon Progo cukup meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses pada masing-masing prasarana fasilitas kesehatan dan tidak perlu untuk menambahkan unit prasarana fasilitas kesehatan baru. Peningkatan akses pada masing-masing prasarana fasilitas kesehatan di Kabupaten Kulon Progo dapat direncanakan melalui perencanaan sektoral mengenai kesehatan.

Tabel 2. 103 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	443.591	447.460	456.680	464.390	470.819	475.081
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Posyandu	959	959	959	959	959	959
Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Bersalin	16	16	16	16	16	16
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	63	63	63	63	63	63
Puskesmas dan Balai Pengobatan	21	21	21	21	21	21
Apotek/Rumah Obat	67	67	67	67	67	67

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

Selanjutnya adalah sarana kebutuhan dasar mengenai pendidikan antara lain TK, SD, SMP, SMA. Terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki kebutuhan sama dengan kondisi pada 2022. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sudah memenuhi kebutuhan berdasarkan perhitungan SNI. Sarana dan prasa kebutuhan tersebut adalah TK dan SD di Kabupaten Kulon Progo.

Dengan demikian, Kabupaten Kulon Progo hanya perlu meningkatkan pelayanan fasilitas seperti peningkatan kualifikasi guru dan tidak perlu untuk menambahkan jumlah unit prasarananya. Sedangkan, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih diperlukan unit sekolah baru sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk pada 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045.

Tabel 2. 104 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	443.591	447.460	456.680	464.390	470.819	475.081
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK	328	358	365	372	377	380
SD/MI	368	368	368	368	368	368
SMP/MTs	83	93	95	97	98	99
SMA/MA/SMK	58	93	95	97	98	99

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Identifikasi dan Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah

Salah satu tujuan utama dari RPJPN 2025-2045 adalah transformasi ekonomi, dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Strategi untuk mencapai antara lain pembentukan koridor ekonomi yang mengoptimalkan potensi lokal, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang disebut sebagai *superhub* ekonomi nusantara. Pusat-pusat pertumbuhan ini bertujuan untuk memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim dengan tetap memperhatikan dinamika global, nasional, dan lokal.

Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mendorong investasi dan menciptakan nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan kesempatan kerja melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru. Pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, di mana fokus pengembangannya terletak pada sentra dan kawasan yang memiliki potensi unggulan, yang akan didukung oleh perkembangan kawasan perkotaan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa pusat pertumbuhan ekonomi lokal dalam sistem perkotaan yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Kulon Progo, yaitu enam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdiri atas perkotaan: Wates, Galur, Sentolo, Nanggulan, Temon, dan Dekso. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki Kawasan Strategis

Provinsi (KSP) yang termasuk dalam Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten, serta Kawasan Strategis Kabupaten untuk sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya yang juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah tabel kawasan strategis di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2. 105 Kawasan Strategis di Kabupaten Kulon Progo

No.	Kawasan Strategis	Lokasi
1.	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	
	a) Kawasan Strategis Kasultanan	KSP Perbukitan Menoreh
	b) Kawasan Strategis Kadipaten	KSP Makam Girigondo; KSP Pusat Kota Wates; dan KSP Pantai Selatan Kulon Progo.
2.	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	
	a) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Kawasan Agropolitan Kalibawang; Kawasan Minapolitan Nanggulan; dan Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (BIY)
	b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Kawasan Koridor Temon – Borobudur (Jalur Bedah Menoreh)

Sumber: Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044

Dalam rangka mendukung pembangunan di tingkat regional maupun nasional, Kabupaten Kulon Progo yang terletak di ujung barat DIY juga turut mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di pinggiran. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

Beberapa kawasan yang menjadi fokus pengembangan antara lain kawasan sekitar Bandara YIA, kawasan pantai selatan yang meliputi kawasan pelabuhan Tanjung Adikarta, kawasan pertambangan pasir besi, kawasan pengembangan perkotaan Wates, kawasan peruntukan industri Sentolo, dan kawasan perbukitan Menoreh. Di kawasan-kawasan tersebut, terdapat berbagai potensi yang dapat dikembangkan, seperti pariwisata, industri, dan logistik.

Kawasan sekitar Bandara YIA memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi, khususnya di Kapanewon Wates dan Temon. Dengan kedekatannya pada Bandara YIA, Kapanewon Wates dan Temon dapat menjadi pusat transit dan akomodasi bagi wisatawan dan pelancong bisnis, melalui investasi dalam infrastruktur hotel, restoran, dan fasilitas logistik yang akan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari bandara.

Selain itu, kawasan industri dan pergudangan juga dapat dikembangkan di Kapanewon Temon guna menarik investasi. Pengolahan hasil pertanian, agrowisata, dan kuliner di kapanewon ini juga dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan keunggulan lokal dalam

produksi pangan dan wisata berbasis alam, sehingga meningkatkan daya tarik daerah ini sebagai destinasi investasi dan pariwisata.

Pengembangan kawasan pinggiran di sekitar Bandara YIA didukung dengan keberadaan jaringan perhubungan darat nasional yang akan melewati Stasiun Wates serta jaringan perhubungan internasional-nasional melalui Bandara YIA dan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Kawasan pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, yang mencakup Kapanewon Panjatan dan Galur, memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata beragam. Pengembangan ini difokuskan pada beberapa sektor unggulan, seperti agrowisata, ekowisata, wisata budaya, dan pengembangan UMKM. Kapanewon Panjatan, dengan garis pantai yang indah, cocok untuk pengembangan resort, penginapan, dan destinasi wisata yang menarik wisatawan domestik dan internasional.

Selain itu, pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan di Kapanewon Panjatan juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sementara itu, Kapanewon Galur memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata budaya, agrowisata, dan kuliner. Dengan kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki, Kapanewon Galur dapat menjadi destinasi wisata budaya yang menawarkan pengalaman unik, sementara agrowisata dan kuliner khas daerah juga dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.

Pengembangan kawasan pesisir selatan juga didukung alur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Di mana keberadaan JJLS di wilayah pinggiran pantai selatan Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu titik pengembangan dan penumbuhan ekonomi baru yang layak untuk diperhatikan yakni pelabuhan Tanjung Adikarto sebagai upaya peningkatan service hub di sektor perikanan laut dan menjadi pemicu pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan Kulon Progo.

Kawasan pertambangan pasir besi di Kapanewon Wates (Kalurahan Karangwuni), dan wilayah Kapanewon Panjatan (Kalurahan Garongan, Pleret) merupakan kawasan pertambangan zona khusus yang berskala internasional. Produk konsentrat pasir besi merupakan produk kualitas ekspor yang telah dikelola dengan model kerja sama pemerintah dengan badan usaha yakni PT Jogja Magasa Iron Yogyakarta selama 30 tahun sejak 2008.

Kawasan pertambangan tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi warga Kulon Progo dan DIY pada umumnya. Perkiraan cadangan bijih besi hingga 605 juta ton dengan kadar Fe 10,8 persen dan cadangan tertinggi pada kedalaman 6-8 m dengan cadangan 273 juta ton dengan kadar Fe 14,2 persen, maka potensi produksi *pig iron* bisa dihasilkan selama 30

tahun. Kondisi tersebut diharapkan menjadi nilai lebih dari kawasan selatan Kulon Progo minimal bermanfaat untuk perluasan kesempatan kerja untuk warag masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya.

Kawasan Pengembangan Perkotaan Wates menjadi salah satu fokus kebijakan jangka panjang daerah karena berperan penting sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian serta pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi terkini dengan kepadatan penduduk dan kepadatan arus lalu lintas di sekitar kawasan Perkotaan Wates maka diperlukan upaya penataan dan pengembangan serta perluasan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menjamin kualitas dan kenyamanan pelayanan publik.

Potensi pengembangan wilayah di sekitar perkotaan Wates dapat diarahkan ke bagian timur dan utara dari kondisi eksisting sekarang, di mana hal tersebut akan mendorong upaya peningkatan sarana prasarana konektivitas dan keterjangkauan masyarakat Kulon Progo sisi utara. Oleh karena itu, titik kawasan pertumbuhan ini sangat penting dalam rencana pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

Fokus utama pembangunan kawasan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo dalam 20 tahun ke depan adalah Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Berdasarkan Perda DIY No. 7 tahun 2019 tentang *Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039*, rencana luasan peruntukan KPI Sentolo yang meliputi wilayah Kapanewon Sentolo, Nanggulan, dan Lendah yang mencakup kawasan seluas 3.809,43 hektare.

Dengan adanya penyediaan dan pengembangan kawasan peruntukan industri tersebut, diharapkan dapat sebagai *trigger* penarik investor utama di Kulon Progo dan mampu menggerakkan roda industri besar serta menarik adanya mutasi penduduk yang masuk ke wilayah Kulon Progo. Potensi alam yang mendukung KPI tersebut misalnya: industri bahan pasir besi, pengolahan pangan, sandang dan kulit, kerajinan bahan alami dan sebagainya.

Kawasan Perbukitan Menoreh, yang meliputi Kapanewon Samigaluh dan Girimulyo, menawarkan potensi yang besar untuk pengembangan ekowisata, agrowisata, dan wisata budaya. Kapanewon Samigaluh, dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati Menoreh, menjadi tempat yang ideal untuk ekowisata yang ramah lingkungan. Di samping itu, agrowisata dan wisata budaya dapat dikembangkan untuk memberikan pengalaman edukatif dan rekreatif kepada pengunjung.

Sementara itu, Kapanewon Girimulyo menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, yang cocok untuk pengembangan wisata alam yang melibatkan *trekking*, berkemah, dan kegiatan edukasi lingkungan. Pengembangan agrowisata di Girimulyo juga memiliki potensi besar untuk memanfaatkan lahan pertanian yang subur. Dengan berfokus pada kelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan,

pengembangan kawasan Perbukitan Menoreh diharapkan dapat meningkatkan atraksi wisata, memberdayakan masyarakat setempat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

2.7.2 Identifikasi dan Analisis Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Arah kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Kulon Progo penting untuk selaras dengan arah kebijakan nasional dan DIY. Salah satu misi RPJPN 2025-2045 adalah melakukan transformasi ekonomi dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Salah satu strateginya adalah melalui pembentukan koridor ekonomi yang didasarkan pada potensi di masing-masing wilayah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang dikenal sebagai *superhub* ekonomi nusantara.

Pusat-pusat pertumbuhan regional ini dibangun dengan maksud untuk mendukung perkembangan Indonesia sebagai negara Nusantara, dengan memperhitungkan dinamika global, nasional, dan lokal.

Berdasarkan pemetaan tematik transformasi ekonomi kewilayahan, koridor ekonomi Jawa diarahkan sebagai industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Berdasarkan peta potensi wilayah Jawa yang dimuat dalam dokumen RPJPN 2025-2045, DIY difokuskan pada pengembangan industri pengolahan makan dan minum, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri pengolahan logam elektronik yang didukung oleh penyediaan akomodasi makan minum serta infrastruktur informasi dan komunikasi yang memadai.

Jika diturunkan kembali pada tingkat provinsi, DIY juga telah memetakan arah pengembangan kewilayahannya ke dalam beberapa tema. Di mana tema yang difokuskan pada Kabupaten Kulon Progo adalah pengembangan kawasan industri terpadu berbasis sumber daya alam wilayah.

Dalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang yang akan berkaitan erat dengan pembangunan wilayah di Kabupaten Kulon Progo adalah *mewujudkan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan jasa, dan industri secara terpadu dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan prinsip pelestarian lingkungan hidup*. Arah pembangunan kewilayahan DIY mengarahkan Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan industri terpadu berbasis sumber daya alam wilayah.

Pada tingkat kabupaten, arah kebijakan pembangunan wilayah yang ditunjukkan dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 106 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Kulon Progo

No.	Kebijakan Pengembangan	Kebijakan Penataan Ruang
1	Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan • Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sesuai kebutuhan secara terpadu dan merata di seluruh wilayah.
2	Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	
	a) Kebijakan pengembangan kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fungsi dan pelestarian kawasan lindung; • Pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana; • Pelestarian kawasan konservasi; dan • Perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
	b) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan; • Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal; • Pengembangan kegiatan industri yang inklusif; • Pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; • Penyediaan aksesibilitas dan jaringan infrastruktur transportasi yang memadai; • Penguatan dan penyiapan sumber daya manusia; • Pengembangan sektor bahari melalui penguatan kelembagaan, dan peningkatan sarana prasarana; • Peningkatan upaya mitigasi bencana secara terpadu dan berkelanjutan; • Pemantapan kawasan pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandar Udara Baru Yogyakarta – Kulon Progo dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur; • Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai daya dukung, daya tampung, dan kesesuaian lahan.
3	Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing; dan • Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Sumber: Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044

Untuk menjawab arah pembangunan skala nasional dan provinsi, maka Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa program strategis. Terdapat 10 program strategis Kabupaten Kulon Progo antara lain sebagai berikut: 1) Bedah Menoreh Proyek sebagai jalur menuju Pusat KSPN Borobudur; 2) Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo; 3) Pengembangan SPAM Kamijoro; 4) Pembangunan Asrama Haji; 5) Pengembangan Aerotropolis; 6) Pengembangan dan Optimalisasi Fungsi Pelabuhan Tanjung Adikarta; 7) Pengembangan

Pertambangan Berkelanjutan Pasir Besi; 8) Pengembangan Kawasan Perkotaan Wates; 9) Penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Selatan; dan 10) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo.

Program strategis Bedah Menoreh sebagai jalur menuju KSPN Borobudur merupakan proyek yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas di Kabupaten Kulon Progo dengan melakukan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada sebelumnya. Dengan konektivitas yang baik maka, pembangunan yang merata akan mudah dicapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkembangan yang muncul akibat adanya perbaikan konektivitas.

Pembangunan Jalan Tol-Solo-Yogyakarta juga merupakan salah satu program strategis yang dapat memberikan dampak besar bagi Kabupaten Kulon Progo, karena adanya pintu keluar tol. Dengan adanya pintu keluar tol tersebut, maka dapat menarik para investor untuk berinvestasi di sekitar wilayah pintu keluar tol, sehingga akan terjadi perkembangan wilayah yang pesat.

Program strategis Pengembangan SPAM Kamijoro yang berfungsi untuk melakukan penanganan terhadap krisis air yang bisa terjadi karena adanya bandara dan perhotelan yang menyebabkan defisit air. Program strategis tersebut dibagi menjadi dua kawasan yaitu bagian tengah-selatan dan bagian tengah-utara.

Program strategis selanjutnya adalah pembangunan asrama haji di Kabupaten Kulon Progo yang dapat meningkatkan pendapatan daerah saat di luar musim haji dengan menyewakan sebagai tempat beristirahat bagi wisatawan dari luar daerah. Program strategis yang terakhir adalah pengembangan aerotropolis. Program strategis tersebut dapat berpengaruh terhadap DIY maupun Kulon Progo. Dengan adanya Bandara YIA maka dapat menjadi pusat perkembangan wilayah baik pada segi ekonomi, jasa, dan lainnya.

Program strategis tersebut difungsikan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang Strategis dan memiliki kebermanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Beberapa tahapan perwujudan pengembangan kawasan *aerotropolis* jangka pendek melalui upaya penerapan *smart agriculture* dan *smart tourism*.

Smart agriculture diusung sebagai salah satu program prioritas utama yang mengangkat potensi sektor pertanian di kawasan *aerotropolis* sebagai bentuk upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tambah produk pertanian yang diintegrasikan melalui pemanfaatan informasi dan teknologi digital.

Selain itu, melalui penerapan *smart agriculture* ini juga sebagai upaya pelestarian lahan sawah *surjan* yang merupakan Warisan Budaya Tak Benda di Kulon Progo. Hal ini dilakukan dalam rangka perwujudan konsep Agro-Aerotropolis di Kulon Progo.

Smart tourism diusung dalam rangka mengangkat potensi sektor pariwisata di kawasan pesisir dan pegunungan yang ada di kawasan *aerotropolis* yang diintegrasikan dengan pemanfaatan informasi dan teknologi digital. Selanjutnya untuk tahapan jangka menengah dan panjang dilakukan melalui perwujudan program prioritas utama *Airfront-MICE*, *science-techno city* serta *futuristic-town*.

Program prioritas *Airfront-MICE* bertujuan untuk menyediakan ruang bagi aktivitas bisnis dan komersial yang timbul sebagai dampak mobilitas logistik (orang dan barang) yang akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan layanan operasional penumpang di Bandara YIA. Sebagai bandara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional maka kawasan sekitar bandara sangat potensial didorong sebagai ruang bagi penyelenggaraan kegiatan Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE).

Implementasi program tersebut diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian program prioritas utama *Science-Techno City* bertujuan untuk mendorong tumbuhnya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi. Perwujudan program prioritas utama ini juga akan didukung dengan pemantapan infrastruktur kawasan, aksesibilitas serta penyediaan moda transportasi terintegrasi (*transit oriented development*). Selanjutnya, program prioritas utama pengembangan *futuristic town* bertujuan untuk mengembangkan kota masa depan yang menerapkan konsep ekonomi sirkular.

Salah satu proyek strategis di kawasan *aerotropolis* adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarta yang diharapkan mampu mengentaskan permasalahan utama dalam penangkapan ikan di pantai selatan DIY. Permasalahan yang dimaksud adalah belum tersedianya fasilitas pendaratan ikan yang memadai, seperti pelabuhan perikanan. Kondisi ini mengakibatkan kapal dan perahu nelayan tidak dapat berlayar setiap saat.

Saat ini, nelayan hanya bisa melaut secara efektif sekitar tujuh hingga sembilan bulan dalam setahun. Bahkan dalam periode tersebut, nelayan tidak bisa melaut secara terus-menerus karena kondisi gelombang laut yang tidak menentu. Pembangunan pelabuhan perikanan diharapkan dapat memungkinkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan setiap hari karena kondisi alam, khususnya gelombang laut, tidak lagi menjadi hambatan. Keberadaan pelabuhan perikanan juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kapal, jumlah nelayan, dan produksi ikan yang dihasilkan.

Proyek strategis lainnya yang berada di kawasan pantai selatan yakni program penambangan pasir besi yang secara kewenangan merupakan wilayah Pemda DIY sebagai pengampu urusan ESDM. Dengan adanya proyek strategis ini diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di kawasan selatan Kulon Progo melalui penyiapan regulasi dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan rencana pembangunan *shelter* di lokasi pertambangan tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Kulon Progo dengan munculnya pusat perdagangan baru, perluasan kesempatan kerja dan peluang investasi serta retribusi dan bagi hasil bagi Kabupaten Kulon Progo.

Intervensi kebijakan untuk keberlanjutan penambangan dan ramah lingkungan hidup maupun secara sosial ekonomi juga menjadi fokus perhatian dalam rencana pembangunan jangka panjang ini.

Proyek strategis dalam pengembangan kawasan Perkotaan Wates mencakup rencana penataan kawasan pemerintahan yang terintegrasi, dengan tujuan menciptakan pusat administrasi yang efisien dan terorganisasi. Proyek ini bertujuan untuk menyatukan berbagai kantor pemerintahan, layanan publik, dan fasilitas pendukung lainnya dalam satu kawasan yang terpusat, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Penataan kawasan ini melibatkan pembangunan gedung-gedung perkantoran yang modern dan ramah lingkungan, infrastruktur jalan yang memadai, serta ruang publik yang nyaman dan terbuka. Dengan integrasi ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kawasan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas bisnis dan perdagangan di sekitar pusat pemerintahan.

Proyek strategis selanjutnya yakni pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo yang terdiri kawasan pantai selatan di wilayah Kapanewon Panjatan dan Galur. Hal tersebut dimungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan RTRW Kabupaten Kulon Progo karena kawasan pesisir pantai di wilayah Kapanewon Temon sudah diperuntukkan sebagai kawasan *aerotropolis* dan di wilayah Kapanewon Wates serta sebagian Panjatan sudah diperuntukkan untuk kawasan pertambangan pasir besi.

Melalui kebijakan penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan Kulon Progo sisi timur dapat difokuskan pada penumbuhan kawasan perekonomian agropolitan dan minapolitan serta ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis pantai. Sehingga diharapkan akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.

Proyek lainnya yang juga masuk dalam kategori strategis adalah proyek pengembangan kawasan peruntukan industri sentolo (KPI) Sentolo. Arah pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo yakni pemberian kepastian lokasi dalam perencanaan, penyediaan air bersih, penyediaan infrastruktur jalan, penyediaan jaringan energi dan listrik dengan pasokan daya dan tegangan stabil, serta mampu mewadahi kegiatan industri di kawasan tersebut dengan penyediaan sarana telekomunikasi berupa sistem kabel dan nirkabel untuk distribusi produk dan pengembangan usaha. Diharapkan pengembangan kawasan ini dapat menyumbang baik untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo sebagai pengungkit maupun upaya penyerapan tenaga kerja dan arus perpindahan penduduk ke Kulon Progo.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo, penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan, jasa, dan industri secara terpadu dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan arah penataan ruang wilayah tersebut, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Penyediaan aksesibilitas dan jaringan infrastruktur transportasi yang memadai, meliputi pengembangan jaringan jalan terutama penghubung PSN Bandara YIA dengan KSPN Borobudur, pengembangan bandar udara internasional sebagai simpul antarmoda terpadu, mengintegrasikan jaringan rel kereta api dengan jaringan jalan, dan mengembangkan *transit oriented development* (TOD) pada simpul angkutan massal.
- b. Kabupaten Kulon Progo, dengan keberadaan Bandara YIA, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Industri Sentolo, dan Kawasan Strategis Pantai Selatan, memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep TOD. *Transit oriented development* (TOD) merupakan konsep pengembangan perkotaan yang berpusat pada transportasi umum, khususnya transportasi massal. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Pengembangan TOD di kawasan ini diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan lahan, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendorong pertumbuhan Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran pertumbuhan ekonomi lokal melalui aksesibilitas yang lebih baik. Khususnya jaringan jalan raya dan kereta api harus dirancang sedemikian rupa untuk menyediakan konektivitas yang cepat, aman, dan

nyaman antara lokasi-lokasi tersebut, serta mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial di sekitarnya. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun kereta, terminal bus, dan fasilitas penunjang lainnya yang dapat mendorong penggunaan transportasi umum, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari emisi kendaraan bermotor. Upaya ini juga penting untuk memperkuat daya tarik pariwisata di Borobudur, mendukung pertumbuhan industri di Sentolo, serta mengembangkan potensi wilayah di sekitar pantai selatan sebagai destinasi wisata dan pusat kegiatan ekonomi baru.

- d. Penguatan dan penyiapan SDM dalam menyambut persaingan masyarakat internasional, meliputi penyediaan ruang untuk pembangunan perguruan tinggi dan fasilitas pendidikan, penyediaan ruang publik untuk warga, dan penyediaan ruang untuk pengembangan sarpras pendukung penyehatan masyarakat.
- e. Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, meliputi hilirisasi agropolitan dan minapolitan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penyediaan ruang pengembangan pariwisata terutama yang berbasis masyarakat, penyediaan ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata, dan pengembangan aksesibilitas kawasan pariwisata.
- f. Pengembangan sektor bahari melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan sarana prasarana, meliputi penyediaan ruang untuk pengembangan kawasan industri perikanan, pemantapan kewirausahaan kelompok nelayan, dan pengembangan pariwisata bahari.
- g. Penyediaan akses dan infrastruktur serta prasarana pada wilayah-wilayah kurang terjangkau, meliputi membuka konektivitas permukiman di perbukitan Menoreh, pengembangan pusat-pusat perekonomian dengan kawasan kurang terjangkau, dan pengembangan sarpras di kawasan perdesaan.
- h. Pengembangan pertambangan yang berkelanjutan, meliputi penyediaan ruang untuk pertambangan dengan konsep *sustainable mining*, pengendalian proses pertambangan, dan pengembangan sarpras aktivitas penambangan.
- i. Pengembangan industri berbahan baku setempat, meliputi pengembangan konteks hulu-hilir industri, penyediaan ruang untuk industri kecil dan berbahan baku lokal, pengelompokan industri sejenis dalam sebuah sentra, dan penyediaan ruang etalase untuk menarik investasi.
- j. Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang menyinergikan kawasan perkotaan dan perdesaan, meliputi pengembangan fungsi kota mina dan kota tani dalam konstelasi agropolitan dan minapolitan, pengembangan perdagangan komoditas perdesaan, dan pengembangan pusat perdagangan industri unggulan setempat di simpul pergerakan regional.

- k. Perlindungan dan pelestarian alam, meliputi penetapan kawasan lindung, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, perlindungan habitat flora fauna endemik Kulon Progo, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- l. Perlindungan dan pelestarian budaya, meliputi penetapan kawasan cagar budaya, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya dan kawasan strategis budaya, mendorong arsitektur warisan budaya jawa sebagai ciri khas bangunan daerah, dan penyediaan ruang untuk pelestarian seni dan budaya.
- m. Peningkatan upaya mitigasi bencana secara terpadu dan berkelanjutan, meliputi identifikasi kawasan rawan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, penyediaan ruang dan pengembangan jalur evakuasi, dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
- n. Pemantapan PSN Bandara YIA dan KSPN Borobudur, meliputi penyediaan ruang untuk aksesibilitas dan penyediaan ruang untuk kegiatan pengembangan perekonomian lokal.
- o. Pemantapan kawasan pendukung pertahanan dan keamanan, meliputi pengendalian pembangunan di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan, penyediaan jalur khusus dan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- p. Pemantapan pelayanan infrastruktur dan jaringan prasarana wilayah, meliputi pemantapan infrastruktur energi dan penyediaan energi alternatif, pemantapan infrastruktur pendukung kota cerdas, pemantapan jaringan pergerakan perdesaan, perkotaan, dan regional, dan pemantapan jaringan sumber daya air
- q. Perwujudan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang praktis dan sinergis, meliputi penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya, pengembangan sistem dan prosedur perizinan, dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

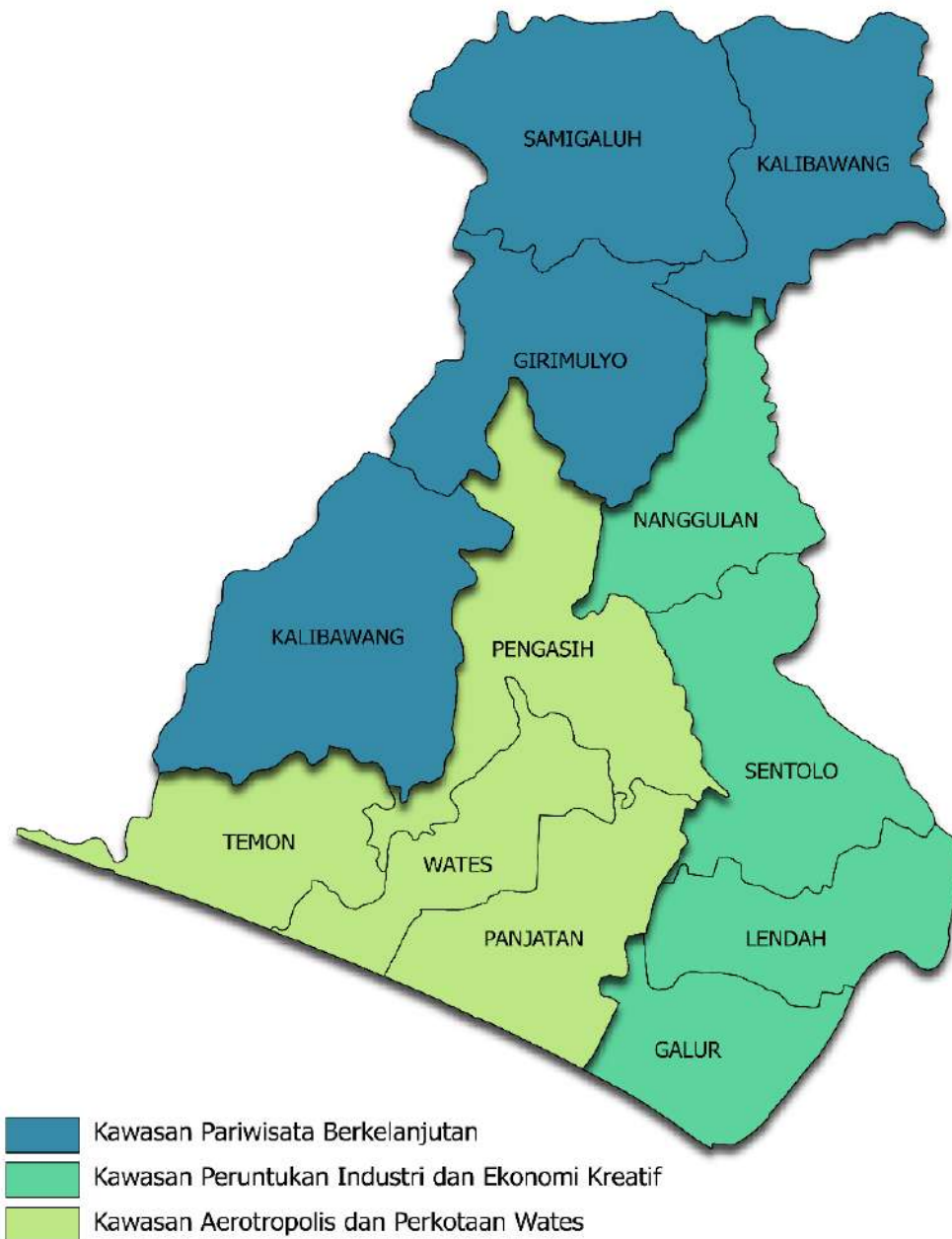
2.7.3 Pembagian Wilayah Berdasarkan Potensi Perekonomian Wilayah

Berdasarkan potensi kondisi perekonomian wilayah, Kabupaten Kulon Progo juga membagi wilayahnya menjadi tiga kawasan sesuai dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Penetapan fokus pembangunan untuk pengembangan wilayah didasarkan pada klasterisasi spasial yang bertujuan mengelola pertumbuhan dan pembangunan wilayah dengan terstruktur dan merata sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Prinsip ini menjadi krusial dalam mengatur perencanaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, sesuai dengan kapasitas dan potensi setiap area di Kabupaten

Kulon Progo. Pembangunan ini berperan dalam mencapai keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, implementasi pembangunan klasterisasi spasial ini juga menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun kerja sama yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk menciptakan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2. 51 Kawasan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2023

Terdapat tiga kawasan di Kabupaten Kulon Progo. Kawasan ke-1 meliputi Kapanewon Temon, Pengasih, Panjatan, dan Wates. Kawasan ini akan diarahkan untuk pengembangan jasa perkotaan dengan konsep *aerocity* karena sebagai wilayah lokasi Bandara Internasional Yogyakarta berada. Kemudian kawasan ke-2 adalah Kapanewon Galur, Lendah, Sentolo, dan Nanggulan yang akan diarahkan untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif dan industri. Kawasan dengan potensi alam yang beragam dan lokasinya yang berada di pesisir selatan membuat kawasan ini memiliki potensi alam yang beragam. Kawasan ke-3 adalah Kapanewon Kokap, Samigaluh, Girimulyo dan Kalibawang. Kawasan ini memiliki area pegunungan dan pesisir menjadikan kawasan ini berpotensi sebagai area pariwisata berfokus pada pariwisata alam maupun budaya.

1) Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates

Secara umum, kawasan ini terdiri dari beberapa kapanewon yang akan dikembangkan dengan fokus utama pada sektor perdagangan jasa dan perkotaan. Kawasan ini terdiri dari empat kapanewon, yaitu Kapanewon Pengasih, Temon, Panjatan, dan Wates. Kapanewon Pengasih berperan sebagai pusat permukiman yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Selanjutnya, Kapanewon Panjatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani satu kapanewon saja, sementara Kapanewon Temon dan Wates ditunjuk sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kapanewon. Sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Kapanewon Wates dan Temon memiliki potensi yang fokus dalam meningkatkan pelayanan fasilitas pemerintah melalui pelayanan publik seperti pusat kesehatan dan pusat pendidikan. Kapanewon Temon juga memiliki Bandara YIA yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perdagangan dan jasa di Kabupaten Kulon Progo.

Dengan adanya bandara internasional tersebut akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan wilayah sekitarnya sehingga akan menjadi kota *aerotropolis* yang memiliki pusat perekonomian di bandara. Selanjutnya, Kapanewon Pengasih merupakan daerah yang menjadi penyokong bagi Kapanewon Wates sebagai ibukota Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 2. 52 Zona Pengembangan Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023

Secara khusus, Kawasan *Aerotropolis* merupakan suatu konsep kawasan perkotaan yang muncul, tumbuh serta mengalami perkembangan pada areal sekitar bandara internasional utama. Dalam hal ini, Kawasan Aerotropolis di Kabupaten Kulon Progo akan terpusat pada sekitar area Bandara YIA di Kapanewon Temon. Kawasan Aerotropolis menjadi salah satu Program Penataan/Pengembangan Kawasan Prioritas yang diatur atau tercantum di dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 353/KEP/2021 tentang *Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan*. Oleh sebab itu, arahan pengembangan kawasan *aerotropolis* ini telah sejalan dengan arahan pengembangan dan pembangunan dari Pemerintah Daerah DIY.

Di dalam Kawasan *Aerotropolis* ini nantinya akan diwujudkan suatu kawasan yang berfokus pada pengembangan lahan untuk peruntukan komersialisasi, permukiman pekerja, manufaktur, serta penerapan atau implementasi sistem transportasi yang integratif melalui perwujudan *transit oriented development* (TOD) sehingga akan tercipta suatu efisiensi mobilisasi orang dan barang pada kawasan *aerotropolis* tersebut.

Di sisi lain, pengembangan kawasan ini juga diarahkan untuk dapat mewujudkan suatu Kawasan Perkotaan Wates sebagaimana turut serta tercantum di dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kawasan ini merupakan sebuah pusat permukiman yang kemudian ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dalam implementasi fungsinya sebagai kawasan Perkotaan Wates, maka kawasan perkotaan ini tidak hanya difokuskan sebagai pusat pemerintahan ataupun pusat permukiman saja melainkan turut serta diarahkan untuk dapat menjalankan fungsi kawasan pendidikan dari berbagai jenjang dari dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka pengembangan pada kawasan Perkotaan Wates juga difokuskan pada pemenuhan aspek fasilitas dan infrastruktur dasar pendidikan yang memadai dan mampu mengakomodasi kegiatan belajar mengajar masyarakat. Selain itu, aksesibilitas kawasan pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting melalui adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang integratif, sehingga memudahkan akses terhadap kawasan tersebut.

Dengan kondisi ketiga kapanewon tersebut, maka dapat dilakukan klasterisasi yang dapat dikembangkan menjadi kota *aerotropolis* dan kawasan pusat pertumbuhan yang difungsikan sebagai pusat pertumbuhan juga dapat diarahkan kepada pembangunan yang mendukung terwujudnya kota pintas, sehingga dapat memberikan pengaruh pembangunan pada daerah sekitarnya melalui teknologi informatika dan komunikasi.

Fokus Pembangunan:

- 1) Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kawasan *smart agriculture*, *smart tourism*, dan destinasi wisata bisnis (*air front MICE*).
- 2) Penerapan sistem ekonomi sirkular untuk mendukung terwujudnya kawasan *futuristic town*.
- 3) Pengembangan sains, teknologi, dan inovasi menuju kota cerdas (*science techno city*).
- 4) Pengembangan konektivitas.
- 5) Pengembangan layanan kesehatan bertaraf internasional.
- 6) Penataan dan pengembangan kawasan pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.
- 7) Pengembangan PKL menjadi PKW.
- 8) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas perkotaan.
- 9) Pengembangan transportasi bersinergi melalui simpul-simpul kegiatan berbasis *transfer oriented development* (TOD).
- 10) Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.

2) Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif

Kawasan kedua terdiri dari Kapanewon Galur, Lendah, Sentolo, dan Nanggulan. Kawasan ini memiliki potensi di area pesisir selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia, memiliki dataran rendah, dan beberapa area berbukit.

Di kawasan ini banyak ditemukan kawasan peruntukan hutan rakyat, pertanian lahan basah, perikanan tangkap, wisata agro dan wisata desa kerajinan. Pusat kegiatan lokal baru akan direncanakan di Perkotaan Galur. Sedangkan Perkotaan Lendah dan Nanggulan akan menjadi pusat pelayanan kawasan. Dua kapanewon di kawasan ini yaitu Lendah dan Galur termasuk dalam kapanewon dengan kepadatan penduduk tinggi dibandingkan dengan kapanewon lainnya.



Gambar 2. 53 Zona Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023

Kapanewon Galur dan Lendah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan pada potensi pertanian dan perikanan yang tinggi di kawasan ini. Komoditas unggulan di kawasan ini meliputi kedelai (Galur), padi sawah yang ditunjukkan oleh luasan panen padi sawah tertinggi kedua di Kabupaten Kulon Progo (Galur), dan juga memproduksi tanaman sayur lainnya. Dua kapanewon ini juga memiliki tingkatan produksi kelapa paling tinggi (Galur) dibandingkan kapanewon lainnya.

Selanjutnya, Kapanewon Nanggulan memiliki produksi pertanian padi yang cukup besar dan memiliki potensi industri yang berupa tenun, tas, dan kuliner. Berdasarkan potensi tersebut, data eksisting saat ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah industri kecil dan menengah di Kulon Progo baru mencapai 1,60 persen (2022) atau menurun 0,15 persen dibanding 2021 (1,75 persen). Meskipun demikian, nilai tersebut berpotensi untuk ditingkatkan jika potensi perekonomian wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 107 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Mikro (unit)	16.717	19.290	20.679	20.451	18.108	23.978
Industri Kecil (unit)	622	48	365	461	323	391
Industri Sedang dan Besar (unit)	12	15	16	15	21	33
Total Industri (unit)	17.351	19.353	21.060	20.927	18.452	24.402
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	3,58%	0,25%	1,73%	2,20%	1,75%	1,60%

Sumber : BPS, diolah

Selain dari produksi pertanian dan perkebunan serta potensi industri, kawasan kedua memiliki produksi perikanan tangkap yang cukup tinggi walaupun nilai tambahnya masih rendah dibandingkan dengan kapanewon lain yang berada di pesisir. Kawasan ini juga memiliki tempat pelelangan ikan (TPI) yang cukup besar yaitu TPI Trisik di Kapanewon Galur. TPI ini menjadi sentra perdagangan ikan tangkap yang dapat berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian wilayah.

Selain memiliki dampak positif terhadap perekonomian melalui pertanian dan perikanan, Kapanewon Lendah memiliki Bendung Sapon untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Dari aspek lingkungan, kawasan ini memiliki ancaman banjir dan potensi tsunami karena lokasinya yang berada di selatan dan memiliki daerah pantai yang cukup panjang. Oleh karena itu, upaya mitigasi terhadap bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim penting untuk dilakukan.

Di sisi lain, dalam pengembangan kawasan peruntukan industri dan ekonomi kreatif ini terdapat salah satu kapanewon yang dideklarasikan atau dicanangkan menjadi sebuah kawasan peruntukan industri yakni Kapanewon Sentolo. Secara umum, kawasan peruntukan industri dapat diartikan sebagai sebuah kawasan yang diutamakan untuk dapat mengakomodasi kegiatan industri yang pematangan tanah serta penyediaan sarana prasarannya dilakukan oleh pelaku usaha atau pengusaha kawasan industri. Dalam hal ini, Kawasan Industri Sentolo dicanangkan menjadi sebuah kawasan industri skala Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan lokasi lahan khususnya akan berada pada Desa Tuksono sebesar 72-200 hektare dan desa lain seperti Banguncipto, Sentolo, Sukoreno, dan Salamrejo.

Pengembangan Kawasan Industri Sentolo diperuntukkan sebagai upaya dalam meningkatkan kerja sama antar-*stakeholder*, meningkatkan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran, menyediakan layanan yang lebih prima bagi calon investor, meningkatkan peluang atau kesempatan penanaman modal, dan menyediakan infrastruktur yang mampu mengakomodasi keberlangsungan kegiatan bisnis.

Dalam rencana implementasinya, kawasan peruntukkan industri ini akan menjalankan dua skema industri utama meliputi industri besar serta industri kecil dan mikro seperti industri pengolahan pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan jasa, serta industri kerajinan yang juga dapat menjadi salah satu aspek dalam implementasi kegiatan ekonomi kreatif. Meskipun zonasi utama kawasan peruntukan industri berada pada Kapanewon Sentolo, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan peruntukan industri di beberapa kapanewon sekitarnya meliputi Kapanewon Temon dan Nanggulan.

Fokus Pembangunan

- 1) Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- 2) Hilirisasi sektor pertanian dan perikanan guna memberikan nilai tambah komoditas unggulan.
- 3) Pelestarian lingkungan sumber daya alam melalui konservasi kawasan pesisir.
- 4) Pemenuhan kebutuhan air minum.
- 5) Kawasan sentra industri kreatif (batik, serat alam, kuliner).
- 6) Pengembangan pusat perekonomian, agropolitan dan minapolitan.
- 7) Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dalam penguasaan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan perikanan.
- 8) Pengembangan Kawasan peruntukan industri.
- 9) Pusat penelitian, Pendidikan, dan inovasi pertanian (JAP).
- 10) Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
- 11) Pengembangan utilitas pendukung kegiatan industri.
- 12) Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas sentra industri batik.

3) Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Kawasan ketiga ini yaitu bertema pariwisata berkelanjutan yang terdiri atas empat kapanewon di wilayah barat Kabupaten Kulon Progo, yaitu Kapanewon Girimulyo, Kokap,

Kalibawang, dan Samigaluh yang merupakan daerah lereng pegunungan Menoreh. Letak geografis tersebut menjadikan kawasan ketiga ini berfungsi penting sebagai penyedia jasa lingkungan berupa kawasan resapan air, konservasi tanah, pengaturan iklim, hingga habitat flora-fauna.

Selaras dengan Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2044, keempat kapanewon tersebut ditetapkan sebagai perwujudan kawasan pariwisata yang terdiri atas dua aspek turunan, yaitu ekowisata dan agrowisata.



Gambar 2. 54 Zona Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023

Kawasan ekowisata direncanakan sebagai pengembangan wilayah berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya. Pada dokumen RTRW, disebutkan bahwa zona ini secara literal dinamakan sebagai Kawasan Koridor Temon-Borobudur yang meliputi Kapanewon Temon, Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh. Pada konteks ini, Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh diprioritaskan sebagai lokus pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di perbukitan menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan pelestarian budaya.

Upaya tersebut perlu dilakukan untuk memanfaatkan eksistensi jalur Bedah Menoreh yang bermuara ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur sebagai pemantik perkembangan pariwisata lokal. Apabila koridor ini dikembangkan dengan komponen 6A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Ansilari, Aktivitas, dan *Available Packages*)

secara komprehensif, maka diharapkan *trigger* pengembangan masyarakat lokal dapat tercipta dengan memanfaatkan karakteristik serta potensi wilayah.

Tidak hanya itu, perluasan ranah penyediaan komponen 6A dapat mempertimbangkan penambahan konsep *Meetings, Incentives, CO*nferences, and *Exhibition (MICE)* sebagai daya tarik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan profesional. Pengadaan fasilitas berbasis MICE, seperti aula serbaguna, transportasi ramah lingkungan, atau penginapan ramah lingkungan (*ecolodge*) dapat diinisiasikan sebagai upaya menciptakan peluang untuk promosi budaya dan lingkungan.

Selain aspek ekowisata, eksistensi Kapanewon Kalibawang pada zona pariwisata berkelanjutan di Kulon Progo akan difokuskan pada wisata berbasis konsep agropolitan. Kawasan ini diperuntukkan sebagai perluasan sistem produksi dan pengelolaan pertanian hingga menjalar pada aspek agrowisata. Selaras dengan amanat dalam RTRW, pengembangan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan pariwisata.

Dengan demikian, arah pengembangan kawasan ini dapat berfokus pada pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari transportasi, fasilitas wisata, hingga sarana dan teknologi pertanian. Pada konteks optimalisasi konsep agrowisata, pengembangan produk pertanian dan paket wisata edukatif-interaktif juga perlu direncanakan demi menonjolkan nilai tambah atraksi yang dimiliki.

Di samping potensi alam sebagai penunjang sektor pariwisata, kawasan ketiga ini memiliki peran penting dalam fungsi konservasi untuk memastikan keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan RTRW, Kapanewon Kokap merupakan satu-satunya kapanewon yang memiliki kawasan konservasi berupa kawasan suaka marga satwa dengan luas kurang lebih 185 hektare.

Selain itu terdapat empat kawasan cagar alam geologi yang berada pada kawasan pariwisata berkelanjutan ini yaitu Kawasan Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo berada di Kapanewon Samigaluh; Kawasan Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari berada di Kapanewon Samigaluh; Kawasan Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang berada di Kapanewon Kalibarang dan Kawasan Goa Kiskendo Kapanewon Girimulyo.

Kapanewon Girimulyo, Kokap, Kalibawang, dan Samigaluh juga ditetapkan sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan sektor pariwisata pada zona ini harus mempertimbangkan eksistensi kawasan lindung agar nilai-nilai keberlanjutan tetap terjaga.

Dengan kekayaan sumber daya wisata alam, budaya dan ekologis tersebut, potensi pariwisata di kawasan ke-3 menjanjikan untuk terus dikembangkan. Upaya peningkatan fasilitas dan promosi lebih gencar diperlukan agar daya tariknya semakin dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara.

Fokus Pembangunan

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah untuk mempertahankan warisan ekologis.
- 3) *Hinterland aerotropolis*.
- 4) Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
- 5) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas perkotaan.
- 6) Pengembangan dan pengaturan fasilitas pariwisata.
- 7) Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kegiatan agropolitan.
- 8) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier kewenangan kabupaten .
- 9) Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan terminal tipe B dan tipe C.
- 10) Pengembangan industri kreatif (gula semut).
- 11) Penguatan konektivitas pariwisata berkelanjutan.
- 12) Pengendalian pemanfaatan lahan dan bangunan baru.

BAB III

Permasalahan & Isu Strategis

Isu Strategis Global



Perkembangan teknologi



Ekonomi, politik, & pemerintah



Kelestarian lingkungan



Kependudukan & kesehatan

Isu Strategis Nasional



Kapasitas SDM



Pergeseran Dini Sektor Perekonomian & Keterkaitan Ekonomi Antar Wilayah



Akses Kesehatan, Pendidikan, & Perlindungan Sosial



Tata Kelola Urusan Pemerintahan



Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan & Ekonomi Hijau

Permasalahan & Isu Strategis Daerah



Sumber Daya Manusia



Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi



Tata Kelola Pemerintahan Daerah



Pelayanan Infrastruktur Daerah



Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup & Alih Fungsi Lahan



Perubahan Iklim

Modal Dasar



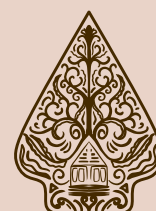
Jumlah penduduk yang terus meningkat



Kekayaan alam yang melimpah



Kondisi ekonomi, sosial, & budaya (Bandara Internasional Yogyakarta, JJLS, jalan tol, dll.)



Keistimewaan DIY



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Penentuan permasalahan daerah merupakan tahap kritis dalam proses perencanaan jangka panjang suatu wilayah. Proses ini melibatkan identifikasi dan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan daerah dalam hal ini dikelompokkan dalam lima bidang mencakup bidang sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, dan ketahanan sosial budaya ekologi.

Identifikasi permasalahan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, penentuan permasalahan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan perumusan permasalahan yang tepat, perencanaan jangka panjang dapat dirancang secara lebih efektif dan mampu menyediakan landasan bagi pengembangan strategi serta kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.

Dalam rangka menggali akar permasalahan di Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka ruang melalui sebuah tautan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai wadah untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ini. Setelah dianalisis dengan metode *selective coding* dan *axial coding*, masukan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat Kulon Progo dominan pada permasalahan aksesibilitas wilayah, penguatan SDM, perluasan kesempatan kerja, pemerataan ekonomi, penataan ruang, dan optimalisasi pariwisata berbasis masyarakat.

Adapun permasalahan pokok daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

3.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan komponen yang sangat penting di dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang menekankan pada aspek kesejahteraan, kemandirian, berbudaya, dan berkelanjutan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa aspek atau komponen yang berkaitan dengan sumber daya manusia belum berjalan secara optimal karena terdapat hal-hal yang menjadi penghambat proses perwujudannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan masukan dari masyarakat Kulon Progo mengenai akar permasalahan aspek sosial, dapat teridentifikasi 24 poin akar permasalahan yang menjadi penyebab utama terjadinya tiga poin permasalahan pokok di antaranya adalah belum

optimalnya kualitas pembangunan manusia, pemenuhan gizi masyarakat belum optimal, dan kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal.

Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sering kali dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima. Pada konteks lebih mendasar, literasi dan numerasi merupakan dua aspek penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Literasi dan numerasi merupakan suatu keterampilan yang berkelanjutan, dan upaya-upaya perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Masih perlu perhatian dalam peningkatan tingkat literasi dan numerasi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, oleh karena itu diperlukan pengukuran tingkat literasi dan numerasi yang akurat dan *up-to-date* untuk memantau perkembangan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Melalui perbaikan kemampuan literasi dan numerasi, maka masyarakat Kulon Progo dapat mengakses lebih banyak peluang pendidikan dan pekerjaan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial wilayah.

SDM yang berkualitas juga dilihat dari karakter yang tertanam di dalam masyarakat, manusia yang berkarakter akan lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan pembangunan ke depan. Pembentukan karakter masyarakat dapat ditanamkan melalui pendidikan karakter di lingkungan setempat. Pendidikan karakter masyarakat merupakan perhatian terhadap pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik pada individu dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk individu yang lebih baik secara moral dan etis dan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kabupaten Kulon Progo sangat menjunjung tinggi pentingnya pendidikan karakter masyarakat terutama dengan basis nilai-nilai budaya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo No. 70 tahun 2021 tentang *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya*.

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan *platform* Pendidikan Nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan nilai-nilai budaya.

Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat yang rendah di Kulon Progo, terutama dalam konteks lama sekolah mencerminkan beberapa masalah pendidikan dan sosial yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Sampai dengan 2023, data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebesar 9,18 tahun, angka ini masih di bawah DIY (9,83). Hal tersebut menunjukkan

bahwa sebagian besar masyarakat Kulon Progo masih belum mampu mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tingkat partisipasi dan lama sekolah juga merupakan isu serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan pendidikan, seperti meningkatkan akses, menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan, dan meningkatkan kualitas pendidikan, harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi dan lama sekolah di Kulon Progo.

Partisipasi masyarakat yang mengenyam perguruan tinggi di Kulon Progo dapat dilihat melalui angka Harapan Lama Sekolah. Hingga 2023, angka Harapan Lama Sekolah di Kulon Progo sebesar 14,48 tahun. Meskipun angka tersebut cukup tinggi namun masih berada di bawah angka HLS di DIY dengan angka 15,66 tahun.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi di Kulon Progo, penting untuk mengatasi kendala tersebut melalui kebijakan yang mendukung akses, memberikan bantuan keuangan, meningkatkan kesadaran, dan memastikan bahwa pendidikan di tingkat sekolah menengah mempersiapkan siswa dengan baik untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Selain itu, pendekatan yang mengakomodasi faktor-faktor sosial dan budaya lokal juga dapat membantu merangsang minat dan motivasi masyarakat untuk mengejar pendidikan tinggi. Dari segi kebutuhan gizi, salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi prioritas bersama yaitu terkait *stunting*.

Kasus *stunting* merupakan permasalahan penting karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Hingga 2022, Kabupaten Kulon Progo dinilai sudah mampu terus menekan angka kasus *stunting* hingga mencapai angka 10,16 persen. Pada 2023, angka *stunting* menurun lagi menjadi 9,49 persen. Angka ini mencerminkan tingkat *stunting* yang signifikan dan merupakan perhatian serius dalam konteks kesehatan perkembangan anak. Berdasarkan data proyeksi yang dihasilkan melalui perhitungan laju penurunan *stunting* saat ini, maka pada 2045 diproyeksikan angka *stunting* di Kabupaten Kulon Progo sebesar 1,43 persen sehingga belum benar benar teratasi.

Usia harapan hidup merupakan indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan suatu daerah. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan adil sangat memengaruhi usia harapan hidup. Daerah yang memiliki sistem kesehatan yang kuat dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, usia harapan hidup umumnya lebih tinggi.

Hingga 2023 diketahui Kabupaten Kulon Progo memiliki usia harapan hidup yang cukup (75,35 tahun). Meski sudah cukup baik namun dalam perumusan kebijakan kesehatan

masyarakat, perlu terus ditekankan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata akan membantu meningkatkan angka harapan hidup secara signifikan. Hal tersebut melibatkan peningkatan akses, edukasi kesehatan masyarakat, promosi pola hidup sehat, serta investasi dalam infrastruktur kesehatan yang modern dan efisien. Dengan demikian, isu ini menjadi sorotan utama dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kualitas masyarakat selain ditinjau dari pendidikan dan kecukupan gizi, juga perlu memperhatikan kondisi pelayanan dan kesetaraan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Isu kematian ibu, bayi, dan kematian neonatal adalah masalah serius dalam bidang kesehatan global yang terkait erat dengan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan maternal dan perinatal.

Mengurangi kematian ibu, bayi, dan neonatal adalah prioritas global dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu, termasuk ibu dan bayi, memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas selama periode penting dalam kehidupan. Hingga 2021 angka kematian bayi per 10.000 kelahiran hidup di Kulon Progo mencapai 12,4 yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya.

Angka ini merupakan angka tertinggi selama periode 2017-2021. Sementara itu angka kematian ibu juga mengalami kenaikan pada 2021 dan 2022 dengan angka berturut turut 222,17 dan 194,69.

Permasalahan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular adalah dua masalah utama dalam bidang kesehatan masyarakat yang memiliki dampak besar terhadap populasi manusia di suatu wilayah. Keduanya, penyakit menular dan tidak menular, memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, sistem perawatan kesehatan, dan ekonomi. Hingga 2022, tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk di Kulon Progo mencapai 60,07 dengan tren yang terus meningkat hingga 64,23 (2045).

Salah satu aspek penting dalam penyediaan layanan kesehatan adalah ketersediaan tenaga medis yang memadai, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Hingga 2022, rasio tenaga kerja medis per satuan penduduk di Kulon Progo sebesar 3,19 dengan rata-rata laju penambahan sejak 2015 sebesar 0,02. Sementara pada rasio dokter per satuan penduduk pada 2022 sebesar 0,64 dengan rata-rata pertumbuhan terhitung sejak 2015 sebesar 0,06 per tahun.

Kurangnya resiliensi masyarakat terhadap berbagai tantangan, termasuk tantangan pandemi, adalah isu yang memiliki dampak serius pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Resiliensi masyarakat merujuk pada kemampuan masyarakat untuk

menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan dan krisis, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia.

Tantangan tersebut dapat mencakup bencana alam, konflik, pandemi, perubahan iklim, serta berbagai risiko dan ancaman lainnya. Isu ini merupakan isu multidimensional yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat umum untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai krisis dan tantangan yang dapat timbul di masa depan.

Permasalahan kualitas sumber daya manusia juga berkaitan erat dengan kapasitas masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kekayaan serta keragaman budaya lokal. Kekayaan dan keragaman budaya merupakan salah satu hal yang patut dipertahankan dan menjadikan suatu kekhasan suatu daerah sehingga budaya dianggap menjadi aset yang penting di suatu daerah.

Namun, terdapat permasalahan yang menjadi penghambat dalam mempertahankan keanekaragaman budaya di Kabupaten Kulon Progo. Rendahnya jumlah rintisan kalurahan budaya pada kategori “mandiri budaya” menjadi permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo saat ini. Hal tersebut tentu menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan upaya konservasi keragaman budaya lokal, pengembangan unsur-unsur kebudayaan, dan peningkatan pengetahuan lokal masyarakat.

3.1.2 Ekonomi

Dalam menjelajahi setiap tantangan dan isu strategis di bidang ekonomi, penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasarinya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber masalah, langkah-langkah perbaikan yang efektif dapat diambil untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, tabel akar masalah menjadi instrumen penting yang memberikan pandangan komprehensif tentang asal-usul masalah, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat guna mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi.

Pertumbuhan ekonomi yang melemah di Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh berbagai kendala pada beberapa aktivitas ekonomi seperti ekspor, pariwisata, investasi daerah, perdagangan, pertanian, serta perikanan dan kelautan. Sampai dengan 2023, di Kabupaten Kulon Progo memiliki delapan jenis komoditas ekspor yang tersebar pada lebih dari 25 negara tujuan.

Dengan berbagai potensi tersebut, Kabupaten Kulon Progo sebenarnya mampu memperkaya jenis komoditas ekspornya dan mengedarkannya ke lebih banyak negara. Namun, masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait regulasi ekspor dan terbatasnya jangkauan pasar ekspor menyebabkan pelaku usaha seringkali menitipkan produk olahannya

untuk diekspor dengan disetor kepada pengepul di luar wilayah Kulon Progo yang sudah memiliki jaringan pasar ekspor sejak lama.

Lemahnya iklim dagang di Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah masih belum optimalnya kompetensi pedagang dalam mengembangkan usahanya. Di mana jenis perdagangan yang masih mendominasi berupa perdagangan eceran berbagai macam barang toko, kaki lima, dan los pasar yang beroperasi secara konvensional dan hanya melayani pada tingkat lingkungan hingga lokal. Padahal, pada era sekarang ini, proses digitalisasi sudah menjamah berbagai bidang kehidupan termasuk perdagangan. Selain itu, rendahnya daya beli masyarakat juga menjadi salah satu penghambat perputaran ekonomi di wilayah ini.

Di sektor pariwisata, kinerja pariwisata yang belum optimal disebabkan oleh terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas beserta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang masih rendah. Jenis wisata yang didominasi oleh wisata alam di wilayah pegunungan Kulon Progo belum didukung oleh aspek aksesibilitas yang memadai, sehingga turut mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung.

Kurangnya ketersediaan aksesibilitas karena kondisi topografi Kabupaten Kulon Progo yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda sehingga penyediaan aksesibilitas akan lebih sulit. Selain itu, aspek amenitas yang belum banyak berkembang juga berpengaruh pada rendahnya masa tinggal wisatawan, sehingga adanya objek wisata belum dapat memberikan pengaruh yang besar pada perputaran ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Nilai investasi yang masih rendah di Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh masih rendahnya potensi investasi yang *ready to offer*. Selain itu, ketidakpastian regulasi yang digunakan sebagai acuan perizinan secara detail juga berpengaruh pada rendahnya nilai investasi.

Rendahnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani. Hal tersebut karena generasi sekarang lebih memilih untuk bekerja pada bidang nonpertanian. Lalu, kurangnya tingkat keterampilan petani, belum adanya standar proses dalam pengelolaan pertanian dan terbatasnya kemampuan adopsi teknologi. Akar dari permasalahan tersebut karena rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan pertanian. Masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani yang karena keterbatasan petugas sehingga kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan.

Kabupaten Kulon Progo juga memiliki potensi laut dan perikanan yang besar. Namun, masih terdapat tantangan seperti belum optimalnya pemanfaatan hasil laut dan perikanan yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi, terbatasnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya kapasitas dan kompetensi SDM dalam mengolah hasil tangkapan. Selain itu, dari sektor perikanan tangkap masih terdapat tantangan berupa masih rendahnya bibit ikan lokal, kurang optimalnya tata kelola kelembagaan perikanan, dan terbatasnya kemitraan perikanan.

Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik disebabkan oleh keterkaitan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Kulon Progo yang masih relatif terbatas. Jika ditinjau pada pengelompokan wilayah di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri atas empat klaster, yaitu Klaster Wates (Kapanewon Wates, Temon, dan Pengasih), Klaster Galur (Kapanewon Galur, Panjatan, dan Lendah), Klaster Pegunungan (Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh), serta Klaster Nanggulan (Kapanewon Nanggulan, Kalibawang, Sentolo), diketahui bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo masih berpusat di Klaster Wates. Terlebih infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan terintegrasi sepenuhnya menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan ekonomi pada Klaster Pegunungan.

Selain isu terkait pertumbuhan ekonomi, ekonomi di Kabupaten Kulon Progo dinilai belum merata. Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi ini kemudian menyebabkan adanya kesenjangan di antara masyarakat. Dampak dari ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo memunculkan masalah kemiskinan, yang menjadi masalah yang kompleks dan dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat setempat. Semua itu berujung pada sulitnya dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang baik. Kemiskinan juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Persentase penduduk miskin di Kulon Progo merupakan yang tertinggi di banding kabupaten/kota lainnya di DIY (15,64 persen). Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan di Kulon Progo mencapai 2,54. Angka ini menggambarkan sejauh mana ketidaksetaraan pendapatan di antara penduduk miskin di daerah tersebut.

Semakin tinggi indeks ini, semakin jauh penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih dalam. Indeks keparahan kemiskinan di Kulon Progo juga diketahui lebih besar dari indeks DIY (0,61) yang memberikan gambaran tambahan tentang kondisi kemiskinan di Kulon Progo.

Angka tersebut menyoroti tingkat deprivasi yang dialami oleh penduduk miskin, seperti akses terhadap pendidikan yang terbatas, perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk mengatasi isu kemiskinan ini, pemerintah daerah Kulon Progo, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, perlu bekerja sama dalam mengembangkan program-program dan kebijakan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk. Hal ini memerlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat untuk mencapai perubahan positif dalam mengatasi isu kemiskinan di Kulon Progo.

Pembangunan mega proyek yang telah berjalan di Kabupaten Kulon Progo dipastikan berpengaruh pada laju alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun yang semakin tinggi dan akan berdampak pada kelanjutan fungsi ekologi-sosial daerah setempat. Terdapat empat mega proyek yang sudah dan sedang berlangsung di Kabupaten Kulon Progo meliputi pembangunan Bandara YIA di Kapanewon Temon, Bedah Bukit Menoreh sepanjang 63 kilometer (perencanaan), Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 122,9 kilometer, serta jalan tol yang melintas di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah *exit* tol sebanyak tiga lokasi.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan yang terjadi karena pembangunan proyek-proyek besar di Kabupaten Kulon Progo. Proyek pembangunan Bandara YIA (587 hektare), Jalur Jalan Lintas Selatan sepanjang 122,9 kilometer dengan lebar 7 meter, serta Bedah Bukit Menoreh yang sekarang Badan Otoritas Borobudur (BOB) diperkirakan akan membangun jalan sepanjang 63 kilometer dengan lebar 3-4 meter (jalan kabupaten) dan 7 meter (jalan provinsi).

Pembangunan proyek-proyek besar di kabupaten Kulon Progo juga berdampak terhadap pembangunan di sekitarnya. Berbagai macam fasilitas seperti hotel, restoran, *rest area*, tempat wisata, rumah toko, dan perumahan dibangun oleh para investor sebagai langkah menangkap peluang usaha seperti pada umumnya. Hal ini akan menyebabkan munculnya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun yang semakin besar.

Luas konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun di Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dimulai pada 2004 dengan adanya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang disusul dengan pembangunan mega proyek lainnya.

Alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun di Kabupaten Kulon Progo harus tetap harus dikelola dengan kebijakan dan pelaksanaan yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat setempat dan regulasi perekonomian daerah, dengan tetap menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.1.3 Tata Kelola Pemerintah Daerah

Demi mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, aspek tata kelola perlu diperhatikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penyaringan permasalahan, diketahui bahwa masih ditemui beberapa persoalan yang menyebabkan agenda pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, perumusan akar dan pokok permasalahan ditujukan untuk menggali hambatan yang dihadapi, sehingga rangkaian solusi bertahap dapat ditentukan.

Di bidang tata kelola, Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan dan tantangan. Salah satunya ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih berada di angka 85,63 persen (2023). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan bagi publik oleh pemerintah masih belum optimal dilaksanakan, yang antara lain disebabkan oleh faktor kualitas pelayanan yang belum optimal, karena belum terintegrasinya sistem informasi manajemen dan keterbatasan sarana infrastruktur pengelolaan pemerintahan. Meskipun nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) cenderung meningkat, dampaknya belum signifikan dalam menyelesaikan isu-isu strategis serta meningkatkan kinerja daerah.

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai kualitas pelayanan publik, maka pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu di tingkat desa/kalurahan perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, birokrasi di tingkat desa/kalurahan masih memiliki permasalahan tersendiri, seperti manajemen dan akuntabilitas keuangannya yang belum berkualitas, kualifikasi SDM Pemerintah Desa/Kalurahan yang belum memadai, SOP dan regulasi yang belum jelas, serta masalah nilai dan budaya kerja yang kurang adaptif. Sehingga Reformasi Birokrasi tidak hanya harus dilakukan di tingkat kabupaten, akan tetapi harus dimulai dari tingkat bawah melalui Reformasi Kalurahan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya memulai reformasi di tingkat desa/kalurahan melalui penerapan sasaran kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan yang diatur dalam Perbup Kabupaten Kulon Progo No. 51 tahun 2020 tentang *Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan*. Hal tersebut dapat menjadi titik awal untuk merespon isu terkait kualitas pelayanan publik di tingkat desa/kalurahan.

Permasalahan lainnya terdapat pada pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah serta implementasi perda yang belum optimal yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi penemuan pemeriksaan pemerintah yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada dasarnya, hal ini dapat dikaitkan dengan implementasi yang kurang optimal dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya SPIP dan implementasinya. Masalah semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar OPD memiliki jumlah SDM yang terbatas, dan mereka juga harus mengatasi tugas-tugas

multitasking yang kompleks yang ditunjukkan oleh rasio ASN dengan kebutuhan riil yang cenderung menurun hingga lima tahun.

Ketidakseimbangan pembangunan modern dan warisan sejarah masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kulon Progo. Pelestarian terhadap warisan bersejarah masih belum banyak diarsipkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, belum optimalnya rencana pengelolaan lingkungan menjadi penyebab adanya degradasi lingkungan dan merusak situs-situs bersejarah. Hal ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk pengelolaannya.

Tantangan lainnya adalah peningkatan jumlah dan variasi pelanggaran Perda dan Perkada. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ditingkatkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan masyarakat untuk mengedepankan ketertiban dan keamanan.

Gangguan ketertiban seperti kejahatan jalanan, begal, tawuran pelajar, serta konflik sosial merupakan masalah yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Selain itu potensi kerawanan dan gangguan ketertiban yang muncul akibat perubahan sosial ekonomi, seperti operasional Bandara YIA dan jalan tol juga menjadi tantangan dalam memastikan ketertiban, kenyamanan, dan ketenteraman di Kulon Progo.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan koordinasi lintas sektor antara instansi seperti Polres, Kodim, dan tokoh masyarakat, dan *stakeholders* lain untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib bagi masyarakat.

3.1.4 Pelayanan Infrastruktur Dasar

Pelayanan infrastruktur dasar merupakan salah satu aspek yang memiliki dampak besar dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang memadai maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan akses yang mudah.

Berdasarkan hasil penjarangan permasalahan infrastruktur, ditemukan beberapa persoalan yang menyebabkan pertumbuhan wilayah yang tidak merata dan adanya ketimpangan antardaerah. Dengan demikian, perumusan akar permasalahan dan pokok permasalahan dapat menunjukkan solusi-solusi yang tepat. Berikut rincian akar dan pokok permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan Kulon Progo pada pelayanan infrastruktur dasar.

Dalam permasalahan pelayanan infrastruktur dasar juga didasari oleh hasil proyeksi sarana dan prasarana dasar. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu kebutuhan sarana dan prasarana juga akan semakin bertambah. Jika kebutuhan sarana dan prasarana tersebut

tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan baru selain permasalahan yang sudah ada. Hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjadikan fokus pembangunan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Kabupaten Kulon Progo.

Persebaran infrastruktur jaringan komunikasi dan telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo masih belum merata, yang dapat dilihat dari wilayah kabupaten yang masih terdapat *blankspot* karena topografi pegunungan, sehingga tidak ada jaringan internet yang dapat diakses. Selain itu, pengetahuan dan literasi digital masyarakat Kabupaten Kulon Progo juga masih belum optimal.

Dalam hal komunikasi dan informatika di Kabupaten Kulon Progo masih belum akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukannya untuk mewujudkan *website* yang menyajikan seluruh data yang dapat diakses oleh berbagai pihak.

Prasarana jalan merupakan salah satu fasilitas infrastruktur yang penting dalam mendukung pembangunan wilayah. Prasarana jalan di kabupaten Kulon Progo masih perlu ditingkatkan. Permasalahan pada prasarana jalan antara lain masih ditemukannya jalan lokal dalam kondisi rusak berat, yang banyak ditemui di wilayah-wilayah perdesaan yang jauh dari pusat kota. Misalnya di Kapanewon: Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh.

Permasalahan jalan ini menjadi isu penting karena dengan tidak adanya jalan yang memadai, maka dapat menghambat konektivitas antarwilayah yang secara jangka panjang dapat berakibat pada ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Di sektor Perhubungan, masyarakat Kabupaten Kulon Progo dinilai masih memiliki kesadaran berlalu lintas yang rendah, hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan angka kejadian kecelakaan lalu lintas yang selalu bertambah setiap tahun. Selain itu masih banyak angkutan umum yang melebihi kapasitas kendaraan (*overdimension* dan *overload*).

Kurangnya prasarana dan perlengkapan jalan seperti lampu jalan, cermin jalan dan sebagainya juga menjadi permasalahan di sektor perhubungan. Lalu, kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum masih kecil karena dianggap kurang efektif untuk melakukan mobilitas sehingga jumlah trayek umum akan semakin berkurang.

Untuk menghadapi perkembangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo manajemen perparkiran dan lalu-lintas masih dianggap belum optimal. Manajemen parkir yang baik dibutuhkan untuk menghadapi pengaruh dari pembangunan bandara yang cukup pesat. Selain itu manajemen lalu lintas (terutama pada perlintasan sebidang) yang belum maksimal dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas karena adanya peningkatan mobilitas kereta api semakin padat karena adanya Bandara YIA.

3.1.5 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Alih Fungsi Lahan

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, penurunan kualitas lingkungan hidup dan alih fungsi lahan menjadi dua permasalahan yang semakin mendesak untuk diatasi di banyak wilayah, termasuk di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya pertumbuhan populasi yang cepat dan meningkatnya aktivitas ekonomi, seperti pembangunan mega proyek dan industri, seringkali terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang diiringi dengan alih fungsi lahan dari area hijau menjadi lahan terbangun. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam mengelola dan memelihara lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, untuk mengidentifikasi penyebab utama dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna menjaga kualitas lingkungan hidup serta meminimalisir alih fungsi lahan yang merugikan.

Data pencemaran air sungai Kabupaten Kulon Progo pada 2021 masih menunjukkan bahwa beberapa sampel pengujian kualitas air sungai telah mengalami penurunan kualitas. Meningkatnya kegiatan UMKM seperti usaha pengrajin batik dan binatu semakin marak, di samping usaha berskala rumah tangga, peternakan, pelayanan jasa kesehatan umumnya belum dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.

Selain sumber pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, industri juga banyak yang membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah lebih dulu, hal ini mempengaruhi kualitas air permukaan atau air sungai terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Faktor pencemar Sungai Serang salah satunya adalah limbah peternakan yang mengumpul di suatu tempat dan saat hujan datang maka limbah peternakan akan terbawa air hujan dan masuk ke dalam sungai.

Selain itu penggunaan pupuk anorganik pada pertanian juga menjadi faktor tercemarnya Sungai Serang, seluruh air pertanian tercampur pupuk kimia akan bermuara ke sungai dan menyebabkan pencemaran. IPAL komunal di sempadan Sungai Serang juga menjadi faktor tercemarnya air. Limbah warung makan yang berada di sempadan Sungai Sermo juga menjadi penyebab pencemaran air Sungai Sermo. Banyaknya jumlah warung makan sehingga belum dapat dilakukan penertiban secara masif.

Laju pertumbuhan penduduk dan banyaknya pendatang yang ada di Kabupaten Kulon Progo menjadi pemicu meningkatnya sampah domestik khususnya pada kawasan perkotaan. Adanya Bandara YIA di Kulon Progo juga memberikan dampak meningkatnya timbulan

sampah secara signifikan. Dari tahun ke tahun volume sampah selalu mengalami peningkatan baik jumlah maupun jenisnya, di sisi lain kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya masih relatif rendah.

Hal ini perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam pengurangan sampah di sumbernya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Mayoritas masyarakat masih mengelola sampah dengan paradigma lama yaitu kumpul, angkut dan buang serta belum menerapkan konsep 3R (reuse reduce recycle).

Kondisi persampahan di Kabupaten Kulon Progo pada 2023 menunjukkan bahwa timbulan sampah keseluruhan adalah 219,27 ton per hari. Jika jumlah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk, maka rata-rata per orang membuang sampah sekitar 0,49 kilogram per hari. Namun perlu diperhatikan juga bahwa timbulan sampah di perdesaan lebih kecil dari pada di perkotaan, sehingga saat dihitung dengan rata-rata timbulan sampah per orang belum dapat menjadi gambaran sumber timbulan sampah di Kabupaten Kulon Progo. Dengan mengetahui sumber timbulan sampah yang mendominasi, maka dapat melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap daerah-daerah yang memiliki tingkat timbulan sampah yang tinggi.

Kabupaten Kulon Progo memiliki tempat pemrosesan akhir di TPA Banyuroto. TPA tersebut memiliki kapasitas tampung hanya 55.000 meter kubik dengan luas dua hektare. Pemrosesan akhir di TPA tersebut hanya menerima residu dari TPS3R di Kabupaten Kulon Progo. TPA skala kota hanya terdapat satu unit di mana TPA ini menerima sampah dari seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Beban sampah berdasarkan jumlah penduduk pada 2023 dikali dengan jumlah timbulan sampah per kapita adalah 0,49 kilogram per orang per hari.

Pembangunan mega proyek yang telah berjalan di Kulon Progo, dipastikan akan berpengaruh pada laju alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Selanjutnya akan berdampak pada kelanjutan fungsi ekologi-sosial daerah setempat. Terdapat empat proyek besar yang sudah dan sedang berlangsung. Masing-masing meliputi pembangunan Bandara YIA di Kapanewon Temon, Bedah Bukit Menoreh sepanjang 63 kilometer (perencanaan), Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 122,9 kilometer, serta jalan tol yang melintas di Kulon Progo dengan jumlah exit tol sebanyak 3 titik.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan yang terjadi karena pembangunan mega proyek memerlukan lahan seluas 587 hektare (bandara), Jalur Jalan Lintas Selatan dengan panjang 122,9 kilometer dengan lebar jalan tujuh meter, serta Badan Otoritas Borobudur (d/h Bedah Bukit Menoreh) diperkirakan membangun jalan sepanjang 63 kilometer dengan lebar jalan 3-

4 meter (jalan kabupaten) dan tujuh meter (jalan provinsi), dan jalan tol dengan jumlah *exit* tol sebanyak 3 titik.

Pembangunan proyek-proyek besar di Kulon Progo berdampak terhadap pembangunan di sekitarnya. Berbagai macam fasilitas seperti hotel, restoran, *rest area*, tempat wisata, rumah toko, dan perumahan dibangun oleh para investor sebagai langkah menangkap peluang usaha seperti yang terjadi tempat lain pada umumnya. Hal ini akan menjadi salah satu penyebab adanya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun.

Luas konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun di Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai dari 2004 dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, disusul dengan pembangunan proyek besar lainnya.

Perhatian terhadap alih fungsi lahan harus tetap dikelola dengan bijak dan pelaksanaan yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan harus bertujuan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat setempat, sekaligus tetap menjaga lingkungan.

3.1.6 Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah salah satu permasalahan yang mendapat perhatian khusus, karena berdampak besar terhadap kehidupan dan kehidupan masyarakat Kulon Progo. Dengan diketahuinya akar permasalahan dan permasalahan pokok, maka akan ditemukan solusi dan strategi untuk mencegah permasalahan yang akan terjadi, serta penanganan permasalahan yang sedang terjadi dengan tepat.

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh dunia saat ini. Fenomena yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri lainnya, yang menghasilkan gas rumah kaca.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini karena wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir. Menurut laporan dari BMKG, anomali suhu rata-rata per Juli 2023 mencapai 0,5 derajat Celcius di atas normal. Selain itu, BMKG juga mencatat bahwa setiap tahun terdapat tren kenaikan suhu di Indonesia. Tren kenaikannya bervariasi sekitar 0,03 derajat Celcius setiap tahunnya.

Perubahan iklim menjadi permasalahan yang semakin rumit dengan berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah masih rendahnya ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, sehingga mereka belum siap dalam menghadapinya.

Selain itu, masih tingginya perubahan lingkungan sebagai akibat dari perubahan iklim menjadi masalah serius. Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya semakin sering terjadi, mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat. Kendati demikian, belum optimalnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi tantangan tambahan.

Keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam menghadapi bencana seringkali membuat upaya penanggulangan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, serta memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi bencana dengan memperbaiki infrastruktur, memberikan pelatihan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Global

Berbagai perubahan yang terjadi di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di tingkat nasional maupun daerah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mendorong perubahan berskala besar dan berpengaruh jangka panjang.

Selain itu, pandemi COVID-19 menjadi fenomena global yang mengubah tatanan hidup masyarakat dunia. Perubahan global yang terjadi memiliki dua akibat, yaitu mendorong perkembangan potensi sosial ekonomi, namun di sisi lain juga menyebabkan disrupsi.

Menjadi sebuah langkah bijak bagi Pemerintah Daerah untuk memahami dan mengantisipasi berbagai perubahan yang mungkin terjadi di ranah global dan nasional. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang bisa dijadikan acuan dalam daerah mempersiapkan masa depan.

3.2.1.1 Teknologi

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat. Perkembangan teknologi akan menjadi topik yang paling berpengaruh dalam dua puluh tahun ke depan. Kemajuan dan inovasi teknologi yang begitu cepat seperti *internet of thing* (IoT), *big data*, *artificial intelligence* (AI), dan robotisasi menjadi peluang sekaligus tantangan.

Di satu sisi perkembangan teknologi membantu memudahkan berbagai pekerjaan manusia, efisiensi dan mendorong efektivitas sumber daya, waktu serta jarak. Namun di sisi

lain, perubahan teknologi bersifat eksponensial cenderung berimplikasi luas yang mempengaruhi hampir semua industri.

Kemajuan teknologi memberikan dampak besar dari sisi tenaga kerja, *artificial intelligence* (AI) dan otomasi dapat menggantikan tugas manusia dalam berbagai pekerjaan. Sektor yang padat karya akan digantikan oleh robot. Dalam perkembangannya, AI dapat belajar lebih cepat untuk melakukan berbagai pekerjaan yang sulit dilakukan manusia seperti analisis dan *forecasting* data dalam skala masif dan dapat membuat produk kreatif (seni dan hiburan).

Dari sudut pandang produksi, kecerdasan buatan membantu mengurangi biaya produksi serta menurunkan biaya sosial. Dampak yang muncul antara lain banyak pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin dan sektor yang tidak mampu bersaing akan mengalami kemunduran.

Perkembangan teknologi akan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor. Perkembangan teknologi seperti robotisasi dan otomasi akan memberikan dampak besar di sektor industri. Teknologi akan mempermudah proses produksi, menjadikannya lebih efisien, efektif, dan lebih menjamin keselamatan manusia.

Di sektor pendidikan, tren pembelajaran semakin berkembang dengan berkembangnya AI dan IoT yang mendorong ilmu pengetahuan dapat diperoleh siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. *Marketplace* membantu sektor UMKM dalam berpartisipasi pada lingkup perekonomian yang lebih luas.

Di sektor pemerintahan, teknologi membantu dalam proses pelayanan masyarakat dengan lebih cepat dan efisien, serta membantu mempercepat pemerintah dalam merumuskan regulasi, melakukan transformasi, memberikan pelayanan publik, dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

3.2.1.2 Ekonomi, Politik, dan Pemerintah

Perkembangan geopolitik semakin dinamis dan berdampak luas. Dinamika politik global dan konflik antarnegara memberikan dampak yang lebih besar dan luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Kemajuan teknologi dan media sosial membuat berbagai informasi lebih mudah terserap dan diolah oleh masyarakat.

Beberapa tantangan geopolitik yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan persaingan antarnegara, memunculkan kekuatan baru. Peningkatan dapat memicu munculnya konflik di beberapa kawasan di tataran global. Isu politik global yang perlu diperhatikan lainnya adalah dampak perang antarnegara, seperti perang Rusia-Ukraina. Kendati perang tersebut tidak

terjadi di kawasan Asia Tenggara, dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian bagi negara-negara lainnya. Misalnya, meningkatnya laju inflasi global dan kelangkaan sumber daya alam. Perang juga mendorong negara lainnya untuk mencari instrumen militer untuk melindungi negaranya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik atau perang antarnegara di masa depan.

Geoekonomi yang bergeser dan tren ekonomi yang berubah. Perkembangan geoekonomi di berbagai negara telah menyebabkan terjadinya pergeseran poros perekonomian dunia. Jika sebelumnya bersifat unipolar yang berpusat di Amerika Serikat, kini mulai berubah menjadi multipolar. Negara-negara seperti Cina, Arab Saudi, Rusia, dan India mulai memiliki pengaruh terhadap perekonomian dunia, akan memberikan pengaruh pula terhadap kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi juga menimbulkan disrupsi terhadap tren perekonomian ke depan, salah satunya adalah perkembangan mobil listrik. Tumbuhnya subsektor ini memberikan peluang bagi negara yang memiliki sumber daya tambang, seperti Indonesia, memiliki peluang besar dalam sebagai pemasok bahan baku baterai dan komponen elektronik lainnya.

No Region can Stand Alone. Perkembangan zaman yang begitu cepat dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat menuntut pemerintah harus dapat beradaptasi tak terkecuali pemerintahan di tingkat regional. Kemampuan pemerintah regional yang terkadang terbatas dari sisi finansial, teknis, dan kebijakan membuat pemerintah regional tidak dapat melaksanakan perannya secara optimal. Perlunya penguatan model pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efektif, dan efisien, salah satu nya dengan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pihak swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Model kerja sama antar daerah yang lebih bebas dan berorientasi, dapat menjadi alternatif bagi daerah dalam memperkuat kapabilitas daerah. Model pemerintahan daerah yang lebih baik, harapannya dapat membantu pemerintah daerah lebih mandiri dan mengurangi beban pemerintah pusat.

3.2.1.3 Lingkungan

Kemajuan umat manusia harus diharmonisasikan dengan kelestarian lingkungan. Perkembangan ekonomi dan teknologi yang begitu pesat perlu diimbangi dengan antisipasi dampak lingkungan. Berdasarkan *United Nation Global Land Outlook* edisi ke-2, 70 persen lahan di bumi telah berubah dari bentuk alaminya. Hal ini menyebabkan degradasi lingkungan dan berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global.

Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap pasokan makanan dunia, migrasi paksa, punahnya keanekaragaman hayati, penurunan kesehatan manusia, munculnya lebih banyak penyakit zoonosis baru, dan konflik perebutan sumber daya alam. Kepedulian terhadap lingkungan perlu diintegrasikan pada perkembangan teknologi dan ekonomi dunia dalam rangka memenuhi kebutuhan energi di masa depan sekaligus mengurangi secara drastis emisi rumah kaca, kerawanan pangan dan kelangkaan air.

Di masa depan perlu adanya percepatan pada metode produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, transisi pada perekonomian sirkular yang bersifat regeneratif, seperti ekonomi hijau atau ekonomi biru, dalam rangka mengurangi dampak buruk limbah dan polusi.

3.2.1.4 Kependudukan dan Kesehatan

Pertumbuhan penduduk yang menurun dan perubahan masyarakat. Jumlah penduduk dunia yang terus bertambah, namun pertumbuhannya semakin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan peningkatan angka harapan hidup bayi. Akan tetapi, terjadi penurunan tren angka kelahiran yang besar di beberapa negara, khususnya negara maju yang didorong oleh proporsi demografi, seperti bertambahnya penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia muda.

Hal tersebut memunculkan tantangan berupa kewajiban pemenuhan perlindungan sosial, tren penurunan kelahiran, dan masalah tenaga kerja. Munculnya perubahan fenomena kependudukan seperti mobilisasi penduduk yang cepat, menunda pernikahan, tidak memiliki anak (*childless*) dan berbagai permasalahan moral seperti perilaku hidup bebas, pornografi, penyimpangan seksual. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dan pemerintah dalam memaknai dan menjalankan fungsi keluarga.

Tantangan kesehatan global. Pandemi Covid-19 dan berbagai penyakit *zoonosis* yang terjadi dan termobilisasi secara cepat ke berbagai negara, menjadi tantangan dalam mempersiapkan infrastruktur kesehatan, layanan kesehatan, dan persiapan berbagai skenario pandemi. Kesehatan mental juga akan menjadi tantangan yang tumbuh semenjak masa pandemi, yang mana kesehatan mental dapat menjadi isu penting di berbagai ranah seperti tenaga kerja dan keluarga.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

3.2.2.1 Masih Lemahnya Kapasitas SDM

Ditinjau dari nilai PISA (membaca, matematika, dan sains), nilai rata-rata siswa di Indonesia masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Rendahnya

kualitas pendidikan terjadi akibat lemahnya distribusi dan minimnya jumlah guru yang memiliki kompetensi baik. Rendahnya kualitas pendidikan berdampak pada keterserapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Selain keterserapan, produktivitasnya juga rendah jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN.

Di bidang inovasi, kuantitas dan kualitas SDM peneliti masih belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388 orang, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hasil riset juga tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional.

Lemahnya kapasitas SDM ini juga berpengaruh terhadap belum optimalnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi. Hal ini disebabkan kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil.

3.2.2.2 Pergeseran Dini Sektor Perekonomian dan Minimnya Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah

Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian masih rendah. Hal ini menyebabkan kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun, di antaranya terjadi akibat pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas sektor-sektor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri terutama di luar Pulau Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata disebabkan terutama oleh terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenities, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang cenderung masih rendah. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal karena kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

Pusat pertumbuhan yang masih banyak berkembang di Pulau Jawa terlihat dari kontribusinya yang mencapai 57,8 persen terhadap PDB. Infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

3.2.2.3 Akses Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial belum Merata

Permasalahan pada perlindungan sosial terutama terjadi pada bantuan sosial yang masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada 2045, tantangan yang dihadapi utamanya adalah akses ke kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang belum merata. Tantangan bagi pembangunan kesehatan antara lain transisi demografi, peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat yang berpengaruh terhadap permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia.

Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem pelayanan kesehatan harus mampu beradaptasi dari fokus ke arah kuratif menjadi ke promotif dan preventif. Jika fokus ini berhasil diterapkan dengan baik maka biaya kesehatan akan mengalami penurunan.

Di sektor pendidikan, tantangan yang terjadi adalah untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan. Untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pendidikan, tantangan yang dihadapi adalah layanan pendidikan yang belum merata akibat disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi yang masih tinggi.

Tantangan dalam jaminan sosial adalah belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial yang masih rendah. Pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan nonalam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang difabel dan lansia.

3.2.2.4 Tata Kelola Urusan Pemerintahan Tidak Adaptif

Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, kementerian/ lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. Kesenambungan pembangunan, menjadi penting dalam menjaga konsistensi dalam satu masa dan antarperiode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

Dalam hal pembiayaan pembangunan, tantangan utama yang dihadapi adalah belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan, tingginya *cost of fund*, dangkalnya sektor keuangan, serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan, di mana inklusi

keuangan RI baru mencapai 85,10 persen. Dari segi pembangunan nonpemerintah, dibutuhkan komunikasi publik yang baik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan yang belum terjalin dengan baik.

Terhambatnya proses digitalisasi publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan. Transformasi digital di tingkat pemerintahan juga dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar seperti disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar daerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Digitalisasi pemerintahan juga mengalami masalah terkait tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2.5 Minimnya Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlu menerapkan konsep ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau antara lain penggunaan bahan bakar fosil yang masih tinggi.

Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*). Timbulan limbah B3 yang tercatat terus mengalami peningkatan secara nasional hingga mencapai 74 juta ton pada 2022. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum dan penerapan insentif disinsentif untuk ekonomi hijau masih lemah.

Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah.

Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan rendahnya efisiensi energi. Di samping itu, tingkat elektrifikasi di perdesaan Indonesia pada akhir 2020 sudah mencapai 98,67 persen, namun secara umum kualitas akses listrik tersebut masih perlu ditingkatkan.

3.2.3 Isu Strategis Daerah

3.2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen dengan tingkat urgensi yang tinggi, serta menjadi salah satu modal berharga di dalam upaya perwujudan pembangunan daerah sesuai dengan target visi pembangunan daerah yang sejahtera, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok aspek sumber daya manusia sebagaimana diterangkan sebelumnya, dapat diketahui beberapa isu yang menjadi penting untuk diperhatikan dan memerlukan penanganan lebih. Kualitas pembangunan manusia dinilai sebagai salah satu permasalahan pokok yang masih dihadapi, khususnya pada aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender sebagai akar permasalahannya. Dinamika tersebut menyebabkan kualitas sumber daya manusia, sebagai modal sosial utama yang dimiliki oleh daerah, belum dapat terjamin keberlangsungannya.

Tentunya, dengan adanya permasalahan pokok tersebut, maka dapat menghambat proses pembangunan daerah yang baik, yang direncanakan atau yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, permasalahan kualitas pembangunan manusia perlu menjadi salah satu isu strategis yang diprioritaskan untuk ditangani permasalahannya, demi mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Di sisi lain, pemenuhan gizi masyarakat juga belum dapat berjalan secara optimal. Permasalahan pokok ini berkaitan dengan beberapa akar permasalahan yang melatarbelakangi, seperti tingginya kasus *stunting*, terbatasnya keanekaragaman pangan, serta masih kurangnya keamanan pangan.

Tentu saja, kondisi tersebut merupakan kondisi yang memprihatinkan, khususnya bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Kulon Progo. Terlebih lagi apabila melihat potensi sumber daya alam Kulon Progo yang cukup melimpah di bidang agrikultur, fenomena ini menjadi sebuah ironi, karena permasalahan pangan dan gizi masih terjadi di lingkup masyarakat yang dapat mempengaruhi kualitas dan kondisi modal sosial sumber daya manusia di Kulon Progo. Urgensi isu strategis pada permasalahan tersebut perlu untuk diperhatikan secara cermat, guna memperbaiki kondisi yang sedang terjadi.

Kulon Progo, sebagai salah satu wilayah administratif di DIY, tentu juga tidak lepas dari aspek kebudayaan lokal yang dimiliki. Namun demikian, potensi keunggulan budaya lokal tersebut belum dapat berjalan dengan optimal karena kurangnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal.

Keberadaan budaya lokal tersebut semestinya dapat menjadi aset penting yang dijaga dan dirawat dari generasi ke generasi. Kebudayaan tersebut dapat menjadi sebuah *spirit* di tengah masyarakat, sebagai salah satu ciri khas daerah. Oleh karena itu, aspek kebudayaan menjadi salah satu poin strategis yang perlu untuk diprioritaskan, karena aspek ini berkaitan langsung dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo yang mengutamakan aspek budaya di dalamnya.

3.2.3.2 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Isu strategis yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Kulon Progo meliputi pertumbuhan ekonomi yang melemah, ketidakmerataan pembangunan ekonomi, dan tingginya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang lesu disebabkan oleh kendala-kendala dalam berbagai sektor ekonomi. Misalnya ekspor, pariwisata, investasi, perdagangan, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Faktor-faktor seperti rendahnya kompetensi pedagang, kurangnya infrastruktur digital dalam perdagangan, dan minimnya aksesibilitas pariwisata, masih menjadi penghambat utama. Di samping itu, rendahnya nilai investasi, produktivitas pertanian, dan terbatasnya pemanfaatan sumber daya kelautan juga menjadi isu yang perlu segera ditangani dengan serius.

Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menimbulkan kesenjangan yang cukup lebar di antara masyarakat, yang tercermin dalam tingginya tingkat kemiskinan. Tingginya persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan perlunya upaya konkret untuk mengatasi isu kemiskinan.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, perlu ditingkatkan untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Terutama bagi kelompok rentan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, dapat diwujudkan pembangunan yang inklusif, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

3.2.3.3 Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Bidang tata kelola pemerintahan daerah adalah satu di antara aspek-aspek penting yang berguna untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan akar dan pokok permasalahan yang telah dirinci sebelumnya, diketahui bahwa terdapat isu-isu mendasar yang penanganannya perlu diprioritaskan.

Beberapa isu tersebut, antara lain belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang dicerminkan dalam keterbatasan sarana infrastruktur pengelolaan pemerintahan. Keterbatasan tersebut menjadikan integrasi sistem informasi tidak dapat diselenggarakan, sehingga akses masyarakat terhadap informasi mutakhir dan faktual belum terwujud.

Permasalahan tersebut tentu berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah dan hubungan integralnya dengan masyarakat. Melihat hal tersebut, isu ini secara umum perlu menjadi satu di antara prioritas penanganan demi meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, serta memperkaya inovasi dan pengembangan berkelanjutan.

Selain akuntabilitas kinerja pemerintah dan akses infrastruktur manajemen sistem informasi yang belum optimal, perwujudan kemandirian desa yang belum signifikan turut menjadi isu strategis di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini meliputi mekanisme perencanaan pembangunan yang belum menjunjung semangat kolaborasi, serta kurangnya kapasitas sumber daya Pemerintah Desa untuk melakukan pelayanan publik.

Persoalan tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas keputusan yang tidak berimbang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, perencanaan yang holistik diharapkan mampu menjadikan perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai penyelenggara pemerintahan yang didukung oleh publik, sehingga akan meningkatkan keberhasilan implementasi program dan kegiatan.

Setelah pandangan inklusif dipertimbangkan, kapasitas dan kepiawaian sumber daya manusia juga perlu diselaraskan antara pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, demi terwujudnya tata kelola yang inovatif dan adaptif. Penyelarasan kapasitas sumber daya manusia dari tingkat kabupaten hingga desa dapat dilakukan melalui praktik Reformasi Kalurahan. Praktik tersebut tidak hanya mengintervensi SDM, tetapi juga digitalisasi pemerintahan hingga manajemen dan transparansi tata kelola keuangan.

3.2.3.4 Pelayanan Infrastruktur Daerah

Infrastruktur daerah yang terpenuhi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Kulon Progo, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembangunan daerah, yaitu komunikasi dan telekomunikasi yang masih belum merata. Terutama di wilayah pegunungan yang tidak memiliki akses internet. Hal tersebut berdampak pada literasi digital masyarakat yang masih rendah. Maka untuk meningkatkan literasi digital, dengan adanya *website* yang menyediakan informasi terkini dan keamanan informasi, akan membantu meningkatkan minat baca masyarakat.

Infrastruktur jalan di kabupaten juga masih perlu ditingkatkan, terutama jalan lokal di perdesaan seperti Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh yang masih banyak dalam rusak berat. Ketidakmerataan pembangunan dipengaruhi oleh kurangnya konektivitas antarwilayah. Selain itu, kesadaran berlalu lintas yang rendah juga masih terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas setiap tahun. Lalu, manajemen perparkiran dan lalu lintas di Kabupaten Kulon Progo juga perlu ditingkatkan untuk menghadapi adanya perkembangan wilayah akibat keberadaan Bandara YIA. Pengelolaan perlintasan sebidang dan tingginya frekuensi mobilitas kereta api, juga perlu ditingkatkan mengingat frekuensi mobilitas kereta api yang semakin meningkat.

Pembangunan infrastruktur yang inklusif bagi kelompok rentan di Kabupaten Kulon Progo juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya, mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap fasilitas publik. Strategi ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan khusus dari kelompok rentan, seperti penyediaan aksesibilitas yang lebih baik di jalanan, bangunan publik yang ramah disabilitas, serta fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan.

Pembangunan yang inklusif ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, tetapi juga mendorong kesetaraan sosial dan pemberdayaan komunitas secara keseluruhan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

3.2.3.5 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Alih Fungsi Lahan

Pada 2021, pencemaran air sungai di Kabupaten Kulon Progo menjadi isu strategis yang mengkhawatirkan, karena terjadi penurunan kualitas air akibat meningkatnya aktivitas UMKM seperti pengrajin batik dan binatu (*laundry*), serta kekurangan fasilitas pengolah limbah rumah tangga, peternakan, dan pelayanan jasa kesehatan.

Selain limbah rumah tangga, sektor industri juga turut mencemari sungai dengan membuang langsung limbahnya ke sungai, terutama di wilayah perkotaan dan industri. Sungai Serang, limbah peternakan dan penggunaan pupuk kimia pertanian menjadi penyumbang utama pencemaran.

Sementara itu, IPAL Komunal di sempadan Sungai Serang juga berkontribusi pada pencemaran. Di sempadan Sungai Sermo, limbah dari warung makan yang belum tertib menjadi penyebab tambahan pencemaran. Diperlukan langkah strategis yang serius untuk

mengatasi masalah ini, termasuk pemberian fasilitas pengolah limbah bagi UMKM, pengawasan ketat terhadap industri, peningkatan kesadaran petani dalam penggunaan pupuk organik, dan penertiban terhadap warung makan di sekitar Sungai Sermo.

Laju pertumbuhan penduduk dan migrasi ke Kabupaten Kulon Progo telah mengakibatkan peningkatan drastis dalam timbulan sampah domestik, terutama di kawasan perkotaan. Bandara YIA juga turut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan volume sampah. Meskipun terjadi peningkatan jumlah dan jenis sampah dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang terus-menerus dari Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dalam pengurangan sampah di sumbernya dan penerapan konsep 3R (*reuse reduce recycle*).

Pada 2023, total timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mencapai 64.143,78 ton per tahun, dari timbulan total sampah tersebut, dapat dilakukan pengurangan sebesar 24.843,80 ton per tahun dan penanganan sebesar 12.164,27 ton per tahun. Kabupaten Kulon Progo memiliki TPA Banyuroto dengan kapasitas terbatas, yang menerima residu dari TPS3R di wilayah tersebut.

Dengan pemahaman tentang sumber timbulan sampah yang dominan, penyuluhan dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif di daerah-daerah dengan tingkat timbulan sampah tinggi, juga diperlukan upaya-upaya mengurangi sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu saja yang benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Diharapkan pengelolaan sampah selesai di masing-masing kalurahan, di TPS3R yang dikelola oleh masing-masing KSM. *Reuse reduce recycle* merupakan tiga pendekatan dasar untuk pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, yakni dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Melihat isu lingkungan yang semakin banyak menjadi perhatian masyarakat, maka diperlukan upaya Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Selain penurunan kualitas lingkungan, terdapat pula isu strategis terkait alih fungsi lahan. Dampak dari alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun, yang akselerasinya dipercepat oleh pembangunan proyek-proyek besar, juga menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

Berbagai pembangunan di Kabupaten Kulon Progo telah menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Dampaknya, tidak hanya terbatas pada perubahan lahan, tetapi

juga pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas di sekitarnya seperti hotel, restoran, dan tempat wisata. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan keprihatinan terhadap keberlanjutan lingkungan. Perhatian terus harus diberikan pada pengelolaan alih fungsi lahan ini dengan memprioritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

3.2.3.6 Perubahan Iklim

Anomali cuaca akibat perubahan iklim menimbulkan berbagai permasalahan. Cuaca ekstrem dapat meningkatkan ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim juga menyebabkan perubahan pola tanam di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini karena perubahan iklim menyebabkan perubahan intensitas curah hujan, suhu, dan kelembaban. Pergeseran musim dapat menyebabkan menurunnya produktivitas. Kesehatan masyarakat juga terancam seiring meningkatnya potensi gangguan kesehatan akibat DBD, malaria, dan pneumonia.

Dampak perubahan iklim meliputi cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, perubahan pola hujan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Perubahan iklim yang ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari peristiwa abrasi pantai di daerah pesisir, terutama di Pantai Trisik, Kapanewon Galur. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui adaptasi terhadap perubahan iklim.

Untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Kabupaten Kulon Progo, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan upaya adaptasi bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang telah terjadi.

3.3 Modal Dasar

3.3.1 Kependudukan

- a. Jumlah penduduk Kulon Progo terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo sebesar 435,64 ribu jiwa dan diproyeksikan terus bertambah menjadi sebanyak 473,08 ribu jiwa (2045). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo termasuk terendah ke dua setelah Kota Yogyakarta. Tingkat fertilitas di kabupaten ini juga diprediksi mengalami tren penurunan yang menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan penduduk hingga 2045.
- b. Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat menjadi

aset pembangunan yang signifikan jika dikelola dengan baik menjadi SDM yang produktif. Dengan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, Kulon Progo berpotensi memiliki tenaga kerja yang semakin besar, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor yang memiliki potensi menciptakan banyak lapangan kerja.

Di sisi lain, jika Kabupaten Kulon Progo tidak berhasil mengoptimalkan potensi penduduknya menjadi sumber daya manusia yang produktif, maka penduduk tersebut dapat menjadi beban pembangunan yang berpotensi menghadirkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, keterbelakangan ekonomi, serta tekanan besar terhadap lingkungan dan kelangsungan penggunaan sumber daya alam.

- c. Dinamika penduduk berdampak luas terhadap pembangunan. Kenaikan jumlah penduduk, seiring dengan pertumbuhan kelompok usia produktif dan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, menghasilkan perubahan cepat dalam struktur penduduk. Mobilitas yang tinggi antarpenduduk dan distribusi yang tidak merata di antara wilayah memerlukan pendekatan yang cermat dalam mengelola dinamika ini. Hal ini bertujuan agar penduduk dapat berperan sebagai pendorong utama yang berdampak positif pada pembangunan.

3.3.2 Ekonomi Sosial Budaya

- a. Keberadaan Bandara YIA yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya KSPN Borobudur, tentu akan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara tersebut dan menjadikan Kulon Progo sebagai *main gate* masuknya wisatawan lokal maupun internasional. Jalur wisata dari bandara menuju Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Keberadaan Bandara YIA dapat memberikan nilai tambah *global value chain* bagi Kabupaten Kulon Progo dalam hal penyediaan transportasi dan akomodasi.
- b. Dibangunnya Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Pulau Jawa bagian selatan. Selain itu, di sepanjang JJLS terdapat potensi pengembangan pariwisata Pantai Selatan, mulai dari Pantai Trisik sampai dengan Hutan Mangrove, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah DIY.
- c. Rencana pembangunan jalan tol yang merupakan rangkaian dari rencana pembangunan jalan tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo.
- d. Kabupaten Kulon Progo terletak bersebelahan dengan kawasan Borobudur berpotensi besar untuk menangkap peluang positif dengan ditetapkannya Borobudur sebagai KSPN

dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan target pencapaian kunjungan dua juta wisatawan mancanegara pada 2024.

- e. Toko Milik Rakyat (ToMiRa) merupakan kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menindaklanjuti permasalahan maraknya toko modern berjejaring waralaba yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. ToMiRa diharapkan dapat membangun jaringan yang lebih luas untuk mengoptimalkan pasokan produk UMKM asli Kulon Progo ke dalam gerai ToMiRa. Diharapkan keberadaan ToMiRa berdampak lebih luas terhadap pemberdayaan UMKM Kulon Progo.
- f. Terdapat beragam jenis seni yang telah dikembangkan dan menjadi seni unggulan seperti Angguk Putri yang menjadi salah satu jenis seni unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun seni unggulan lainnya meliputi ketoprak, jathilan, inkling, keroncong, reog, oglek, hadroh/salawatan, lengger tapen, wayang topeng, panjidor, krumpyung, dan zabur. Selain itu budaya tradisi berupa upacara adat juga sudah dikemas dengan cukup baik sehingga memiliki daya tarik wisata daerah.
- g. Pengembangan kawasan di empat Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten meliputi 1) Perbukitan Menoreh; 2) Makam Girigondo; 3) Pusat Kota Wates; dan 4) Pantai Selatan Kulon Progo.
- h. Semangat kegotongroyongan masyarakat yang masih terpelihara dengan relatif baik dalam praktik kehidupan di tingkat RT, RW dan Kalurahan merupakan modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dari pengaruh eksternal di era global.
- i. Program Sambang Kulon Progo (Sambanggo) adalah suatu gerakan dalam upaya pengembangan pariwisata yang ditetapkan melalui Perbup Kulon Progo No. 24 tahun 2022 tentang *Sambang Kulon Progo* dengan tujuan menggali potensi wisata dan mengunjungi destinasi pariwisata berupa pantai (gisik), usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif (gawe), dan pegunungan (giri). Sambanggo dilaksanakan dengan mengedepankan kekayaan dan potensi daerah dalam wujud kearifan lokal masyarakat dalam bentuk gotong-royong, padat karya, dan bedah wisata guna membangun dan menghidupkan kembali destinasi pariwisata
- j. Besarnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan adalah merupakan modal sosial (*social capitals*) yang dapat dijadikan sebagai pondasi bagi sistem dan mekanisme

pembangunan daerah menuju perwujudan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

- k. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance* dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif serta berkelanjutan dapat dipergunakan sebagai modal dasar untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 20 tahun ke depan dapat tetap berada pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sebagaimana yang telah teruji manfaatnya.
- l. Rencana pembangunan Terminal Ekspor yang dapat memberikan fasilitas ekspor bagi pelaku UMKM dan NonUMKM di Kulon Progo agar dapat melakukan ekspor secara mandiri. Memanfaatkan potensi Bandara YIA dan jalan tol yang dapat mendukung aksesibilitas darat dan udara dalam distribusi barang dalam dan luar negeri.
- m. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto diharapkan menjadi batu loncatan dalam membuka potensi ekonomi biru di Kulon Progo. Adanya pelabuhan tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor perikanan melalui pengembangan budi daya dan penangkapan ikan serta dapat mendorong sektor pariwisata melalui wisata bahari.
- n. Pengelolaan sampah di Kulon Progo sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.

3.3.3 Kekayaan Alam

- a. Kawasan perbukitan Menoreh sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur memiliki potensi daya tarik pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan pembangunan Jalur Temon-Borobudur atau Jalur Bedah Menoreh merupakan salah satu strategi daerah dalam rangka menyediakan akses transportasi dari Bandara YIA menuju kawasan Borobudur.
- b. Sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, dengan produksi total ikan tambak maupun budi daya yang terus meningkat setiap tahun. Didukung oleh inovasi *Gerbang Segoro* yang merupakan gerakan membangun sektor kelautan dan perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, berbasis pemberdayaan masyarakat dengan membangkitkan semangat berbudi daya ikan dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah dan penangkapan ikan di laut.
- c. Produktivitas pertanian yang terus meningkat terutama pada empat komoditas unggulan yaitu jagung, padi, kacang tanah, dan ubi kayu.
- d. Warisan geologi berupa *geoheritage* sejumlah lima situs yang telah diakui oleh nasional. Situs *geoheritage* tersebut terletak di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Suroloyo dengan keunggulan geowisata yang meliputi kawasan wisata alam pegunungan menoreh, serta KSPD Kiskendo dan Sermo dengan potensi pengembangan *geoheritage*. Warisan geologi tersebut berpotensi menjadi geopark yang dapat menjadi daya tarik wisata, pusat inovasi dan penelitian.

3.3.4 Keistimewaan DIY

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, DIY memiliki kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan;
5. Tata ruang.

Dalam hal kewenangan di kabupaten/kota, kabupaten/kota di DIY melaksanakan kewenangan keistimewaan dalam urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Dalam urusan kelembagaan, keistimewaan DIY yang dilimpahkan ke Kabupaten Kulon Progo diwujudkan dengan penetapan kelembagaan melalui Perda No. 3 tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, di mana terdapat perubahan nomenklatur “kecamatan” menjadi “kapanewon” dan Desa Wates menjadi Kalurahan Wates di bawah Kapanewon Wates untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Panewu, serta penetapan Perda No. 4 tahun 2019 tentang *Penetapan Kalurahan*, di mana terdapat perubahan nomenklatur “desa” menjadi “kalurahan”. Selain itu, urusan kelembagaan diwujudkan untuk tata laksana kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Urusan kebudayaan menjadi urusan yang paling dominan dalam kewenangan keistimewaan. Di Kabupaten Kulon Progo, penggunaan dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan digunakan untuk pembinaan dan pengembangan kesejarahan, bahasa, sastra, cagar budaya, warisan budaya, desa budaya, dan kantong budaya. Selain itu, dana keistimewaan digunakan untuk pelaksanaan gelar budaya Jogja serta berbagai kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat.

Dalam urusan pertanahan, keistimewaan DIY di Kabupaten Kulon Progo diwujudkan pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Urusan keistimewaan pada aspek tata

ruang yang dimiliki meliputi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan terlebih dahulu menyusun kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, sesuai dengan Keistimewaan DIY dengan tetap memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan ini, dalam Perda No. 2 tahun 2017 tentang *Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*, dirumuskan ke dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan/kadipaten, yaitu satuan ruang tanah kasultanan/kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana, dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan amanah Perda No. 2 tahun 2017 pula, terdapat 18 Satuan Ruang Strategis Kasultanan/Kadipaten yaitu sebagai berikut.

1. Satuan Ruang Strategis Kasultanan:

- a. Karaton;
- b. Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
- c. Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
- d. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
- e. Masjid Pathok Nagara;
- f. Gunung Merapi;
- g. Pantai Samas – Parangtritis;
- h. Kerto – Pleret;
- i. Kotabaru;
- j. Candi Prambanan - Candi Ijo;
- k. Sokoliman;
- l. Perbukitan Menoreh;
- m. Karst Gunungsewu; dan
- n. Pantai Selatan Gunungkidul.

2. Satuan Ruang Strategis Kadipaten:

- a. Puro Pakualaman
- b. Makam Girigondo
- c. Pusat Kota Wates
- d. Pantai Selatan Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo, dalam tipologi Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan memiliki satu SRS Kesultanan yaitu Perbukitan Menoreh, dan tiga SRS Kadipaten yaitu Makam Girigondo, Pusat Kota Wates, dan Pantai Selatan Kulon Progo. Amanah bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi Kasultanan dan Kadipaten tersebut tertuang di dalam Pasal 43 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2017 tentang *Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*.

Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Kasultanan dan Kadipaten tertuang di dalam Pasal 44 Perda No. 2 tahun 2017 di mana fasilitasi Pemda dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, memberikan bantuan dalam hal sebagai berikut.

- a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- c. Penyusunan rencana induk pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- d. Pelaksanaan Penataan Ruang;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
- f. Penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- g. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- h. Pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal tersebut mengamanatkan agar Pemda DIY memfasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan rencana induk. Mengacu pada Pergub DIY No. 13 tahun 2022 tentang *Penugasan Urusan Keistimewaan*, aspek tata ruang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- b. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- c. Penyusunan rencana induk pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;

- d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten yang berada dalam kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- e. Pemanfaatan ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- f. Audit tata ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- g. Pengenaan sanksi pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten; dan
- h. Pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten.

Secara umum, pemanfaatan tanah dan ruang merupakan isu yang sedang disoroti pemerintah provinsi agar dapat dilaksanakan sesuai peruntukan. Sesuai dengan arahan dalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2024-2044, arahan pemanfaatan ruang perlu memperhatikan prosedur perizinan dan pengendalian. Hal tersebut dapat didukung dengan menyusun tata ruang dengan peraturan zonasinya, mengembangkan sistem prosedur perizinan, dan melaksanakan pengawasan atas dasar peruntukan.

Selaras dengan arahan pemanfaatan ruang, efektivitas terkait perizinan dapat ditingkatkan dengan beberapa resolusi. Penegakan hukum yang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur daerah perlu menjadi gerbang pertama dalam mengatasi permasalahan perizinan.

Kesalahan terkait suatu perizinan dapat berakibat fatal bagi daya dukung dan kemampuan lahan yang berujung pada terancamnya eksistensi sumber daya lahan. Dengan demikian, perizinan yang transparan dan akuntabel perlu diperkuat sebagai pemahaman aparatur sehingga bisa diteruskan kepada masyarakat. Pada konteks ini, Danais dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyusunan regulasi daerah, peningkatan kapasitas, dan penegakan hukum.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan, Danais juga dapat direncanakan alokasinya untuk pengadaan elemen pendukung penegakan hukum pemanfaatan tanah dan tata ruang. Beberapa di antaranya meliputi infrastruktur pendukung seperti digitalisasi dan penguatan arsip untuk menghindari duplikasi serta mempermudah verifikasi. Tidak hanya itu, pengawasan dengan pemberian sanksi dapat dilakukan secara tegas dan efektif oleh jajaran terkait. Koordinasi antarlembaga dengan mengadakan forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang efektif.

BAB IV

Visi & Misi Daerah



Visi Kulon Progo Tahun 2025-2045:
**Kulon Progo yang Sejahtera, Maju,
Mandiri, Berbudaya & Berkelanjutan
(SEMARAK)**

Sasaran Visi:

Peningkatan Pendapatan Per Kapita



PDRB Per Kapita

2025: Rp41,91-66,64 juta

2045: Rp110,01-134,74 juta



Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

2025: 10,56-11,01%

2045: 12,00-12,45%

Peningkatan Daya Saing SDM



Indeks Pembangunan Manusia

2025: 76,00 - 76,23

2045: 84,01 - 85,51

Pengentasan Kemiskinan & Ketimpangan



Tingkat Kemiskinan

2025: 14,12-15,12%

2045: 5,52-6,52%



Gini Ratio

2025: 0,357-0,394

2045: 0,36-0,38



Kontribusi PDRB Kabupaten

2025: 8,96%

2045: 11,14%

Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*



IKLH

2025: 69,75

2045: 71,63

Misi Kulon Progo Tahun 2025-2045:



1. Mewujudkan manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera

2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi



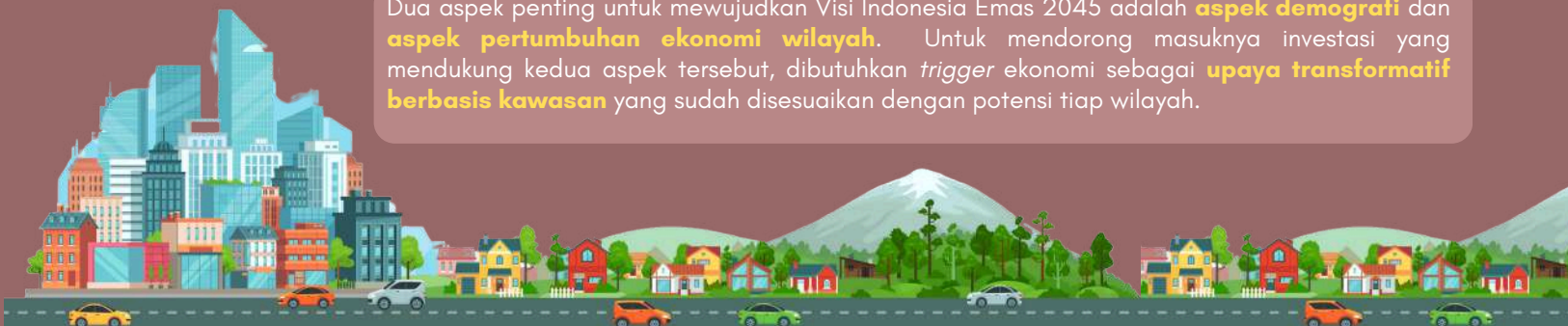
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis

4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana



Upaya Transformatif :

Dua aspek penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah **aspek demografi** dan **aspek pertumbuhan ekonomi wilayah**. Untuk mendorong masuknya investasi yang mendukung kedua aspek tersebut, dibutuhkan *trigger* ekonomi sebagai **upaya transformatif berbasis kawasan** yang sudah disesuaikan dengan potensi tiap wilayah.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

Kabupaten Kulon Progo memiliki permasalahan utama berupa tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih relatif rendah. Kesejahteraan yang masih relatif rendah di Kabupaten Kulon Progo dilatarbelakangi oleh tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang belum optimal, meningkatnya kerawanan dan gangguan ketertiban, belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan infrastruktur wilayah, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta sumber daya manusia yang belum kompetitif.

Permasalahan-permasalahan ini perlu diatasi segera dengan perencanaan pembangunan yang tepat. Momen ini menjadi waktu yang tepat bagi Kabupaten Kulon Progo dalam menentukan visi pembangunan daerah yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo.

Visi RPJPD menjadi pandangan jangka panjang selama 20 tahun mengenai pembangunan daerah yang didasarkan pada kepentingan daerah. Visi RPJPD menggambarkan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat terwujud.

Visi ini menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan menganalisis tren periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi bukan sekadar impian atau serangkaian harapan, melainkan suatu komitmen dan usaha untuk merencanakan dan mengelola perubahan demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut.

**“KULON PROGO YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, BERBUDAYA, DAN
BERKELANJUTAN”**

(SEMARAK)

Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2045 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945,

khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tersebut haruslah terukur, sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam rangka mewujudkan *“Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan”*.

Akronim dari kata “Semarak” dipilih untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Kulon Progo di masa depan. Kata “Semarak” memiliki arti kemuliaan, kemegahan, keelokan. Pada 2045 nanti diharapkan Kabupaten Kulon Progo telah menjadi kabupaten yang maju penuh dengan kemegahan dan kemuliaan dan tetap elok.

Masyarakat yang “sejahtera” merupakan kristalisasi dari masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan harus dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol dalam pembangunan.

Kesejahteraan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, serta dapat memberikan makna dan arti penting bagi masyarakat lainnya.

Tingkat *“kemajuan”* Kabupaten Kulon Progo dinilai berdasarkan berbagai ukuran, ditinjau dari indikator sosial dan dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya, ditandai oleh semakin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli, serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan.

Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik akan tercermin dalam produktivitas yang semakin tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan

suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pemerataannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan meratanya pemerataan ekonomi suatu daerah menjadi daerah tersebut lebih sejahtera dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam menciptakan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor-sektor jasa, serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu perundang-undangan yang ditetapkan.

Daerah yang maju juga ditandai dengan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan dan ketertiban. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang hak-hak warganya, keamanannya dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut masyarakat yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang "*mandiri*" adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk membangun kemandirian, harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam daerah yang makin kokoh, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Secara mendasar kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap masyarakat atau daerah mengenai

dirinya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaan pembangunan, kemandirian masyarakat Kulon Progo tetap menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.

Kemandirian dan kemajuan masyarakat Kulon Progo tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Menjadi maju dan mandiri tidak berarti masyarakat Kulon Progo melupakan tradisi, karakter, dan kebudayaan lokal serta keberlanjutan pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka 20 tahun kedepan.

Visi Kulon Progo “berbudaya” lahir sebagai komitmen untuk menjaga keberlangsungan warisan leluhur berupa nilai-nilai luhur, adat istiadat, kesenian, dan beragam ekspresi budaya masyarakat setempat. Melalui penerapan konsep pembangunan berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan, keunggulan dan identitas Kulon Progo yang kental budayanya diharapkan mampu terjaga di tengah modernisasi.

Implementasi berbudaya dapat dilakukan dengan memformulasikan berbagai program pembangunan daerah dengan mengintegrasikan aspek pemberdayaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di dalamnya. Di sektor pendidikan, melalui visi ini diharapkan dapat menumbuhkan generasi muda Kulon Progo yang memiliki akar kuat jati diri dan kebanggaan terhadap tanah kelahirannya salah satunya dengan penguatan kurikulum muatan lokal kebudayaan yang diajarkan di bangku-bangku sekolah.

Pembangunan berbasis kearifan lokal juga perlu menyentuh domain sosial kemasyarakatan. Sebab sebagai makhluk sosial, interaksi antarwarga masyarakat yang didasari nilai-nilai luhur kemanusiaan menjadi hal penting. Oleh karena itu selain optimalisasi sarana prasarana fisik, peningkatan toleransi, semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial antar warga juga terus diintensifkan.

Pembangunan Kulon Progo selama 20 tahun kedepan juga memperhatikan aspek aspek pembangunan yang “berkelanjutan”. Pembangunan yang berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam proses pembangunan yang berjalan mempunyai prinsip yang selalu berkembang dan membaik, berdampak maksimal yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kunci utama untuk menjamin keberlanjutan seluruh visi Kulon Progo yaitu komitmen politik dan tekad kuat dari para pemimpin daerah. Tanpa hal tersebut, segala program dan anggaran yang disiapkan akan berjalan setengah hati dan tidak optimal. Dengan langkah-langkah progresif tersebut, diharapkan kemajuan laju pembangunan fisik dapat seiring sejalan dengan pelestarian ekosistem sosial budaya dan kemanusiaan masyarakat Kulon Progo ke depan.

Demi mewujudkan Visi mulia Kulon Progo Tahun 2045, maka telah disusun *roadmap* dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.



Gambar 4. 1 Roadmap Implementasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

Pada periode pertama RPJPD (2025-2029), agenda pembangunan Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan daerah. Penguatan fondasi pembangunan daerah merupakan langkah krusial sebagai tahap pertama dalam rangkaian pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo. Fondasi yang kokoh menjadi landasan utama untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa depan. Dalam hal ini, penguatan fondasi mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pada tingkat infrastruktur, pembangunan jalan yang baik dan aksesibilitas yang memadai menjadi fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya. Sistem listrik yang andal juga esensial untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perkembangan sektor industri. Selain itu, penyediaan air bersih yang memadai merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas.

Di samping itu, penguatan fondasi pembangunan daerah juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat setempat untuk berkontribusi dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global.

Dengan penguatan fondasi pembangunan daerah sebagai tahap pertama, sebuah wilayah dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Fondasi yang kokoh tidak hanya menciptakan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan daya tahan terhadap perubahan dan krisis. Dengan demikian, langkah awal ini menjadi investasi yang sangat penting untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pada periode ke dua (2030-2034), agenda pembangunan difokuskan pada percepatan transformasi pembangunan daerah. Setelah berhasil melakukan tahap penguatan fondasi pembangunan daerah, tahap percepatan transformasi. Percepatan ini melibatkan peningkatan signifikan pada berbagai sektor pembangunan yang telah diawali dengan fondasi yang kuat. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian utama adalah sektor infrastruktur. Pembangunan jalan tol, pengembangan transportasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi fokus untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah.

Selain itu, percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo juga mencakup peningkatan sektor ekonomi lokal. Inisiatif pengembangan klaster industri dan peningkatan daya saing produk lokal menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui program pelatihan, pendanaan, dan akses pasar juga turut meramalkan dinamika ekonomi lokal.

Percepatan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya merambah ke sektor ekonomi, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi prioritas untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara

merata. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan juga ditingkatkan melalui forum partisipasi masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pada periode ketiga (2035-2039) agenda pembangunan difokuskan pada ekspansi pembangunan daerah. Setelah berhasil melakukan percepatan pembangunan, fokus utama beralih ke peningkatan kapasitas dan cakupan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten. Inisiatif utama termasuk pengembangan sektor industri yang lebih luas, ekspansi infrastruktur berbasis teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam konteks ekonomi, ekspansi pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo mencakup diversifikasi sektor industri dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Kebijakan pembentukan kluster industri yang lebih beragam dan berorientasi pada inovasi menjadi langkah strategis. Selain itu, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara merata.

Ekspansi pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo juga melibatkan peningkatan infrastruktur teknologi. Pengembangan *smart city*, penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan promosi inovasi digital menjadi komponen utama. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang terkoneksi dan efisien, mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada sisi sosial, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting.

Penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, peningkatan partisipasi dalam program-program sosial dan ekonomi, serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan langkah-langkah kunci dalam memastikan bahwa dampak pembangunan mencapai seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, ekspansi pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Periode terakhir (2040-2045) merupakan periode perwujudan visi Kulon Progo yang maju, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan dari seluruh proses pembangunan yang telah berlangsung selama 15 tahun. Di mana pada tahap ini, diharapkan Kabupaten Kulon Progo telah mencapai tingkat sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kemajuan di sektor ekonomi yang didukung oleh kemandirian dan inovasi. Kulon Progo tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Pemberdayaan masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil dan menengah menjadi landasan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Keberlanjutan ekonomi juga dipandu oleh prinsip ramah lingkungan, dengan pembangunan yang memperhatikan ekologi dan keberlanjutan sumber daya alam.

Di sisi sosial, diharapkan masyarakat Kulon Progo menjadi masyarakat yang sejahtera dan unggul di berbagai bidang dan tetap memelihara kekayaan warisan budaya dan tradisinya. Dalam tahap akhir ini, budaya lokal menjadi pendorong daya tarik wisata dan identitas komunitas. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, wilayah ini menciptakan suasana yang berimbang antara kemajuan dan pelestarian budaya. Melalui sinergi antara kemajuan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya, Kulon Progo muncul sebagai contoh sukses pembangunan jangka panjang yang holistik dan memberdayakan masyarakatnya secara menyeluruh.

Tabel 4. 1 Persandingan Visi RPJPD Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan RPJPN Tahun 2025-2045

Visi Rancangan Akhir RPJPN	Visi Rancangan Akhir RPJPD DIY	Visi RPJPD Kabupaten Kulon Progo
<i>Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan</i>	<i>Terwujudnya DIY yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan</i>	<i>Kulon Progo SEMARAK: Kulon Progo Yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan</i>

Pada tabel di atas terlihat bahwa seluruh kata kunci pada visi jangka panjang Indonesia telah tertuang pada visi Kulon Progo, yaitu Berdaulat/Mandiri, Maju, serta Berkelanjutan. Sedangkan kata kunci pada visi DIY, yaitu Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Kebudayaan juga sudah tertuang pada visi Kulon Progo. Maka dapat disimpulkan bahwa visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo telah selaras dengan visi RPJPN.

4.2 Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045

Sasaran visi dapat diartikan sebagai bentuk hal-hal yang hendak dicapai melalui tindakan terfokus dengan sifat yang khusus, spesifik, terinci, serta terukur dalam mengimplementasikan atau merealisasikan visi yang ada. Sasaran visi menjadi bagian penting

yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah *milestone* perencanaan pembangunan wilayah baik dalam skala nasional maupun daerah termasuk pada Kabupaten Kulon Progo.

Mengacu pada Instruksi Mendagri RI No. 1 tahun 2024 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)* beserta penjelasannya, dalam rangka mewujudkan efektivitas pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, maka diperlukan upaya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut didasarkan pada beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang No. 23 tahun 2013 Pasal 263 (2) dan Pasal 160.

Adapun salah satu tujuan diadakannya penyelarasan yakni menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan nasional. Dengan demikian, setelah melalui tahap ini dapat diketahui bahwa sasaran visi skala kabupaten/kota merupakan salah satu komponen yang perlu untuk dilakukan penyelarasan terhadap rencana pembangunan nasional dan provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, poin-poin sasaran visi Kabupaten Kulon Progo dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 turut serta diselaraskan dengan jumlah sasaran visi pada RPJP Nasional yang juga disesuaikan dengan karakteristik daerah. Secara lebih lanjut, sasaran visi Kabupaten/Kota selaras pula dengan Sasaran Visi Provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Dokumen Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan DI Yogyakarta.

Sebagai bentuk penyelarasan Sasaran Visi, Kabupaten Kulon Progo mengimplementasikan empat dari lima poin substansi Sasaran Visi Nasional dan Provinsi meliputi: 1) Peningkatan Pendapatan per Kapita setara Negara Maju; 2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; 3) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan 4) Intensitas Emisi GRK Menurun menuju *net zero emission* dengan *baseline* 2025 dan Sasaran 2045 yang disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan keadaan pada Kabupaten Kulon Progo.

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima unsur tersebut adalah mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*. Sasaran visi Indonesia Emas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran visi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Sasaran Visi Kabupaten Kulon Progo

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	PDRB per kapita (Rp juta)	41,91-66,64	110,01-134,74
	Kontribusi PDRB Industri (%)	10,56-11,01	12,00-12,45
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	Tingkat kemiskinan (%)	14,12-15,12	5,52-6,52
	Rasio gini (indeks)	0,357 - 0,394	0,36-0,38
	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	8,96	11,14
3	Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	76,00-76,23	84,01-85,51
4	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	69,75	71,63

4.3 Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi merupakan pernyataan umum mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi juga dapat dianggap sebagai strategi yang akan diambil oleh pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dalam konteks pembangunan secara umum, termasuk untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan. Dengan mempertimbangkan inti dari visi pembangunan jangka panjang, maka dirumuskan lima misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebagai berikut.

a. Misi-1 Mewujudkan Manusia Kulon Progo Berbudaya, Maju, dan Sejahtera

Misi ini mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo dalam aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan taraf hidup keluarga, kesetaraan gender serta inklusivitas dalam masyarakat yang layak, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, maju dan berbudaya melalui pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. Pada misi ini, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yakni terkait

kualitas gizi masyarakat terlihat dari peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan anak-anak, penyuluhan laktasi, dan layanan kesehatan ibu hamil.

Langkah-langkah ini berkontribusi pada pencegahan dan penanganan kurang gizi, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Secara umum, meningkatnya gizi masyarakat adalah indikator positif dalam pencapaian kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal masyarakat, memberikan dampak positif dalam hal produktivitas, kecerdasan, dan kualitas hidup secara umum.

Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan tercermin dalam pendekatan inovatif terhadap metode pengajaran, kurikulum yang relevan, dan peningkatan kualifikasi guru.

Dengan demikian, peserta didik dapat mengakses pendidikan yang tidak hanya informatif tetapi juga memotivasi dan mendukung pengembangan keterampilan kritis. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan adalah investasi berharga dalam pembangunan masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing, menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak mencerminkan pencapaian positif dalam pembangunan menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat melalui nilai IPM di Kabupaten Kulon Progo. Dengan meningkatkan nilai IPM, maka secara langsung juga meningkatkan kualitas masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan dan taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan hidup dengan kualitas hidup yang lebih tinggi secara keseluruhan.

Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

Upaya perlindungan sosial terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM. Upaya perlindungan sosial ini meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, perluasan jaminan ketenagakerjaan dan perlindungan kelompok rentan sosial ekonomi seperti penyandang disabilitas dan kaum marginal lainnya. Setiap anggota masyarakat perlu

ditingkatkan ketahanannya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat perlindungan dan pemberdayaan sosial yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki apapun situasi dan kondisinya. Hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat.

Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diiringi dengan peningkatan pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang mencerminkan dorongan kuat untuk memelihara, menghidupkan, dan menghargai warisan budaya suatu masyarakat. Inisiatif ini mencakup sejumlah upaya yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai, tradisi, seni, dan ekspresi kultural yang membentuk identitas suatu komunitas. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan menciptakan masyarakat yang kaya akan identitas dan keberagaman budaya. Hal ini tidak hanya menciptakan kebanggaan masyarakat terhadap akar budayanya, tetapi juga memastikan bahwa kearifan lokal dan tradisi diteruskan dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

Terwujudnya Kesenjangan Gender

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM di daerah yakni kualitas keluarga, kesetaraan gender dan akses penghidupan dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi semua unsur masyarakat tanpa terkecuali. Aspek pemberdayaan keluarga menuju keluarga yang utuh dan berkualitas menjadi salah satu kunci kesuksesan pembangunan.

Melalui keluarga yang sejahtera dan harmonis maka akan tercipta generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas yang nantinya bermanfaat sebagai aktor pembangunan selanjutnya. Aspek kesetaraan gender mempunyai kontribusi yang positif terhadap keberlanjutan pembangunan, dimana terdapat pemahaman peran dan fungsi yang baik antara pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian akan terjadi peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang sama baiknya antara pria dan wanita dalam menghadapi permasalahan hidup. Aspek ketiga yakni masyarakat yang inklusif yakni dengan melibatkan semua unsur masyarakat dalam proses pembangunan dan memberikan akses yang seluasnya bagi semua lapisan masyarakat dalam hal memperoleh hasil-hasil pembangunan, sehingga tiga aspek tersebut menjadi salah satu kunci keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan dalam hal peningkatan kualitas SDM di daerah.

b. Misi-2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi

Misi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses pembangunan. Pencapaian daya saing ekonomi akan menciptakan peluang ekonomi dan pekerjaan yang lebih luas, sedangkan pemerataan ekonomi akan memastikan bahwa semua masyarakat dapat memanfaatkan peluang tersebut. Dengan demikian, misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Dalam misi ini terdapat tiga sasaran pokok sebagai berikut.

Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah

Peningkatan produktivitas ekonomi berarti mengembangkan keunggulan kompetitif Kabupaten Kulon progo dalam lingkup ekonomi yang lebih luas. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas, inovasi, dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Produktivitas ekonomi daerah dapat ditingkatkan melalui investasi dalam infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, dukungan kepada industri-inovasi, dan peningkatan tata kelola bisnis yang baik. Pengadaan investasi yang direncanakan harus memasukkan unsur kunci seperti penataan ruang yang didukung dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini penting untuk mengakomodasi kepentingan dalam OSS demi perizinan.

Selain investasi, dorongan untuk menciptakan inovasi perlu dilakukan sebagai upaya adaptif dalam menghadapi pergeseran era perekonomian. Saat ini, era perekonomian telah berevolusi sejak ekonomi pertanian, industri, informasi, hingga ekonomi kreatif. Dengan demikian, strategi pengentasan masalah perlu menyesuaikan keadaan yang telah mengalami pergeseran. Misalnya, permasalahan ketimpangan pendapatan dapat dilakukan dengan memberdayakan UKM, koperasi, dan kemitraan antara perusahaan besar dan pihak lokal. Kemudian, pemberian insentif kepada pelaku usaha dapat dilakukan untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien dan meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya, potensi sumber daya lokal harus dimanfaatkan sebagai dorongan pertumbuhan sektor ekonomi, seperti kehadiran Bandara YIA, jalan tol, dana keistimewaan, jumlah penduduk usia produktif, dan modal sosial masyarakat.

Namun, investasi dalam sektor-sektor ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru yang menekankan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan

praktik bisnis yang ramah lingkungan. Dengan penerapan konsep tersebut, Kabupaten Kulon Progo dapat meningkatkan daya saing ekonomi dengan menciptakan peluang baru dalam sektor-sektor berkelanjutan.

Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah mengacu pada kemampuan Kabupaten Kulon Progo untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya dan sektor ekonomi yang dimilikinya secara efisien dan berkelanjutan. Meningkatkan kemandirian berarti mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal atau sektor ekonomi tertentu. Hal ini melibatkan diversifikasi ekonomi, pengembangan kapabilitas lokal, dan investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang mendukung perkembangan sektor ekonomi lokal.

Terjangkaunya Pemenuhan Kebutuhan Bermukim

Keterjangkauan masyarakat terhadap akses hunian yang layak dan berkelanjutan akan mendorong upaya penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui proses penyediaan dan pembangunan sarana prasarana permukiman warga masyarakat yang tertata dengan baik dan mudah dalam mengakses pusat-pusat perekonomian daerah maka akan mendukung proses tercapainya pemerataan ekonomi daerah.

Pembangunan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas bagi penghidupan masyarakat luas akan berkontribusi positif terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui keterjangkauan akses perekonomian yang merata. Menciptakan pemerataan ekonomi berarti memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi juga oleh sebagian besar penduduk di wilayah tersebut.

Pemerataan ekonomi mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan peluang ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, memastikan akses yang adil terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta mendukung sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan struktur ekonomi saat ini, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Kulon Progo. Sektor primer tersebut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan menjalar hingga ke sektor industri pengolahan serta jasa-jasa terkait. Skema ini perlu diperhatikan demi mendukung perkembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kulon Progo yang berbasis agroindustri dan agribisnis.

Peningkatan nilai tambah perlu diawali dengan menguatkan basis produksi, infrastruktur produksi, serta kualitas produk. Seluruh upaya tersebut perlu dilakukan untuk memanfaatkan potensi daerah berupa ketersediaan sumber daya alam terbarukan yang melimpah. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan perdesaan dapat terwujud hingga taraf pemerataan ekonomi yang disertai dengan kedaulatan pangan daerah.

c. Misi-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis

Misi ketiga menekankan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini meliputi perwujudan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif untuk memastikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Salah satu kunci dari pelayanan yang berkualitas adalah sistem birokrasi yang teratur dan efisien. Hal ini mencerminkan bagaimana kualitas pemerintah dalam mengatur tata kelola pemerintahan, sehingga reformasi birokrasi diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam misi ini terdapat beberapa sasaran pokok yang dicapai yaitu sebagai berikut.

Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Akuntabel

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi penting karena hal ini membentuk dasar pertanggungjawaban yang kuat kepada masyarakat. Dengan tingkat akuntabilitas yang lebih baik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana dan sumber daya yang mereka kelola digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik. Lebih dari itu, hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik serta transparansi yang lebih tinggi. sumber daya manusia di pemerintahan untuk meningkatkan peranan SDM dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang baik juga.

Aspek yang perlu diperhatikan juga dalam proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah kualitas akses komunikasi dan informasi masyarakat melalui digitalisasi, dengan lebih cepat, mudah, dan merata. Layanan komunikasi digital yang lebih berkualitas meningkatkan konektivitas antarindividu, kelompok, dan komunitas. Hal ini menciptakan jaringan informasi yang lebih luas, memungkinkan pertukaran ide, pengetahuan, dan kolaborasi antar berbagai pihak.

Selain itu, proses digitalisasi juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan, dan perdagangan dengan menyediakan platform digital untuk mengoptimalkan

proses-proses tersebut. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk terlibat dalam era informasi digital.

Di level pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, pemberdayaan desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemandirian desa secara menyeluruh, memperhatikan baik aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Salah satu langkah kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di desa adalah dengan memperkuat kapasitas serta kualitas aparaturnya yang dilakukan dengan kebijakan reformasi birokrasi sektor kalurahan.

Secara komprehensif, upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam memajukan pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan peningkatan kemampuan aparaturnya, pemerintahan desa dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan yang ada di tingkat desa secara lebih baik.

Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Unsur stabilitas ekonomi makro daerah yang lain adalah kemandirian fiskal daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah serta menjaga kestabilan keuangan daerah. Selain itu, hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan upaya pembangunan daerah.

Untuk mencapai kemandirian fiskal daerah, diperlukan upaya efektif dalam mengelola keuangan daerah. Ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen keuangan daerah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan pendapatan asli daerah, yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada. Hal ini juga meliputi meningkatkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Aspek yang lebih penting lagi adalah peningkatan kuantitas dan kualitas inovasi daerah dalam rangka penguatan dan percepatan ekonomi makro daerah. Komitmen dalam peningkatan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi memegang peranan penting dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah dapat berdampak positif dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks, seperti kemiskinan, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi juga penting untuk meningkatkan daya saing daerah karena mewujudkan ide-ide yang memberdayakan keunggulan lokal.

Oleh karena itu, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan inovasi dapat mendukung fokus pendekatan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat

diwujudkan melalui pemberdayaan sumber daya manusia serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas inovasi daerah.

Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman

Lingkungan yang aman dan nyaman menjadi fondasi bagi partisipasi yang aktif dalam pembangunan masyarakat. Keamanan fisik, di mana individu merasa terlindungi dari ancaman kejahatan dan ketidakamanan. Di lain sisi kenyamanan juga diwujudkan di lingkungan bermasyarakat. Kenyamanan mencakup layanan publik yang memadai, infrastruktur yang terjangkau, dan akses mudah ke pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Dengan menciptakan kondisi yang adil, inklusif, dan demokratis bagi semua elemen masyarakat, lingkungan yang aman dan nyaman akan memperkuat partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

d. Misi-4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Ketangguhan masyarakat terhadap tekanan dari berbagai aspek perlu untuk ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai hal tersebut yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta mewujudkan masyarakat yang adaptif terhadap bencana melalui pelestarian lingkungan hidup terutama dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Infrastruktur dasar yang optimal dan kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi menjadi upaya untuk memastikan akses masyarakat terhadap pembangunan dan mewujudkan pemerataan. Akses terhadap infrastruktur dan pembangunan sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas dapat membantu meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, juga sangat penting untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketangguhan daerah terhadap bencana. Kedua hal tersebut merupakan kunci dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan. Keseimbangan ekosistem merupakan dukungan bagi sumber daya alam seperti kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Melalui perlindungan dan pemeliharaan ekosistem, pembangunan dapat merespon kebutuhan manusia tanpa mengorbankan kemampuan lingkungan.

Di sisi lain, tangguh bencana juga merupakan isu yang strategis untuk membangun masyarakat yang kuat dan tahan terhadap ancaman alam. Bencana alam dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan mengancam keselamatan manusia, sehingga perencanaan

pembangunan dengan melibatkan ketahanan terhadap bencana menjadi sangat penting. Infrastruktur yang tahan bencana, dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana dapat meminimalisir risiko yang timbul akibat terjadinya suatu bencana. Kedua hal tersebut penting untuk saling terintegrasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah sasaran pokok yang masuk dalam misi ke-4.

Terwujudnya Kondisi Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Aspek utama yang perlu menjadi fokus dalam misi ini yakni kualitas lingkungan hidup. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup mencerminkan perubahan positif yang terjadi dalam upaya menjaga dan memperbaiki kondisi ekosistem serta keberlanjutan alam sekitar.

Melalui komitmen yang kuat terhadap praktik berkelanjutan, terlihat peningkatan dalam pengelolaan sumber daya alam, mengurangi pencemaran, dan memulihkan ekosistem yang terdampak. Langkah-langkah konkret, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan dan perubahan dalam pola pikir masyarakat terhadap lingkungan, turut berkontribusi pada pencapaian ini.

Dengan adanya regulasi yang ketat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, terbentuklah fondasi yang kokoh untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap berkelanjutan. Perubahan positif ini mencakup pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam, peningkatan dalam kualitas udara dan air, serta keberlanjutan dalam pola hidup yang mendukung kehidupan yang seimbang antara manusia dan alam. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga sebuah komitmen berkelanjutan untuk melindungi bumi bagi generasi mendatang.

Infrastruktur dasar yang berkualitas bermakna sarana dan prasarana konektivitas intra-regional yang baik, berarti terdapat keterhubungan yang efisien dan lancar di dalam suatu wilayah. Hal ini dapat mempercepat pergerakan orang, barang, dan informasi, menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sementara itu, konektivitas inter-regional menunjukkan adanya hubungan yang solid antara wilayah-wilayah yang berbeda. Ini dapat merangsang pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan peluang ekonomi antarwilayah, menciptakan sinergi dan saling mendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Semakin kuatnya konektivitas intra dan inter regional menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jaringan dan hubungan antar wilayah, baik di dalam suatu wilayah maupun antara wilayah-wilayah berbeda. Ini berarti adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan sarana transportasi, komunikasi, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan wilayah.

Terwujudnya Daerah yang Berketahanan dan Berdaulat Pangan

Aspek keberlanjutan pembangunan juga berkaitan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ketahanan dan kedaulatan pangan diciptakan dari produktivitas lahan pertanian yang masih terjaga dan terlindungi luasan maupun peruntukannya.

Oleh karena itu, peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dapat melibatkan perencanaan tata ruang yang lebih strategis, di mana setiap zona atau area diidentifikasi dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam hal ini guna menjaga dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan lahan yang sesuai dengan peruntukannya, seperti zona perumahan, zona komersial, atau zona hijau, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan perkembangan ekonomi.

Zona pertanian berkelanjutan juga berkaitan dengan akses ketahanan serta tata kelola air yang didukung dari pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi. Sarana prasarana sumber-sumber air baik untuk rumah tangga maupun pertanian diharapkan dapat terkelola dengan baik sebagai bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, kesesuaian pemanfaatan ruang juga mencakup integrasi elemen-elemen seperti transportasi, infrastruktur, dan lingkungan sosial. Peningkatan ini dapat diukur dengan tingkat optimalisasi pemanfaatan lahan, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kesesuaian pemanfaatan ruang juga dilakukan untuk menyesuaikan karakteristik lahan dengan peruntukan baik berdasarkan topografinya maupun karakteristik lainnya.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang mencerminkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan area atau lahan yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan penggunaan ruang telah diatur dan dilaksanakan dengan lebih baik, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah.

Dinamika pemanfaatan ruang yang baik di dalam suatu wilayah dapat ditinjau melalui kesesuaian pemanfaatan ruangnya. Di sisi lain, pemanfaatan ruang tersebut turut serta perlu untuk dioptimalisasi penataan ruangnya sehingga dapat berlangsung menjadi jauh lebih efisien dan efektif. Salah satu bentuk optimalisasi penataan ruang dapat dilakukan melalui integrasi aspek pelayanan publik.

Hal tersebut dapat tercermin melalui integrasi lokasi kantor pemerintahan yang saling berdekatan dan saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya di dalam suatu kompleks kawasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan terintegrasinya kantor urusan pemerintahan tersebut, maka akan terbentuk suatu pusat pemerintahan di suatu wilayah yang

terdiri atas keberadaan kantor kepala daerah beserta OPD lainnya. Di sisi lain, integrasi pusat pemerintahan di dalam satu tempat yang sama dinilai mampu mempermudah urusan birokrasi antar OPD atau kantor pemerintahan sehingga dapat berlangsung semakin efektif dan efisien.

Konsep optimalisasi penataan ruang dalam skema integrasi pusat pemerintahan ini hendak diimplementasikan oleh Kabupaten Kulon Progo. Rencana pengintegrasian pusat pemerintahan turut serta diwarnai dengan adanya rencana pemindahan pusat kota yang sebelumnya terletak di Kota Wates menuju Kota Margosari. Hal tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, integrasi pusat pemerintahan dalam satu kawasan lokasi yang sama dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja perangkat daerah karena saling terintegrasi dan saling terkoneksi antara satu kantor dinas dengan kantor yang lainnya.

Rencana pemindahan dan pengintegrasian pusat pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan selama jangka waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.

Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Meningkatnya ketahanan masyarakat melalui mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat merupakan cerminan dari perubahan positif dalam cara suatu komunitas menghadapi risiko bencana. Dalam perjalanan menuju ketahanan yang lebih tinggi, komunitas tersebut telah mengadopsi pendekatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam segala aspek mitigasi dan penanganan bencana. Kesadaran akan risiko dan edukasi mengenai tindakan preventif telah meningkat secara signifikan di kalangan penduduk. Infrastruktur yang tahan bencana dan sistem peringatan dini yang efektif telah dibangun, memberikan komunitas waktu yang cukup untuk merespons dengan cepat saat bencana terjadi.

Pentingnya partisipasi komunitas dalam perencanaan bencana juga menjadi fokus utama, dengan penduduk lokal terlibat dalam mengidentifikasi risiko, menentukan lokasi aman, dan merancang rencana tanggap darurat.

Pelatihan dan simulasi reguler memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat, mempersiapkan mereka untuk menghadapi situasi darurat dengan tenang dan efektif. Jaringan komunitas yang kuat dan kemitraan lokal yang erat menjadi dasar bagi kerja sama dalam memperkuat daya tahan bersama.

Secara umum, meningkatnya ketahanan masyarakat ini tidak hanya mencerminkan transformasi struktural, tetapi juga perubahan dalam budaya dan sikap masyarakat terhadap risiko bencana. Ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul di masa depan.

Tabel 4. 3 Persandingan Misi RPJPD Kabupaten Kulon Progo dengan Misi RPJPN dan Misi RPJPD DIY Tahun 2025-2045

Misi Rancangan Akhir RPJPN		Misi Rancangan Akhir RPJPD DIY		Misi RPJPD Kabupaten Kulon Progo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan transformasi sosial 2. Mewujudkan transformasi ekonomi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia 5. Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi 6. Pembangunan kewilayahan 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua dan Kesejahteraan Sosial 2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi yang menitik beratkan pada Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan IPTEK dan Produktivitas 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi Tata Kelola 4. Penguatan Keamanan DIY yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Kondisi Ekonomi Makro yang Stabil 5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan serta Pembangunan Kebudayaan Lestari Berkelanjutan yang Tercermin dalam Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan 7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 8. Melaksanakan Kestinambungan Pembangunan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera 2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah Serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana

Dari tabel di atas terlihat bahwa misi RPJPD Kulon Progo telah selaras dengan misi RPJPN sehingga misi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo menunjang misi nasional di tahun 2025-2045.

4.4 Upaya Transformatif

Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih sejahtera dan maju merupakan sebuah amanah besar yang diberikan dan diemban bersama kepada seluruh *stakeholder* maupun masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia baik yang berada pada skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal tersebut dapat terjadi karena tanpa adanya sinergitas dan penyelarasan maka upaya perwujudan tersebut tidak akan dapat terjadi dan hanya akan menjadi angan-angan semata.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, berbagai upaya pembangunan wilayah dilakukan secara progresif dan komprehensif termasuk bagi wilayah administratif Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota yang terletak di DIY. Tentu, sebagai wilayah administratif, Kabupaten Kulon Progo turut serta mengemban amanah dalam perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 salah satunya dalam aspek ekonomi. Menindaklanjuti hal tersebut, salah satu indikator yang digunakan adalah indikator pertumbuhan ekonomi wilayah.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan perekonomian wilayah. Berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk Kulon Progo bergerak sangat lambat.

Permasalahan ini dibuktikan dengan kondisi jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo yang dinilai paling kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk di empat kabupaten/kota lain yang termasuk ke dalam wilayah DIY seperti Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunungkidul. Kondisi tersebut tentunya sangat kontradiktif dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kulon Progo memiliki luas yang dinobatkan sebagai wilayah administratif terluas nomor dua di DIY.

Dengan implikasinya terhadap kepadatan penduduk yang masih rendah, semestinya dapat menjadi potensi dalam menampung lebih banyak jumlah penduduk untuk tinggal di dalamnya terlebih berkaitan dengan upaya peningkatan persentase pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam rangka menarik penduduk dan investasi masuk, dibutuhkan adanya *triggers* ekonomi sebagai katalisator daya tarik wilayah bagi penduduk baru dengan harapan selain menggerakkan ekonomi secara makro juga dapat menjaga perputaran ekonomi intrawilayah secara maksimal dan optimal. *Trigger* ekonomi sebagaimana dimaksudkan menjadi sebuah upaya transformatif Kabupaten Kulon Progo dalam Rencana Jangka Panjang Daerah 2025-2045 yang akan diimplementasikan selama 20 tahun mendatang.

Perwujudan upaya transformatif tersebut dimanifestasikan melalui konseptual Klasterisasi Wilayah per kapanewon yang didasarkan pada potensi lokal wilayah. Dalam hal ini, terdapat tiga klasterisasi wilayah yang direncanakan meliputi: 1) Kawasan Aerotropolis dan Agribisnis meliputi Kapanewon Pengasih, Temon, Wates, dan Panjatan; 2) Kawasan Ekonomi Kreatif dan Industri serta Agroproduksi dan Agroindustri meliputi Kapanewon Kapanewon Nanggulan, Sentolo, Lendah, dan Galur dan 3) Kawasan Pariwisata Berkelanjutan dan Agrowisata meliputi Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap.

Sebagaimana dimaksudkan sebelumnya, pengembangan masing-masing klaster didasarkan pada potensi dan keunggulan wilayah yang dimiliki berdasarkan kesamaan karakteristik. Meskipun demikian, wilayah-wilayah yang termasuk pada Kawasan Pariwisata Berkelanjutan dan Agrowisata seperti Kokap dan Samigaluh tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan ekonomi dan budi daya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa zona pada kawasan ini merupakan zona penyangga dan zona lindung sehingga peruntukannya lebih ditekankan pada fungsi konservatif.

Trigger ekonomi pertama yakni Kawasan Aerotropolis yang secara definitif dapat diartikan sebagai pendekatan kawasan yang memandang bandara sebagai pemberi pengaruh *spread effect* serta *stimulant generator* pertumbuhan ekonomi masyarakat pada daerah di sekitarnya. Kawasan Aerotropolis memiliki jangkauan radius 30 kilometer dari Bandara YIA. Dalam konteks ini, Kawasan Aerotropolis Kulon Progo sebagaimana dimaksudkan adalah merupakan Kawasan Aerotropolis Bandara YIA yang telah beroperasi sejak 2020 dan merupakan potensi besar adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi Kabupaten Kulon Progo dan wilayah di sekitarnya. Di mana bandara berperan sebagai gerbang perekonomian Kulon Progo yang didukung dengan berbagai fasilitas pendukung kawasan lainnya.

Trigger ekonomi ke dua yakni Kawasan Industri. Di mana bahwa melalui Perda Kabupaten Kulon Progo No. 7 tahun 2022 tentang *Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan industri unggulan pada bidang pangan, furniture, tekstil, obat tradisional, batik, logam, barang anyaman, dan elektronika. Kabupaten Kulon Progo memiliki bidang industri kecil-menengah (IKM) yang cukup beragam, sehingga masih banyak potensi yang dapat dikembangkan.

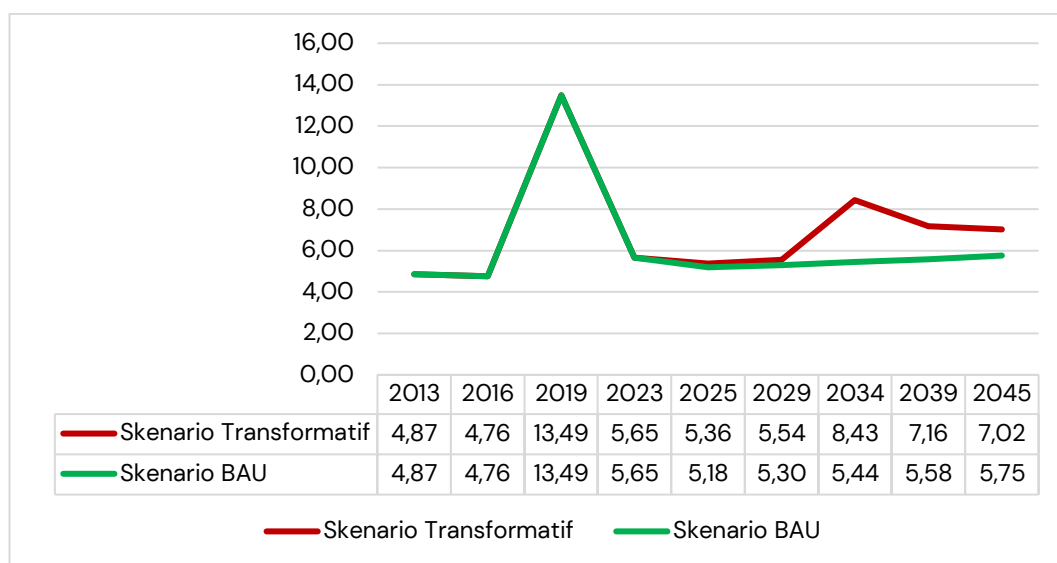
Oleh karena itu, diperlukan implementasi beberapa strategi peningkatan jumlah produksi, investasi, dan serapan tenaga kerja industri kecil-menengah Kulon Progo seperti diversifikasi produk, penguatan kelembagaan, perluasan jaringan kemitraan dan konektivitas antardaerah, serta penarikan minat investasi melalui promosi daerah dan sistem informasi terintegrasi satu pintu. Dengan cara tersebut, diharapkan operasionalitas *trigger* ekonomi berupa Kawasan Industri di Kabupaten Kulon Progo dapat beroperasi secara optimal.

Trigger ekonomi terakhir yakni berkaitan dengan Kawasan Pendidikan. Hal tersebut didasarkan karena pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan dan tentunya tidak akan terpisahkan dari dinamika kehidupan warga masyarakat. Urgensi pendidikan dan kebutuhan akan pendidikan menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan wilayah karena keberadaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dinilai mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk kemudian tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Adanya kawasan pendidikan juga dapat memberikan *multiplier effect*

terhadap perekonomian lokal di Kabupaten Kulon Progo, terutama pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Berbagai *trigger* ekonomi yang disebutkan dan telah diuraikan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan demografi dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo melalui pelaksanaan atau implementasi skenario transformatif. Skenario ini merupakan skenario yang dimaksudkan untuk mendorong atau mempercepat proses pengembangan wilayah secara signifikan pada periode-periode yang ditetapkan.

Dalam aktualisasinya bagi Kulon Progo, skenario transformatif dimaksudkan untuk menggapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7-7,5 persen pada akhir periode RPJPD Tahun 2045 melalui berbagai *trigger* ekonomi. Perbandingan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan skenario transformatif dan BAU secara lebih lanjut disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 4. 2 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo (%)

Implementasi skenario transformatif pada dasarnya perlu diikuti dengan penguatan sistem tata kelola agar risiko yang dapat terjadi dapat diminimalisasi. Sistem tata kelola pada dasarnya harus berfokus pada reformasi tatanan birokrasi terkait adaptasi sistem tata kelola pemerintahan. Hal pertama yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kulon Progo adalah secara proaktif mendorong produktivitas lapangan usaha, khususnya pada sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan.

Ketiga sektor tersebut perlu diberikan perhatian khusus, salah satunya dengan cara pemberian insentif kepada pihak-pihak yang menggeluti bidang terkait. Dengan adanya skema tersebut, diharapkan Kulon Progo dapat menjadi pusat pelayanan terpadu (*service hub*) wilayah Jawa bagian tengah-selatan yang mampu memberikan pelayanan terhadap multi-

wilayah. Kondisi ini turut didukung dengan eksistensi sarana dan sarana transportasi yang memadai, seperti Bandara YIA, serta jalur tol dan kereta api.

Guna memaksimalkan posisi Kulon Progo sebagai *service hub*, perlu adanya penekanan pada beberapa implementasi RPJPD periode pertama, yakni penguatan fondasi pembangunan daerah. Konsentrasi penerapan skema transformatif pada periode pertama RPJPD dapat meliputi optimalisasi pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi perkotaan.

Selain itu, fokus peningkatan produktivitas ketiga sektor lapangan usaha sebelumnya dapat didukung dengan reformasi birokrasi terhadap perizinan untuk penggunaan teknologi yang efektif dan efisien. Hal ini penting untuk dilakukan agar pelayanan dapat dilakukan dengan prinsip pelayanan satu pintu (*one stop service*).

Kerja sama setiap OPD sangat penting untuk dilakukan agar integrasi penyediaan dan akses data dapat terwujud. Upaya integrasi ini turut berperan dalam mengontrol pertambahan jumlah penduduk yang bermigrasi ke Kulon Progo agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Tidak hanya itu, kontrol terhadap jumlah penduduk harus dilakukan bersamaan dengan penegasan partisi antara kawasan sasaran investasi dan kawasan yang dilindungi.

Dengan demikian, tawaran investasi akan bersifat akuntabel dan perkembangan yang terjadi sejalan dengan minimalisasi risiko dampak negatif. Harapannya, Kulon Progo sebagai *service hub* akan menjadi titik akhir capaian dari skema transformatif, sehingga pelayanan masif multi-akses yang ditargetkan dapat terwujud dengan garansi kenyamanan dan keamanan bagi seluruh penduduk.

Menindaklanjuti dampak yang dapat mengintai di masa mendatang tersebut khususnya pada urusan pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan beberapa solusi penanggulangan penurunan daya dukung pertanian pada skenario transformatif. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian utamanya pada kawasan agropolitan Kulon Progo sesuai dengan RTRW 2012-2032 meliputi: 1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur pertanian (melalui insentif) seperti traktor roda dua dan empat, dan mekanisasi lainnya; 2) Diversifikasi pertanian dengan memperluas komoditas unggulan melalui pertanian terpadu dapat dilakukan sebagai cara pemenuhan kebutuhan pangan yang tinggi; 3) Pengembangan kelembagaan dan sistem pelayanan; serta 4) Kerja sama antardaerah dalam pemenuhan komoditas pangan dengan daerah di sekitar Kabupaten Kulon Progo seperti Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Bantul.

Melalui berbagai upaya tersebut maka diharapkan Daya Dukung Wilayah Pertanian Kabupaten Kulon Progo dapat tetap terjaga, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat tetap terus terjamin dan terpenuhi meskipun dalam pelaksanaan atau implementasi skenario

transformatif sekalipun. Sebagai konklusi dari berbagai uraian mengenai upaya transformatif tersebut, maka dapat diketahui terdapat empat prinsip utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo meliputi: 1) Prinsip *Growth*; 2) Prinsip *Equity*; 3) Prinsip *Welfare*; dan 4) Prinsip *Sustainability*. Keempat prinsip tersebut dapat dijalankan dengan melaksanakan strategi-strategi transformatif.

Strategi transformatif tersebut juga diperlukan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kulon Progo dengan berbagai upayanya baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kestabilan kondisi perekonomian, tata kelola birokrasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan kondisi lingkungan yang mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Strategi transformatif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Strategi Transformatif (*Game Changer*)

No	Strategi Transformatif
Transformasi Sumber Daya Manusia	
1	Pengembangan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan bagi masyarakat
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> bagi penduduk usia produktif
3	Pengembangan keterampilan masyarakat melalui sosialisasi <i>soft skill</i> dan penyuluhan upaya pemberdayaan masyarakat lokal
4	Pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lingkup masyarakat secara merata dan berkeadilan
5	Pemenuhan pelayanan terhadap ketersediaan fasilitas pendidikan berkualitas dan bermutu tinggi
6	Peningkatan kapasitas berbahasa bagi masyarakat khususnya usia produktif
7	Pemerataan distribusi tenaga pengajar berkualitas di seluruh lingkup wilayah Kulon Progo
8	Penjaminan kesejahteraan bagi tenaga pengajar
9	Peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi
10	Pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan tinggi secara berkeadilan
11	Penguatan upaya pelestarian budaya lokal di lingkup masyarakat
12	Peningkatan akses masyarakat terhadap buku bacaan dan literasi-literasi terkait.
13	Pemenuhan aksesibilitas dan kebutuhan pelayanan dasar di sekitar unit pendidikan tinggi
Transformasi Ekonomi	
1	Penerapan dan implementasi konsep industri 4.0 pada sektor industri unggulan dan potensial
2	Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasionalitas industri melalui adopsi teknologi digital
3	Penerapan sistem otomasi sektor industri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri

No	Strategi Transformatif
4	Penerapan praktik industri hijau dalam operasionalitas pabrik guna mengurangi emisi karbon
5	Pengembangan produk hasil industri ramah lingkungan dan adopsi prinsip ekonomi sirkular
6	Peningkatan dan pengembangan inovasi produk sektor industri pengolahan
7	Optimalisasi proses produksi dan peningkatan kualitas produk
8	Pengadaan infrastruktur pendukung sektor industri seperti jalan dan aksesibilitas transportasi lain
9	Perluasan akses pasar dan dagang sektor industri baik dalam skala dalam negeri maupun mancanegara
10	Percepatan dan pemenuhan akses transportasi di sekitar kawasan aerotropolis
11	Optimalisasi aksesibilitas bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui pengadaan jalur transportasi Tol. Bedah Menoreh, dan JJLS
12	Penerapan konsep Transit Oriented Development dalam rangka mewujudkan Kulon Progo sebagai Hub transportasi di Pulau Jawa bagian Tengah-Selatan
13	Optimalisasi operasionalitas moda transportasi seperti bandara dan stasiun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah
14	Optimalisasi sektor industri pengolahan dan akomodasi makan minum sebagai sektor ekonomi unggulan dan potensial bagi Kulon Progo
15	Penyediaan Kawasan Permukiman Pekerja Vertikal bagi Pekerja di sekitar Kawasan Aerotropolis
16	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi pekerja di sektor industri dan konstruksi di Kulon Progo
Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
1	Optimalisasi dan percepatan upaya kejelasan regulasi terkait investasi di Kulon Progo
2	Penyederhanaan dan pemudahan perizinan investasi melalui penerapan sistem perizinan satu pintu
3	Penerapan digitalisasi dan penggunaan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien dalam proses pelayanan perizinan investasi
4	Peningkatan transparansi dan keamanan investasi
5	Penyederhanaan dan perampingan regulasi investasi untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan ketidakjelasan investasi antarpihak
6	Penyediaan alur dan panduan investasi yang jelas, tepat dalam rangka mewujudkan proses investasi yang transparan, aman, dan tepat guna
7	Percepatan penerapan mekanisme pengawasan proses investasi
8	Pemberian insentif khusus bagi investor dengan pemenuhan kriteria tertentu (pendorong upaya transformatif Kulon Progo)
9	Perluasan jangkauan investasi dan membangun kemitraan strategis serta asosiasi bisnis dengan

No	Strategi Transformatif
	investor
10	Peningkatan kualitas infrastruktur khususnya bidang transportasi, telekomunikasi, dan utilitas dasar dalam rangka menarik minat investasi
11	Peningkatan citra positif wilayah dalam rangka menarik minat investor
Transformasi Ekologi	
1	Penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru
2	Peningkatan dan penjaminan upaya perlindungan terhadap kawasan lindung Kulon Progo sesuai dengan deliniasi wilayah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah
3	Percepatan upaya deliniasi dan revaluasi zonasi lahan sawah abadi baik LSD dan/atau LP2B dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan wilayah
4	Penerapan upaya restorasi ekosistem terdegradasi dalam rangka pemulihan fungsi ekologis wilayah
5	Penerapan dan penggunaan energi baru terbarukan serta ramah lingkungan
6	Pendorongan upaya peningkatan efisiensi energi
7	Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam melakukan penggunaan terhadap sumber daya alam wilayah
8	Penetapan dan penjaminan hukum terhadap kebijakan atau regulasi terhadap penjaan lingkungan
9	Pengembangan strategi dan upaya adaptasi dampak perubahan iklim
10	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pengembangan kota

BAB V

Arah Kebijakan & Sasaran Pokok



Arah Kebijakan

	2025-2029: Penguatan fondasi pembangunan daerah	2030-2034: Percepatan pembangunan daerah	2035-2040: Ekspansi pembangunan daerah	2039-2045: Perwujudan Kulon Progo SEMARAK
Misi 1	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penguatan karakter lokal untuk membentuk manusia yang maju dan berbudaya	Percepatan pembangunan manusia yang inklusif untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berbudaya	Penguatan kualitas SDM berbudaya yang produktif dan inovatif serta memastikan keberlanjutan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Perwujudan manusia Kulon Progo yang berbudaya, maju, dan sejahtera
Misi 2	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan kapabilitas tenaga kerja lokal	Penguatan sektor unggulan melalui hilirisasi SDA dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikan sektor-sektor ekonomi dan memperkuat kemitraan untuk memperluas peluang kerja dan akses pasar	Perwujudan ekonomi mandiri, adil, dan berdaya saing
Misi 3	Penguatan infrastruktur pelayanan publik, pemantapan tugas pokok & fungsi seluruh lembaga pemerintahan serta pemberdayaan ASN untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintahan	Peningkatan kualitas manajemen pembangunan daerah serta penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang inovatif	Integrasi dan pemantapan tata kelola pemerintahan dengan infrastruktur teknologi informasi untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik	Perwujudan pelayanan publik yang adaptif secara menyeluruh dan peningkatan kemandirian fiskal daerah
Misi 4	Pemenuhan kebutuhan sarpras dasar sebagai modal dasar pembangunan serta optimalisasi SDA	Peningkatan konektivitas intra & inter regional untuk mendorong pembangunan inklusif serta peningkatan ketangguhan daerah melalui optimalisasi daya dukung & daya tampung lingkungan hidup	Memperluas konektivitas antar daerah dalam memperkuat upaya pembangunan wilayah & pemantapan ketangguhan daerah & kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana serta pengendalian SDA	Perwujudan ruang yang aman & nyaman serta pembanunan yang berkelanjutan serta Kulon Progo yang tangguh dan adaptif terhadap bencana serta krisis iklim

Sasaran Pokok

Misi 1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Meningkatnya pengembangan & pelestarian kebudayaan	Terwujudnya Kesetaraan Gender
Misi 2	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah	Terjangkaunya Pemenuhan Kebutuhan Bermukim		
Misi 3	Meningkatnya Regulasi dan Tata Kelola yang Akuntabel	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman		
Misi 4	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Terwujudnya Daerah yang Berketahanan dan Berdaulat Pangan	Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk periode 20 tahun tercermin dalam arah kebijakan dan sasaran pokok. Sasaran pokok yang ditetapkan untuk periode 20 tahun kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan setiap lima tahun, serta disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam proses perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok juga akan merujuk pada RPJP Nasional 2025-2045, RPJPD DIY Tahun 2025-2045, dan evaluasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2005-2025.

Arah kebijakan menjadi kerangka kerja pembangunan setiap lima tahun untuk mendukung pencapaian visi daerah. Secara umum, arah kebijakan Kabupaten Kulon Progo selama 20 tahun ke depan dibagi menjadi empat periode: 1) 2025–2029; 2) 2030–2034; 3) 2035–2039; dan 4) 2040–2045. Perumusan arah kebijakan yang tepat sangat penting karena menjadi landasan yang lebih terperinci untuk mencapai sasaran pokok sesuai visi yang telah ditetapkan oleh daerah. Arah kebijakan berperan signifikan dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan periode yang ditentukan.

Arah kebijakan ini akan memperhitungkan tahapan implementasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, yang terdiri dari sebagai berikut.

- Periode 2025-2029: Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah
- Periode 2030-2034: Percepatan Pembangunan Daerah
- Periode 2035-2039: Ekspansi Pembangunan Daerah
- Periode 2040-2045: Perwujudan Kulon Progo Sejahtera, Maju, Berbudaya, Mandiri, dan Berkelanjutan.

Tahapan arah kebijakan akan dikelompokkan menurut misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan sasaran inti telah dirumuskan dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, dari ekonomi hingga aspek sosial dan lingkungan. Arah kebijakan ini menjadi pedoman konkret yang mendukung serta mengarahkan kebijakan dan program pembangunan yang akan direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah daerah setiap periode. Penyusunan arah kebijakan juga melibatkan identifikasi tantangan dan potensi yang mungkin muncul dalam setiap periode lima tahunan.

Pada periode satu (2025-2029), arah kebijakan akan berfokus dalam penguatan fondasi pembangunan daerah. Hal ini meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari Kabupaten Kulon Progo. Ketika kondisi sumber daya manusia yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi lingkungan dalam kondisi baik

kemudian dengan dukungan kualitas pemerintahan yang mumpuni maka dapat menjadi penggerak pembangunan daerah di periode selanjutnya yang akan masuk menuju percepatan pembangunan daerah.

Pada periode dua (2030-2034) arah kebijakan mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu peningkatan daya saing Kabupaten Kulon Progo yang meliputi kondisi masyarakat dan ekonomi yang selalu berkembang.

Pada periode tiga (2035-2039) meliputi ekspansi pembangunan daerah yang meliputi meningkatkan keunggulan Kabupaten Kulon Progo dari seluruh aspek dan mewujudkan kestabilan kualitas pembangunan yang telah diwujudkan di periode sebelumnya.

Kemudian pada periode terakhir (2040-2045) akan terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan. Berikut adalah penjabaran arah kebijakan sesuai dengan misi pembangunan daerah.

Misi-1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo Berbudaya, Maju, dan Sejahtera



Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera

Pada periode (2025-2029) arah kebijakan Kabupaten Kulon Progo fokus pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penguatan karakter lokal untuk membentuk manusia yang maju dan berbudaya. Memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai sarana dalam

penguatan fondasi bagi tahapan-tahapan pembangunan daerah yang hendak dilakukan pada periode selanjutnya.

Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada penyediaan layanan pendidikan untuk memberikan akses dan mutu pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial untuk melindungi warga dari risiko sosial dan ekonomi.

Beberapa bentuk implementasi arah kebijakan dalam misi ini meliputi Penguatan budaya hidup sehat secara promotif-preventif, peningkatan penyediaan fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan upaya preventif stunting, peningkatan penyediaan fasilitas sarana-prasarana pendidikan, pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar, menengah, penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun, penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan berkeadilan, penumbuhan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, penyelenggaraan upaya *upskilling* dan *reskilling* dalam peningkatan kualitas SDM usia produktif, pemerataan dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan, percepatan pembangunan dan upaya penurunan kemiskinan, serta pemberian hak perlindungan sosial secara berkeadilan.

Dalam upaya penguatan basis data kebudayaan, maka diberlakukan upaya penguatan sistem pendataan kebudayaan sehingga penyediaan atau akses terhadap informasi kebudayaan semakin baik. Selain itu, ada upaya untuk memperkuat karakter lokal, yang mencakup nilai-nilai budaya dan identitas khas daerah, dengan tujuan membentuk manusia yang tidak hanya maju dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga mempertahankan kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal.

Konsep kebudayaan yang digunakan dalam hal ini berpedoman pada Perda DIY No. 3 tahun 2017 tentang *Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan*. Di sisi lain, terdapat pula pedoman berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan*. Mengacu pada pedoman tersebut, upaya pemajuan kebudayaan dilakukan dengan langkah yang strategis meliputi upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan yang ditujukan dalam upaya perwujudan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai acuan umum secara strategis, arah kebijakan menuju masyarakat yang berbudaya juga perlu mengacu pada Pergub DIY No. 131 tahun 2021 tentang *Grand Design Keistimewaan*. Langkah pengembalian, rehabilitasi, penguatan, dan pengembangan nilai-nilai keistimewaan budaya perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan komprehensif yang berasaskan roh kebudayaan.

Menindaklanjuti upaya tersebut, maka objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Hal tersebut juga dapat dikemas dengan mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis budaya, seperti industri kreatif dan pariwisata budaya.

Dengan demikian, pendekatan ini mengarah pada pembentukan individu yang berkembang secara holistik, tidak hanya dari segi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam hal nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Menindaklanjuti hal tersebut, terdapat beberapa bentuk implementasi arah kebijakan Periode pertama meliputi penguatan sistem pendataan kebudayaan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal, serta penguatan upaya pelestarian budaya lokal.

Pada periode kedua (2030-2034) fokus pada percepatan pembangunan manusia yang inklusif bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses dan partisipasi dalam proses pembangunan, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal.

Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, yang tidak hanya memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang kuat. Dengan menciptakan pembangunan manusia yang inklusif, diharapkan setiap individu dapat mengembangkan potensinya tanpa hambatan, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati hasil pembangunan.

Kualitas SDM dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek nilai-nilai budaya, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, percepatan pembangunan manusia yang inklusif bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki kedalaman budaya dan kualitas karakter yang tinggi.

Selain itu, dalam periode ini sebagai salah satu bentuk percepatan pembangunan maka dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan-pengembangan yang diperlukan dengan tujuan mewujudkan percepatan pembangunan sebagai persiapan dalam melaksanakan arah kebijakan pada periode berikutnya.

Terdapat beberapa bentuk implementasi arah kebijakan dalam periode ini meliputi pemerataan dan peningkatan kualitas terhadap akses pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga medis, percepatan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang berkualitas serta penjaminan aksesibilitas, pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, penguatan pemenuhan

kebutuhan guru serta tenaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan dan penguatan akses pendidikan tinggi, penyelenggaraan *upskilling* dan *reskilling*, percepatan penurunan kemiskinan dan penjaminan kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan pusat kebudayaan, percepatan dan penguatan kolaborasi kesenian dengan komunitas budaya dan pelaku seni, serta penyelenggaraan dan percepatan integrasi kurikulum pendidikan formal dengan budaya lokal.

Pada periode ketiga (2035-2039) fokus pada Penguatan kualitas SDM berbudaya mencakup upaya untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan inovasi individu dalam masyarakat sebagai bentuk dari ekspansi atau perluasan pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah menciptakan SDM yang tidak hanya memiliki keahlian yang tinggi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan, menjadi produktif, dan memiliki kemampuan inovatif.

Aspek berbudaya menekankan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari perkembangan SDM. Selain itu, upaya ini juga diarahkan pada memastikan keberlanjutan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Artinya, tidak hanya ada peningkatan kualitas individu tertentu, tetapi juga diperhatikan aspek distribusi hasil pembangunan untuk memastikan bahwa manfaatnya merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kualitas SDM berbudaya yang produktif dan inovatif diintegrasikan dengan upaya pemerataan kesejahteraan, menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Bentuk-bentuk rinci dari arah kebijakan pada periode ini meliputi pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, perluasan promosi PHBS di masyarakat, pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas, pemerataan dan penjaminan akses sarana-prasarana secara berkeadilan di seluruh lingkup wilayah, pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perluasan akses pendidikan bagi masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pendidikan berbasis digital dan TIK, perluasan promosi kebudayaan lokal secara luas, serta pengembangan wisata budaya.

Pada periode terakhir yaitu periode empat (2040-2045), perwujudan manusia di Kulon Progo yang berbudaya, maju, dan sejahtera merujuk pada pencapaian suatu kondisi di mana penduduk di wilayah tersebut memiliki karakteristik tertentu. *Pertama*, aspek berbudaya menekankan pengakuan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan identitas unik daerah Kulon Progo. Hal ini mencakup pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya serta kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Kedua, kata "maju" menunjukkan bahwa masyarakat Kulon Progo mengalami perkembangan signifikan, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, teknologi, dan

infrastruktur. Maju dalam konteks ini mencakup kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan yang mendukung perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, arahan kebijakan pada periode ini dirincikan melalui strategi transformatif, khususnya untuk mewujudkan akses terhadap IPTEK sehingga menjadikan masyarakat memiliki kualitas diri yang terasah dan berdaya guna.

Ketiga, "sejahtera" merujuk pada keadaan di mana penduduk Kulon Progo menikmati kesejahteraan yang baik, termasuk dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Sejahtera mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Perwujudan manusia di Kulon Progo sesuai dengan misi tercermin melalui beberapa poin perwujudan meliputi perwujudan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan, berkualitas, merata, dan berkeadilan, perwujudan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Perwujudan SDM yang berkualitas, andal, kompeten, dan memiliki daya saing; Perwujudan keterjaminan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial bagi masyarakat; serta Perwujudan kelestarian budaya lokal berbasis karakteristik daerah serta mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perwujudan manusia Kulon Progo yang berbudaya, maju, dan sejahtera mencerminkan tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo Berbudaya, Maju, Dan Sejahtera

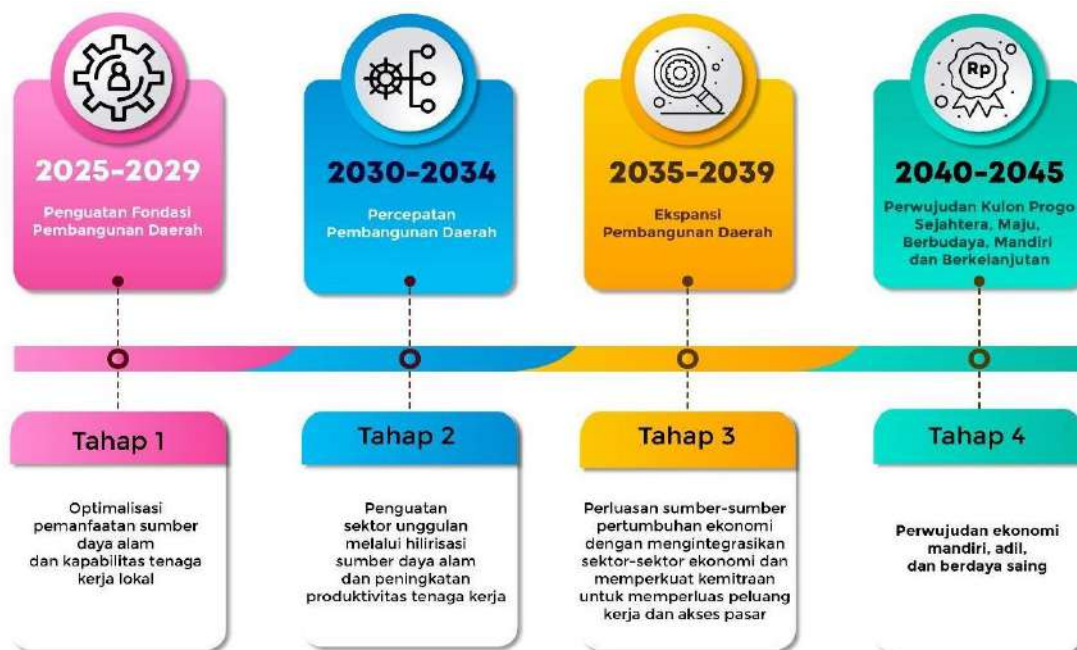
Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KULON PROGO YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan budaya hidup sehat secara promotif-preventif melalui pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung kesehatan, air minum dan sanitasi layak, dan ruang terbuka hijau. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan serta peningkatan kualitas terhadap akses pelayanan kesehatan secara universal. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan, berkualitas, merata, dan berkeadilan.
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyediaan fasilitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan upaya promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan operasional pelayanan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan dengan kesadaran masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya preventif stunting serta pencegahan stunting. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan generasi selanjutnya yang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
		<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, kapasitas berbahasa, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan fasilitas sarana-prasarana pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan distribusi jumlah dan kesejahteraan tenaga pengajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dalam konteks kompetensi dan sertifikasi. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia dini, dasar, dan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga pendidikan melalui pemberian insentif pendidikan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses pendidikan berbasis kurikulum inklusif melalui pengembangan sistem layanan pendidikan berbasis digital dan TIK 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar beserta penjaminan aksesibilitas terhadap sarana transportasi bagi peserta didik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjalinan kemitraan dengan universitas, antarsekolah, dan sektor swasta/LSM untuk membuka akses dan peluang penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pelayanan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara inklusif.
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia. 		<ul style="list-style-type: none"> • Penjalinan kemitraan dengan sekolah menengah, antaruniversitas, dan sektor swasta/LSM untuk membuka akses dan peluang penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan upaya upskilling serta reskilling untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan upaya upskilling serta reskilling untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, andal, kompeten, dan memiliki daya saing. 	-

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> ● Percepatan pembangunan wilayah serta upaya penurunan kemiskinan. ● Penguatan upaya pemberian hak-hak perlindungan sosial bagi masyarakat secara merata dan berkeadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Percepatan upaya penurunan kemiskinan dan penjaminan kesejahteraan sosial masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perluasan jaringan pengaman sosial dengan ekspansi cakupan bantuan sosial, penyesuaian kebutuhan kelompok rentan, dan integrasi program sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan keterjaminan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan Pusat Kebudayaan seperti panggung teater, lokakarya seni, tempat pertunjukan, dan galeri seni sebagai upaya pelestarian budaya lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan wisata budaya melalui penyelenggaraan paket wisata berbasis masyarakat lokal bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perluasan daya tarik budaya lokal melalui kerja sama dan kolaborasi multipihak, penyelenggaraan acara budaya, serta promosi ekstensif pada berbagai platform. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan kelestarian budaya lokal berbasis karakteristik daerah serta mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan sistem pendataan kebudayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan fasilitas, aksesibilitas, dan teknologi guna mendukung pengelolaan pusat-pusat kebudayaan, 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan wisata dan pusat-pusat kebudayaan dengan menjalankan upaya konservasi dan pelestarian sebagai bentuk pengelolaan berkelanjutan. 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal meliputi seni tradisional, kerajinan, tradisi adat, bahasa daerah, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Percepatan dan penguatan kolaborasi kesenian dengan komunitas budaya dan pelaku seni dalam upaya pelestarian budaya lokal dan rekognisi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat 		
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelenggaraan komponen 6A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Akomodasi, Aktivitas, dan Ansilari) pariwisata budaya lokal secara komprehensif. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kualitas pengalaman wisata melalui pengembangan multi-atraksi, optimalisasi pelayanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perluasan target promosi daerah melalui penguatan <i>branding</i> yang menonjolkan identitas destinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan kelestarian budaya lokal melalui pengelolaan pariwisata sebagai representatif potensi lokal.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya pelestarian budaya lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan dan percepatan integrasi kurikulum pendidikan formal dengan budaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan peran komunitas untuk pengembangan materi ajar dari budayawan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kelestarian budaya lokal melalui efektivitas pendidikan formal.
		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan informasi dasar mengenai serta perencanaan tahap awal mengenai analisis kebutuhan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan, upskilling, dan modul materi bagi masyarakat khususnya usia produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jangkauan implementasi program perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan masyarakat dalam skala yang lebih luas dan menyeluruh. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan masyarakat yang optimal bagi masyarakat.

**Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah Serta
Menciptakan Pemerataan Ekonomi**



Gambar 5. 2 Arah Kebijakan Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah Serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi

Pada periode pertama (2025-2029) arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan fondasi dalam pembangunan ekonomi dengan cara optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan kapabilitas tenaga kerja lokal yang merupakan pendekatan penting dalam memajukan ekonomi daerah.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan menggali dan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya alam ada secara bijak dan berkelanjutan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sumber daya alam yang potensial dan pengembangan strategi untuk memanfaatkannya secara efisien.

Strategi dalam mengolah sumber daya lokal mencakup diversifikasi sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam, pengembangan teknologi dan inovasi dalam ekstraksi atau pengolahan sumber daya, dan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan menyerap produk lokal Kulon Progo juga dapat dikuatkan pada periode pembangunan yang pertama, seperti program *Bela Beli Kulon Progo* serta penerapan Bantuan Pangan Nontunai dengan produk pertanian dan perikanan produksi Kulon Progo yang dibarengi dengan upaya peningkatan daya saing produk lokal Kulon Progo, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain itu, upaya peningkatan kapabilitas tenaga kerja lokal juga perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal. Dengan cara ini, Kabupaten Kulon Progo dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dengan lebih baik, sementara masyarakat lokal memiliki keterampilan yang relevan untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi.

Pada periode ke dua (2030-2034), arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan melalui hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sektor ekonomi yang diidentifikasi sebagai sektor unggulan, yaitu sektor-sektor yang memiliki potensi komparatif atau keunggulan kompetitif di Kabupaten Kulon Progo mulai diberdayakan.

Dalam konteks ini, hilirisasi sumber daya alam menjadi penting, di mana bahan mentah atau sumber daya alam yang diekstraksi dan diproses lebih lanjut dalam industri lokal untuk menciptakan produk bernilai tambah. Hilirisasi sumber daya alam tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Guna mendukung kegiatan hilirisasi tersebut, pengembangan ekonomi regional dengan membentuk klaster industri juga dapat dipertimbangkan karena Kabupaten Kulon Progo memiliki keunggulan konektivitas udara melalui Bandara YIA. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung keperluan logistik, ekspor-impor, dan kegiatan industri manufaktur ringan. Selain kepentingan pertumbuhan ekonomi, pembangunan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Namun, dalam rangka pembangunan dengan prinsip ekonomi hijau, masih terdapat catatan terhadap Indeks Ekonomi Hijau DIY tahun 2021 yaitu produktivitas padi sawah yang masih rendah. Oleh karena itu, selain upaya ekstensifikasi lahan sawah yang konsisten dilakukan oleh Kulon Progo, arah kebijakan pembangunan pertanian juga diarahkan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian didukung penerapan teknologi dan pengembangan SDM dan kelembagaan petani.

Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan memungkinkan tenaga kerja lokal untuk bekerja lebih efisien dalam sektor-sektor unggulan, meningkatkan daya saing wilayah, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat secara keseluruhan.

Pada periode ke tiga (2035-2039), fokus arah kebijakan diberikan pada perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor-sektor ekonomi pada penggabungan berbagai sektor ekonomi ke dalam suatu ekosistem yang saling mendukung. Integrasi ini mencakup kolaborasi antara sektor swasta, sektor publik, dan lembaga

pendidikan untuk menciptakan sinergi dan mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan potensi ekonomi wilayah. Upaya ini juga melibatkan pengembangan rantai pasokan yang terintegrasi, di mana produk-produk dari sektor-sektor yang berbeda saling mendukung, menciptakan nilai tambah, dan memperluas peluang pasar. Misalnya, produk pertanian lokal dapat diintegrasikan dengan industri makanan lokal untuk menciptakan produk olahan yang lebih bernilai tinggi.

Selain itu, upaya untuk memperkuat kemitraan bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor lokal, dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha, mendukung inovasi, dan memungkinkan akses yang lebih baik ke pasar regional dan global.

Selain itu, penawaran bekerja sama dengan pihak eksternal (di luar lokalitas Kulon Progo) juga dapat membantu untuk menumbuhkan minat investasi dalam pengelolaan proyek-proyek pendukung pengembangan ekonomi. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo dapat memanfaatkan eksistensi Bandara YIA sebagai ikon dari sentra ekonomi wilayah.

Keberadaan Bandara YIA sebagai sentra ekonomi Kulon Progo lebih lanjut dapat direncanakan sebagai kawasan komersial atau Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang mampu memfasilitasi perdagangan multi-region dan menyediakan penawaran berbagai produk serta layanan untuk masyarakat.

Melalui integrasi sektor-sektor ekonomi dan penguatan kemitraan, wilayah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan berkontribusi pada penciptaan peluang kerja yang lebih banyak, sementara integrasi sektor-sektor ekonomi menciptakan produk-produk yang lebih beragam dan bernilai tinggi.

Dengan cara ini, Kabupaten Kulon Progo dapat memperluas peluang ekonomi dan memperkuat daya saingnya di pasar lokal dan global, mencapai kemandirian ekonomi yang diinginkan sambil memastikan pemerataan ekonomi yang lebih adil.

Perwujudan ekonomi yang mandiri, adil, dan berdaya saing adalah tujuan akhir dari serangkaian arah kebijakan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan dalam tiga periode sebelumnya. Misi untuk mencapai kemandirian ekonomi wilayah telah mengarah pada pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal, dan hilirisasi sumber daya alam.

Sementara itu, upaya penguatan sektor unggulan dan integrasi sektor-sektor ekonomi telah menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan inovatif. Pada tahap akhir, fokus diberikan pada keberlanjutan ekonomi dengan penekanan pada perhatian terhadap keadilan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, "mandiri" mengacu pada kemampuan wilayah untuk

mengelola ekonominya tanpa ketergantungan yang signifikan pada sumber daya eksternal, "adil" mencerminkan kesetaraan peluang dan distribusi manfaat ekonomi yang merata kepada seluruh masyarakat, dan "berdaya saing" menunjukkan kemampuan wilayah untuk bersaing dalam pasar global.

Tujuan semua ini adalah menciptakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan tantangan global yang semakin kompleks.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Misi 2: Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Ekonomi Daerah Serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KULON PROGO YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. • Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor perikanan dan pertanian. • Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian. • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan. • Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan dengan mengintegrasikan langkah-langkah untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan serta kemakmuran air melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian. • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan, dan nelayan, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kawasan lintas wilayah dan lintas pemerintahan yang terintegrasi. • Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. • Optimalisasi kualitas konsumsi pangan. • Peningkatan kualitas produk pertanian dan perikanan. • Perluasan diversifikasi hasil olahan pertanian dan perikanan. • Peningkatan ragam konsumsi pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun internasional. • Kedaulatan pangan dan pemantapan kualitas konsumsi pangan. • Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. • Perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budi daya. • Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. 	<p>iklim, dan pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace</i>/platform.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank dan asuransi pertanian. 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola dan manajemen BUMD. • Penguatan pembinaan terhadap BUMD melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi. • Peningkatan Kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan BUMD yang produktif dan optimal sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah. • Pengembangan inovasi dan diversifikasi usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas BUMD. • Optimalisasi kerja sama dan kemitraan strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi produktivitas BUMD
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, seperti infrastruktur ketenagalistrikan; penyediaan air baku dan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal. • Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi dan industri hijau. • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha dan industri bersih berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>transmisi/ distribusinya; penyediaan akses telekomunikasi; penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; fasilitas kesehatan bagi pekerja; fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; serta pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung perkembangan sektor industri pengolahan. • Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis, dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Pengembangan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan bisnis UMKM. 	<p>dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi). • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai dengan perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis. 	<p>industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses pasar industri yang berdaya saing global. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan aspek 6A (Atraksi, Aksesibilitas, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aspek 6A (Atraksi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kepariwisataan dan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam dan wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata. 	<p>Amenitas, <i>Ancillary services</i>, Aktivitas, <i>Available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan asosiasi usaha. 	<p>Aksesibilitas, Amenitas, <i>Ancillary services</i>, Aktivitas, <i>Available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. 	<p>ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan aspek 6A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, <i>Ancillary services</i>, Aktivitas, <i>Available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis



Gambar 5. 3 Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis

Pada awal periode (2025-2029), Kabupaten Kulon Progo menetapkan beberapa prioritas demi penguatan sistem tata kelola pemerintahan. *Pertama*, penguatan infrastruktur pelayanan publik melalui peningkatan kinerja pengelolaan pendanaan pembangunan. Alokasi pembangunan infrastruktur dapat dikondisikan lebih tinggi selama periode ini guna mengadakan infrastruktur yang lebih banyak dan tepat sasaran.

Kedua, pemantapan tugas pokok dan fungsi dari setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kapasitas internal pemerintah daerah. Salah satu cara strategis yang dilakukan adalah melalui Reformasi Kalurahan. Kualitas pelayanan yang lebih baik penting untuk didukung pemberdayaan ASN untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ketiga, pemberdayaan ASN perlu diupayakan demi menciptakan landasan yang kokoh untuk penyelenggaraan pembangunan daerah yang optimal dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada periode ke dua (2030-2034), Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas manajemen pembangunan daerah. Fokus kemudian bertambah ke upaya penelitian, pengembangan, dan inovasi di tingkat daerah guna menciptakan pemerintahan yang lebih inovatif. Langkah-langkah inovatif ini melibatkan berbagai program

penelitian untuk menggali potensi lokal, serta pengembangan strategi yang lebih adaptif terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Pemerintah daerah berupaya mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan solusi inovatif bagi pembangunan daerah. Pengadaan sistem pemerintahan yang kolaboratif dan sinergis diharapkan dapat mendorong keberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi multipihak, serta terwujudnya sistem yang transparan. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan keistimewaan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur DIY No. 131 tahun 2021 tentang *Grand Design Keistimewaan*.

Pada periode ketiga (2035-2039), Kabupaten Kulon Progo memfokuskan upaya pada integrasi dan pemantapan tata kelola pemerintahan dengan infrastruktur teknologi informasi yang optimal. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Penerapan teknologi informasi di berbagai sektor pemerintahan akan menjadi landasan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, budaya birokrasi yang berorientasi pada perkembangan IPTEK dapat meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan *smart government*. Integrasi ini diharapkan membawa transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pada periode terakhir (2040-2045), Kabupaten Kulon Progo beralih untuk mencapai perwujudan pelayanan publik yang adaptif secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kemandirian fiskal daerah sebagai upaya untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan. Hal ini meliputi upaya meningkatkan daya saing daerah yang dapat berdampak positif dalam pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah.

Kemandirian fiskal diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan daerah, memberikan ruang yang lebih dalam alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat, serta menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, pemerintah daerah berupaya untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan tidak hanya responsif tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi yang terus berubah.

Dengan rangkaian kebijakan yang terarah pada setiap periode, diharapkan bahwa Kabupaten Kulon Progo dapat membangun mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis. Apabila tata kelola pemerintahan berjalan dengan fondasi yang kuat, ke depannya Kulon Progo diyakini mampu untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan, kualitas layanan publik yang baik, serta mencapai kemandirian yang lebih baik pada 2045. Hal ini tentu akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang terjamin dan sistem pemerintahan yang tangguh.

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif Serta Masyarakat Yang Aman Dan Demokratis

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KULON PROGO YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan infrastruktur pelayanan publik melalui kinerja pengelolaan pendanaan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas manajemen pembangunan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integrasi antarsektor dalam sistem informasi dengan landasan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemandirian fiskal daerah untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan.
		<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan tugas pokok dan fungsi, serta kinerja seluruh perangkat daerah guna meningkatkan kapasitas internal pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi tingkat daerah guna menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif serta progresif. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan tata kelola pemerintahan dengan infrastruktur teknologi informasi yang optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi.
		<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) demi meningkatkan produktivitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan kolaborasi antarsektor yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam merumuskan solusi inovatif bagi pembangunan daerah. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Pembenahan alur investasi eksisting dan penyediaan regulasi alur investasi mudah, tepat, aman, dan transparan di Kabupaten Kulon Progo 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan regulasi investasi melalui integrasi teknologi dan sistem modern 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan dan mempermudah akses serta jangkauan investasi melalui integrasi TIK modern. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan implementasi regulasi investasi di Kabupaten Kulon Progo yang aman, nyaman, transparan, mudah, dan tepat guna mendukung pembangunan wilayah.

**Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Serta Lingkungan Yang Lestari Dan Tangguh Bencana**



Gambar 5. 4 Arah Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana

Pada periode pertama (2025-2029), fokus pembangunan merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar sebagai modal dasar. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar merupakan modal dasar yang kritis untuk memulai dan mendukung proses pembangunan suatu wilayah atau negara. Sarana dan prasarana dasar melibatkan infrastruktur kunci yang memberikan fondasi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat dan membuka potensi pengembangan ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar dianggap sebagai fondasi utama yang mendukung perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Sarana dan prasarana dasar mencakup infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan komunikasi.

Fasilitas dasar berupa infrastruktur perhubungan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah. Kemudian infrastruktur terkait penyediaan air bersih, sanitasi dan listrik juga harus dilakukan secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana dasar yang memadai menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan akses yang lebih adil terhadap peluang-peluang pembangunan.

Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai modal dasar yang memungkinkan masyarakat untuk meraih potensi penuhnya dalam perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, fokus pembangunan pada optimalisasi pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu pendekatan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga penting dilakukan pada periode pertama untuk mendukung keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam tanpa merusak ekosistem itu sendiri dan menyerap serta mengatasi dampak negatif dari aktivitas manusia tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Langkah pada periode pertama ini, dapat mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Pada periode ke dua (2030-2034), membangun konektivitas intra dan interregional adalah langkah kunci dalam upaya mendorong pembangunan yang inklusif. Konektivitas yang baik mencakup pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi, teknologi informasi, dan komunikasi yang dapat menghubungkan antarwilayah di Kabupaten Kulon Progo.

Langkah-langkah menuju pembangunan yang inklusif melalui konektivitas regional juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek konektivitas. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat memastikan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh semua pihak, termasuk yang berada di wilayah yang terpencil atau kurang berkembang.

Secara keseluruhan, membangun konektivitas intra dan interregional bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membuka peluang, mengurangi ketidaksetaraan, dan menciptakan lingkungan di mana setiap wilayah dan individu dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dengan membangun konektivitas yang kuat, pembangunan yang inklusif dapat menjadi kenyataan, membawa manfaat kepada semua lapisan masyarakat dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu, pada periode kedua ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan ketangguhan daerah melalui mitigasi berbasis masyarakat dan meningkatkan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Peningkatan ketangguhan daerah merupakan suatu upaya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi tantangan, termasuk dampak perubahan iklim dan bencana alam. Mitigasi berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan kunci dalam meningkatkan ketangguhan ini dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi langkah-langkah mitigasi. Ini mencakup pemahaman dan pengenalan resiko yang dihadapi oleh komunitas setempat serta

pemberdayaan mereka untuk menjadi bagian dari solusi. Proses ini dapat melibatkan pelatihan, edukasi, dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara itu, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan kapasitas alam dalam mengatasi tekanan dan gangguan. Ini mencakup pelestarian habitat alam, restorasi ekosistem yang terganggu, dan penerapan praktik-praktik berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam.

Pada periode ke tiga (2035-2039), memperluas konektivitas antardaerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pembangunan wilayah. Memperluas konektivitas pada tahap ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan intraregional yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan kabupaten sekitarnya.

Konektivitas yang lebih baik antar daerah menciptakan suatu jaringan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, serta pertukaran sumber daya dan pengetahuan. Dengan memperluas konektivitas antardaerah, pembangunan wilayah tidak hanya menjadi lebih inklusif tetapi juga lebih berkelanjutan. Konektivitas yang lebih baik menciptakan lingkungan di mana setiap daerah dapat memaksimalkan potensinya sendiri sambil berkolaborasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

Pada gilirannya, hal ini menciptakan suatu peta pembangunan yang saling terhubung, mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan wilayah secara keseluruhan. Pada periode ketiga ini juga terfokus pada pembangunan dengan pemantapan ketangguhan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pemantapan ketangguhan daerah melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko bencana yang mungkin dihadapi oleh suatu wilayah. Ini melibatkan pemetaan potensi bahaya, analisis kerentanan komunitas, dan perhitungan kapasitas adaptasi. Dengan pemantapan ketangguhan daerah dan kapasitas pemerintah, suatu wilayah dapat lebih siap menghadapi bencana dan menanggapi perubahan lingkungan dengan cara yang berkelanjutan, melindungi kehidupan manusia dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam juga penting untuk terus dilakukan, sehingga generasi selanjutnya tetap dapat merasakan kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahap terakhir (2040-2045), Kulon Progo direncanakan sudah dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, serta pembangunan yang berkelanjutan. Ruang yang aman dan nyaman menggambarkan lingkungan yang terhindar dari ancaman keamanan dan memberikan rasa perlindungan kepada penduduknya. Infrastruktur fisik seperti keamanan

jalan, penerangan umum, dan sistem pemantauan yang efektif menciptakan ruang yang aman untuk beraktivitas, baik pada siang maupun malam hari.

Dengan perwujudan ruang yang aman dan nyaman serta pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, dan lingkungan akan tetap lestari untuk generasi-generasi yang akan datang. Hal ini merupakan komitmen untuk menciptakan ruang yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan dalam bingkai pembangunan kota yang modern dan inklusif.

Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga dirancang menjadi daerah yang tangguh dan adaptif terhadap bencana dan krisis iklim dengan kualitas lingkungan yang baik merupakan implementasi dalam tiga periode sebelumnya. Pada tahap ini, Kabupaten Kulon Progo telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis dan berhasil menciptakan lingkungan yang resilient, beradaptasi, dan lestari, sambil menjaga kualitas lingkungan tetap optimal. Hal tersebut dapat terlihat melalui permukiman dan infrastruktur yang adaptif serta adanya respon cepat masyarakat terhadap potensi bencana.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KULON PROGO YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar sebagai modal dasar pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jangkauan pelayanan infrastruktur dasar hingga wilayah-wilayah terpencil sehingga konektivitas daerah dapat terwujud. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan pelayanan infrastruktur dasar yang aman dan nyaman.
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan jalan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan konektivitas intra dan inter regional untuk mendorong pembangunan yang inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan konektivitas antar daerah dalam upaya memperkuat pembangunan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan konektivitas antardaerah melalui peningkatan, perluasan, dan pengelolaan prasarana transportasi.
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya.
		<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian kawasan lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang memiliki potensi mengganggu fungsi kawasan lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian kawasan lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang memiliki potensi mengganggu fungsi kawasan lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian kawasan lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang memiliki potensi mengganggu fungsi kawasan lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian kawasan lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang memiliki potensi mengganggu fungsi kawasan lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan risiko bencana dengan memastikan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran, dan literasi masyarakat akan potensi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan memastikan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran, dan literasi masyarakat akan potensi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan pengelolaan risiko bencana dengan memastikan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran, dan literasi masyarakat akan potensi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan sistem penanganan risiko bencana dengan memastikan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran, dan literasi masyarakat akan potensi bencana.
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu dan berbasis masyarakat menuju <i>zero solid waste city</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu dan berbasis masyarakat menuju <i>zero solid waste city</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ekspansi sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu dan berbasis masyarakat menuju <i>zero solid waste city</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu dan berbasis masyarakat menuju <i>zero solid waste city</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau untuk mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau untuk mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau untuk mengurangi permasalahan defisit tempat tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau untuk mengurangi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		permasalahan defisit tempat tinggal	permasalahan defisit tempat tinggal		permasalahan defisit tempat tinggal
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik (ii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan kendala pasokan listrik (iii) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas guna mendukung peningkatan kendala dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik (iv) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik (ii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan kendala pasokan listrik (iii) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas guna mendukung peningkatan kendala dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik (iv) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik (ii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan kendala pasokan listrik (iii) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas guna mendukung peningkatan kendala dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik (iv) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas 	-
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas, meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.	digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas, meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.	yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas, meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.	transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas, meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.
		<ul style="list-style-type: none"> Persiapan rencana penataan lokasi pemerintahan baru termasuk persiapan dan pembebasan lahan, penentuan anggaran, dan persiapan regulasi penunjang. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur dasar lokasi pemerintahan baru mencakup aksesibilitas jalan, prasarana sarana, dan utilitas umum (PSU) wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan gedung pemerintahan dan fasilitas penunjang kinerja OPD meliputi teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi rencana bertahap penataan lokasi pemerintahan baru mencakup pemindahan operasionalitas OPD

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah merupakan panduan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan holistik. Secara esensial, sasaran ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara bijak dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Sasaran pokok yang disusun membentuk landasan bagi perencanaan pembangunan jangka panjang dan menjadi acuan bagi kebijakan serta program-program yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo pada produk-produk perencanaan lainnya. Dalam mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mempertimbangkan karakteristik lokal, potensi ekonomi, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pencapaian sasaran ini memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan daerah secara menyeluruh.

Sasaran pokok berperan penting dalam memetakan kondisi yang diinginkan pada akhir periode 20 tahun secara bertahap yang terbagi atas empat periode lima tahunan dengan menguraikan rincian target yang diharapkan tercapai di setiap periode pembangunan. Sasaran-sasaran pokok ini merujuk pada visi dan misi yang telah dijabarkan sebelumnya dan menjadi landasan bagi strategi pencapaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo, rumusan sasaran-sasaran pokok menjadi panduan yang spesifik, mengarah pada target konkret yang harus dicapai dan memungkinkan pemantauan terhadap progres selama periode 20 tahun yang telah ditetapkan.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah perlu untuk diselaraskan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui substansi yang termuat di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan efektifitas pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dokumen RPJPD Provinsi erat kaitannya dengan dokumen RPJP Nasional, begitupula bagi dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang erat kaitannya dengan dokumen RPJPD Provinsi serta RPJP Nasional.

Arah pembangunan daerah merupakan bagian penting dari sasaran pokok yang termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah yang ditujukan untuk dapat meraih tujuan pembangunan daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Dalam konteks ini, arah pembangunan daerah yang termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo disesuaikan dengan karakteristik serta potensi masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait sebagaimana termuat dalam Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan DI Yogyakarta. Secara lebih rinci, Arah Pembangunan Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 5 Arah Pembangunan Kulon Progo 2025-2045

No	Misi	No/Kode	Arah Pembangunan	No/Kode	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Manusia Kulon Progo Berbudaya, Maju, dan Sejahtera	KP1	Kesehatan untuk Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
				2	Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
				3	Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%) b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
				4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
		KP2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran: a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi b) Harapan Lama Sekolah (tahun)
		KP3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	6	Tingkat Kemiskinan (%)
				7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)
		KP4	Berkebudayaan Maju	8	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
KP5	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	9	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
2	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi	KP6	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	10	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
				11	Pengembangan Pariwisata: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

No	Misi	No/Kode	Arah Pembangunan	No/Kode	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi			12	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%) b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
				13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
				14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
		KP7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	15	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
		KP8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	16	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis	KP9	Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		KP10	Stabilitas Ekonomi Makro	18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
				19	Pendalaman Intermediasi Sektor Keuangan: Total Kredit/PDRB (%)
		KP11	Ketangguhan Diplomasi dan Daya Gantar Kawasan	20	<i>Crime Rate</i>
4	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	KP12	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	21	Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
				22	c. Pengelolaan Sampah Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
		KP13	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	23	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan: a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) b. Ketahanan Air:

No	Misi	No/Kode	Arah Pembangunan	No/Kode	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
		KP14	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	24	Indeks Risiko Bencana (IRB)

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, arah kebijakan daerah perlu menggambarkan upaya transformasi yang merupakan penurunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Upaya transformasi yang digambarkan dalam arah kebijakan daerah perlu digambarkan secara spesifik dan selaras dengan kebutuhan serta karakteristik daerah demi mendukung tercapainya visi daerah.

Berdasarkan acuan konsep dasar arah kebijakan dalam RPJPN, Kabupaten Kulon Progo mengemas upaya transformasi pada bidang sosial; ekonomi; tata kelola; keamanan daerah Tangguh, demokrasi substantial, dan stabilitas ekonomi makro daerah; serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pada dasarnya, arah kebijakan transformasi merupakan bentuk perincian terstruktur dari arah kebijakan umum. Setiap bidang yang ditargetkan mewakili permasalahan dan isu strategis yang penting untuk diselesaikan secara tepat sasaran. Upaya transformasi Kulon Progo dalam jangka panjang ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif. Arah kebijakan transformasi Kulon Progo lebih lanjut dapat dilihat pada rincian tabel berikut.

Tabel 5. 6 Arah Kebijakan Transformasi Kulon Progo 2025-2045

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
1	Transformasi Sosial	Penguatan budaya hidup sehat secara promotif-preventif melalui pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung kesehatan, air minum dan sanitasi layak, dan ruang terbuka hijau.
		Peningkatan penyediaan fasilitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta berkeadilan.
		Peningkatan upaya preventif <i>stunting</i> serta pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan penyediaan fasilitas sarana-prasarana pendidikan.
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia dini, dasar, dan menengah.
		Penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan.
		Penyelenggaraan upaya upskilling serta reskilling untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif.
		Percepatan pembangunan wilayah serta upaya penurunan kemiskinan.
		Penguatan upaya pemberian hak-hak perlindungan sosial bagi masyarakat secara merata dan berkeadilan.
		Penguatan sistem pendataan kebudayaan.
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal meliputi seni tradisional, kerajinan, tradisi adat, bahasa daerah, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
		Penguatan upaya pelestarian budaya lokal.
		Pemerataan serta peningkatan kualitas terhadap akses pelayanan kesehatan secara universal.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan.
		Percepatan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar beserta penjaminan aksesibilitas terhadap sarana transportasi bagi peserta didik.
		Pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah.
		Pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri.
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		Penguatan pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga pendidikan melalui pemberian insentif pendidikan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan serta penguatan akses pendidikan tinggi khususnya pada bidang STEAM.
		Percepatan upaya penurunan kemiskinan dan penjaminan kesejahteraan sosial masyarakat.
		Pengembangan Pusat Kebudayaan seperti panggung teater, lokakarya seni, tempat pertunjukan, dan galeri seni sebagai upaya pelestarian budaya lokal.
		Percepatan dan penguatan kolaborasi kesenian dengan komunitas budaya dan pelaku seni dalam upaya pelestarian budaya lokal dan rekognisi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Penyelenggaraan dan percepatan integrasi kurikulum pendidikan formal dengan budaya lokal
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
		Perluasan upaya promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pemerataan dan penjaminan akses terhadap sarana-prasarana secara berkeadilan di seluruh lingkup wilayah.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan.
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya pada bidang STEAM
		Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.
		Perluasan promosi budaya lokal secara luas melalui media konvensional maupun media digital dan TIK.
		Pengembangan wisata budaya melalui penyelenggaraan paket wisata berbasis masyarakat lokal bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
		Perwujudan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan, berkualitas, merata, dan berkeadilan.
		Perwujudan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
		Perwujudan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, handal, kompeten, dan memiliki daya saing.
		Perwujudan keterjaminan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
		Perwujudan kelestarian budaya lokal berbasis karakteristik daerah serta mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>).
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dan berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor perikanan dan pertanian
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan,

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		<p>pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pasca panen, serta pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i>.</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p> <p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i>, bank, dan asuransi pertanian.</p> <p>Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.</p> <p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.</p> <p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, serta pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i>.</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.</p> <p>Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budi daya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i>, bank, dan asuransi perikanan.</p> <p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk perikanan.</p> <p>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.</p> <p>Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.</p>

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		<p>Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budi daya.</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/<i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i></p> <p>Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.</p> <p>Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>)</p> <p>Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.</p> <p>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <p>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa</p> <p>Dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah DI Yogyakarta untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bawen-Magelang-Yogyakarta; dan - Cilacap-Kebumen-Purworejo-YIA-Yogyakarta.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), antara lain pada ruas Kutoarjo-Bandara YIA (termasuk elektrifikasi).
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
		Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		Peningkatan produktivitas BUMD.
		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
3	Transformasi Tata Kelola	Penguatan infrastruktur pelayanan publik melalui kinerja pengelolaan pendanaan pembangunan.
		Pemantapan tugas pokok dan fungsi, serta kinerja seluruh perangkat daerah guna meningkatkan kapasitas internal pemerintah daerah.
		Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) demi meningkatkan produktivitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
		Peningkatan kualitas manajemen pembangunan daerah.
		Pengadaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi tingkat daerah guna menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif serta progresif.
		Perluasan kolaborasi antarsektor yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam merumuskan solusi inovatif bagi pembangunan daerah.
		Penguatan integrasi antarsektor dalam sistem informasi dengan landasan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik.
		Pemantapan tata kelola pemerintahan dengan infrastruktur teknologi informasi yang optimal.
		Peningkatan kemandirian fiskal daerah untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan.
		Perwujudan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi.
4		Penguatan keamanan dan ketertiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Pengimplementasian dalam melakukan pengembangan tata ruang berbasis wilayah dengan kesatuan lanskap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya (potensi tsunami, gempa, longsor, dan erupsi gunung api, atau bahaya bencana lainnya), serta mengembangkan mitigasi yang terstruktur dan nonstruktural.
		pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan setra perkawinan di bawah umum.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat 45 indikator utama pembangunan daerah yang dikelompokkan dalam delapan agenda pembangunan. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di daerah dan memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Indikator utama pembangunan merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator utama pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, tidak seluruh indikator utama pembangunan di tingkat nasional dapat diakomodasi pada tingkat kabupaten/kota.

Indikator utama pembangunan digunakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyusun program-program pembangunan yang terarah dan terukur. Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan dengan efektif dan efisien. Secara lebih lanjut, indikator utama pembangunan Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 7 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kulon Progo 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo Berbudaya, Maju, dan Sejahtera						
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,50-79,75	77 - 81,25	
			Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	76,84	85,62	
			b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,39-14,39	4,0 - 5,0	
			Penanganan Tuberkulosis:			
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	100	100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	86,84-89,84	95 - 98	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,25-99,95	99,26-99,95	
2	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			i) Literasi Membaca	81,16-83,16	91,16-93,16	
			ii) Numerasi	41,60-43,60	81,60-83,60	
			b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,63-15,72	16,11 - 17,2	
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	14,12-15,12	5,52 – 6,52	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	38,46-46,21	63,75-71,50	
4	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan	Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	66,25-67,5	80,05-80,1	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Terwujudnya Kesenjangan Gender	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,095-0,175	0,06-0,14	
Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi						
1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	10,56-11,01	12,00 – 12,45	
			Pengembangan Pariwisata:			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,82-6,82	10-13	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
			a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	2,17-3,17	6,0-7,0	
			b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,56-3,56	4,5-5,5	
			c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,47-4,47	7,0-9,0	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,08-2,60	1,89 - 2,39	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	66,65-67,65	70 - 80	
2	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,02-44,99	41,19-45,00	
3	Terjangkaunya Pemenuhan Kebutuhan Bermukim	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	50,45	100	
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis						
1	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Akuntabel	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,11-4,61	4,5-5	
2	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,65-0,78	1-1,13	
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
			Total Kredit/PDRB (%)	29,18-37,00	70,71-75,35	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Ketangguhan Diplomasi dan Daya Gentar Kawasan	<i>Crime Rate</i>	87,61	78,3	
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana						
1	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup			
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup	69,75	71,63	
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	11,90	45	
			c. Pengelolaan Sampah:			
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	81,36-91,36	90-100	
2	Terwujudnya Daerah yang Berketahanan dan Berdaulat Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	15,60-17,60	6,0-8,0	
			b. Ketahanan Air:			
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,84	100	
3	Terciptanya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,71-137,71	100-105	

BAB VI PENUTUP

Upaya pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus dilakukan tanpa henti. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat berkembang dan mendapatkan tujuan akhir kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan di Kabupaten Kulon Progo. Semangat ini selaras dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, harus dapat mendukung upaya pembangunan daerah dengan karakter lokal, serta turut serta dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Oleh karena itu, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 telah mempertimbangkan berbagai visi sampai dengan target pembangunan di tahun 2045. Pada konteks di atas, dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 diwujudkan dengan upaya menciptakan Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Unsur-unsur prioritas selama 20 tahun ke depan yang akan menjadi fokus sasaran dalam mewujudkan sistem pelayanan serta kondisi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Visi di atas yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan transformatif, yang diawali dengan memetakan faktor peubah untuk menuju kondisi akhir yang diharapkan. Metode ini yang kemudian disebut sebagai faktor *game changer* pada dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.

Di samping itu, upaya mewujudkan kondisi akhir pembangunan jangka panjang daerah dapat dilakukan dengan upaya transformatif dari berbagai sektor di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa upaya transformatif tersebut dapat dilakukan dalam sektor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan dengan dasar supremasi hukum dan kestabilan politik daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi di masyarakat. Pada akhirnya, indikator kinerja pembangunan dapat diukur secara jelas melalui skema kebijakan berbasis luaran atau *outcome based policy*.

Keberadaan dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 ini diharapkan mampu memberikan kepastian arah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat. Keberadaan dinamika demokrasi kepemimpinan daerah, tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberlanjutan program dan arah pembangunan. Kestinambungan pembangunan yang diharapkan mampu terwujud, sehingga masyarakat dapat merasakan konsistensi pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam mengimplementasikan RPJPD Kabupaten Kulon Progo, upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Penguatan pengendalian dan evaluasi di tiap perangkat daerah harus lebih dioptimalkan dan institusionalisasi untuk memastikan pencapaian target indikator kinerja daerah. Pengendalian dan evaluasi itu harus menjadi instrumen untuk (*prove*) kinerja serta untuk perbaikan (*improve*) pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Selain itu, pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 sangat ditentukan kualitas sinergitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan untuk peningkatan sinergi antarsektor (urusan) pun harus diperkuat dan diinstitusikan.

6.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 memiliki posisi tertinggi dalam hirarki perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo selama periode 20 tahun (2025-2045) dan akan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran (APBD) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Konsistensi antara RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut.

- a. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo dalam empat periode ke depan (20 tahun).
- b. RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2045. Hal-hal lain yang bersifat rencana strategis lima tahunan semua perangkat daerah akan dimuat ke dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo selama periode 20 tahun ke depan.
- c. Arah kebijakan dan indikator pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo selama periode 20 tahun ke depan.

- d. Tujuan dan sasaran (beserta indikator) kinerja pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada RKPD, tujuan dan sasaran (beserta indikator) pada rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).
- e. Tujuan, sasaran, dan indikator program rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan indikator program pada rencana kerja perangkat daerah (RKPD).
- f. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kulon Progo juga dipedomani dalam menyusun tujuan sasaran, dan indikator program rencana kerja perangkat daerah. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- g. Dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo, dan dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral daerah.

Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Kulon Progo perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kulon Progo, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik

terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati Kulon Progo. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo; ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; iii) evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo; dan iv) evaluasi pencapaian indikator kinerja utama dan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo membutuhkan partisipasi aktif dari semua pelaku pembangunan, termasuk pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi ini, diperlukan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan semua pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif, sehingga mempercepat

pencapaian tujuan utama pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Bagi pelaku pembangunan dari unsur pemerintah, insentif ini diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja dan manajemen anggaran, yang diberikan berdasarkan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan utama pembangunan. Kinerja tersebut diukur dari konsistensi perencanaan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator ekonomi makro daerah, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Sementara itu, untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci untuk mitigasi risiko terhadap perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam situasi *force majeure*, seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, target RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 dapat diperbarui melalui RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Pembaruan target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pelaksanaan kaidah ini didukung oleh transformasi digital dengan menggunakan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada setiap tahap siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan serta pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Sementara itu, tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui penggunaan data referensi yang konsisten.

6.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang obyektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik melibatkan dua pemangku kepentingan utama, yaitu perangkat daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada perangkat daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar perangkat daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas

pembangunan. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa, kapanewon, dan kabupaten untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.6 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); dan ii) penguatan dan perluasan instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola, dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas, dan infrastruktur sosial. Sedangkan peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui optimalisasi dana masyarakat pembangunan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta

kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DPRD Kabupaten Kulon Progo, serta kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi pembangunan jangka panjang, diharapkan Kabupaten Kulon Progo akan menjadi Kabupaten yang SEMARAK (Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, Dan Berkelanjutan).

Wates, 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI



**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo**

Jl. Perwakilan No.1, Terbah,
Wates, Kap. Wates, Kabupaten
Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55611

